



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 12
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Kediri telah membentuk Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan dengan adanya perubahan perangkat daerah, upaya pembinaan badan usaha milik daerah dan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kediri.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Barenlitbang adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam perencanaan pembangunan dan penelitian di Kota Kediri.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Kediri adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi, arah pembangunan daerah Kota Kediri.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2014-2019.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Kediri untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
16. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visidan misi.
18. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
21. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Kepala Barenlitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
 - (2) Kepala Barenlitbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala PD.
 - (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Barenlitbang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
 - (4) Kepala Barenlitbang melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
3. Lampiran Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 28 Juni 2018

WALIKOTA KEDIRI

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 141 – 5 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 12
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 - 2019

I. UMUM

Perubahan regulasi perencanaan pembangunan daerah diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mendorong dilakukannya evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014 – 2019.

Mempertimbangkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bahwa Pemerintah Kota Kediri perlu mencantumkan peran strategis Badan Usaha Milik daerah pada RPJMD. Disisi yang lain hasil evaluasi sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah juga merekomendasikan perlunya menyesuaikan tujuan dan sasaran pada RPJMD agar lebih menggambarkan kinerja Walikota dan bersifat outcome.

RPJMD Kota Kediri khususnya untuk 3 (tiga) tahun awal masih berlaku, sedangkan perencanaan kebijakan pembangunan yang tertera dalam dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, merumuskan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan target sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2018-2019 serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan target sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka pendanaan selama tahun 2018-2019.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD yang dilakukan serta pertimbangan teknis lainnya, maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dimana RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan *lintas Perangkat Daerah* yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi, serta RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014, merupakan perencanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025. Pada tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 telah memasuki pelaksanaan tahun ke-4. Telah banyak pencapaian target kinerja dari visi, misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seiring dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi Kota Kediri yang dinamis.

Selanjutnya, mengingat perubahan dinamika pembangunan sosial ekonomi dan perubahan peraturan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Kediri dengan persetujuan DPRD melaksanakan penyusunan perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019. Adapun latar belakang dilakukannya perubahan RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa perubahan RPJMD dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yaitu adanya perubahan atas kebijakan nasional yaitu :
 - a. Penyelarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur;
 - b. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikuatkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Kediri telah melakukan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Kediri dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.

2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kota Kediri Semester II Tahun 2016 untuk menjabarkan peran dan fungsi strategis serta pengembangan BUMD pada Perubahan RPJMD;
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari Visi dan Misi.

Dokumen RPJMD Kota Kediri menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada (Rencana Kerja Pemerintah) RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kota Kediri, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1717, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3, Seri D);
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 29);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025, khususnya pada Tahap Ketiga dalam rencana pelaksanaan jangka panjang daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016- 2021 beserta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030.

Untuk lebih jelasnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 keterkaitan atau hubungan antar dokumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. RPJMD Kota Kediri dengan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga di dalam pelaksanaan RPJP Kota Kediri 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kediri periode Tahun 2014-2019, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat di dalam RPJPD Kota Kediri.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Visi Kota Kediri dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, “Kota Kediri Yang Aman, Sejahtera, Adil, Demokratis, Bermartabat dan Berdaya Saing”, ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yang arah kebijakannya secara umum dijabarkan sebagai berikut :

- 1). Mewujudkan Masyarakat Kota Kediri yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya Sesuai Nilai Luhur Pancasila;
- 2). Mewujudkan Kota Kediri Sebagai Pusat Industri, Jasa, Perdagangan dan Pariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing;
- 3). Mewujudkan Kota Kediri Menjadi Pusat Pendidikan yang Berkualitas;
- 4). Mewujudkan Tata Pemerintahan Kota Kediri yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum;
- 5). Mewujudkan Kota Kediri yang Aman, Tertib, Tentram, Damai dan Bersatu dicapai dengan meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, terbinanya dan terbangunnya semangat atau jiwa patriotisme dan nasionalisme;
- 6). Mewujudkan Sarana dan Prasarana Umum, Ruang Publik yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan;
- 7). Mewujudkan Kota Kediri Yang Sehat, Indah, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.

b. RPJMD Kota Kediri dengan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kota.

Dalam menyusun RPJMD juga berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

c. RPJMD Kota Kediri dengan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri 2014-2019 yang mempunyai Visi “Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi” yang disusun pada tahun 2014 berpijak pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri 2005-2025 yaitu terwujudnya “Kota Kediri Yang Aman, Sejahtera , Adil Demokratis, Bermartabat dan Berdaya Saing” dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” dan RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan Visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka dilakukan Perubahan RPJMD Kota Kediri di mana penyusunannya diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019 yang mempunyai Visi “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, sehingga RPJMD Kota Kediri 2014-2019 merupakan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan.

d. RPJMD Kota Kediri dengan RPJMD Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri juga memperhatikan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur sehingga pembangunan di Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur selaras, pembangunan di Kota Kediri menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan di Jawa Timur yang mendukung pembangunan Nasional.

e. RPJMD Kota Kediri dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten Kediri

Penyusunan RPJMD Kota Kediri juga memperhatikan RPJMD dan RTRW Kabupaten Kediri sebagai satu-satunya daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Kediri. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kediri yang secara substansi makna yang terkandung di dalamnya terdapat keselarasan dengan visi dan misi yang hendak dicapai Kota Kediri. Selanjutnya dalam penataan ruang, wilayah Kota Kediri yang lokasinya berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Kediri. Secara ekonomis adanya saling ketergantungan untuk dapat menggerakkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat Kabupaten Kediri dan Kota Kediri khususnya.

Keselaran antara RPJMD Kota Kediri 2014-2019, RPJMD Provinsi 2014-2019 dan RPJMN 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Keselaran Misi

Misi Kota Kediri	Misi RPJM Provinsi Jatim	Misi RPJMN
Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien dengan Memperluas Partisipasi Publik dalam Pembangunan	Misi 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik	Misi II : Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum
Misi II : Mewujudkan Kota Kediri yang Indah, Nyaman dan Ramah Lingkungan	Misi 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang	
Misi III : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan	Misi 5 : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial	Misi IV : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
	Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	Misi VII : Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Misi IV : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya kota kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif	Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi	Misi V : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Tabel 1.2
Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

No.	Isu Strategis		
	RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019	RPJMN 2015-2019
1	Menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif	Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	• Isu Strategis Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pertama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi, keberlanjutan kehidupan social dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. (Buku II RPJMN, Sub bab 1.1.1.2). • Pertumbuhan Ekonomi Inklusif juga merupakan arah kebijakan Peningkatan Pemerataan dan penanggulangan Kemiskinan. (Buku II RPJMN Sub Bab 1.2, bagian A).
2	Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM	Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM	• Isu Strategis Re-Industrialisasi yang berkelanjutan. Pada bagian ini memberikan perhatian pada Populasi dan Struktur Industri Lemah, yaitu pada Skala Usaha Mikro (Industri Kecil Kerajinan dan Rumah Tangga, IKKR) untuk tumbuh dan berkembang. (Buku II RPJMN Sub Bab 3.1.5). • Isu Strategis pemberdayaan UMKM dan Koperasi. (Buku II RPJMN Sub Bab 3.1.7).
3	Disparitas Wilayah	Disparitas Wilayah	• Isu Strategis Kesenjangan Wilayah. (Buku II RPJMN Bab 9). • Isu Strategis Bidang Wilayah dan tata Ruang. Meliputi informasi Geospasial, tata Ruang, Pertanahan, Perkotaan, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Kawasan Transmigrasi, Kasawan Strategis, Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal meliputi Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang, Penanggulangan Bencana. (Buku II RPJMN Sub Bab 8.1).
4	Infrastruktur	Infrastruktur	• Isu Strategis Infrastruktur dan Ekonomi (Buku II RPJMN, Sub bab 9.1).
5	Pengangguran dan Ketenagakerjaan	Pengangguran dan Kondisi Ketenagakerjaan	• Isu Strategis Perlindungan Pekerja. Melalui jaminan social, baik dalam negeri maupun buruh luar negeri. (Buku II RPJMN Sub Bab 3.1.13).
6	Energi bersih dan terjangkau	Energi	• Isu Strategis Pengelolaan Energi yang Lebih Efisien. utama yang dilakukan antara lain: (Buku II RPJMN Bab 10 Sub Bab 10.3.7.3). a. Penerapan danpenguasaan teknologi pembangkit listrik tenagauap (PLTU) dengan tingkat efisiensi yang tinggi, seperti Super Critical, Ultra Super-Critical, ataupun IGCC; b. Insentif untuk memodernkan kilang BBM dan BBG yang saat ini beroperasi sehingga keandalan dan efisiensinya meningkat; c. Pelibatan sektor swasta di dalam investasi efisiensi energy melalui penyempurnaan insentif serta mekanisme pendanaan, terutama untuk memanfaatkan pinjaman lunak serta sumber sumber dana perubahan iklim (climate change funds); d. Pelibatan BUMN pemasok energi dan lembaga pembiayaan dalam sistem pembiayaan energi efisiensi di industry pengolahan dan manufaktur; dan e. Pemberdayaan perusahaan layanan energi (Energy Service Company – ESCOs) di dalam skim pembiayaan energi efisiensi. • Isu Strategis Peningkatan Dukungan Iptek Bagi daya Saing Produksi, khususnya Energi. (Buku II RPJMN, Sub bab 4.3.1 Bag B poin 2).
7	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	• Isu Strategis Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Sesuai dengan Arahan dalam Indonesia Biodiversity Strategy And Action Plan/IBSAP 2003-2020 (Buku II RPJMN bab 10 Sub Bab 10.1.9).

No.	Isu Strategis		
	RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019	RPJMN 2015-2019
			• Isu Strategis Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) (Buku II Bab 10 Sub Bab 10.1.6.3). • Isu Strategis Perubahan Iklim. Dengan focus permasalahan pada (1) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/mitigasi (GRK), dan (2) Peningkatan Ketahanan Masyarakat/adaptasi terhadap Perubahan Iklim. (Buku II RPJMN, Sub bab 1.2. 2).
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	• Isu Strategis Pengarusutamaan Gender, hal ini juga berkontribusi terhadap IPM dari perspektif partisipasi perempuan. (Buku II RPJMN, Sub bab 1.1.3.2).
9	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan dan Pertanian	• Isu Strategis Peningkatan Dukungan Iptek Bagi daya Saing Produksi, khususnya Pangan dan Pertanian. (Buku II RPJMN, Sub bab 4.3.1 Bag B poin 1).
10	Kemiskinan	Kemiskinan	• Isu Strategis Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan. (Buku II RPJMN, Sub bab 1.2.1). • Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan pada periode 2015-2019 adalah: a. pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, b. peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk rentan dan pekerja informal, c. perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu dan rentan, dan d. pengembangan penghidupan berkelanjutan.
11	Kerjasama daerah dalam berbagai bidang	Kerjasama Daerah	• Isu Strategis Kerjasama Ekonomi internasional. (Buku II RPJMN Sub Bab 3.1.15). • Isu Strategis kerjasama Akademisi-Swasta-Pemerintah. (Buku II RPJMN, Sub bab 4.3.1 Bag E).
12	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	• Secara spesifik tidak terdapat dalam Permasalahan dan Isu Strategis Buku II RPJMN, tetapi mendapat perhatian pada pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu teknologi komunikasi dan informasi. (Buku II RPJMN Bab 4).
13	Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana	• Isu Strategis Penanggulangan bencana adalah: (1) kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; (2) sistem peringatan dini di tingkat hulu dan hilir; (3) Pengarusutaman Pengurangan Risiko Bencana (PUPRB) di seluruh sektor pembangunan; (4) Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana; (5) koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring; dan (6) pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis pengurangan risiko bencana. (Buku II RPJMN Sub Bab 8.1.10).

Tabel 1.3
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019					RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019		RPJMN 2015-2019	
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Opini BPK	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan	Opini BPK	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Kinerja Keuangan Daerah : Rata-rata nasional WTP Pemda Kota
				Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)				
				Nilai SAKIP	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan	Nilai LAKIP		
				Peringkat LPPD		Peringkat LPPD		
				Indeks Profesionalitis ASN	Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerint ah	Indeks Profesionalitis Pegawai		
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Nilai IKM			Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan aparatur pemerintah
			Meningkatnya penerapan e-Governance	Prosentase penerapan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK secara terpadu	Meningkatnya layanan informasi publik	Jumlah layanan public yang menggunakan elektronik		
Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan	Mewujudkan penataan ruang kota yang indah dan ramah lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Lingkungan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
				Indeks Kualitas Udara		Indeks Kualitas Udara		
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan				

RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019					RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019		RPJMN 2015-2019	
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah				
			Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	Prosentase luas lahan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	Terwujudnya Kepastian Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW	Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas RTR serta Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Mewujudkan kota yang nyaman	Indeks Kota Layak Huni	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Prosentase permukiman dalam kondisi baik/layak huni	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman		
				Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan				
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Menin gkatnya akses pendidikan menen gah yang berkua litas	Indeks Pendidikan	Pendidikan	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
				Angka Melek Huruf		Angkat partisipasi		
				Indeks Minat Baca				
			Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup	Kesehatan	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan
		Tingkat Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Pengangguran terbuka	Menin gkatny a partisi pasi angkat an kerja, dan penyer apan tenaga kerja	Tingkat Partisipa si Angkatan Kerja (TPAK)	Ekonomi Makro	Tingkat Pengangguran terbuka

RPJMD KOTA KEDIRI 2014-2019					RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019		RPJMN 2015-2019	
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun dan berbudaya	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase penanganan potensi kasus SARA			Sasaran Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragam	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama
			Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur		Menguatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa wisata dan industri kreatif	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produk-produk unggulan daerah	Persentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi sektorsektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan		
				Persentase pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB		Persentase Pertumbuhan Industri		
				Persentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB		Persentase pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB		
			Meningkatnya jumlah investasi	Nilai investasi	Meningkatnya kontribusi sektorsektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Nilai Realisasi Investas	Penguatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Panjang jalan dengan kualitas mantap	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategi	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
				Jumlah jembatan dengan kondisi baik				
				Panjang jalan yang memiliki drainase (%)				
			Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	Meningkatnya kontribusi sektorsektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Pariwisata	Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.

Tabel 1.4
Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik secara konsisten		Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	
	Penerapan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah		Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government	Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah		Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah: meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten	Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik secara konsisten		1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah		
				2. Optimalisasi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat	
				3. Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	
	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian secara terpadu	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD Peningkatan	Meningkatkan profesionalisme dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah	Meningkatkan kinerja koordinasi dan integrasi perencanaan seluruh OPD	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas OPD	Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah: meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
				Efektifitas kinerja pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah		
				Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah		
				Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pengendalian secara terpadu		
Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	Peningkatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif dan efisien dalam mendukung pelayanan publik	Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesiona	Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan kepegawaian	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi , sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya	Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat
				Penempatan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur berdasarkan kompetensi		
	Peningkatan akuntabilitas ASN			Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan kinerja ASN		
Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif	Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan	Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan terkini	Peningkatan kualitas pelayanan publik
				Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan		
				Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan		
				Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan		

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
				Meningkatkan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Meningkatkan kinerja legislatif		
				Meningkatkan pelayanan tanggap darurat bencana		
Meningkatnya penerapan e-Governance	Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik		Optimalisasi penerapan e-Government yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan on-line, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat	1. Meningkatkan ketersediaan jaringan infrastruktur Teknologi, Komunikasi dan Informatika		Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif
				2. Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi data dan informasi (data center) berbasis TIK		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan	Menjaga kualitas dan ketersediaan data dan informasi parameter yang dipergunakan di dalam IKLH	Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan kualitas air & kualitas udara Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
	Rehabilitasi dan pengelolaan kawasan lindung dan RTH			Merehabilitasi dan mengelola kawasan lindung serta meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH		

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas proses dan output dalam penyusunan rencana dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah	Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	Harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang termasuk di dalamnya peraturan insentif untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka mendukung Agenda Kedaulatan Pangan	Meningkatkan sinergi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga tercipta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan antar wilayah yang mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan kualitas ruang secara berkelanjutan	Percepatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur	Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis
	Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang	Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provins		Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen rencana penataan ruang serta penyempurnaan instrumen pengawasan & pengendalian pemanfaatan ruang	Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	
Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Peningkatan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman		Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam bentuk sarana prasarana permukiman, transportasi publik, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana sosial budaya, sarana prasarana ekonomi, dan sarana prasarana keamanan kota	Penataan kawasan kumuh perkotaan dengan penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau		Mengembangkan wilayah perkotaan Sedang dan Kecil
				Meningkatkan kinerja pelayanan umum kebersihan dan pengelolaan sampah		
				Meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan dengan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan, komposting dan daur ulang (<i>reuse, reduce dan recicle</i>); meningkatkan pemenuhan sarana prasarana		Pengembangan upaya 3R (<i>reduce, reuse, dan recycle</i>)

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
				pengelolaan persampahan; optimalisasi pemanfaatan lahan TPA serta merintis dan menjalin kerjasama dengan daerah lain dalam pengelolaan TPA terpadu Regional		
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)	Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas	Meningkatkan pelayanan pendidikan		Meningkatkan akses sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta kualitas layanan pendidikan
				Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah yang berkeadilan dengan : a) Memfasilitasi pembiayaan pendidikan dasar dan menengah melalui BOSNAS dan BOSDA; b) Pemberian beasiswa bagi siswa Kota Kediri yang tidak mampu baik yang bersekolah di negeri dan swasta, didalam maupun di luar Kota Kediri; c) Standar pelayanan pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar pendidikan nasional; d) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat; e) Perluasan sekolah inklusif (akses bagi anak berkebutuhan khusus);	Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
				f) Membangun dan mengembangkan sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; g) Beasiswa perguruan tinggi bagi siswa berprestasi dari kalangan tidak mampu (sebanyak 1.500 mahasiswa)		
	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		Pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa, untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atau anak berkebutuhan khusus	1. Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini secara terpadu		Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini
				2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan non formal dan informal dengan: a) Meningkatkan angka melek huruf melalui pendidikan keaksaraan fungsional;	Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas	
				b) sinergitas program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan dalam memperluas kesempatan kerja; c) Meningkatkan fasilitas pendidikan di Pondok Pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta		

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan manajemen pendidikan berbasis sekolah		Peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah/madrasah untuk mengimplementasikan MBS	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholders untuk mengakses informasi kinerja satuan pendidikan melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi; serta mengembangkan kerjasama dalam pengembangan Perguruan Tinggi Negeri di Kota Kediri		Sekolah (MBS) untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah
	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standart	Meningkatkan kapasitas SDM pendidikan	Penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan berkarakter	Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata	Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan
	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah		Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat	Meningkatkan daya tarik perpustakaan, minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan berbasis teknologi informasi menuju pengembangan manajemen perpustakaan secara modern		Meningkatkan budaya gemar membaca
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan akses, cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin serta meningkatkan pemantauan terhadap kelompok rentan terutama ibu dan bayi	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB)	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
				Merevitalisasi puskesmas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar		
				Mengembangkan pelayanan puskesmas rawat inap dan RSUD		
				Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan		
				Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian		
				Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat lingkungan kelurahan melalui (Poskeskel)		
	Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan melalui kampanye pola hidup bersih dan sehat		Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta, dan masyarakat madani	1. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan		Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
				2. Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya keluarga siaga dan terciptanya PHBS		
Menurunnya tingkat kemiskinan	Peningkatan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar sektor dengan lokasi dan sasaran penanggulangan kemiskinan			Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang ada antar OPD sehingga dapat mengurangi beban rumah tangga miskin		

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
	Pelayanan sosial bagi PMKS sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS		Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial	
	Peningkatan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS			Mendayagunakan dan memberdayakan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial		
	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas, produktivitas, kompetensi tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja.	Revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelatihan yang diberikan	1. Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan daerah	Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) menuju standar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas berbasis kompetensi serta penempatan alumni siswa UPT BLK melalui Bursa Kerja Khusus	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
				2. Memfasilitasi informasi lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, program AYO KERJA (bursa kerja online), job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	
	1. Peningkatan Perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif		Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan lembaga/serikat perburuhan	Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru	

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan pendidikan politik dan perilaku demokratis		Pelebagaan forum komunikasi, konsolidasi, dan dialog untuk pemantapan demokrasi, dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat	1. Pengembangan wawasan kebangsaan dan nasionalisme		Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan
				2. Meningkatkan pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban		
				3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara		
	Peningkatan kewaspadaan daerah untuk menangkal upaya disintegrasi bangsa		Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, serta mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba serta terorisme		Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan
	Peningkatan fasilitasi dan harmonisasi sosial kemasyarakatan			Meningkatkan fasilitasi, monitoring dan evaluasi efektivitas bantuan layanan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan		
Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	Menguatkan partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa	1. Meningkatkan Pengarusutamaan gender dengan : a) Memperkuat dan advokasi kelembagaan; b) Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak; c) Memfasilitasi pembinaan serta peningkatan kapasitas organisasi perempuan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan	Pembangunan Desa mencakup : Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa

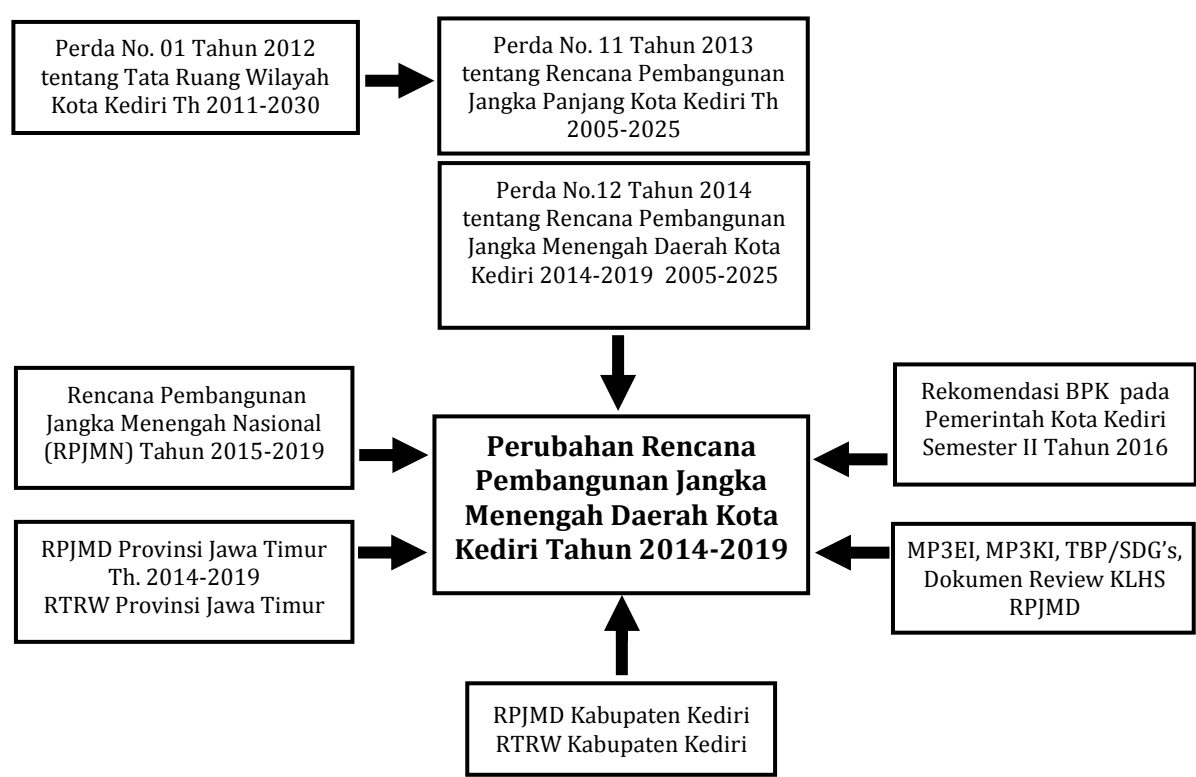
RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
				2. Meningkatkan pemberdayaan kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak, advokasi perempuan dan anak korban kekerasan, advokasi perlindungan hak-hak anak serta mendorong terwujudnya kota layak anak		
Meningkatnya produk-produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif	Meningkatkan kinerja sektorsektor unggulan		Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk pengembangan produk unggulan daerah	Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran	
				Peningkatan kualitas produk lokal melalui inovasi yang dilakukan		
				Perluasan pangsa pasar bagi produk unggulan daerah	Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional	
	Peningkatan promosi dan pengembangan informasi potensi produk unggulan Kota Kediri	Meningkatkan kinerja sektorsektor unggulan		1. Mengembangkan kerja sama pengelolaan perdagangan skala besar, menengah dan kecil	Peningkatan fasilitasi kemitraan UKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar	
				2. Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif		
				3. Mengembangkan industri kreatif serta meningkatkan akses dan informasi pasar		

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
	Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatkan kinerja sektorsektor unggulan	Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran	1. Meningkatkan kinerja pelayanan umum pendampingan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan koperasi dan usaha mikro	Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren	Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ("naik kelas") dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional
				2. Peningkatan kualitas dan manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro		
	Pengembangan kelembagaan perekonomian tingkat kelurahan			Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi sehat		
	Peningkatan akses permodalan dan peran serta Usaha Mikro dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	Meningkatkan kinerja sektorsektor unggulan		Perluasan jaringan akses permodalan melalui peran stimulasi pemerintah dan lembaga keuangan dengan mengutamakan pendampingan untuk kelancaran pembiayaan usaha bagi usaha ekonomi marginal serta meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam aktivitas ekonomi masyarakat	Perluasan jaringan akses permodalan UKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UKM untuk kelancaran pembiayaan usaha	
Meningkatnya jumlah investasi	Pengembangan sarana prasarana investasi serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif		Menyiapkan regulasi terkait pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)	1. Mengembangkan potensi investasi sesuai dengan karakteristik daerah		Arah kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus : Percepatan investasi industri.
				2. Meningkatkan promosi jenis-jenis usaha potensial untuk meningkatkan daya tarik investasi		
	Meningkatkan promosi investasi secara terpadu			Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan dan memperluas cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, Nasional dan Internasional		

RPJMD KOTA KEDIRI		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD KOTA KEDIRI	RPJMD PROVINSI	RPJMN
SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Peningkatan Infrastruktur jaringan jalan dan jembatan	Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur	Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik	1. Meningkatkan pelayanan kebinamargaan dan keciptakaryaan		
				2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan jalan dan jembatan untuk mempercepat aksesibilitas antar wilayah	Peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas ekonomi Pembangunan jaringan jalan baru untuk menunjang aktivitas ekonomi	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota
				3. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi perhubungan	Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan (TOD)
	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan drainase perkotaan	Meningkatkan akses cakupan terhadap layanan air minum, dan sanitasi yang layak serta ketersediaan perumahan	Simpan Air : menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga\ (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan	1. Peningkatan sistem jaringan drainase perkotaan	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak	Membangun Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman : Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
				2. Revitalisasi saluran drainase perkotaan		
				3. Normalisasi saluran drainase perkotaan		
Meningkatnya daya tarik wisata	Pengembangan kuantitas dan kualitas obyek dan event pariwisata		Peningkatan pemasaran pariwisata nasional	1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata		Pembangunan Destinasi Pariwisata
				2. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata		
				3. Pengembangan event kepariwisataan		

Penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan beberapa dokumen antara lain, meliputi: Rekomendasi BPK pada Pemerintah Kota Kediri Semester II Tahun 2016 tentang peran dan fungsi strategis Pemerintah Kota Kediri dalam pengembangan BUMD, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI), dan Dokumen Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019.

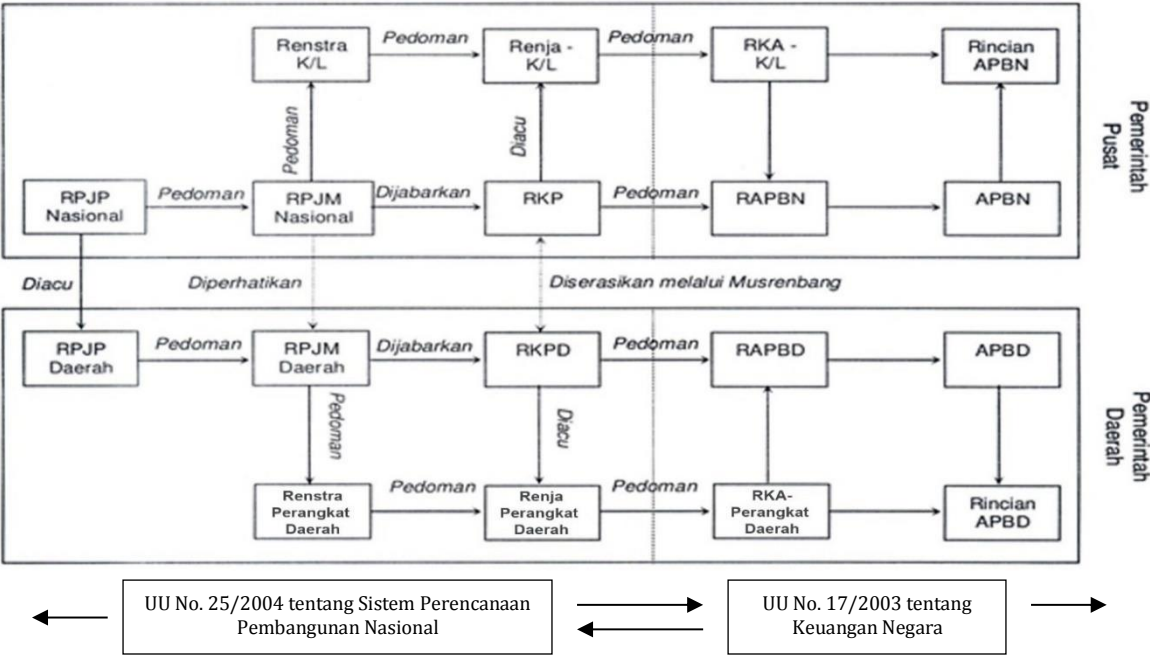
Gambar 1.1.
Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Perubahan RPJMD



Kesesuaian RPJMD dengan RPJMN dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut :

Gambar 1.2.
Bagan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang di susun oleh seluruh Perangkat Daerah di Kota Kediri di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.

Pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Kediri yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Kediri yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

Renstra Perangkat Daerah dan RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan RKA PD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 secara teknis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Perubahan RPJMD Kota Kediri, maksud dan tujuan penyusunannya, landasan normatif penyusunannya, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisannya.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud Dan Tujuan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut :

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.6 Analisis Gambaran Umum

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah :

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu-isu Strategis

BAB V. PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi Pemerintah Kota Kediri Tahun 2014-2019, serta tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode 2014-2019.

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini berisi tentang uraian penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur melalui pencapaian target masing-masing indikator kinerja.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 disusun dengan maksud menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, memperbaiki indikator kinerja sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, serta menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK Semester II Tahun 2016 dalam menjabarkan peran dan fungsi strategis serta pengembangan BUMD yang meliputi BPR Kota, PDAM dan PD Pasar.

Perubahan RPJMD Kota Kediri 2014-2019 ini disusun dengan tujuan :

- 1). Menyediakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah selama tahun 2015-2019;
- 2). Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota;
- 3). Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Kediri dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 4). Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- 5). Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- 6). Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Kediri adalah 63,404 km², secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,6 km² terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah 14,9 km², dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 23,9 km² terdiri dari 15 Kelurahan.

Secara rinci luas wilayah Kota Kediri berdasarkan 46 Kelurahan yang ada dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

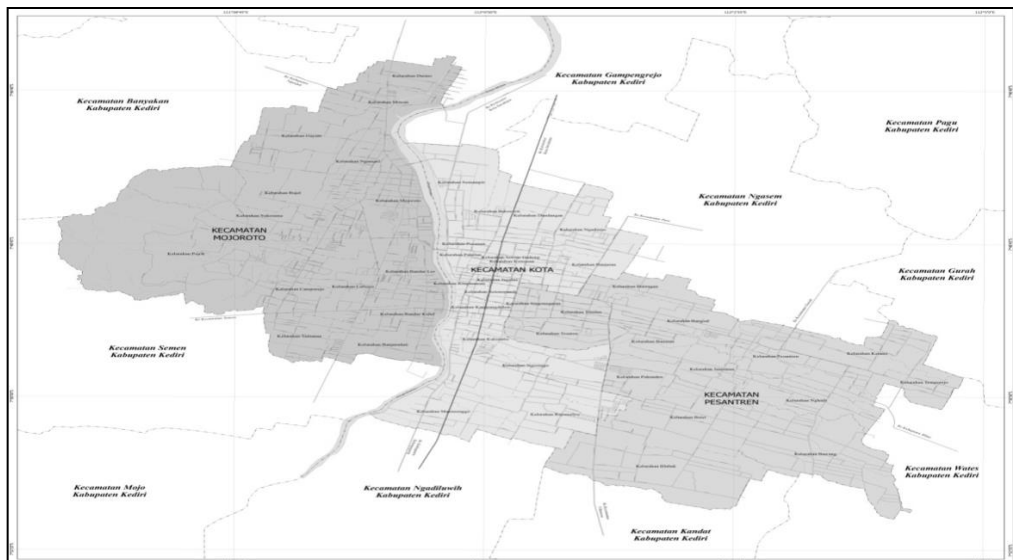
Luas Wilayah Kota Kediri Dirinci Menurut Kecamatan dan Kelurahan

Kode	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (km ²)	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (km ²)	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (km ²)
	Kec. Kota	14,90	Kec. Pesantren	23,903	Kec.Mojoroto	24,601
001	Manisrenggo	1,764	Blabak	3,354	Pojok	5,153
002	Rejomulyo	1,670	Bawang	3,449	Campurejo	1,409
003	Ngronggo	2,585	Betet	1,691	Tamanan	1,077
004	Kaliombo	0,958	Tosaren	1,361	Banjarmlati	0,954
005	Kampungdalem	0,332	Banaran	0,974	Bandar Kidul	1,299
006	Setonopande	0,383	Ngletih	1,237	Lirboyo	1,037
007	Ringinanom	0,050	Tempurejo	1,864	Bandar Lor	1,113
008	Pakelan	0,214	Ketami	1,894	Mojoroto	2,130
009	Setonogedong	0,059	Pesantren	1,356	Sukorame	4,302
010	Kemasan	0,228	Bangsai	1,029	Bujel	1,590
011	Jagalan	0,043	Burengan	1,283	Ngampel	1,468
012	Banjaran	1,209	Tinalan	0,926	Gayam	1,296
013	Ngadirejo	1,470	Pakunden	1,024	Mrican	1,109
014	Dandangan	1,100	Singonegaran	0,99	Dermo	0,657
015	Balowerti	0,830	Jamsaren	1,471		
016	Pocanan	0,214				
017	Semampir	1,791				

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka, 2017

Sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 di bawah ini wilayah Kota Kediri berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri, yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Kandat dan Ngadiluwih, sebelah timur berbatasan dengan Kec. Wates dan Gurah, sebelah barat berbatasan dengan Kec. Banyakan dan Semen, serta sebelah utara berbatasan dengan Kec. Gampengrejo

Gambar 2.1.
Peta Kota Kediri



Sumber : RTRW Kota Kediri 2011-2030

b. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kediri dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kediri dan terletak di sebelah selatan garis katulistiwa, berada diantara 111°15' - 112°03' Bujur Timur dan 7°45' - 7°55' Lintang Selatan.

Kota Kediri dipisahkan oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara sepanjang 7 Km. Wilayah barat sungai menjadi wilayah Kecamatan Mojoroto, sedangkan timur sungai terdiri dari Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren.

c. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kota Kediri relatif datar, yaitu pada kemiringan antara 0 s/d 40 dan sebagian besar merupakan dataran rendah dengan kemiringan antara 0-2% seluas 5,737 Ha atau 90,49%. Mayoritas ketinggian wilayah Kota Kediri (80,17%) berada pada 63m sampai 100m dari permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Brantas. Ketinggian antara 15-40% berada di kawasan Gunung Maskumambang dengan ketinggian 300 mdpl dan Gunung Klotok 672 mdpl di bagian barat Kecamatan Mojoroto. Untuk Kecamatan Kota kondisi topografinya mayoritas berada pada kemiringan 0-2%. Untuk Kecamatan Pesantren kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu pada kemiringan antara 0 s/d 15% dengan ketinggian lebih kurang 67mdpl.

d. Geologi

Secara geologi wilayah Kota Kediri terdiri atas berbagai macam jenis batuan dan tanah. Berdasarkan Geologi Lembar Kediri yang disusun oleh Departemen Pertambangan dan Energi, dinyatakan bahwa tataan stratigrafi terdapat batuan sedimen, batuan gunung api dan alluvium yang diperkirakan berumur plitosen awal hingga resen.

Sebagian wilayah Kecamatan Mojoroto yaitu Kelurahan Dermo, Mrican, Gayam, Bujel, Sukorame, Pojok, Ngampel, Mojoroto, Bandar Lor, Bandar Kidul, Banjarnlati dan Tamanan memiliki endapan alluvium yang terdiri atas elemen kerakal, kerikil, pasir lempung, lumpur, dan sisa tumbuhan. Bahannya berwarna kelabu-kuning keruh-kehitaman, mudah lepas atau gembur.

Pada wilayah Kecamatan Kota, jenis batuan yang ada adalah tuf vulkan intermedier dengan kedalaman lebih dari 25 cm dan bertekstur tanah halus. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pesantren, berdasarkan jenis batuan termasuk dalam jenis batuan endapan lahar yang sebagian besar dari Gunung Kelud dan sebagian kecil dari Gunung Anjasmara dan Gunung Kawi-Butak. Endapan lahar ini melampar pada kaki gunung, lereng gunung dan lembah sungai dan diduga berupa lahar panas, lahar dingin dan lahar longsor. Jenis batuan ini memiliki ketebalan puluhan sampai ratusan meter. Memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 25 cm dan bertekstur halus.

Jenis tanah di wilayah Kota Kediri adalah alluvial coklat kelabu dan mediteran. Sesuai dengan karakteristik jenis tanah tersebut, yaitu tanah alluvial, memiliki sifat fisik diantaranya memiliki daya adsorpsi tinggi, permeabilitas rendah dan kepekaan erosinya besar. Disamping itu, tanah alluvial banyak dijumpai di kawasan datar (kemiringan rendah), jadi erodibilitasnya yang tinggi tidak berpengaruh pada kemungkinan terjadinya erosi. Namun karena memiliki permeabilitas rendah, maka pembangunan di atas tanah alluvial memerlukan perencanaan sistem drainase yang cermat agar tidak terjadi genangan yang dapat merugikan. Sedangkan untuk jenis tanah mediteran juga dijumpai di wilayah ini, dengan daya adsorpsi yang sedang, permeabilitas tinggi dan kepekaan erosinya besar. Tanah mediteran sesuai untuk kawasan terbangun, namun harus mencermati erodibilitasnya yang besar. Jika berada di wilayah yang memiliki sumber air cukup, tanah mediteran sesuai untuk pertanian padi, palwija, tebu, tembakau dan kapas.

e. Hidrologi

Keberadaan Sungai Brantas di tengah-tengah Kota Kediri yang mengalir dari arah selatan ke arah utara, seolah-olah membelah Kota Kediri menjadi wilayah barat (Kecamatan Mojoagung) dan wilayah timur (Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren). Kota Kediri juga dilalui beberapa sungai yang mengalir menuju Sungai Brantas sebagai saluran primer. Sungai tersebut antara lain : Sungai Kresek sepanjang 5,87 km di Kecamatan Pesantren; Sungai Parang sepanjang 3 km, Sungai Kedak sepanjang 5,84 km, Sungai Ngampel sepanjang 1,38 km, dan Sungai Bruno sepanjang 1,93 km di Kecamatan Mojoagung; serta Sungai Tawang sepanjang 7,46 km di Kecamatan Kota.

Selain sungai, mata air adalah sumber air bersih yang potensial di Kota Kediri. Kecamatan Mojoagung memiliki banyak sumber mata air yaitu 7 sumber dan yang memiliki debit paling besar adalah sendang (0-60 liter/detik). Potensi ini bisa mendukung kebutuhan air bersih penduduk sehari-hari seperti masak, cuci dan mandi. Kecamatan Pesantren memiliki 14 sumber mata air dan yang memiliki debit paling besar adalah mata air Banteng (10-112 liter/detik). Potensi ini sangat mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk sehari-hari seperti memasak, mencuci dan mandi. Kedalaman air sumur di kecamatan Pesantren berkisar antara 6-9 meter, yang paling dangkal (6 meter) berada pada Kelurahan Bawang, Tempurejo dan Ketami.

f. Klimatologi

Rata-rata curah hujan di Kota Kediri pada periode 2013-2015 adalah 1.999 mm³ dimana yang terendah pada tahun 2014 sebesar 1.510 (Tabel 2.2). Secara umum curah hujan pada tahun 2015 dengan intensitas rendah terjadi di bulan Mei, Juni, Oktober dan paling rendah bulan agustus, bahkan pada bulan Juli dan September tidak terjadi hujan sama sekali. Berbeda halnya pada tahun 2016 hujan terjadi

hampir di sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari, dengan jumlah curah hujan mencapai 369 mm³ (Tabel 2.3) Demikian halnya dengan hari hujan, hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan Februari.

Tabel 2.2.
**Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan & Rata-rata Curah Hujan
Tahun 2013- 2015**

BULAN	Rata-rata Hari Hujan			Jumlah Curah Hujan di 3 Kecamatan Tahun 2015 (mm ³)			Rata-rata Curah Hujan (mm ³)		
	2013	2014	2015	Mojoroto	Kota	Pesantren	2013	2014	2015
Januari	19	17	15	268	328	310	510	266	302
Pebruari	15	14	15	469	286	277	349	222	344
Maret	12	6	18	408	317	385	240	141	370
April	10	10	8	0	198	329	278	215	176
Mei	11	5	2	148	0	0	222	90	49
Juni	11	5	0	63	0	0	332	58	21
Juli	6	1	0	0	0	0	134	6	0
Agustus	0	1	0	9	0	0	0	2	3
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	4	0	1	35	0	0	81	0	12
November	10	10	7	121	145	196	301	220	154
Desember	16	13	12	256	314	254	335	290	275
Jumlah	114	82	78	1.777	1.588	1.751	2.782	1.510	1.706

Sumber : Statistik Hasil Pembangunan Kota Kediri, 2016

Tabel 2.3.
**Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Kediri
Tahun 2016**

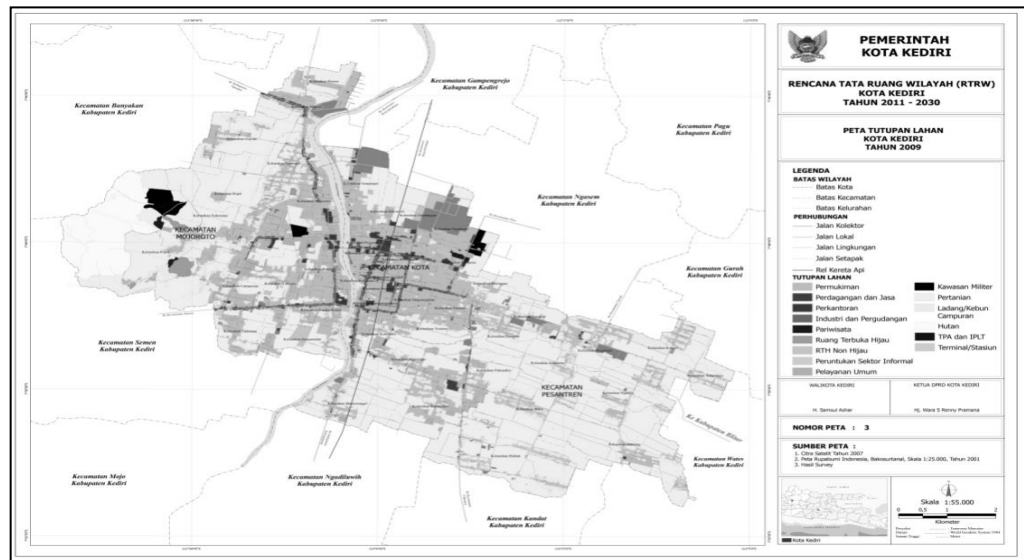
BULAN	CURAH HUJAN (mm ³)	HARI HUJAN
Januari	344	14
Pebruari	369	17
Maret	197	14
April	256	10
Mei	161	4
Juni	147	8
Juli	72	3
Agustus	1	1
September	161	5
Oktober	136	9
November	302	16
Desember	245	14

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka, 2017

g. **Penggunaan Lahan**

Penggunaan Lahan di Kota Kediri didominasi oleh lahan terbangun. Namun demikian perkembangan lahan terbangun belum tersebar secara merata. Dominasi penggunaan lahan kepadatan tinggi adalah Kecamatan Kota, dengan 63% penggunaan lahan di Kecamatan Kota dimanfaatkan untuk perkantoran, perdagangan jasa, industri, pemukiman dan wisata kota, sedangkan sisanya untuk persawahan, fasilitas umum dan sosial serta lahan kosong. Sedangkan penggunaan lahan untuk Kecamatan Mojoroto sebesar 67,48% dimanfaatkan untuk persawahan, tanah kosong dan hutan, dan 32,52% digunakan untuk pendidikan, home industri, industri, pariwisata dan pertanian serta pemukiman kepadatan sedang dan rendah. Untuk Kecamatan Pesantren, dominasi penggunaan lahannya sama dengan Kecamatan Mojoroto sebesar 58,81%, selebihnya dimanfaatkan untuk perkantoran, industri, home industri, permukiman kepadatan sedang dan rendah serta pertanian.

Gambar 2.2.
Tutupan Lahan Kota Kediri, 2009



Sumber : RTRW Kota Kediri 2011-2030

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berada di jalur transportasi regional yang menghubungkan antara Kota Surabaya dengan Tulungagung, Nganjuk, Blitar, dan Malang, Kota Kediri telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk mendorong sistem perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder. Kota Kediri merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata secara regional sehingga Kota Kediri memiliki kawasan-kawasan strategis yang dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan potensinya masing-masing, sebagai berikut :

a. Kawasan Khusus Militer, yaitu terdapat :

- 1). Asrama militer yang berlokasi di Kelurahan Bujel;
- 2). Kompleks TNI di Kelurahan Banjaran, Kelurahan Mojoroto, dan Kelurahan Sukorame.

Kawasan khusus militer tersebut memiliki pengaruh strategis terhadap stabilitas keamanan dan politik yang juga berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan pengembangan wilayah Kota Kediri secara keseluruhan.

b. Kawasan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan strategis di Kota Kediri yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

1). Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pasar induk (Pasar Grosir Ngronggo) yang merupakan pusat kegiatan perdagangan skala besar untuk berbagai komoditas hasil pertanian utamanya sayuran dan buah, selain itu di beberapa kawasan Jl. Dhoho, Jl. Pattimura, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Hayam Wuruk (Transmart Kediri Mall & Golden), dan daerah Kediri Town Square terdapat pusat perdagangan produk garment, elektronik, kelontong dan sebagainya.

2). Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri potensial di Kota Kediri meliputi industri besar, industri menengah, industri kecil dan home industri. Yang merupakan industri besar yaitu industri rokok Gudang Garam di Kelurahan

Semampir, Balowerti dan Dandangan serta pabrik gula di Kelurahan Mrican dan Pesantren. Industri sedang berupa industri pengolahan kayu di Kelurahan Pesantren dan industri pembuatan makanan di Kelurahan Betet dan Kelurahan Blabak. Industri kecil, khususnya tahu tersebar di beberapa wilayah kota Kediri. Adapun *home* industri tersebar di Kelurahan Bandar Kidul sebagai Sentra Tenun Ikat, Bandar Lor, Banjarmlati, Pakelan, Kampungdalem dan Blabak.

3). Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Kediri didukung oleh banyaknya hotel berbintang serta beberapa penginapan yang tersebar di wilayah Kota Kediri. Pengembangan kawasan pariwisata tersebut meliputi pariwisata industri; pariwisata belanja dan kuliner; serta pariwisata olahraga dan seni. Pariwisata industri merupakan kegiatan pariwisata untuk melihat proses produksi industri besar, sedang, kecil maupun *home* industri. Kawasan potensial untuk pengembangan pariwisata industri meliputi Pabrik Gula Mrican dan Pesantren, Pabrik Rokok Gudang Garam, pabrik pengolahan kayu, industri pembuatan makanan dan *home* industri. Pengembangan pariwisata belanja dan kuliner berpusat di Jalan Dhoho dan sekitarnya. Pengembangan pariwisata olahraga berpusat di GOR Jayabaya dan Stadion Brawijaya. Disamping itu juga terdapat berbagai kawasan wisata rohani sejalan dengan perkembangan syiar Islam di Kota Kediri dengan keberadaan pondok-pondok pesantren besar seperti Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Kedunglo, Pondok Pesantren LDII yang secara rutin mengadakan agenda kegiatan keagamaan tahunan yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai penjuru nusantara.

c. Kawasan Pengembangan Sosial Budaya

Kawasan potensial untuk pengembangan sosial budaya yang merupakan kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya dan kawasan pusat pendidikan di Kota Kediri, yaitu :

1). Kawasan Goa Selomangleng

Merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai wisata alam dan budaya serta perlindungan terhadap peninggalan bersejarah, antara lain dengan keberadaan Monumen Airlangga, Pura Kilisuci, Goa Selobale, Goa Padedean, dan Gunung Klotok. Pada saat ini juga sedang dikembangkan objek wisata buatan yaitu "*view 138*" dimana kita dapat menikmati pemandangan (*view*) Kota Kediri yang menarik dari lereng Gunung Klotok. Selain itu kawasan Gua Selomangleng juga digunakan sebagai pusat aktivitas/kegiatan olahraga masyarakat dengan banyaknya spot yang dapat dieksplor untuk kegiatan alam, outbond, dan Jambore pendidikan, serta adanya akses di sepanjang jalan lereng Goa Selomangleng menuju jalan tembus Lebak Tumpang yang sering dimanfaatkan untuk arena *jogging track*.

2). Kawasan Makam Kuno

Beberapa situs makam kuno sebagai peninggalan budaya yang perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan sebagai kawasan wisata religi, yaitu Makam Sunan Geseng, Kompleks Makam Islam Mbah Wasil, Makam Kuno Eyang Boncolono dan berbagai macam tempat ziarah makam islam lainnya.

3). Kawasan Pendidikan

Kota Kediri merupakan Pusat Pendidikan bagi daerah *hinterlandnya*. Pengembangan kawasan pendidikan diutamakan di bagian barat wilayah Kota Kediri, dengan banyaknya lembaga pendidikan berkualitas mulai dari

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Pendidikan Tinggi, diantaranya pengembangan Politeknik Kediri di Kelurahan Pojok serta Universitas Brawijaya di Kelurahan Mrican.

d. Kawasan Pendukung Lingkungan Hidup

1). Kawasan Resapan Air

Di Kota Kediri terdapat kawasan resapan air yang memiliki kemampuan tinggi dalam meresapkan air hujan sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air, antara lain di Kecamatan Pesantren, yaitu di Kelurahan Betet, Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Jamsaren), serta di Kecamatan Mojoroto yaitu di Kelurahan Pojok. Kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air ini sebagian besar merupakan kawasan lahan pertanian dan hutan yang perlu dilestarikan untuk menjaga kemampuan resapan air.

2). Kawasan Perlindungan Setempat

Beberapa mata air dan sungai berfungsi sebagai sumber air bersih maupun drainase. Untuk melindungi kelestarian mata air dan sungai diperlukan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan mata air dan sempadan sungai yang tersebar di Kecamatan Mojoroto yaitu di Kelurahan Pojok dan Gayam; Kecamatan Kota yaitu di Kelurahan Ngadirejo, Rejomulyo dan Banjaran; serta Kecamatan Pesantren tepatnya di Kelurahan Singonegaran, Blabak dan Betet.

3). Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota perlu dipertahankan keberadaannya minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yang mencakup RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Ruang terbuka hijau (RTH) Publik di Kota Kediri pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2016 dikarenakan tidak ada perluasan RTH, namun ada upaya untuk meningkatkan fungsi dan eksistensi RTH khususnya taman dan hutan kota. Adapun luas RTH Kota Kediri sebesar 524,32 Ha atau 8,52% dari luas wilayah, antara lain merupakan ruang terbuka hijau taman kota yang tersebar di beberapa tempat yaitu : Taman Alun-alun, Taman dan Lapangan Brawijaya, Kediri *Memorial Park*, Taman Sekartaji, Taman Pancasila, Taman Sudanco Supriyadi, Taman Selatan Pembantu Gubernur, Taman Air Mancur, Taman Monumen dan Peta Relief, Taman Bahagia Kelurahan Jamsaren, Taman Gapensi, Taman Ngronggo, Taman Tempurejo, dan Taman Brantas. Selain itu lahan pertanian berupa sawah di Kota Kediri seluas 2.230,50 Ha juga merupakan penyedia ruang terbuka hijau kota yang keberadaannya harus dipertahankan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 500 Ha.

Luasan RTH publik yang ada di Kota Kediri secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Luas Eksisting RTH Kota Kediri Tahun 2017

NO.	RTH	LUAS (Ha)	%
1	Tempat Rekreasi	12	0,19%
2	Hutan Kota	309	5,02%
3	Makam	59,2789	0,96%
4	Sempadan Sungai	34	0,55%
5	Jalur Hijau	16	0,26%
6	Pulau dan Median	8,5	0,14%
7	Kebun Bibit	15	0,24%
8	Sempadan Rel	10	0,16%
9	Taman-taman di Kota Kediri	41,6955	0,68%
10	Kediri Memorial Park	0,24	0,00%
11	Perluasan Taman Ngronggo	1,02	0,02%
12	Taman Tempurejo	1,67	0,03%
13	Eks Lokalisasi Semampir	1,3	0,02%
14	Sumber Mata Air	14,9193	0,24%
LUAS		524,3237	8,52%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang rawan terjadi di wilayah Kota Kediri meliputi kebakaran, banjir dan erosi. Tingkat kepadatan hunian yang tinggi dan dimensi jalan yang sangat kecil (kurang dari 1,5 meter) menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran dalam melakukan upaya evakuasi bencana kebakaran. Sedangkan dimensi saluran yang ada pada kawasan rawan bencana banjir relatif kecil sehingga tidak dapat menampung debit air yang masuk saat curah hujan tinggi, di samping terjadi sedimentasi dan sumbatan pada saluran drainase tersebut. Selanjutnya, wilayah rawan erosi adalah wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam dan berjenis tanah alluvial.

Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Kediri yaitu pada Kelurahan Dandangan, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Kemas, Kelurahan Setonopande, Kelurahan Ringinanom dan Kelurahan Bandar Lor. Sedangkan kawasan rawan bencana banjir di Kota Kediri yaitu pada Kelurahan Balowerti, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Ngadirejo wilayah Ngadisimo, dan Kelurahan Mojoroto. Adapun kawasan rawan bencana erosi di Kota Kediri ada di wilayah Kecamatan Mojoroto bagian barat yang merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng sekitar 40%. Kawasan tersebut merupakan pusat suaka alam dan cagar budaya, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk mengurangi risiko terjadinya erosi.

2.1.4. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Secara administratif, penduduk Kota Kediri pada tahun 2017 tercatat berjumlah 290.147 jiwa, berkurang sebesar 25.406 jiwa atau menurun 8,05% jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 315.553 jiwa. Penurunan jumlah tersebut disebabkan karena perbaikan sistem kependudukan, perpindahan penduduk, dan selisih antara jumlah kelahiran dan kematian. Kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2017 masuk dalam kategori tinggi. Dengan luas wilayah sebesar 63,40/Km2, kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2016 sebesar 4.576 jiwa/km².

Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Kediri lebih sedikit dibanding jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 144.985 jiwa penduduk laki-laki (49,97%) dan 145.162 jiwa penduduk perempuan (50,03%).

Perkembangan penduduk di Kota Kediri selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,3%. Selengkapnya komposisi penduduk Kota Kediri menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok Umur
di Kota Kediri Tahun 2013-2017

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017
0 – 4	20.233	20.233	20.788	20.431	18.407
5 – 9	23.209	23.209	24.502	24.386	23.449
10 – 14	23.273	23.273	24.709	24.947	23.405
15 – 19	18.602	20.203	22.145	22.584	21.929
20 – 24	18.508	20.083	20.875	21.220	19.965
25 – 29	22.346	23.282	23.029	22.213	19.746
30 – 34	26.094	28.715	29.667	28.525	23.563
35 – 39	22.166	24.779	27.069	27.607	25.153
40 – 44	20.581	22.433	23.778	24.272	22.081
45 – 49	19.022	21.182	21989	22.525	21.151
50 – 54	16.856	18.347	20.206	20.530	19.118
55 – 59	13.967	15.723	17.405	17.649	16.890
60 – 64	9.348	10.555	12.590	13.132	12.931
>65	18.727	21.165	24.247	25.532	22.359
JUMLAH	267.310	293.282	312.999	315.553	290.147

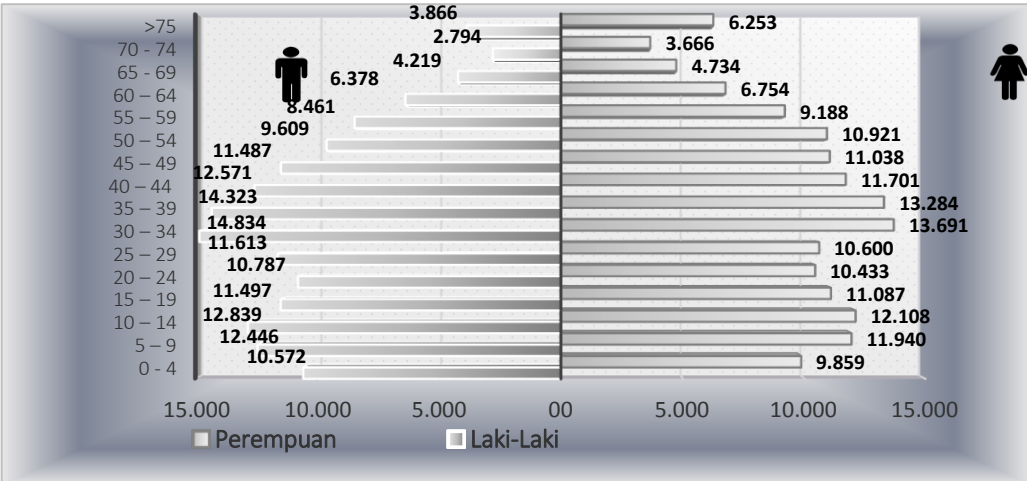
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

Penurunan jumlah pendudukan tahun 2011 disebabkan oleh perbaikan system kependudukan, perpindahan penduduk, dan selisih antara jumlah kelahiran dan kematian.

Ditinjau dari kelompok umur, jumlah penduduk Kota Kediri usia produktif (usia 15-64 tahun) relatif tinggi yaitu berjumlah 202.527 orang atau sekitar 69,8% dibandingkan dengan besaran penduduk pada usia non produktif yang hanya 30,2% atau sebanyak 87.620 orang. Kondisi ini sangat menguntungkan karena

penduduk usia produktif berpotensi sebagai modal pembangunan. Jumlah penduduk usia muda lebih banyak bila dibandingkan jumlah penduduk usia tua, bila digambarkan dalam bentuk piramida penduduk masuk dalam kategori piramida ekspansif atau piramida penduduk muda.

Grafik 2.1.
Piramida Penduduk Kota Kediri



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Salah satu indikator demografi yang penting yaitu tingkat ketergantungan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan penduduk di Kota Kediri relatif menurun selama lima tahun terakhir dengan penurunan rata-rata sebesar 0,58%, yaitu angka dependency ratio pada tahun 2013 sebesar 45,57 menurun menjadi 43,36 pada tahun 2017. Data tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2017 setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan atau tidak produktif.

Dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk Kota Kediri beragama Islam, yaitu sebesar 91,37%, sedangkan yang beragama Kristen 5,74%, Katholik 2,34%, dan Budha 0,42% selebihnya beragama Hindu, Khonghucu dan Penganut Kepercayaan. Adapun pemeluk agama Islam terbesar berada di wilayah Kecamatan Mojoroto, dimana merupakan Pusat Pengembangan Pendidikan Agama Islam terbesar di Kota Kediri dengan adanya Pondok-pondok pesantren besar seperti Lirboyo, Wahidiyah, dan Al-Ishlah yang menjadi tempat pembelajaran bagi para santri dari berbagai daerah.

Komposisi penduduk Kota Kediri menurut agama yang dianut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Kota Kediri Menurut Agama Tahun 2016

No	Kecamatan	Agama						
		Islam	Kristen Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
1	Mojoroto	115.081	3.467	2.659	134	89	19	121.449
2	Kota	85.457	9.580	3.608	70	1.032	90	99.837
3	Pesantren	88.022	5.001	971	51	186	36	94.267
Jumlah		288.560	18.048	7.238	255	1.307	145	315.553

Sumber : Dispendukcapil Kota Kediri

Dari sisi aspek pekerjaan, lapangan usaha yang banyak dilakukan oleh penduduk Kota Kediri adalah disektor perdagangan (40,23%) dan jasa (25,85%) sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.7.
**Penduduk Berumur 15 tahun ke atas (yang Bekerja Seminggu)
Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2015**

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	3.967	1.028	4.995
Pertambangan dan Penggalian	597	N/A	597
Industri Pengolahan	8.681	6.452	15.133
Listrik, Gas, dan Air	549	N/A	549
Bangunan	10.742	N/A	10.742
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	27.249	25.275	52.524
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	6.587	346	6.933
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	3.709	1.631	5.340
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	15.819	17.932	33.751
Jumlah	77.900	52.664	130.564

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri

b. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Salah satu indikator utama yang dapat dijadikan ukuran kualitas manusia adalah tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata penduduk menunjukkan semakin tingginya kualitas manusia.

Tingkat pendidikan penduduk di Kota Kediri pada tahun 2017 mayoritas adalah setingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan manusia di Kota Kediri relatif baik untuk menjadi modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perbandingan komposisi penduduk Kota Kediri menurut jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8.
Komposisi Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Strata III	53	53	54	58	61
2	Strata II	1.571	1.571	1.651	1.759	1.702
3	Diploma IV/Strata I	22.058	22.058	23.917	24.796	23.616
4	Akademi/D- III/Sarjana	6.956	6.956	7.346	7.431	6.800
5	Diploma I/II	-	-	-	-	-
6	SMA/Sederajat	83.946	83.946	89.640	91.323	84.147
7	SMP/Sederajat	46.935	46.935	50.310	50.623	46.717
8	Tamat SD/Sederajat	52.959	52.959	55.201	54.408	48.508
9	Belum Tamat SD/Sederajat	78.804	78.804	84.880	85.155	78.556
10	Tidak/Belum Sekolah	-	-	-	-	-
JUMLAH		267.310	293.282	312.999	315.553	290.147

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sasaran pembangunan nasional maupun daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik jasmani maupun rohani yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan ekonomi serta kesejahteraan sosial dalam rangka membentuk sumber daya insani yang berkualitas.

Salah satu unsur penting yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan adalah pemerataan. Kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ingin dicapai oleh setiap daerah selain meningkat kualitas dan kuantitasnya, juga manfaatnya harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang antara lain dapat dilihat dari perkembangan PDRB, laju inflasi, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Begitu pula dari sisi kualitas masyarakat, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

Keberhasilan pembangunan SDM dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan pengeluaran dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan untuk mengukur kualitas SDM dengan mempertimbangkan hasil pembangunan yang dicapai menurut gender dapat dijelaskan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) sehingga dapat diketahui kesenjangan capaian pembangunan antar kelompok gender. IPG merupakan rasio capaian IPM perempuan terhadap capaian IPM laki-laki, sedangkan nilai IDG merupakan indikator yang lebih melihat pada keterbandingan pemberdayaan perempuan terhadap laki-laki pada dunia publik.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian Kota Kediri secara makro dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Daerah Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Nilai PDRB saat ini menggunakan tahun dasar 2010 dengan menggunakan implementasi System of National Account (SNA) 2008 dan klasifikasi baku komoditi Indonesia (KBKI) 2014 revisi IV. Jumlah sektor yang sebelumnya 9 sektor yang didukung 39 sub sektor, saat ini menggunakan 17 kategori dengan 54 industri sebagai pendukungnya.

Perkembangan PDRB Kota Kediri pada tahun 2013-2017 berdasarkan metode perhitungan baru tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9.
PDRB Kota Kediri dan Peranan PT Gudang Garam (%)

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
PDRB adhb dengan PT. Gudang Garam (Milyar Rp)	79.858.861	87.704.152	95.865.245	106.396.453	116.060.217
PDRB adhb tanpa PT. Gudang Garam (Milyar Rp)	16.022.310,47	17.423.892,77	19.172.479,30	21.407.936,01	24.075.851,98
Peranan PT GG (%)	79,94	80,13	80,00	79,88	79,26

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
PDRB adhk dengan PT. Gudang Garam (Milyar Rp)	65.408.804,78	69.232.890,11	72.945.528,52	76.988.364,89	80.946.163,71
PDRB adhk tanpa PT. Gudang Garam (Milyar Rp)	14.241.045,46	14.925.697,72	15.740.738,51	16.719.144,36	17.893.398,05
Peranan PT GG (%)	78,23	78,44	78,42	78,28	77,89

*) angka sementara
 **) angka sangat sementara
 Sumber : BPS Kota Kediri

Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri didominasi oleh PT. Gudang Garam Tbk, dengan kontribusi rata-rata diatas 75%. Peranan PT. Gudang Garam Tbk pada PDRB ADHB Kota Kediri tahun 2013-2017 berturut-turut sebesar 79,94%; 80,13%; 80,00%; 79,88% dan 79,26%.

Sedangkan, peranan PT. Gudang Garam Tbk. terhadap pembentukan PDRB Kota Kediri berdasarkan harga konstan lebih kecil dibandingkan atas dasar harga berlaku. Peranan PT. Gudang Garam Tbk. terhadap PDRB ADHK dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kecenderungan menurun, peningkatan peranan industri pengolahan tembakau hanya terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 dan selebihnya terus mengalami penurunan. Dari tahun 2013 hingga 2017 berturut-turut sebagai berikut: tahun 2013 sebesar 78,23% naik menjadi 78,44% pada tahun 2014; kemudian menurun menjadi 78,42% pada tahun 2015, dan turun lagi menjadi 78,28% pada tahun 2016 dan penurunan paling besar pada tahun 2017 menjadi 77,89%. Penurunan peranan PT. Gudang Garam Tbk. perlu terus dilakukan agar tingkat ketergantungan semakin kecil.

Peranan 17 sektor/kategori dalam pembentukan PDRB Kota Kediri ADHB berdasarkan lapangan usaha tahun 2013-2017 terinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10.
PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2017

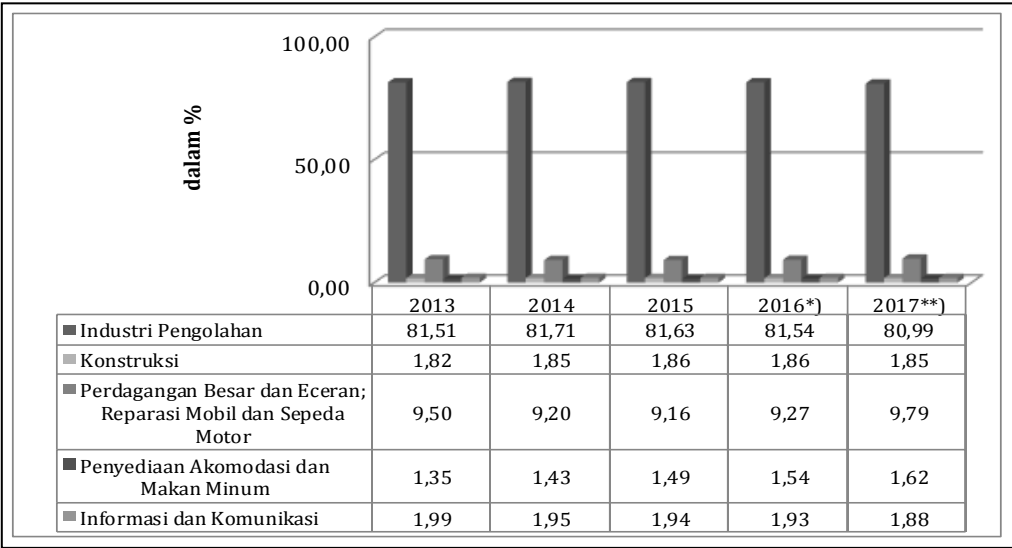
Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	219.187	243.242	272.148	288.661	297.761
B	Pertambangan dan Penggalian	37	38	37	39	40
C	Industri Pengolahan	65.092.032	71.662.729	78.253.046	86.758.986	93.995.898
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.887	7.160	7.921	8.532	9.925
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.821	17.421	18.507	20.133	21.555
F	Konstruksi	1.456.975	1.625.572	1.781.351	1.974.788	2.148.172
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.583.423	8.070.373	8.783.151	9.865.915	11.359.461
H	Transportasi dan Pergudangan	301.560	349.100	392.523	435.378	494.962
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.081.594	1.255.404	1.433.064	1.642.012	1.881.666
J	Informasi dan Komunikasi	1.591.579	1.706.969	1.855.186	2.057.199	2.181.374
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	735.002	823.272	913.864	1.004.572	1.095.329
L	Real Estate	331.868	357.387	400.663	437.034	477.716
M,N	Jasa Perusahaan	152.564	166.947	182.782	204.113	238.361

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	314.784	320.014	339.356	368.554	401.668
P	Jasa Pendidikan	602.319	674.647	752.989	813.268	882.313
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.047	140.837	156.553	171.335	194.016
R,S,T,U	Jasa lainnya	251.181	283.041	322.102	345.934	380.001
	PDRB	79.858.861	87.704.152	95.865.245	106.396.453	116.060.217

*) angka sementara
 **) angka sangat sementara
 Sumber : BPS Kota Kediri

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB Kota Kediri didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, yaitu berkisar di atas 81%. Kontribusi terbesar kedua disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dengan rata-rata diatas 9,00% selama lima tahun terakhir. Sektor informasi dan komunikasi menempati kontribusi terbesar ketiga dalam struktur perekonomian Kota Kediri: yaitu berturut-turut sebesar 1,99% (2013), 1,95% (2014), 1,90 (2015) 1,92 (2016), dan 1,88% (2017). Sektor konstruksi dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menempati urutan keempat dan kelima dalam mendukung struktur perekonomian Kota Kediri. Perkembangan kontribusi dari kelima lapangan usaha dominan tersebut tersaji pada gambar berikut :

Grafik 2.2.
Perkembangan Kontribusi Lima Sektor Dominan Dalam Struktur Perekonomian Kota Kediri Tahun 2013 – 2017 (%)



*) angka sementara
 **) angka sangat sementara
 Sumber : BPS Kota Kediri

b. Laju Inflasi.

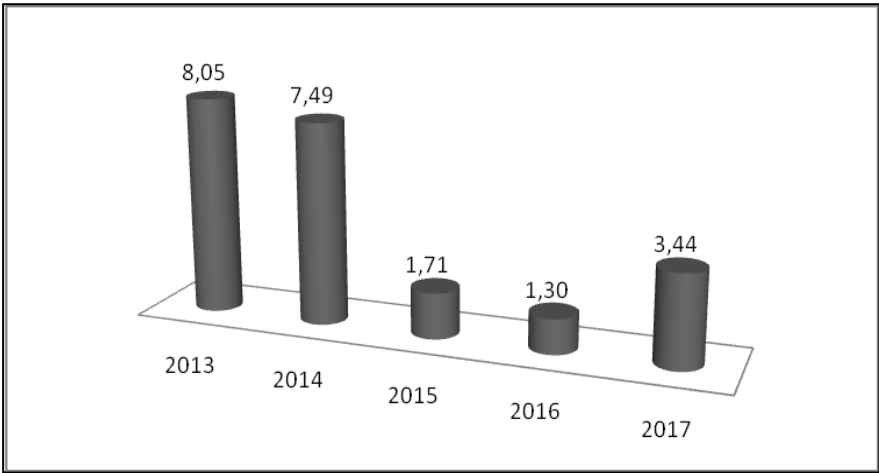
Inflasi menjadi salah satu indikator stabilitas perekonomian suatu daerah yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat.

Berdasarkan data inflasi selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Kota Kediri tergolong relatif stabil. Meskipun mengalami perkembangan yang fluktuatif, rata-rata laju inflasi di Kota Kediri tidak melebihi dua digit.

Inflasi kumulatif Kota Kediri pada tahun 2017 sebesar 3,44 persen lebih rendah dari inflasi Jawa Timur sebesar 4,04 persen dan inflasi nasional sebesar 3,61 persen. Sedangkan apabila dilihat selama kurun waktu lima tahun terakhir, laju inflasi kumulatif tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,05 persen, diikuti tahun 2014 sebesar 7,49 persen. Sementara inflasi kumulatif Kota Kediri terendah sepanjang kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,30 persen.

Upaya mewujudkan stabilitas inflasi membutuhkan sinergi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia. Untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil tersebut diperlukan sinergi kebijakan makro ekonomi yang mencakup kebijakan fiskal, moneter dan sektoral. Peran kebijakan fiskal dan berbagai kebijakan sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting karena inflasi banyak dipengaruhi oleh sisi penawaran. Dalam hal ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri dibentuk sebagai wujud upaya menjaga stabilitas harga dan inflasi di Kota Kediri. Secara periodik TPID Kota Kediri telah melakukan pemantauan inflasi, mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, dan melakukan langkah-langkah antisipatif- preventif dalam rangka mengendalikan kenaikan harga dan inflasi di Kota Kediri.

Grafik 2.3.
Laju Inflasi Kota Kediri Tahun 2013-2017



Sumber Data : BPS Kota Kediri

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, laju inflasi kumulatif tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,05%, diikuti tahun 2014 sebesar 7,49%. Sementara inflasi kumulatif terendah Kota Kediri sepanjang kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,30%.

Tingkat inflasi yang rendah dan stabil berimbas pada kestabilan harga, sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya mewujudkan stabilitas harga ini membutuhkan sinergi kebijakan yang tepat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. sehingga dampak lanjutan atas kebijakan tersebut tidak menimbulkan tekanan yang dalam.

Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mencapai inflasi yang rendah tidak terlepas dari peran aktif anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri yang berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi serta menindaklanjuti fenomena yang terjadi di lapangan seperti melakukan pemantauan inflasi secara periodik, memantau ketersediaan komoditas pada momen-momen khusus, melaksanakan operasi pasar, mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan dan melakukan langkah-langkah antisipatif-preventif dalam rangka mengendalikan kenaikan harga dan inflasi di Kota Kediri. Atas upayanya tersebut TPID Kota Kediri berhasil memperoleh predikat sebagai TPID Terbaik se-Jawa pada tahun 2017.

c. Tingkat Pertumbuhan PDRB Per Kapita.

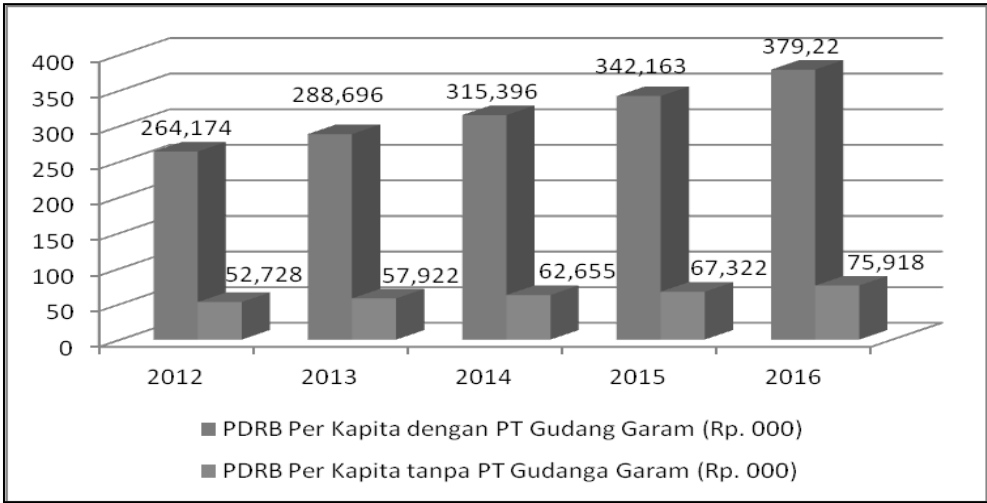
PDRB perkapita adalah besaran PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Penghitungan PDRB perkapita bisa dibedakan menurut PDRB harga berlaku dan PDRB dengan harga konstan (Tahun dasar 2010). PDRB perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima penduduk jika seluruh nilai PDRB diterima oleh penduduk kota Kediri, tanpa melihat sumber perolehan PDRB apakah dari luar atau dari dalam wilayah Kota Kediri. Pendapatan PDRB per kapita bermanfaat sebagai indikator standar hidup atau kesejahteraan suatu daerah dari tahun ke tahun, menjadi pembanding kesejahteraan antar daerah, serta digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan ekonomi daerah.

Berdasarkan grafik, sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 nilai PDRB per Kapita ADHB Kota Kediri terus mengalami peningkatan, baik PDRB dengan PT. Gudang Garam Tbk atau tanpa PT. Gudang Garam Tbk. Untuk PDRB per kapita ADHB dengan PT. Gudang Garam Tbk mulai tahun 2012 sebesar Rp.264.173.727,00; tahun 2013 sebesar Rp.288.696.230,00; tahun 2014 Rp.315.396.104,00; tahun 2015 sebesar Rp.342.162.681,00 dan tahun 2016 sebesar Rp.379.220.238,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang besarannya PDRB perkapita mencapai 348,0 juta rupiah, PDRB perkapita tahun 2016 menunjukkan ada kenaikan sekitar 31 juta rupiah atau naik 8,96 persen.

Selain PDRB perkapita dengan harga berlaku, dapat pula dilihat PDRB perkapita atas dasar harga konstan. PDRB perkapita dengan harga konstan adalah pendapatan perkapita tanpa melihat efek dari nilai inflasi dan perubahan harga lainnya. PDRB perkapita kota Kediri tahun 2016 mencapai 272,9 juta rupiah, dan naik sekitar 4,76% dibanding tahun 2015 yang mencapai 260,5 juta rupiah.

Meningkatnya nilai PDRB per Kapita tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kesejahteraan masyarakat Kota Kediri semakin meningkat. Lebih jelasnya dapat dipahami grafik berikut ini :

Grafik 2.4.
**Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kota Kediri
 Tahun 2012 – 2016 (Rp Ribu)**

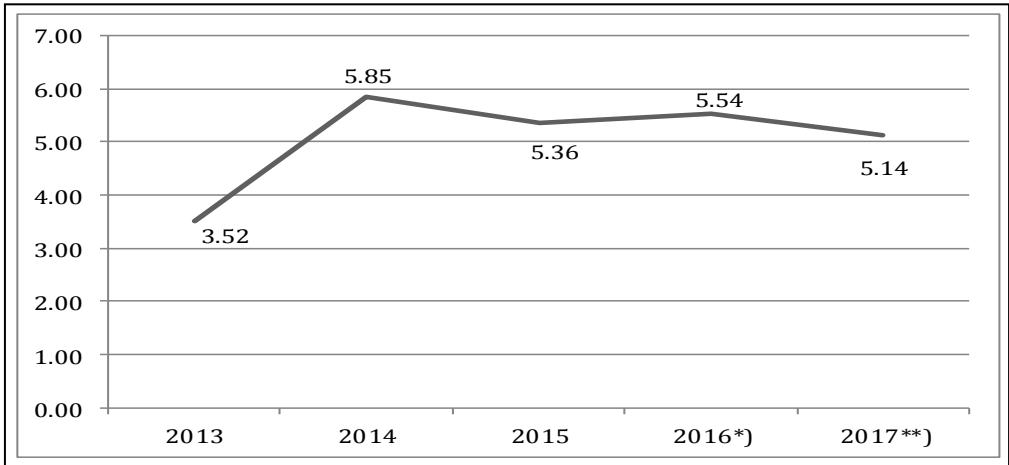


Sumber : BPS Kota Kediri

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami fluktuasi tiap tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kediri pada Tahun 2017 sebesar 5,14 persen lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 seperti yang tergambar pada grafik di bawah :

Grafik 2.5.
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri
 Tahun 2013 – 2017 (%)**



*) angka sementara
 **) angka sangat sementara
 Sumber : BPS Kota Kediri

Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan 17 lapangan usaha. Selama tahun 2013 sampai dengan 2017 seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB di Kota Kediri mengalami fluktuasi yang bervariasi kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang stagnan. Secara lengkap pertumbuhan ekonomi Kota Kediri masing-masing lapangan usaha dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri berdasarkan Lapangan Usaha, 2013-2017 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,20	1,78	2,53	1,91	0,33
B	Pertambangan dan Penggalian	0,74	-0,98	-0,98	-0,96	-0,96
C	Industri Pengolahan	2,57	6,13	5,39	5,41	4,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,50	2,64	0,67	1,66	2,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,68	0,83	3,43	3,53	3,53
F	Konstruksi	8,22	3,38	2,81	4,01	3,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,56	3,57	4,95	6,04	8,78
H	Transportasi dan Pergudangan	8,06	7,99	5,47	6,12	7,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,17	7,61	7,34	7,94	8,28
J	Informasi dan Komunikasi	11,74	7,22	7,22	7,92	3,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,90	5,80	4,82	4,92	4,37
L	Real Estate	6,95	6,98	5,28	5,88	5,95
M,N	Jasa Perusahaan	7,09	8,24	6,56	6,46	6,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,95	0,20	3,42	2,92	2,97
P	Jasa Pendidikan	8,11	7,16	6,78	6,28	6,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,45	7,88	7,36	6,91	6,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,77	4,89	5,20	5,10	4,80
	PDRB	3,52	5,85	5,36	5,54	5,14

*) angka sementara
 **) angka sangat sementara
 Sumber : BPS Kota Kediri

Pelaksanaan program pembangunan di Kota Kediri telah menunjukkan perubahan yang positif. Meningkatnya ekonomi Kota Kediri dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Walaupun dua tahun terakhir laju pertumbuhannya tidak begitu cepat tetapi tumbuh dalam kondisi yang cukup baik, dimungkinkan laju pertumbuhannya akan semakin meningkat karena adanya pengaruh pasar dunia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kondisi demikian bukan saja akan memberi peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan mereka para pelaku kegiatan ekonomi. Sinergi dari berbagai faktor tadi tercermin dengan semakin membaiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Kediri seperti diperlihatkan oleh peningkatan angka IPM.

e. Penduduk Miskin.

Tren prosentase penduduk miskin dari tahun 2014-2016 fluktuatif, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,11%, yaitu dari 23.770 jiwa pada 2015 menjadi 23.640 jiwa penduduk miskin. Tingkat kemiskinan Kota Kediri pada tahun 2017 sedikit mengalami peningkatan 0,09% atau sebanyak 430 jiwa dibanding tahun 2016, namun masih dibawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,2% maupun Nasional sebesar 10,12%.

Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 diantaranya dipengaruhi oleh adanya kebijakan pencabutan subsidi listrik bagi pengguna daya 900 Va yang tidak masuk dalam basis data terpadu (BDT). Sementara itu

prosentase pengguna daya 900 Va di Kota Kediri masih sangat besar yaitu 40% dari total penduduk. Disamping itu dipengaruhi pula dengan kenaikan inflasi tahun 2017 yang disebabkan adanya peningkatan harga komoditas yang diatur Pemerintah (Administered Price) serta kenaikan harga beras yang terjadi selama 8 bulan ditahun 2017.

Meskipun demikian jumlah penduduk miskin Kota Kediri sebanyak 24.070 jiwa pada tahun 2017 menempati urutan ke 7 (tujuh) terendah diantara 38 Kab./Kota di Jawa Timur, dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,49% pada urutan ke-11 (sebelas) terendah dari 38 Kab/Kota di Jawa Timur.

Perkembangan kemiskinan di Kota Kediri selama lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12.
**Indikator Kemiskinan di Kota Kediri,
Tahun 2013-2017**

Jenis Data	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	22.700	22.130	23.770	23.640	24.070
Prosentase Kemiskinan (%)	8,20	7,95	8,51	8,40	8,49
Garis Kemiskinan (Rp)	349.925	366.788	386.521	400.096	420.712
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,60	0,91	1,40	0,96	0,99
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,47	0,17	0,43	0,20	0,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri

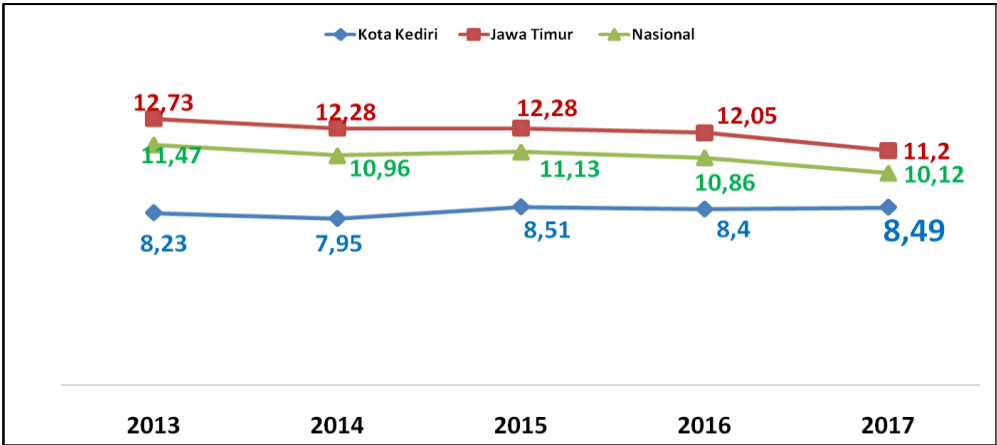
Selanjutnya untuk mengetahui kondisi kemiskinan dari dimensi ekonomi selain dengan melihat capaian dan perkembangan jumlah maupun persentase penduduk miskin, juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Pada tahun 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Kediri sebesar 0,99, lebih tinggi 0,03 poin dibanding tahun 2016, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di bawah garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2016 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Kediri menunjukkan angka 0,20 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,01 pada tahun 2017. Artinya meskipun indeks kedalaman kemiskinan mengalami sedikit peningkatan, namun ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Kediri menunjukkan perkembangan yang lebih baik karena tingkat kesenjangan semakin menurun.

Jika dibandingkan dengan Provinsi maupun Nasional, tingkat kemiskinan di Kota Kediri jauh menunjukkan angka yang lebih rendah sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.6.
Tingkat Kemiskinan Kota Kediri dengan Provinsi dan Nasional
Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kota Kediri

Penurunan angka kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2017 menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang *pro-poor* dan mengarah pada rumah tangga miskin yang tepat sasaran. Program-program tersebut diantaranya adalah pembangunan prasarana fisik seperti Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), jaminan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Kediri/PBI Daerah, bantuan keberlanjutan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi tidak mampu, bantuan kelayakan hidup bagi warga miskin (BLSM), pemberian bantuan bagi anak yatim, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Penyaluran bantuan sosial santunan kematian bagi warga miskin yang meninggal dunia, pemberian bantuan pada penyandang distabilitas/bantuan sosial uang tunai bagi orang dengan kecacatan berat, pemberian jaminan hidup bagi lansia terlantar (Aslut), penyaluran sembako maupun bantuan rastrada, pelatihan keterampilan kerja, maupun bantuan modal usaha dan pinjaman modal bergulir dalam upaya menumbuhkan ekonomi produktif dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat

Diantara indeks komposit yang dikembangkan oleh UNDP sebagai ukuran untuk mengetahui status dan kemajuan pembangunan manusia yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan manusia adalah **Indeks Pembangunan Manusia atau IPM** (*Human Development Index* atau HDI), **Indeks Pembangunan Gender atau IPG** (*Gender Related Development Index* atau GDI), dan **Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG** (*Gender Empowerment Measure* atau GEM).

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang

sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standart hidup layak.

Perkembangan IPM Kota Kediri selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan jauh berada di atas capaian IPM Provinsi Jatim. Pada tahun 2013 IPM Kota Kediri 74,18, naik menjadi 74,62 pada tahun 2014, dan sebesar 75,67 pada tahun 2015. IPM Kota Kediri mencapai 76,33 atau mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 2,67 poin dibandingkan lima tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2017 mencapai 77,13 dan menempatkan pembangunan manusia di Kota Kediri pada peringkat ke-5 diantara Kab/Kota se-Jawa Timur dan termasuk dalam kelompok tinggi berdasarkan skala internasional ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Kediri mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik.

Selama periode tahun 2013-2017, seluruh komponen indikator IPM Kota Kediri ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Kediri, Tahun 2013-2017

INDEKS	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	73,51	73,52	73,62	73,65	73,69
Harapan Lama Sekolah	13,27	13,52	14,30	14,61	14,95
Rata-rata Lama Sekolah	9,57	9,70	9,88	9,89	9,90
Pengeluaran Riil yang Disesuaikan (Rp.000)	10.670	10.702	10.733	11.070	11.550
IPM	74,18	74,62	75,67	76,33	77,13

Sumber : BPS Kota Kediri

Tabel diatas menunjukkan komponen penyusun IPM yaitu angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat, capaian pendidikan yang direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta tingkat pendapatan yang disesuaikan. Selama lima tahun terakhir seluruh komponen penyusun IPM tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Kediri yang merupakan rata-rata lama tahun bertahan hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk meningkat, yaitu dari 73,51 pada tahun 2013 mencapai 73,69 pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2013-2017 di Kota Kediri akan mampu bertahan hidup sampai umur 73-74 tahun.

Harapan Lama Sekolah Kota Kediri tahun 2013 sebesar 13,27 meningkat 1,68 poin menjadi 14,95 pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa harapan pendidikan dari penduduk Kota Kediri minimal lulus SLTA. Indikator pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Kota Kediri tahun 2013-2017 meningkat sebesar 0,33 tahun, yaitu dari 9,57 tahun pada tahun 2013 menjadi 9,90 tahun pada tahun 2016. Hal ini berarti rata-rata penduduk Kota Kediri bersekolah sampai kelas satu SLTA.

Komponen lain penentu IPM adalah kemampuan daya beli masyarakat. Selama tahun 2013-2017 kemampuan daya beli masyarakat Kota Kediri mengalami peningkatan dari Rp 10.670.000 tahun pada tahun 2013 menjadi Rp 11.550.000

pada tahun 2017 atau naik sebesar Rp 880.000. Kenaikan kemampuan daya beli masyarakat mengindikasikan perekonomian Kota Kediri yang semakin baik.

Angka IPM juga dapat menggambarkan posisi pembangunan manusia, baik antar waktu maupun antar wilayah. Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan banyak kalangan terutama pemerintah. Dalam perencanaan pembangunan, IPM berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program. Dan salah satu kebijakan pemerintah yang menggunakan IPM sebagai salah satu indikator penentu adalah pengalokasian dana perimbangan wilayah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*).

Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi saja karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan salah satu syarat. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan tercapai kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 Kota Kediri termasuk daerah dengan kondisi yang ideal, hal ini disebabkan Kota Kediri mempunyai persentase penduduk miskin yang relatif rendah yaitu sebesar 8,40 persen dari total penduduk Kota Kediri, dan mempunyai IPM yang masuk dalam kelompok IPM tinggi yaitu sebesar 77,13. Artinya, pada kondisi ini daerah mampu menekan angka kemiskinan dan di saat yang sama mampu meraih capaian pembangunan manusia yang tinggi.

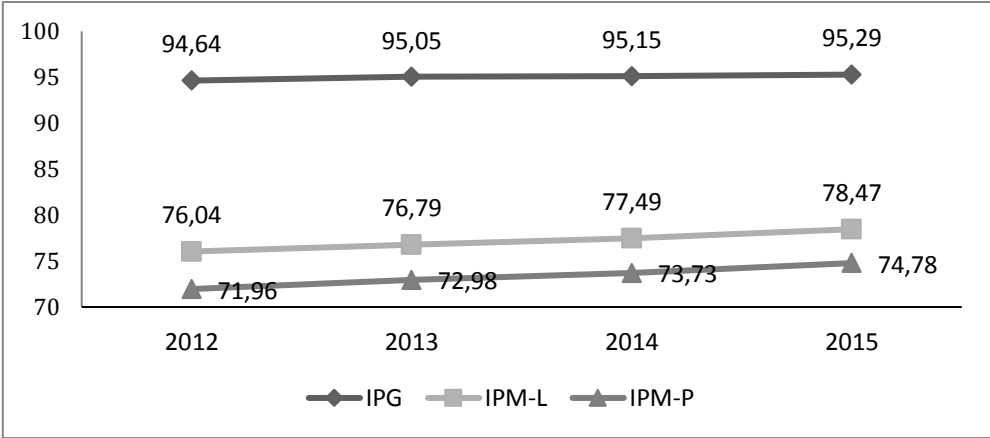
b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender, sehingga dapat diketahui ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, IPG adalah IPM yang disesuaikan (dikurangi) oleh adanya ketimpangan gender. Makin besar kesenjangan antar gender dalam pembangunan manusia, makin rendah nilai IPG suatu daerah dibandingkan dengan nilai IPM-nya.

Penghitungan IPG pada dasarnya hampir sama dengan IPM dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Angka IPG merupakan rasio dari angka IPM Perempuan (IPM-P) terhadap Angka IPM laki-laki (IPM-L). Bila capaian IPG semakin mendekati nilai 100 maka capaian pembangunan gender semakin baik. Nilai IPG sama dengan 100 memberikan gambaran hasil capaian pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara, dan sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dari nilai 100, maka terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kota Kediri selama tahun 2012-2015 :

Grafik 2.8.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri, Tahun 2012-2015



Sumber : Dokumen Pembangunan Manusia Berbasis Gender, BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri pada tahun 2015 sebesar 95,29. Capaian ini lebih tinggi dari capaian angka IPG Provinsi Jawa Timur sebesar 91,03 maupun Nasional sebesar 91,03, dan menempati urutan ke-5 tertinggi dari 38 Kab/Kota se-Jatim. Dalam perkembangannya angka IPG Kota Kediri terus menunjukkan tren peningkatan, angka IPG pada tahun 2012 sebesar 94,64 naik menjadi 95,29 pada tahun 2015. Peningkatan IPG selama periode ini dikarenakan semakin mengecilnya jarak antara angka IPM laki-laki dan IPM perempuan. Pada tahun 2012 selisih angka IPM perempuan dan laki-laki sebesar 4,08 dan pada tahun 2015 turun menjadi 3,69.

Hal mendasar yang membuat semakin kecilnya gap tersebut dikarenakan adanya peningkatan beberapa indikator pembentuk IPM yang meliputi peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan peranan perempuan pada perekonomian. Peningkatan dari ketiga penyusun IPM tersebut tidak lepas dari program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri sehingga menunjang peningkatan capaian IPG Kota Kediri, antara lain meliputi : (1) Bidang kesehatan : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan utamanya bagi ibu, anak dan balita melalui peningkatan posyandu Gerdu Sehati, serta meningkatkan ketersediaan tenaga medis secara merata yang terintegrasi dalam program GEMAKIBA (Gerakan Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi); (2) Bidang Pendidikan: pemerataan dan perluasan akses pendidikan melalui Sekolah Gratis, Bus Sekolah gratis, subsidi angkutan kota bagi pelajar dan mahasiswa, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa tidak mampu yang berprestasi, pengadaan seragam gratis, penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif (PAUD HI), Sekolah Ramah Anak Inklusi, serta program belajar Bahasa Inggris gratis melalui *English Massive*; (3) Peningkatan peran Perempuan pada Perekonomian, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), penyertaan modal bergulir, pengembangan Koperasi Wanita (Kopwan) di 46 Kelurahan, Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Bank Sampah.

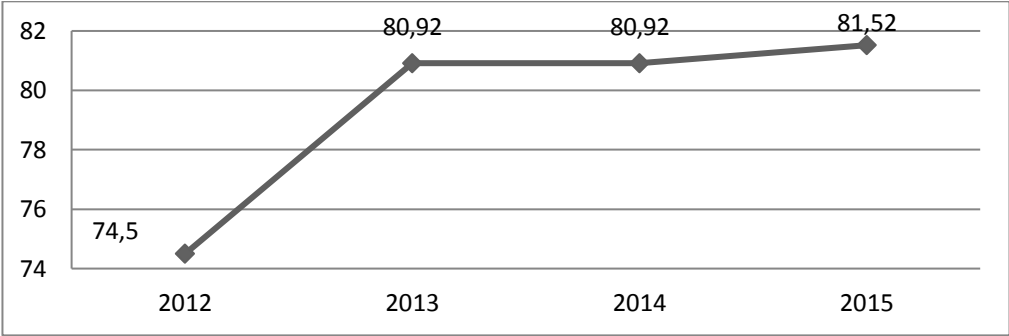
Keberhasilan capaian indikator penyusun IPG tersebut tidaklah bisa instan namun perlu adanya konsistensi dan keberlanjutan program untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam upaya meminimalisir kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Kediri.

c. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan gender (IPG) menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi yang tergambarkan melalui komponen sumbangan pendapatan; partisipasi perempuan dalam berpolitik digambarkan melalui komponen keterwakilan perempuan dalam parlemen serta partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan yang digambarkan melalui perempuan sebagai tenaga profesional (manajer, tenaga administrasi dan teknisi), serta persentase penghasilan wanita dibandingkan penghasilan laki-laki. Berbeda dengan IPG, IDG melihat ketimpangan kesempatan di beberapa bidang.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Kediri selama tahun 2012-2015 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.9.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Kediri, Tahun 2012-2015



Sumber : Dokumen Pembangunan Manusia Berbasis Gender, BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

Seperti terlihat pada grafik diatas, selama periode 2012-2015 perkembangan angka IDG menunjukkan tren meningkat dengan puncak capaian IDG tertinggi pada tahun 2015 mencapai 81,52. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 7,02 poin dibanding angka IDG tahun 2012 sebesar 74,5. Capaian IDG Kota Kediri pada tahun 2015 merupakan capaian IDG tertinggi kedua dari 38 Kab/Kota se-Jatim setelah Kota Surabaya yang memiliki nilai IDG sebesar 82,15.

Tingginya capaian angka IDG di Kota Kediri pada tahun 2015 tidak terlepas dari tingginya keterwakilan perempuan dalam Parlemen, yaitu sebesar 33,33 persen. Selain itu banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan penting sebagai tenaga profesional sebesar 48,41 persen dengan penghasilan yang cukup besar sehingga mampu memberikan sumbangan pendapatan dengan persentase sebesar 35,11 persen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14.
Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Kediri, Tahun 2012-2015

Komponen	2012		2013		2014		2015	
	P	L	P	L	P	L	P	L
Proporsi Penduduk (%)	50,19	49,81	50,29	49,71	50,16	49,84	50,18	49,82
Keterlibatan di Parlemen (%)	23,33	76,67	23,33	76,67	33,33	66,67	33,33	66,67

Komponen	2012		2013		2014		2015	
	P	L	P	L	P	L	P	L
Proporsi sebagai tenaga profesional (%)	48,57	51,43	45,22	54,78	43,90	56,10	48,41	51,59
Proporsi sumbangan pendapatan (%)	33,99	66,01	34,30	65,70	34,60	65,40	35,11	64,89
IDG	74,5		80,92		80,92		81,52	

Sumber : Dokumen Pembangunan Manusia Berbasis Gender, BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kota Kediri dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipatif, transparansi, kesetaraan, *responsive*, visioner, akuntabel, efisien dan efektif serta profesional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada 3 (tiga) aspek pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu penyelenggaraan Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1). Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik dalam pengembangan mutu sumber daya pendidikan, pemerataan, maupun perluasan pendidikan, seperti tercermin dari capaian angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan tingkat kelulusan yang semakin tinggi.

Melalui program-program pembangunan yang diselenggarakan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan dan mendorong meningkatnya jumlah lembaga pendidikan bermutu di Kota Kediri. Khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi, Pemerintah Kota Kediri terus berbenah diri dengan mengembangkan Politeknik Kediri serta mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di luar Kota Kediri. Untuk memperluas cakupan pelayanan pendidikan, khususnya perguruan tinggi, Kota Kediri sedang menjalin kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang untuk mengembangkan Universitas Brawijaya di Kota Kediri.

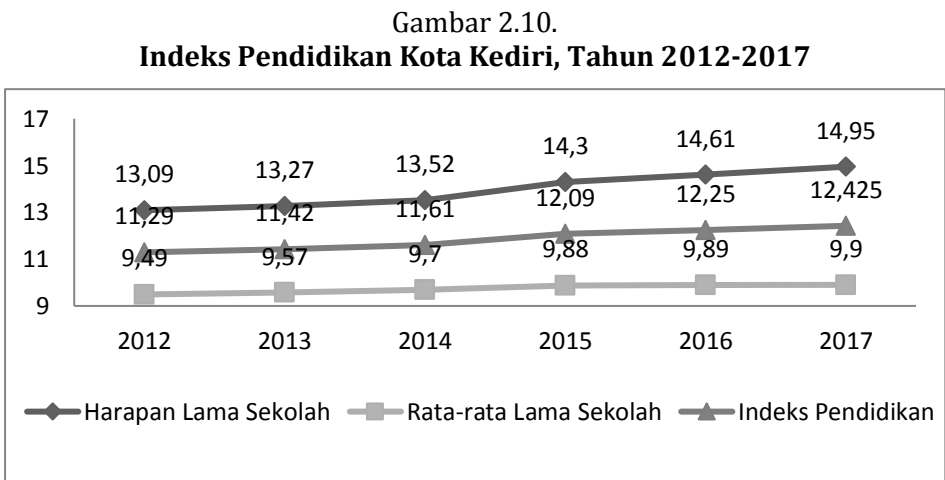
Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan melalui perluasan terhadap daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda sosial, ekonomi, gender, serta tingkat kemampuan fisik dan intelektual. Sedangkan penyelenggaraan urusan wajib pendidikan diarahkan untuk meningkatnya pencapaian standar pelayanan minimal dan meningkatnya pemerataan pada semua jenjang pendidikan. Kinerja meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan secara makro dapat dilihat dari capaian Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

a). Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah Kota Kediri tahun 2013 sebesar 13,27 naik 1,68 poin menjadi 14,95 tahun 2017. Hal ini berarti bahwa harapan pendidikan dari penduduk Kota Kediri minimal lulus SLTA.

Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas (tahun) dalam menjalani pendidikan formal. Selama lima tahun terakhir rata-rata lama sekolah Kota Kediri naik sebesar 0,33 tahun, yaitu dari 9,57 tahun pada tahun 2013 menjadi 9,90 tahun pada tahun 2017. Hal ini bermakna bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota Kediri berada di atas rata-rata standar Program Wajib Belajar 9 Tahun dengan rata-rata penduduk Kota Kediri bersekolah sampai kelas satu SLTA. Pemerintah Kota Kediri telah mengupayakan adanya peningkatan kualitas belajar mengajar yang lebih baik serta peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan yang memadai dalam mendorong terwujudnya wajib belajar 12 tahun.

Perkembangan indeks pendidikan di Kota Kediri selama lima tahun terakhir berikut komponen pendukungnya dapat dicermati pada grafik dibawah ini:



Sumber : BPS Kota Kediri

b). Angka Melek Huruf

Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya angka melek huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. Indikator ini juga dapat menggambarkan kualitas SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM.

Pencapaian Angka Melek Huruf atau kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya bagi penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Kediri menunjukkan adanya peningkatan selama lima tahun terakhir, dan pada tahun 2014 hingga sekarang telah mencapai 100%. Artinya, penduduk Kota Kediri usia 15 tahun ke atas tidak ada yang mengalami buta huruf.

Hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan, tingginya kesadaran mayarakat untuk dapat membaca dan menulis, semakin efektifnya kelompok belajar masyarakat, serta meningkatnya layanan taman bacaan. Upaya penghapusan buta aksara terus dilakukan melalui program Keaksaraan Fungsional pada Pusat Kegiatan Belajar Mandiri Masyarakat (PKBM), program kejar paket A, kejar paket B dan kejar paket C. Untuk program kejar paket A dan paket B, warga belajarnya tidak dipungut biaya alias gratis, bahkan diberi buku tulis dan buku pelajaran.

Selain itu untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah sedang giat menumbuhkan kembali budaya baca antara lain melalui layanan Perpustakaan Keliling pada sekolah-sekolah maupun fasilitas umum seperti taman kota dan tempat wisata di Kota Kediri, kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan, pameran buku, pembiasaan membaca sejak dini melalui program literasi sekolah, yaitu penyediaan pojok buku di masing-masing kelas di sekolah, serta kegiatan kunjungan anak TK/PAUD ke perpustakaan, kegiatan lomba, dan kegiatan membaca kreatif lainnya.

Tabel 2.15.
Angka Melek Huruf

Tahun	Penduduk 15 th yang dapat Baca Tulis	Penduduk Usia ≥15	%
2012	217.288	222.948	97,46
2013	196.889	197.794	99,54
2014	209.374	209.374	100,00
2015	241.950	241.950	100,00
2016	244.383	244.383	100,00
2017	242.934	242.934	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

c). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Seperti yang tersirat dalam tagline Harmoni Kediri *The Service City* yang salah satunya berfokus pada pendidikan, pengembangan PAUD sebagai pondasi utama dalam dunia pendidikan harus didukung oleh peningkatan kesadaran semua komponen masyarakat yang terus meningkat terhadap pentingnya PAUD sebagai satuan pendidikan non formal yang membantu pembentukan karakter anak. Komitmen ini ditunjukkan melalui bantuan dana dan insentif tutor PAUD yang meningkat jumlahnya, serta penyediaan APE dan sarana prasarana pendukung untuk menunjang kegiatan bermain dan belajar para peserta PAUD.

Sejak tahun 2014 Pemerintah Kota Kediri mengintegrasikan PAUD Gerdu Sehati menjadi Taman Posyandu yang dikenal dengan nama Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), yaitu penyelenggaraan PAUD yang mengintegrasikan pembelajaran pendidikan dengan pengajaran cara pola pengasuhan anak yang benar, cara peningkatan pengembangan gizi balita hingga peningkatan kualitas pendidikan orang tua (*Smart Parenting*). Dengan kata lain, PAUD-HI merupakan integrasi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Posyandu dan BKB (Bina Keluarga Balita) yang melibatkan 3 sektor yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri dalam pengembangannya.

Perluasan akses dan mutu layanan PAUD merupakan strategi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Selama tahun 2013-2017 APK PAUD menunjukkan tren meningkat dengan perkembangan yang signifikan. Realisasi APK PAUD sebesar 91,15% pada tahun 2013 meningkat menjadi 101,30% pada tahun 2016, dan mencapai 101,71%

pada tahun 2017, yaitu sebanyak 13.941 siswa PAUD di Kota Kediri dengan jumlah penduduk usia PAUD pada tahun 2017 sebanyak 13.706 jiwa.

Begitu pula untuk APK TK mengalami peningkatan 6,32% yaitu dari 105,44% pada tahun 2013 menjadi 108,34% pada tahun 2017, yaitu sebanyak 10.345 siswa TK di Kota Kediri dengan jumlah penduduk usia TK sebanyak 9.549 jiwa.

Realisasi Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini yang telah melebihi angka 100% menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kota Kediri bahwa seluruh penduduk usia PAUD telah sangat besar minat masyarakat luar Kota Kediri untuk bersekolah di Kota Kediri. Citra Kota Kediri sebagai pusat pendidikan terus dipertahankan melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai.

d). Pendidikan Dasar

Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan secara berkelanjutan. Pembangunan pendidikan di Kota Kediri difokuskan pada dua hal yaitu pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam hal pemerataan kesempatan belajar, kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan menjadi titik fokus utama, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kota Kediri, termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah yang diukur dengan menghitung jumlah murid kelompok usia sekolah dibanding jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah.

Selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) angka partisipasi sekolah pendidikan dasar baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Kediri menunjukan nilai yang fluktuatif namun telah berada diatas 100%. Pencapaian APM diatas 100% menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah dasar di Kota Kediri telah dapat tertampung di lembaga pendidikan yang ada, sedangkan realisasi APK diatas 100% menunjukkan jumlah siswa yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari berbagai kelompok umur atau adanya siswa dengan usia lebih tua atau lebih muda dibanding usia standar pada jenjang pendidikan dasar.

Perkembangan APK dan APM di Kota Kediri pada jenjang pendidikan dasar selama tahun 2013-2017 diuraikan pada tabel ini :

Tabel 2.16.

**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni, 2013-2017**

Jenjang Pendidikan	Tahun	APK (Persen)	APM (Persen)
SD/MI	2013	108,77	98,82
	2014	125,81	117,30
	2015	112,45	102,95
	2016	111,87	104,53
	2017	111,50	104,44

Jenjang Pendidikan	Tahun	APK (Persen)	APM (Persen)
SMP/MTs	2013	133,67	102,90
	2014	154,01	121,18
	2015	131,61	103,33
	2016	131,34	102,46
	2017	131,34	101,52

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

Tingginya Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Bentuk komitmen dan partisipasi masyarakat dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun diwujudkan dengan pendeklarasian “kampung pendidikan” diantaranya di Kel. Ngampel dan Kel. Sukorame Kec. Mojoaroto, Kel. Jamsaren Kec. Pesantren, dan Kel. Kampungdalem Kec. Kota. Warga menginisiasi kampung pendidikan dengan menandatangani kesepakatan bersama yang berisi : 1). Penerapan jam belajar bagi anak-anak mulai pukul 18.00-20.00 WIB; 2). Orang tua dan keluarga mendampingi anak dalam belajar; 3). Mematikan TV, Radio dan tidak menggunakan HP pada jam belajar anak; 4). Tidak ada anak yang putus sekolah di wilayahnya.

Pembangunan pendidikan didukung oleh banyaknya program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu serta berkebutuhan khusus. Program-program tersebut antara lain Sekolah Gratis, bantuan siswa miskin, beasiswa siswa tidak mampu dan berprestasi, penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak Inklusi, pengadaan seragam gratis, subsidi angkutan kota dan bus sekolah gratis, bantuan sosial pengadaan perlengkapan sekolah melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), pengembangan literasi melalui Taman Baca Masyarakat dan pojok baca, kursus belajar Bahasa Inggris gratis yang diwadahi dalam *English Massive*, pembinaan pusat kreativitas anak punk termasuk penyelenggaraan kejar paket. Peningkatan kualitas belajar mengajar yang lebih baik serta pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan yang memadai diupayakan untuk mempertahankan citra Kota Kediri sebagai pusat pendidikan yang berkualitas seiring dengan brand Harmoni Kota Kediri *The Service City*.

e). Pendidikan Menengah

Capaian keberhasilan penyelenggaraan pendidikan menengah dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah pendidikan menengah di Kota Kediri yang jauh diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sekolah menengah di Kota Kediri mampu bersaing sehingga berdampak pada tingginya animo masyarakat baik didalam maupun luar daerah untuk menyekolahkan anaknya di sekolah menengah di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri juga terus *concern* mendukung terwujudnya wajib belajar 12 tahun salah satunya melalui subsidi pendidikan, bahkan penyediaan beasiswa bagi keberlanjutan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun demikian sejak tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menerapkan pengalihan urusan pemerintahan SMA/ sederajat dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagai amanat Undang-undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga pengelolaan sekolah menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Capaian keberhasilan penyelenggaraan pendidikan menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri selama lima tahun terakhir dapat dijelaskan melalui indikator sebagai berikut :

- **Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)**

Seperti halnya pada pendidikan dasar, dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun dalam kegiatan belajar/sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM). Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan menengah baik APK maupun APM di Kota Kediri telah jauh melebihi angka 100%. Hal ini dirorong oleh tingginya siswa yang berasal dari luar Kota Kediri yang menempuh pendidikan yang berkualitas di Kota Kediri. Perkembangan APK dan APM di Kota Kediri pada jenjang pendidikan menengah selama tahun 2012-2016 diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Kediri, Tahun 2012-2016

Jenjang Pendidikan	Tahun	APK (Persen)	APM (Persen)
SMA/MA/ SMK	2012	256,67	195,44
	2013	234,55	170,60
	2014	260,55	191,93
	2015	244,44	180,53
	2016	222,31	162,52

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

- **Angka Kelulusan SMA/MA/SMK**

Salah satu syarat kelulusan setiap siswa dari suatu jenjang pendidikan adalah mengikuti Ujian Akhir Nasional (UNAS). Namun UNAS bukanlah satu satunya syarat seorang siswa dinyatakan lulus. UNAS disyaratkan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi, untuk kelas reguler jenjang SD sederajat kelas 6, dan kelas 3 untuk jenjang SMP dan SMA sederajat, sedangkan untuk kelas akselerasi adalah menduduki kelas akhir. Angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas jenjang pendidikan, jika persentase kelulusan suatu sekolah tinggi berkorelasi positif terhadap kualitas sekolah tersebut

Angka Kelulusan diukur dengan membandingkan jumlah siswa yang lulus dengan jumlah total siswa yang mengikuti ujian pada tahun yang sama. Selama lima tahun terakhir angka kelulusan SMA/SMK/MA terus meningkat mulai 96,46 persen tahun 2012, meningkat menjadi 99,73% pada tahun 2016. Hal ini memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas jenjang pendidikan menengah dengan angka kelulusan terus meningkat mendekati angka sempurna yaitu 100%.

Angka Kelulusan Siswa SMA/MA dan SMK pada tahun 2012-2016 dapat dicermati pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18
Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Tahun 2012-2016

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
AK SMA/MA/SMK	96,46	96,74	99.40	99,72	99,73

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

f). Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

Masih adanya siswa putus sekolah diakibatkan oleh gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang berasal dari faktor internal seperti kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar, maupun yang gangguan yang berasal dari faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan yang tidak mendukung serta ketidakmampuan ekonomi. Minimnya ekonomi menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga. Acapkali cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menimbulkan anggapan bahwa pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan mayoritas alasan banyaknya siswa memutuskan untuk putus sekolah.

Jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Kota Kediri selama tahun 2014-2016 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif yaitu dari 53 siswa pada tahun 2014 menurun menjadi 31 siswa pada tahun 2015, namun mengalami peningkatan sebanyak 68 siswa putus sekolah pada tahun 2016. Meskipun Angka Putus Sekolah penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan persentase 0,23%, yaitu sebanyak 68 anak putus sekolah dari 29.531 siswa. Namun jika dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 0,56% menunjukkan capaian 158,93%.

Angka putus sekolah perlu terus ditekan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap esensi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa Pendidikan tidak saja menjadi kebutuhan melainkan juga investasi masa depan. Dengan demikian kebutuhan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan menengah pada umur 16-18 tahun semakin menjadi prioritas guna mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun.

g). Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu kualitas hasil anak didik, salah satunya diwujudkan melalui pemenuhan guru dan peningkatan kualitas guru. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru pada jenjang pendidikan menengah adalah 20 : 1. Pada tahun 2016 jumlah guru jenjang pendidikan menengah sebanyak 2.183 orang menangani siswa sebanyak 29.531 orang atau rasio guru dibanding siswa 1 : 13. Artinya proporsi guru yang ada dalam menangani jumlah siswa lebih baik dari yang ditargetkan.

Rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan menengah di Kota Kediri selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
Rasio Guru Jenjang Pendidikan Menengah, 2012- 2016

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Guru	2.288	2.220	2.301	2189	2183
Jumlah Murid	30.639	30.896	29.580	30.944	29.531
Rasio Guru Murid (1: ..)	13	14	13	14	13

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

h). Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya dilihat dari sisi jumlahnya saja, melainkan juga kualitas SDM guru yang secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar siswa, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka semakin baik pula kemampuan mengajar seorang tenaga pendidik yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Realisasi guru sesuai kualifikasi S1/D4 pada tahun 2017 sebesar 94,28%, yaitu sebanyak 3.546 guru telah memiliki ijazah S1/D4 dari 3.761 guru yang ada di Kota Kediri. Guru berkualifikasi mengalami perkembangan yang cukup baik, terdapat peningkatan sebanyak 24 guru berijazah S1/D4 dibanding tahun 2016, dimana sebesar 86,76% guru berkualifikasi S1/D4 atau sebanyak 3.546 orang dari 3.761 guru yang ada pada tahun 2016.

Peningkatan motivasi kepada guru perlu terus dilakukan antara lain melalui Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sehingga seluruh guru di Kota Kediri dapat memenuhi standar pelayanan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu kualifikasi akademik guru minimal harus berijazah S1/D4 sebagai upaya pemenuhan indikator peningkatan guru berkualitas.

Presentase jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 dari tahun 2012-2016 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.20
Presentase guru yang berkualifikasi S1/D-IV
per jenjang pendidikan di Kota Kediri

No	Jenjang sekolah	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI	81.93	88,78	93,22	86,76	94,28
2.	SMP/MTs	98.33	97,84			
3.	SMA/SMK/MA	98.45	97,79			

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

2). Urusan Kesehatan

Pemerintah Kota Kediri menetapkan sasaran prioritas yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya akses, mutu pelayanan kesehatan dan perilaku hidup sehat; serta meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan.

Kinerja keberhasilan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat antara lain dapat ditunjukkan melalui indikator sebagai berikut :

a). **Angka Kematian Bayi (AKB)**

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi dihitung berdasarkan jumlah bayi yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama. Perkembangan AKB di Kota Kediri selama lima tahun terakhir fluktuatif dengan tren menurun, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.21.
Angka Kematian Bayi di Kota Kediri, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	27	25	23	22	27
Jumlah Kelahiran Hidup	5.342	4.793	4.277	4.214	4.293
Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup	5,02	5,22	5,38	5,22	6,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri

Pada tahun 2017 AKB sebesar 6,29 per 1000 kelahiran yaitu sebanyak 27 kasus kematian bayi dari 4.293 kelahiran bayi hidup. Jumlah bayi yang lahir meninggal di Kota Kediri mengalami peningkatan sebanyak 5 bayi dibanding tahun 2016 dengan AKB sebesar 5,22 per 1000 kelahiran hidup. Namun demikian AKB Kota Kediri pada tahun 2017 berhasil melampaui target Nasional yang ditetapkan sebanyak 40 bayi per 1000 kelahiran hidup.

Pola penyakit penyebab kematian pada bayi neonatal dini lebih banyak disebabkan oleh beberapa masalah yaitu : BBLR < 2.000 gr, infeksi, penyebab kematian karena asfiksia, kelainan kongenital bawaan, trauma, pneumonia, diare, meningitis, TBC, kelainan syaraf, aspirasi, dan penyebab lainnya. Selain peran kesehatan ibu ketika hamil, perawatan yang tidak akurat dan tidak tepat selama hamil, bersalin, dan beberapa jam setelah melahirkan juga mempunyai konsekuensi terhadap terjadinya kematian bayi baru lahir. Kwalitas antenatal care (ANC) yang kurang menyebabkan kehamilan ibu tidak terpantau dengan baik. Masih ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kematian neonatal, seperti status Sosio-ekonomi ibu yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah sehingga kurang pengetahuan ibu dalam hal kesehatan pada kehamilan, status gizi ibu dan fertilitas yang tinggi. Hal ini di dukung dengan adanya tingkat pendidikan ibu dan ayah terutama yang masih setingkat SD dan SMP, serta faktor sosial ekonomi yang sangat berpengaruh pada angka kematian bayi, apabila keadaan sosial ekonomi ibu dan ayah rendah dan kurang baik, maka untuk mendapatkan akses pendidikan pun sulit didapatkan sehingga berpengaruh pada tingkat pekerjaan, penghasilan, perumahan dan tempat tinggal.

Sehingga terhadap permasalahan tersebut upaya yang telah dilakukan dan terus ditingkatkan kualitasnya untuk menekan angka kematian bayi di Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- Adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Kediri dengan semua RS, bidan koordinator puskesmas / bidan penanggungjawab wilayah dan bidan praktik mandiri;
- Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) anak;
- Pelatihan Asfiksia bagi petugas bidan;
- Pendampingan ibu hamil oleh kader dan bidan wilayah yang berkemitra dengan TP PKK Kota Kediri;
- Faskes I sudah melaksanakan rujukan dini terencana mulai janin dalam kandungan ke Rumah sakit baik dari puskesmas / BPM tetapi kematian bayi tidak dapat dihindari dan kematian semua terjadi di rumah sakit;
- Pelaksanaan MTBS dan MTBM sudah berjalan ditiap puskesmas (baik kunjungan rumah oleh kader dan petugas maupun pasien berkunjung ke faskes I;
- Kepatuhan petugas terhadap SOP penanganan bayi baru lahir;
- Adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Kediri dengan Bidan koordinator Puskesmas/bidan penanggung jawab wilayah;
- *Respon time* petugas dan kader dalam mengenali tanda bahaya pada bayi baru lahir dan memantau perkembangan bayi sampai bayi umur 28 hari;
- Perlu adanya refreshing penanganan bayi baru lahir bagi bidan;
- Pelatihan Berat Badan Lahir Rendah;
- Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit;
- Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi;
- Audit Maternal Perinatal;
- *Supervisi supportive*;
- Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu;
- Mempertahankan hasil kegiatan dan apabila ada kasus kematian bayi bidan puskesmas segera lapor 1 x 24 jam kemudian disusul laporan OVP dan kronologi kematian; dan
- Adanya team work dalam menangani kasus kehamilan atau kebidanan dengan resti dan kasus bayi dengan komplikasi.

b). Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu, yang diperoleh dengan perhitungan jumlah kasus kematian ibu melahirkan per 100.000 ibu melahirkan hidup.

AKI pada tahun 2017 sebesar 93,17 per 100.000 kelahiran hidup yaitu sebanyak 4 kasus dari jumlah ibu melahirkan sebanyak 4.293 orang. Realisasi AKI pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016 sebesar 94,92 per 100.000 kelahiran hidup, dan berhasil melampaui target nasional tahun 2017 sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup.

Perkembangan capaian Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran di Kota Kediri selama lima tahun terakhir dapat dicermati pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.22.
**Angka Kematian Ibu di Kota Kediri,
Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kematian ibu	4	4	3	4	4
Jumlah kelahiran hidup	5.342	4.793	4.277	4.214	4.293
Angka Kematian Ibu per Seratus ribu kelahiran hidup	74,88	83,46	70,14	94,92	93,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri

Keberhasilan pencapaian AKB dan AKI dibawah Nasional maupun MDGs didukung dengan adanya program GEMAKIBA yaitu Gerakan Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi dengan menggerakkan kader pendamping yang ada di Kelurahan. Kader pendamping berasal dari unsur PKK, kader posyandu serta bidan puskesmas. Adapun tugas bidan pukesmas tidak hanya memantau kesehatan ibu hamil, melainkan juga memastikan pemeriksaan diri ibu hamil sesuai jadwal termasuk memberi pemahaman pada ibu hamil tentang asupan makanan yang benar selama proses kehamilan. Penyebab meningkatnya angka kematian ibu dirinci menjadi dua yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya karena pendarahan, eklamsi/preeklamsi, abortus, infeksi dan persalinan macet/partus lama. Sedangkan penyebab tidak langsung antara lain karena pendidikan yang berpengaruh pada sikap dan perilaku dalam pencapaian akses informasi yang terkait dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ibu, sosial ekonomi dan sosial budaya yang masih rendah berpengaruh terhadap keputusan ibu dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ibu. “Empat terlalu” dalam melahirkan yaitu “Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak jumlah persalinan”, “Tiga terlambat” yaitu “Terlambat dalam mengambil keputusan hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penentuan tindakan yang akan dilakukan dalam kasus kebidanan yang membutuhkan waktu segera, terlambat dalam pengiriman ketempat rujukan, terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan dan kualitas layanan ditingkat rujukan). Dari beberapa penyebab terjadinya Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Kediri, sebanyak 75% disebabkan oleh kasus preeklamsia/eklamsia meskipun sebenarnya sudah dilakukan rujukan dengan berencana pada saat Trimester 2 (dua) pada saat ditemukan adanya tanda-tanda kelainan seperti pendarahan, hipertensi dan infeksi, apabila ada ibu yang memiliki resiko tinggi ,bidan atau dokter yang menangani akan lebih optimal sehingga dapat meminimalisasi terjadi komplikasi selama kehamilan.

c). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Untuk menekan angka kematian ibu dan bayi pertolongan persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Realisasi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan dokter spesialis di Kota Kediri mencapai 94,70%, yaitu sebanyak 4.274 persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kebidanan dan dokter spesialis dari keseluruhan tindakan sebanyak 4.513 persalinan.

Terpenuhinya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi kebidanan didorong oleh peran aktif kader kesehatan dan bidan wilayah, optimalisasi program KIA melalui Kelurahan Siaga, adanya penyegaran kemitraan bidan dan dukun dalam rangka menunjang program kemitraan bidan dan bayi, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan posyandu Gerdu Sehati (Gerakan Terpadu Menuju Masyarakat Sehat Sejati).

d). Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus gizi buruk pada balita dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Jumlah balita gizi buruk di Kota Kediri pada tahun 2017 sebanyak 13 balita dari 21.521 balita yang diperiksa atau sebesar 0,06%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dimana persentase balita gizi buruk menurun dibanding tahun 2016 sebagaimana tabel 2.23. Hal ini didorong oleh meningkatnya kerjasama lintas program dan lintas sektor serta adanya dukungan dari stakeholders terkait serta meningkatnya kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Tabel 2.23
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Kediri, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Balita dengan Gizi Buruk	8	10	6	14	13
Jumlah Balita	23.268	23.659	17.128	18.210	21.521
Persentase Gizi Buruk	0,034	0,042	0,036	0,08	0,06

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Kediri

e). Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan Kelurahan UCI menunjukkan persentase kelurahan yang seluruh balitanya telah tercakup imunisasi. Dari 46 Kelurahan yang ada di Kota Kediri sebanyak 45 kelurahan atau 97,83% telah tercakup imunisasi pada tahun 2014. Dan sejak tahun 2015 hingga sekarang seluruh balita di 46 kelurahan yang ada di Kota Kediri telah tercakup imunisasi (UCI).

Kelurahan cakupan UCI di Kota Kediri telah terdeteksi dan telah dilakukan penanganan secara optimal. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan UCI adalah pendataan sasaran belum sesuai kondisi riil. Sebagai solusi diperlukan adanya upaya-upaya sosialisasi ke Kelurahan akan pentingnya imunisasi didapat secara gratis baik di posyandu maupun puskesmas, efektifitas supervisi suportif, terdapatnya tenaga yang terlatih dari pemerintah maupun unit swasta, serta adanya kerjasama lintas program sehingga penanganan UCI bisa terlaksana secara maksimal.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan kesehatan di Kota Kediri antara lain dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, yang didukung dengan perbaikan sarana pelayanan kesehatan di masing-masing kelurahan melalui ponkeskel, serta pembangunan gedung baru RSUD Gambiran 2 yang mulai beroperasi pada tahun 2017.

Pemerintah Kota Kediri juga memfasilitasi pelayanan kesehatan gratis di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rawat jalan serta rawat inap melalui program BPJS sehingga penduduk lebih memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan di RS, fasilitas yang memadai, pelayanan yang profesional, ditunjang SDM yang berkualitas

Peningkatan akses, mutu pelayanan kesehatan dan perilaku hidup sehat dapat dilihat dari capaian indikator berikut :

a). Meningkatnya Cakupan Rumah Sehat.

Jumlah rumah sehat pada tahun 2017 sebanyak 55.436 rumah dari 66.466 rumah yang diperiksa atau sebesar 83,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebanyak 52.453 rumah sehat dari 58.523 rumah yang diperiksa, maka cakupan rumah sehat di Kota Kediri pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 2.983 rumah sehat. Peningkatan jumlah rumah sehat yang di Kota Kediri dipengaruhi oleh meningkatnya taraf status ekonomi masyarakat Kota Kediri yang lebih baik, adanya program bantuan bedah rumah melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b). Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menggambarkan cakupan jumlah dokter yang ada dibanding jumlah penduduk Kota Kediri. Rasio dokter umum dan dokter gigi didasarkan pada kebutuhan tenaga dokter yang ditetapkan sesuai kondisi dan cakupan pasien, sedangkan untuk kebutuhan dokter spesialis mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit.

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2017 terinci sebagai berikut :

- Dokter Umum
Dengan rasio 1:1500 jiwa, diperoleh cakupan sebesar 115,29%.
- Dokter Gigi
Dengan rasio 1:3000 jiwa, diperoleh cakupan sebesar 142,69%.
- Dokter Spesialis
Sesuai standar Permenkes RI No. 56 Tahun 2014 di klasifikasikan menjadi 4 kelas (Kelas A,B,C dan D). Sedangkan di Kota Kediri pada saat ini terdapat 3 klasifikasi RS (Type B,C dan D) sesuai dengan kelas tenaga medis/dokter spesialis sebagaimana dimaksud maka tingkat ketersediaan dokter terhadap kebutuhan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24.
**Daftar Jumlah Dokter Dan Kebutuhan Dokter di Kota Kediri
Tahun 2017**

No	Jenis Dokter	Jumlah Yang ada	Kebutuhan
1.	Dokter umum	223	192
2.	Dokter gigi	138	96
3.	Dokter Spesialis :		
	Spesialis Obgyn	12	10
	Spesialis Peny. Dalam	11	10
	Spesialis Anak	11	10
	Spesialis Bedah	8	6
	Spesialis Mata	6	6
	Spesialis Anestesi	8	6
	Spesialis Paru	6	5
	Spesialis Jantung	3	5
	Spesialis Syaraf	7	5
	Spesialis Urologi	2	3
	Spesialis THT	8	3
	Spesialis Kulit Kelamin	5	3

No	Jenis Dokter	Jumlah Yang ada	Kebutuhan
	Spesialis Orthopedi	6	3
	Spesialis Patologi Klinik	3	3
	Spesialis Kesehatan Jiwa	3	3
	Spesialis KFR	3	3
	Spesialis Bedah Syaraf	1	1
	Spesialis Bedah Anak	1	1
	Spesialis Bedah Plastik	-	3
	Spesialis Andrologi	1	1
	Spesialis Radiologi	6	5
	Spesialis Gizi Klinik	2	3
	Spesialis Bedah Mulut	1	3
	Spesialis Orthodontia	2	3
	Spesialis Konservasi Gigi	1	2
	Spesialis Periodensi	-	1
	Spesialis Syaraf Anak	1	1
	Spesialis Fisioterapis	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri

Pada Tahun 2017 RS di Kota Kediri terdapat 4 jenis layanan yang terdiri dari 8 RSU (Rumah Sakit Umum), 1 RSB (Rumah Sakit Bersalin, 2 RSIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak) dan 1 RSGM (Rumah Sakit Gigi Mulut). Untuk mengatasi kekurangan kebutuhan tenaga dokter spesialisik di Kota Kediri adalah dengan memberikan beasiswa untuk spesialisasi dokter, rekrutmen tenaga kontrak untuk kekurangan dokter spesialis, adanya dokter tamu/dokter intensif di RS dan puskesmas rawat inap, program kerjasama dengan Universitas Kedokteran negeri maupun swasta.

c). **Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**

Ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Kediri pada tahun 2017 terdiri dari : 275 dokter, terdiri dari 167 dokter spesialis dan 108 dokter umum, 409 bidan, 1.272 perawat, 83 dokter gigi dan dokter gigi spesialis, 199 tenaga kefarmasian, 14 orang tenaga kesehatan, 27 orang sanitarian, dan 55 orang nutrisi, dengan rasio per satuan penduduk sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.25.
**Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Kota Kediri, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Bidan	0,44	0,51	0,47	0,55	0,61
Perawat	0,92	0,31	0,36	0,87	1,09
Dokter gigi	0,31	0,56	0,93	0,97	1,31
Apoteker	4,81	5,10	7,74	6,88	6,32
Assisten apoteker	5,75	4,96	6,43	5,96	5,58
Sanitarian	1,25	1,22	1,20	1,43	1,52
Nutrisi	0,60	0,57	0,36	0,44	0,48

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Kediri

d). **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC**

Indikator ini menggambarkan bahwa penemuan TBC dapat dilakukan penanganan secara optimal, diukur dengan membandingkan jumlah

penemuan penderita penyakit TBC dibanding jumlah penanganan penderita penyakit TBC.

Cakupan penanganan penderita penyakit TBC pada tahun 2017 sebesar 100%, yaitu sebanyak 244 kasus yang ditemukan semuanya berhasil ditangani. Kondisi ini tidak mengalami perubahan dibanding capaian tahun 2016, dimana dari 263 kasus TBC yang ditemukan telah tertangani semua atau terealisasi 100%. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.26
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC
Kota Kediri, 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	79,4	86,4	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri

Peningkatan cakupan penemuan dan penanganan TBC didorong oleh upaya-upaya antara lain penyelenggaraan 18 layanan TB DOTS di 9 Puskesmas, 7 RS (RSUD Gambiran, Baptis, Bhayangkara, DKT, RS Lirboyo, RSM Ahmad Dahlan, dan RS Kusta) dan 2 Poliklinik (Poli Lapas dan Poliklinik Gudang Garam), adanya Kolaborasi TB – HIV, kader TBC yang proaktif ikut memotivasi pasien TB, penyediaan sarana pemeriksaan pasien TB dan ketersediaan obat tuberkulosis yang berkesinambungan, serta tak lepas dari dukungan dan komitmen semua unsur yaitu Pemerintah Daerah, layanan kesehatan, masyarakat dan pasien dalam menanggulangi TBC.

e). Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Pada tahun 2017 di Kota Kediri ditemukan 155 kasus DBD dan semuanya berhasil ditangani 100%. Begitu pula dengan kondisi pada tahun 2016, dari 338 kasus DBD yang terjadi berhasil ditangani 100%.

Keberhasilan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ini tidak terlepas dari peran Kader Jumantik yang telah melakukan pemantauan pada kondisi sanitasi dan lingkungan rumah tangga melalui gerakan 3 M Plus. Gerakan ini berhasil meningkatkan angka bebas jentik Kota Kediri, dimana pada tahun 2014 tercapai sebesar 91,42%, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 95,23%, yaitu dari 62.505 rumah sebanyak 58.755 rumah telah bebas jentik. Dan pada tahun 2016 angka bebas jentik menunjukkan angka 92,50%. Atas upayanya dalam meningkatkan angka bebas jentik pada tahun 2015 kader Jumantik Kota Kediri berhasil meraih prestasi sebagai Juara 3 Lomba Kader Jumantik tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan pada tahun 2017 angka bebas jentik meningkat signifikan sebesar 2,8% menjadi 95,3% dibandingkan tahun 2016 sebesar 92,5%.

f). Cakupan Penemuan dan Penanganan HIV dan AIDS

Perkembangan penyakit HIV/AIDS terus menunjukkan peningkatan, seperti fenomena gunung es yang senantiasa tampak kecil di permukaan tetapi sebenarnya lebih besar di dalamnya, meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan. Semakin tingginya mobilitas penduduk antar wilayah, menyebarnya sentra-sentra pembangunan ekonomi di Indonesia. Hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual) dan *Injecting Drug User* (IDU) secara stimulan telah memperbesar tingkat resiko penyebaran HIV/AIDS. Tidak seluruh kasus HIV/AIDS yang ada atau baru sebagian kecil dilaporkan (*under reported*).

Pada tahun 2016 jumlah kasus baru HIV yang terjadi di Kota Kediri sebanyak 121 kasus, sedangkan kasus AIDS sebanyak 46 kasus dengan jumlah kematian akibat AIDS sebanyak 10 orang.

Upaya untuk pencegahan penularan terhadap kasus HIV juga dilakukan melalui screening donor darah yang salah satunya dilakukan oleh PMI (Palang Merah Indonesia). Dari jumlah 16.645 pendonor (12.188 pendonor laki-laki dan 4.457 pendonor perempuan) semua sampel darah diperiksa dan diketahui tidak ada yang positif HIV.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberantasan penyakit HIV/AIDS disamping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan, diarahkan juga pada upaya pencegahan yang dilakukan melalui skrining HIV/AIDS terhadap darah donor, serta upaya pemantauan dan pengobatan penderita Infeksi Menular Seksual (IMS). Pencegahan bahaya meluasnya HIV dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat bekerjasama dengan KPAD dan LSM peduli AIDS, pelatihan SDM klinik VCT, serta didirikannya sarana kesehatan khusus untuk konseling dan berobat bagi para penderita, seperti adanya Klinik Seroja di wilayah Semampir Kota Kediri dan ditindaklanjuti dengan penambahan fasilitas pelayanan di semua Puskesmas.

g). Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan jumlah penduduk miskin yang dapat dilayani dengan pengobatan gratis melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas, Jamkesda, BPJS) terus ditingkatkan, dari 37.814 jiwa pada tahun 2008 menjadi 123.431 pada tahun 2016. Sebanyak 123.431 penduduk miskin pada tahun 2016 semuanya tercakup dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan melalui Jamkesmas dan Jamkesda.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi pasien masyarakat miskin adalah dengan secara bertahap pasien masyarakat miskin yang tercakup Jamkesda akan diintegrasikan ke PBI serta menyusun perencanaan untuk anggaran pembiayaan jaminan kesehatan peserta yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan secara bertahap.

Tabel 2.27.
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kota Kediri, 2012-2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	91,39	100	86,4	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri

h). Rasio Posyandu per Satuan Balita

Peningkatan peran serta masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup sehat menuju terwujudnya keluarga berkualitas tercermin dari meningkatnya jumlah posyandu aktif di Kota Kediri. Revitalisasi peran posyandu di setiap kelurahan ditingkatkan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memotivasi kader kesehatan yang terintegrasi dalam Gerdu Sehati (Gerakan Terpadu Menuju Masyarakat Sehat Sehati).

Jumlah posyandu di Kota Kediri pada tahun 2017 sebanyak 336 posyandu dan jumlah balita sebanyak 20.521 balita. Dengan demikian rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2017 mencapai 16,37 Hal ini menunjukkan bahwa dari 1.000 balita yang ada di Kota Kediri pada tahun 2017 dapat dilayani Posyandu sebanyak 16 - 17 Posyandu. Dengan kata lain pada tahun 2017 dari 336 posyandu yang ada telah melayani sebanyak 20.521 balita atau 1 posyandu melayani 61 balita.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 dimana rasio posyandu sebesar 18,45 dalam artian 18 – 19 posyandu untuk 1.000 balita, atau 1 posyandu melayani 54 balita, maka rasio posyandu pada tahun 2017 mengalami peningkatan dimana jumlah balita yang dilayani bertambah rata-rata 10 balita pada 1 posyandu. Tentu hal ini akan lebih meningkatkan efektivitas pelayanan posyandu bagi balita. Rasio posyandu

Rasio posyandu di Kota Kediri sebanyak 336 posyandu telah melampaui target nasional yang harus dicapai sebesar 80% atau sebanyak 328 posyandu.

i). Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi

Jumlah puskesmas yang telah terakreditasi pada tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan dari sebanyak 4 puskesmas atau sebesar 44,44% pada tahun 2016, menjadi 9 puskesmas dari 9 puskesmas yang ada atau 100% puskesmas di Kota Kediri telah terakreditasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang memenuhi standart pelayanan di puskesmas sudah meningkat, dimana puskesmas yang telah terakreditasi pada tahun 2015 masih 1 puskesmas yaitu puskesmas Pesantren I, sedangkan pada Tahun 2016 sebanyak 4 puskesmas diantaranya adalah Puskesmas Sukorame,Puskesmas Kota Wilayah Selatan,Puskesmas Kota Wilayah Utara,Puskesmas Pesantren II.

Capaian indikator ini dikarenakan pelaksanaan akreditasi puskesmas baru dilaksanakan pada tahun 2015, dan yang telah terakreditasi sebanyak 1 Puskesmas yaitu Puskesmas Pesantren I. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya acuan yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan kesehatan adalah melalui sertifikasi ISO, dimana pada tahun 2014 sebanyak

3 puskesmas dari 9 puskesmas yang ada telah memperoleh sertifikasi ISO atau sebesar 33,33%.

Namun demikian terkait kualitas kinerja puskesmas pada Tahun 2016 Puskesmas Sukorame telah berhasil meraih akreditasi dari Kemenkes sebagai Puskesmas dengan tingkat madya. Perubahan acuan sebagai tolok ukur kualitas puskesmas pada tahun 2016 ini dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan standart mutu dan kinerja pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan manajemen, upaya-upaya kesehatan dan pelayanan klinis, sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, dan Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

j). Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes

Tingkat ketersediaan obat menunjukkan kemampuan pemenuhan obat di sarana kesehatan dan pelayanan kesehatan terhadap kebutuhan obat. Dari 20 jenis kebutuhan obat pada tahun 2017 telah tersedia 19 jenis obat atau terealisasi sebesar 95%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didorong oleh adanya kegiatan-kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan ketersediaan obat melalui peningkatan koordinasi lintas program, menyusun perencanaan/daftar kebutuhan obat sesuai dengan yang dibutuhkan, serta adanya plot untuk jenis kebutuhan obat yang disediakan di sarkes/yankes sesuai ketentuan.

k). Peningkatan Kualitas Layanan RSUD.

Kinerja layanan RSUD diantaranya dapat dilihat dari indikator angka kunjungan pasien dan angka kematian pasien. Angka kunjungan pasien ke RSUD Gambiran dapat dilihat dari indikator BOR rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat yang jumlahnya terus meningkat. Peningkatan jumlah kunjungan diimbangi pula dengan peningkatan sarana penunjang di RSUD termasuk dengan adanya RSUD Gambiran 2, pelayanan rumah sakit yang selalu ditingkatkan, jumlah spesialisasi serta sarana prasarana semakin lengkap dan pelayanan IGD cepat, akurat dan rasional.

Sementara itu angka kematian pasien di RSUD juga menunjukkan adanya penurunan baik NDR (*Net Death Rate*) maupun GDR (*Gross Death Rate*). NDR menggambarkan kematian pasien rumah sakit > 48 jam yang dirawat dibandingkan dengan jumlah pasien keluar, sedangkan GDR menggambarkan jumlah kematian seluruh pasien rumah sakit dibanding dengan jumlah pasien keluar. Pada tahun 2017 NDR terealisasi sebesar 30,55‰, bila dibandingkan dengan target kinerja yang hendak dicapai sebesar $\leq 25\%$, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 77,81‰. Sedangkan GDR terealisasi sebesar 62,93‰ dari target kinerja yang hendak dicapai sebesar $\leq 49\%$, sehingga capaian kinerja sebesar 71,57‰.

Perkembangan angka kunjungan dan angka kematian pasien RSUD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28.
**Angka Kunjungan Pasien dan Angka Kematian Pasien RSUD
Kota Kediri, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
BOR Rawat Inap (%)	76,67	66,99	6,88	74,83	73,50
Rawat Jalan (orang)	143	126.250	174.137	175.986	186.426
Rawat Darurat (orang)	21.143	19.385	22.204	22.557	21.011
NDR (‰)	38,09	42,48	33,89	30,76	30,55
GDR (‰)	76,85	83,72	83,70	63,60	62,93

Sumber : RSUD Gambiran Kota Kediri

Untuk menstandarkan kualitas layanan RSUD sesuai UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes No. 1144 tahun 2010, pada tahun 2016 RSUD Gambiran telah melaksanakan Penilaian Akreditasi Versi 2012 yang mengacu pada Joint Commission International (JCI) dengan hasil Lulus Tingkat PARIPURNA berdasarkan Sertifikat KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) Jakarta No. KARS-SERT/479/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, meliputi pelayanan berfokus pada pasien, manajemen rumah sakit, danteselamatan pasien dan SDGs.

Adapun jenis pelayanan yang ada di RSUD Gambiran sudah sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit type B, dengan melaksanakan pelayanan dasar dan pelayanan sub spesialis dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana sesuai standar RS Type B, dari 54 jenis pelayanan target yang ditetapkan, pada tahun 2017 RSUD Gambiran sudah mencapai 56 jenis pelayanan, dengan penambahan layanan Home Care dan Poli Psikologi sehingga capaian kinerja yang dicapai sebesar 103,70%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah alat kedokteran rumah sakit sesuai kebutuhan dan adanya peningkatan kompetensi SDM.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya perwujudan kehidupan sehat yang berkualitas di Kota Kediri ditunjukkan dengan tren perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Kediri yang terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 angka harapan hidup berkisar 70,18 tahun dan mencapai 73,69 pada tahun 2017.

3). **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a). **Panjang Jalan dalam Kondisi Baik**

Ketersediaan infrastruktur jalan yang baik akan memberikan keamanan, kenyamanan dan kemudahan yang mendorong terjadinya saling interaksi, integrasi dan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi serta memperluas aksesibilitas untuk memperoleh pelayanan umum administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan dan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya akan mempercepat peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Tabel 2.29.
**Pembangunan Transportasi Jalan
Kota Kediri, Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik (persen)	71,50	84,62	87,32	85,38	92,89
Panjang jalan kondisi baik (km)	236,920	282,745	292,740	286,249	311,414
Panjang jalan seluruhnya (km)	331,345	334,097	335,249	335,264	335,264

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri

Panjang jalan dalam kondisi baik/mantap pada tahun 2016 sebesar 286,249 km dan pada tahun 2017 sebesar 311,414 km, mengalami peningkatan sebesar 25,165 km.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/mantap juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 sebesar 85,38 persen dan pada tahun 2017 sebesar 92,89 persen , mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,51 persen.

Upaya pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan terus dilakukan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung jalan seperti saluran drainase/ pematusan, dinding penahan jalan, rambu-rambu jalan ataupun pengaturan/rekayasa lalu lintas dapat membantu menjaga kondisi jalan.

b). Prasarana Sumber Daya Air

Pengelolaan prasarana sumber daya air meliputi pengelolaan wilayah sungai, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih serta pengendalian banjir. Sistem jaringan prasarana sumber daya air diarahkan untuk pengembangan pengairan berdasarkan Wilayah Sungai (WS) Brantas.

Pelayanan pengairan dilakukan dengan cara melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air; perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai; mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; serta pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air. Pengembangan prasarana sumber daya air untuk air bersih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber mata air yang ada yaitu : Sumber Mata Air Sendang Kembar di Kelurahan Gayam; Sumber Mata air Jiput di Kelurahan Rejomulyo; Sumber Mata air Sendang Ngembak; Sumber Mata air Cakarsi di Kelurahan Tosaren; Sumber Mata air Sumber Bulus di Kelurahan Tosaren; dan Sumber Rempy di Kelurahan Betet.

Sedangkan untuk jaringan irigasi dikembangkan dengan :

- Menggunakan saluran irigasi teknis dan non teknis di Kecamatan Mojoroto dan Pesantren;

- Menetapkan jaringan irigasi secara menerus dan tidak terputus baik melalui persawahan maupun kawasan terbangun kota; dan
- Meningkatkan jaringan irigasi pada lahan pertanian berkelanjutan di Kelurahan Sukorame, Kelurahan Bujel, Kelurahan Ngampel dan Kelurahan Gayam.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M /2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Kota Kediri ditetapkan sebagai berikut:

1. Daerah Irigasi Gunting seluas 198 Ha
2. Daerah Irigasi Kembangan seluas 85 Ha
3. Daerah Irigasi Klitik Bendokrosok seluas 146 Ha
4. Daerah Irigasi Klitih Kresek seluas 33 Ha
5. Daerah Irigasi Ngaglik seluas 35 Ha
6. Daerah Irigasi Ngablak seluas 36 Ha
7. Daerah Irigasi Bujel seluas 39 Ha
8. Daerah Irigasi Pesantren seluas 20 Ha
9. Daerah Irigasi Betis/ Ngreco seluas 28 Ha

Pada tahun 2016 jenis lahan pertanian yang ada di Kota Kediri adalah sawah dengan sistem irigasi teknis dengan luas sekitar 1.903 hektar yang terinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.30.
Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kota Kediri (Hektar), Tahun 2016

No	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
1	Mojoroto	547	6	553
2	Kota	267	0	267
3	Pesantren	1.089	0	1.089
Kota Kediri		1.903	6	1.909

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

Pertanian beririgasi ini dipertahankan untuk pengembangan komoditas tanaman pangan dan penguatan ruang terbuka hijau kota melalui penetapan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 500 Ha, sehingga diperlukan peningkatan jaringan irigasi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut.

c) Drainase dalam kondisi baik

Saluran drainase/saluran pembuangan air mempunyai peranan penting dalam pengaturan sistem tata ruang perkotaan. Secara prinsip, drainase mampu memastikan suatu tempat tidak mengandung kelebihan air yang dapat mengganggu kenyamanannya, sehingga tempat tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta tetap aman, nyaman, bersih, dan sehat.

Tabel 2.31.
**Persentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran
pembuangan air Kota Kediri, Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (%)	-	50,00	51,19	51,99	51,43

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri

Persentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air pada tahun 2016 sebesar 51,99 persen dan pada tahun 2017 sebesar 51,43 persen. Penurunan tersebut disebabkan belum tersedianya saluran drainase pada jalan-jalan lingkungan baru di kawasan permukiman. Upaya untuk mendorong penyediaan saluran drainase pada jalan-jalan lingkungan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berskala lingkungan seperti Prodamas.

d). **Penataan Ruang**

Perencanaan tata ruang Kota Kediri mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030. Indikator kinerja pembangunan dalam pengendalian penataan ruang antara lain adalah tercukupinya rasio ruang terbuka hijau (RTH) dengan standar minimal 30%. Dari luas kota secara keseluruhan. RTH diupayakan adanya peningkatan tiap tahun nantinya sehingga perkembangan pembangunan Kota dapat diimbangi dengan peningkatan ekologi.

Dan dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya serta guna mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan, maka setiap bangunan Gedung diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan bangunan (IMB). Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan pada tahun pada tahun 2016 adalah sebesar 41,61 persen dan pada tahun 2017 adalah sebesar 42,49 persen. Semakin meningkatnya rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan maka diharapkan tercipta bangunan yang gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan Gedung, baik dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanannya.

Tabel 2.32.
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang
Kota Kediri, Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio ruang terbuka hijau	7,19	7,1	7,29	8,52	8,52
2.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	38,84	39,64	40	41,61	42,49
3.	Jumlah Bangunan ber-IMB	20.857	21.504	21.776	22.569	23.047
4.	Jumlah Bangunan	53.706	54.245	54.245	54.245	54.245

Sumber : LKPJ Kota Kediri Tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4). **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

a). **Perumahan**

Pembangunan di bidang perumahan bertujuan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur yang dapat dilihat dari banyaknya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak huni.

Jumlah rumah yang memiliki akses air bersih cenderung fluktuatif, yaitu sebesar 95,31% pada tahun 2014, menurun menjadi 93,27% pada tahun 2015, dan meningkat signifikan sebesar 4,62 persen menjadi 97,89% pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 96,85%. Penurunan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih disebabkan oleh berkurangnya masyarakat yang menggunakan air bersih melalui jaringan perpipaan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan layanan air bersih antara lain melalui pemberian potongan biaya pemasangan instalasi air bersih melalui jaringan perpipaan PDAM, penurunan kebocoran dan revitalisasi sistem penyediaan air bersih yang sudah ada, pemenuhan Readiness Criteria, mengingat Pemerintah Pusat menyediakan anggaran yang besar untuk peningkatan akses air minum yang merupakan salah satu target RPJMN 2014-2019, yaitu 100 persen akses air minum.

Sedangkan untuk tempat pemakaman umum di Kota Kediri, dari 46 kelurahan hampir keseluruhan memiliki tempat pemakaman umum, sedangkan tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri adalah TPU Semampir, TPU Klothok dan TPU Setonogedong serta TPU Taman Makam Pahlawan.

Sementara itu jumlah rumah di Kota Kediri pada tahun 2017 sebanyak 63.524 unit. Diantaranya terdapat rumah yang tidak layak huni (RTLH) yang didefinisikan atas rumah dengan kondisi ALADIN (atap, lantai dan dinding) dengan kualitas yang jelek sebanyak 4.122 unit, sehingga jumlah rumah layak di Kota Kediri sebanyak 59.402 unit. Hal ini didorong dengan adanya program stimulan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Kediri yang terus meningkat jumlahnya.

Berikut disajikan data terkait aspek pelayanan umum bidang perumahan di Kota Kediri :

Tabel 2.33.
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Kota Kediri Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	100	28,44	85,11	97,89	96,85
2.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	100	100	100	100	100
3.	Rumah tangga bersanitasi (%)	98,48	89,25	93,27	96,79	95,78
4.	Rasio rumah layak huni	85,420	66,67	99,65	90	93,51

Sumber : DPUPR Kota Kediri

b). Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Terpasang.

Pencapaian indikator Jumlah Titik Lampu Yang Terpelihara dan Adanya Database LPJU dilaksanakan melalui Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum. Pada tahun 2017 jumlah titik PJU yang terpelihara sebanyak 8.732 titik yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi peningkatan sebanyak 165 titik yaitu sebanyak 8.567 titik. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka pada tahun 2017 fokus dilakukan pada pengalihan lampu konvensional menjadi lampu hemat energi (LED) yang dipasang pada beberapa ruas jalan dengan menggunakan sistem Smart City, sehingga diharapkan penggunaan listrik akan lebih efisien.

c). Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2016, jumlah rumah tangga yang bersanitasi di Kota Kediri sebesar 99,23%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Peningkatan ini didorong oleh keikutsertaan Pemerintah Kota Kediri dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Program SANIMAS dan IPAL Komunal, sebagai bentuk komitmen dalam upaya penyehatan lingkungan di bidang permukiman.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan Rumah Tangga bersanitasi antara lain masih minimnya ketersediaan data rumah tangga bersanitasi serta adanya perbedaan definisi sanitasi sehat oleh beberapa Kementerian. Sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi serta pendataan sanitasi sesuai kriteria yang disepakati bersama agar penanganan sanitasi dapat dilakukan secara holistik dan berkesinambungan. Selain itu mengingat Pemerintah Pusat menyediakan anggaran yang besar untuk penanganan Sanitasi yang merupakan salah satu target RPJMN 2014-2019, yaitu 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi), maka Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan upaya-upaya guna pemenuhan *Readinesss Criteria*, antara lain melalui penyiapan masterplan sanitasi (persampahan, air limbah, dan drainase) dan *Design Engineering Detail* (DED) serta penyiapan lahan.

Perkembangan jumlah Rumah Tangga bersanitasi di Kota Kediri tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.34
**Persentase Rumah Tangga Berdasar Penggunaan Fasilitas
Tempat Buang Air Besar di Kota Kediri**

Tahun	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Jumlah	RT
2012	80,12%	15,17%	3,13%	1,58%	100%	73.377
2013	78,66%	14,81%	6,03%	0,50%	100%	72.271
2014	81,21%	15,80%	1,56%	1,43%	100%	72.650
2015	80,17%	14,56%	4,10%	1,17%	100%	73.155
2016	84,90%	12,86%	1,47%	0,77%	100%	73.671

Sumber : Susenas 2016, BPS

Sementara itu pada tahun 2017 jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 85.826 unit dari keseluruhan 89.612 unit rumah tangga di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 95,78%.

Secara umum permasalahan sanitasi di Kota Kediri sudah dapat diatasi dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi di dalam pengelolaannya, antara lain permasalahan persampahan. TPA yang ada saat ini masih dalam kondisi keterbatasan lahan. Pengelolaan air limbah (*grey water*) sudah cukup baik, namun masih ada sebagian masyarakat yang masih membuang limbahnya ke saluran umum/drainase/sungai, sebagian drainase lingkungan selain berfungsi sebagai saluran air hujan, juga sebagai saluran pembuangan air limbah rumah tangga, akibatnya sering terjadi penyumbatan saluran dan bila terjadi hujan air akan meluber ke badan-badan jalan dan menimbulkan banjir serta menjadi sumber dari berbagai macam penyakit kulit. Di beberapa tempat di wilayah Kota Kediri, kondisi drainase lingkungan kurang memenuhi syarat teknis dan fungsi.

Di dalam pengelolaan air limbah khususnya tinja (*black water*), sebagian masyarakat di Kota Kediri telah memiliki jamban lengkap dengan *septic tank*. Jika dilihat persentasenya relatif cukup besar yaitu 90,70 persen, namun secara teknis belum diketahui secara pasti kelayakannya. Air limbah domestik, belum dikelola secara optimal, hal tersebut dikarenakan aturan yang dapat mengikat kepatuhan pihak-pihak yang berkepentingan belum dibuat dan dialokasikan secara memadai serta belum disusunnya Master Plan Air Limbah Domestik secara terintegrasi dan komprehensif Kota Kediri. Selanjutnya untuk pelayanan Air Bersih hampir semua rumah tangga sudah terlayani air bersih. Terhadap aspek Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tindakan pencegahan yang dilakukan agar terhindar dari penyakit berbasis lingkungan misalnya diare, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir secara rutin disosialisasikan baik di lembaga-lembaga pendidikan maupun masyarakat secara luas. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang berbasis kesadaran pada setiap lapisan masyarakat terus dikembangkan.

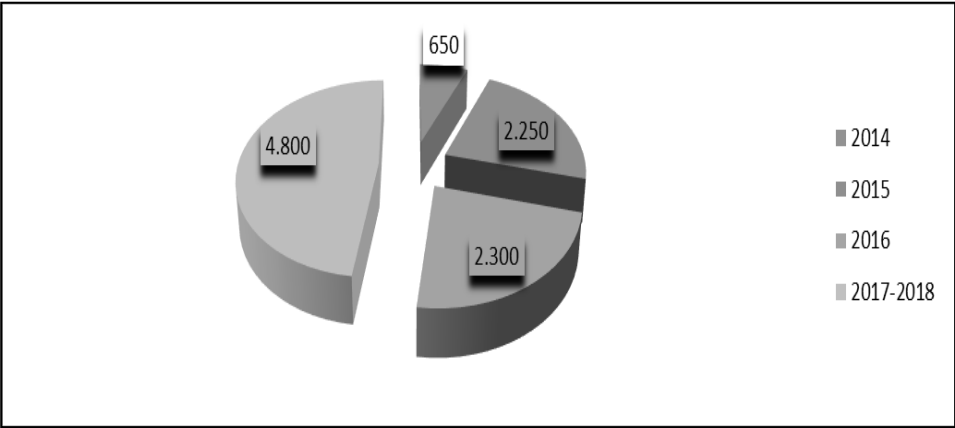
5). Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

a). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pendidikan politik kepada organisasi masyarakat diarahkan untuk terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah Kota Kediri menargetkan minimal bisa memberikan pendidikan politik kepada 10.000 orang masyarakat luas dalam kurun waktu 2014-2018 melalui program Pendidikan Politik Masyarakat. Sasarannya antara lain anggota Ormas, LSM, Orpol, Pelajar SMU dan Sekolah yang sederajat, Santri Pondok dan Mahasiswa. Kegiatan tersebut sudah diikuti oleh 7.600 orang dari tahun 2014-2017 terinci sebagaimana grafik di bawah ini :

Grafik 2.11.
Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat pada Tahun 2014 – 2016 dan Target 2017-2018



Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kota Kediri

Sementara itu pembinaan ormas dan LSM menunjukkan adanya peningkatan kerja, yaitu jumlah organisasi yang dibina sebanyak 140 dari 382 organisasi yang ada di Kota Kediri. Tahun 2017 jumlah organisasi berkurang menjadi 304 termasuk 117 organisasi yang terbina. Capaian target yang direncanakan 37,98%. Dengan demikian capaian target tahun 2017 adalah 38,49% (117 dibanding 304), dengan capaian kinerja 101,33% (37,98% dibanding 38,49%) penurunan jumlah data organisasi yang terdaftar pada tahun 2017 ini dikarenakan banyak ormas yang saat dilakukan monitoring sudah tidak ada lagi sehingga tidak sesuai dengan data di Kantor Kesbangpol.

Keberhasilan kinerja indikator capaian sasaran ini dikarenakan terjalannya komunikasi dan kerjasama yang baik antara ormas dan pemerintah untuk terciptanya situasi yang kondusif. Kedepan monitoring keberadaan Orpol, Ormas dan LSM sangat diperlukan agar data Orpol, Ormas dan LSM setiap tahunnya dapat terupdate. Sehingga pemantauan perkembangan kinerja ormas dalam menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang stabil dan kondusif dapat tercapai. karena seringkali perubahan atau pergantian kepengurusan Ormas dan LSM serta pindahnya alamat sekretariat yang tidak selalu dilaporkan.

b). Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- Rasio Satpol PP per 10.000 Penduduk

Dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

Pada tahun 2017 Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sebanyak 195 dibandingkan jumlah penduduk Kota Kediri sebesar 290.147 sehingga rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk adalah sebesar 6,72. Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5,23 dari jumlah Satpol PP sebesar 165 dibanding jumlah penduduk sebesar 315.553.

Kinerja satpol PP salah satunya ditunjukkan oleh penurunan pelanggaran Perda. Pada tahun 2016 pelanggaran Perda sebanyak 267 pelanggaran sedangkan tahun 2017 terjadi 134 pelanggaran perda. Bila dibandingkan tahun sebelumnya pelanggaran Perda Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 133 pelanggaran perda atau sebesar 49,81% dari target sebesar 47% sehingga diperoleh Capaian Kinerja sebesar 94,35% indikator ini mencapai kesimpulan Berhasil. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target tersebut antara lain :

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan Perda/Peraturan Walikota/SK Walikota;
 - Memberikan pembinaan kepada PK5, Pemilik Tempat-tempat Hiburan, Hotel dan Kos serta pihak yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Daerah;
 - Memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui seksi Pengembangan Kapasitas dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
 - Meningkatkan kemampuan dan mobilitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembenahan sarana dan prasarana;
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas atau instansi lain dalam rangka mengamankan dan menegakkan Perda/Peraturan Walikota/SK Walikota;
 - Meningkatkan Patroli Wilayah secara rutin dan Operasi Gabungan dengan TNI/Polri serta Instansi terkait dalam upaya menurunkan pelanggaran Peraturan Daerah.
- **Menurunnya Tingkat Pelanggaran Perda**
- Pada tahun 2016 terjadi pelanggaran Perda sebanyak 267 pelanggaran sedangkan tahun 2017 terjadi 134 pelanggaran perda. Bila dibandingkan tahun sebelumnya pelanggaran Perda Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 133 pelanggaran perda atau sebesar 49,81%.
- Terhadap hal tersebut upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat pelanggaran Perda antara lain :
1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan Perda/Peraturan Walikota/SK Walikota;
 2. Memberikan pembinaan kepada PK5, Penambang Pasir, dan Pemilik Tempat-tempat Hiburan;
 3. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka peningkatan SDM;
 4. Meningkatkan kemampuan dan mobilitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembenahan sarana dan prasarana;
 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas atau instansi lain dalam rangka mengamankan dan menegakkan Perda/ Peraturan Walikota/SK Walikota;
 6. Meningkatkan Patroli Wilayah secara rutin dan Operasi Gabungan dengan TNI/Polri serta Instansi terkait dalam upaya menurunkan pelanggaran Peraturan Daerah.

- **Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 1.000 Penduduk**

Penyelenggaraan kemanaan, ketentraman dan ketertiban umum melalui pemberdayaan masyarakat dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling.

Pada Tahun 2017 Rasio Jumlah Satuan Linmas per 1.000 penduduk sebesar 5,07 yaitu dari jumlah Satuan Linmas yang ada sebesar 1.470 dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2017 sebesar 290.147 jiwa. Data jumlah penduduk ini mengacu pada DKB (Data Konsolidasi Bersih) dari pemerintah pusat.

Rasio Jumlah Satuan Linmas per 1.000 penduduk mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 4,50 dari jumlah Sat Linmas sebesar 1.420 dibanding jumlah penduduk sebesar 315.553 di tahun 2016. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio satuan linmas mengalami kenaikan sebesar 0,57 per 1.000 penduduk pada tahun 2016. Hal ini mengingat laju perkembangan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah Satlinmas dimana untuk dapat direkrut menjadi Satlinmas harus memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Adapun usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Melakukan pembenahan sarana dan prasarana, serta pemberian operasional sesuai beban kerja kepada anggota Satuan Linmas;
2. Mengadakan sosialisasi tentang Linmas dan pemberian operasional ke anggota Linmas;
3. Mengkoordinasikan dengan kelurahan terkait perekrutan anggota Satlinmas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
4. Memperbaiki koordinasi dan komunikasi secara rutin dengan pihak kelurahan.

Tabel 2.35.

Kinerja Aspek Penyelenggaraan Ketertiban Umum

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	73	68	108	165	195
2.	Jumlah Penduduk	267.310	293.282	312.999	315.553	290.147
3.	Rasio Satpol per 10.000 penduduk	2,73	2,32	3,45	5,23	6,72
4.	Jumlah Pelanggar Perda	52	48	428	267	134
5.	Menurunnya tingkat pelanggaran Perda	55,31	51,06	47,92	37,62	49,81

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Kediri

6). Urusan Sosial

Urusan sosial diarahkan untuk meningkatkan mutu dan cakupan layanan sosial kepada masyarakat. Selain pemberian bantuan pada masyarakat miskin, Pemerintah Kota Kediri juga melakukan pelayanan rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan terhadap PMKS untuk memberikan motivasi dan perubahan sikap mental PMKS dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Jumlah PMKS di Kota Kediri pada di tahun 2017 sebanyak 4.700 jiwa atau terealisasi sebesar 1,62 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2017 sebesar 290.147 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah PMKS Tahun 2015 dan 2016, Jumlah PMKS Kota Kediri Tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 25 jiwa, dimana jumlah PMKS tahun 2015 dan 2016 sebanyak 4.725 jiwa.

Tingginya komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menjaga konsistensi dalam pelaksanaan strategi penurunan PMKS di Kota Kediri, yakni dalam bentuk penyediaan layanan rehabilitasi sosial. Diantaranya pemberian bantuan serta pelatihan ketrampilan kepada PMKS. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan semangat pemberdayaan ekonomi produktif para PMKS sehingga mereka bisa mandiri dan meningkat derajat perekonomiannya. Disamping itu tingginya motivasi dan perubahan sikap mental PMKS dalam meningkatkan taraf hidupnya juga turut berperan sebagai akselerator keberhasilan penurunan PMKS di Kota Kediri. Disamping itu sinergitas antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga salah satu faktor pendukung keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam penanganan PMKS di Kota Kediri.

Berikut kinerja aspek pelayanan umum bidang sosial di Kota Kediri tahun 2013-2017 :

Tabel 2.36.
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Kediri
Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	PMKS yang dibantu	3.154	3.135	4.725	4.725	4.700
2.	Jumlah PMKS	5.796	4.755	4.725	4.725	4.700
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	54,40	65,93	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kota Kediri

7). **Urusan Tenaga Kerja**

Penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Kediri diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan jumlah penduduk bekerja. Peningkatan nilai investasi yang cukup tinggi pada tahun 2017 sebesar 79,96% berpengaruh dalam penyerapan angkatan kerja di Kota Kediri. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Kediri pada tahun 2017 menurun signifikan dari 8,46% pada tahun 2015 menjadi 4,68% pada tahun 2017 dan berhasil dibawah TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 4,00%.

Pemerintah Kota Kediri terus berupaya meningkatkan kompetensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja siap pakai melalui peningkatan pelatihan ketrampilan tenaga kerja. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2.569 angkatan kerja di Kota Kediri yang mendaftar untuk mendapatkan AK-1 (Kartu Kuning). Dari angkatan tersebut, sebanyak 3041 pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota Kediri maupun yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) yang ada di Kota Kediri.

Tabel 2.37.
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan
Kota Kediri Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,99	-	8,46	8,46	4,68
2.	% tenaga kerja yang mendapat pelatihan	-	(1.112 orang)	72,80 (1.234/1.695)	77,59 (1.800/2.320)	118,37 (3.041/2.569)
3.	Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	-	-	75,70 (25.489/33.670)	77,31 (25.609/33.125)	85,31 (28.259/33.125)
4.	% penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun	100 (3 kasus)	100 (1 kasus)	100	100 (3 kasus)	100 (3 kasus)

Sumber : Dinas Sosial Kota Kediri, Dinkopnaker Kota Kediri

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Kediri terus meningkatkan sosialisasi serta pembinaan Norma Jamsostek terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Kediri. Hal ini memberikan dampak positif pada peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, yaitu sebanyak 28.259 tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2017 dibanding tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS pada tahun 2016 sebanyak 25.609 jiwa.

Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mengedukasi pengusaha dan juga tenaga kerja terhadap kewajiban dan hak masing-masing sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku ditunjukkan dengan minimnya perselisihan industrial yang terjadi. Berbagai upaya sosialisasi peraturan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri maupun pemantauan serta pengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di seluruh perusahaan yang ada di Kota Kediri cukup efektif dalam meningkatkan harmonisasi hubungan antara berbagai elemen serikat pekerja dengan manajemen perusahaan selaku kepanjangan tangan dari para pengusaha yang ada di Kota Kediri.

8). **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk melaksanakan pembangunan berwawasan gender salah satunya dengan meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Pada tahun 2017 di Kota Kediri terdapat 40 kasus KDRT yang terdokumentasi/ dilaporkan, dibanding jumlah rumah tangga yang ada sebanyak 113.896 keluarga atau rasio KDRT sebesar 0,035%. Tingginya rasio KDRT pada tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya ada 2 kasus KDRT yang terdokumentasi/ dilaporkan. Hal ini didorong oleh makin meningkatnya peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) yang terbentuk di 46 Kelurahan se-Kota Kediri, keberadaan rumah kemitraan/rumah curhat yang tersebar di 3 Kecamatan Kota Kediri, untuk secara intensif mensosialisasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perda Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perda Kota Kediri

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kota Layak Anak, sehingga masyarakat tidak lagi merasa canggung untuk melaporkan adanya kasus KDRT. Adapun penanganan kasus apabila telah terjadi KDRT dilaksanakan secara sinergis bersama stakeholder terkait melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kota Kediri.

Atas upayanya dalam melaksanakan pembangunan gender Pemerintah Kota Kediri berhasil memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pratama pada tahun 2016 dan tahun 2017. Kinerja keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38.
**Kinerja Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kota Kediri, Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio KDRT	0,018	20	0,022	0,0008	0,035
	Jumlah KDRT	11	18	9	2	40
	Jumlah RT	62.192	87.770	117.185	124.150	113.896
2.	Prosentase Kejadian Kasus KDRT yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase capaian indikator Kota Layak Anak	-	-	54,84% (17/31)	54,84% (17/31)	54,84% (17/31)

Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri

Percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Kediri dulunya diawali dengan dilaksanakannya Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yaitu dengan mengintegrasikan konsep gender pada perencanaan program dan kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Dengan dilaksanakannya PPRG diharapkan program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat lebih mengarah pada kebutuhan dan kepentingan perempuan dan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan bagian dari implementasi PUG di daerah. Pemerintah Kota Kediri sangat concern pada penanganan permasalahan anak dan perwujudan kota yang ramah anak salah satunya dengan diterbitkannya Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Selain itu Pemerintah Kota Kediri juga terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan, antara lain selain melalui Satgas PPA di tingkat Kelurahan, juga pembentukan Satgas Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan Seksual Anak (Satgas GM AKSA) sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual anak serta dalam rangka mewujudkan lingkungan yang nyaman untuk anak.

Atas upayanya dalam memenuhi hak dan perlindungan anak Pemerintah Kota Kediri memperoleh apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama pada tahun 2015 dan diperoleh kembali pada tahun 2017. Dari 31 Indikator KLA berdasarkan Permeneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, sebanyak 17 indikator berhasil dicapai oleh Pemerintah Kota Kediri atau sebesar 54,84%.

Keberhasilan ini dicapai melalui tahapan pengembangan KLA di Kota Kediri yang diawali dengan Pembentukan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2015 disusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak sebagai roadmap penyelenggaraan kebijakan KLA di Kota Kediri untuk mempercepat perwujudan Kota Kediri sebagai Kota Layak Anak.

9). **Urusan Pangan**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Ketersediaan pangan di Kota Kediri yang beranekaragam diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Gizi, yang bertujuan untuk mengkonsumsi pangan yang beranekaragam serta mengurangi ketergantungan pada satu bahan pangan yaitu beras. Hal ini diharapkan berdampak pada meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat menuju pangan yang Beragam, Bergizi dan Berimbang atau 3B.

Secara kumulatif ketersediaan pangan di Kota Kediri sudah lebih dari cukup dan beraneka ragam. Hal ini ditunjukkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) diatas standar Nasional berdasarkan analisis Neraca Bahan Makanan, serta stok cadangan pangan sesuai standar pelayanan minimal kota.

Ketersediaan energi dan protein perkapita perhari adalah parameter dari kemampuan daerah dalam penyediaan pangan dari hasil produksi dalam daerah, pemasokan pangan dan pengelolaan cadangan pangan yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya, yang diukur melalui analisis Neraca Bahan Makanan (NBM).

AKE Kota Kediri tahun 2017 berada diatas standar nasional AKE sebesar 2400 kkal/kap/hari, yaitu mencapai 2.688 kkal/kap/hari. Prosentase AKE kota Kediri dibanding standar nasional sebesar 112%. Begitu pula untuk Angka Kecukupan Protein (AKP) diperoleh hasil yang lebih tinggi yaitu 77,3 gr/kap/hari dibanding standar AKP nasional sebesar 63 gr/kap/hari. Prosentase AKP kota Kediri dibanding standar nasional sebesar 122,7%. Sehingga prosentase ketersediaan Energi dan Protein Perkapita untuk tahun 2017 adalah 129%.

Sementara itu data yang diperoleh dari BULOG selaku instansi terkait yang menangani stok pangan, untuk wilayah Kota Kediri pada tahun 2017 tersedia stok cadangan pangan kondisi darurat sebesar 100 ton sesuai batas minimal cadangan pangan yang harus disediakan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal adalah sebesar 100 ton ekuivalen beras di tingkat Kabupaten/Kota.

Pemenuhan ketersediaan pangan di Kota Kediri antara lain dilakukan melalui pengembangan cadangan pangan, penyusunan database potensi pengembangan pangan, serta pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Perkembangan kinerja peningkatan ketahanan pangan di Kota Kediri selama tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39.
Kinerja Ketahanan Pangan Kota Kediri, Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)	116,67	116,87	112
2	Penguatan cadangan pangan (ton)	100	100	100
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah (%)	90,59	91,33	94,67
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	90,2	91,1	92,1
5	Penangan daerah rawan pangan (%)	66,67	75	75
6	Skor pola Pangan Harapan (PPH) (%)	81,5	87	87

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

10). **Urusan Lingkungan Hidup**

Dalam urusan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Kediri menitikberatkan pembangunan pada pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap memperhitungkan daya dukung lahan dengan sasaran program dan kegiatan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber air, peningkatan kualitas dan akses informasi SDA, pencegahan dan penanggulangan dampak polusi guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta penanganan sampah perkotaan.

Kinerja Aspek Pelayanan Umum Bidang Lingkungan Hidup Kota Kediri pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40.
Aspek Pelayanan Umum Bidang Lingkungan Hidup Kota Kediri

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	% Penanganan sampah	95,91	99,37	82,02	87,42	87,42
2.	Pencemaran status mutu air	12,36	12,36	-	-	-
	Udara	-	-	0	0	0
	Air Sumur	-	-	0	0	2
	Air Sungai	-	-	13	9	5
	Air Limbah Industri	-	-	22	8	7
3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	20	20	-	-	-
4.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	13,92%	57,57%	89,03%	90,63%	90,63%

Sumber : DLHKP Kota Kediri

Penanganan sampah di Kota Kediri dilakukan pada beberapa sarana pengelolaan sampah, antara lain pada 36 TPS, 5 TPS 3R dan 1 TPA.

Atas upaya Pemerintah Kota Kediri dalam mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2016 volume sampah yang ditangani mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu dari 205.293,61 m³ pada tahun 2015 menjadi 172.765,27 m². Pengelolaan sampah dilakukan antara lain : (1). Dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya prinsip 3R yaitu reduksi (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*), baik di lingkungan rumah tangga, sekolah, maupun perkantoran; (2)

peningkatan kapasitas pemulung dan lapak; (3) pengomposan yang berbasis masyarakat, dan pemilahan atau bahkan pengolahan sampah sejak dari hulu sehingga diharapkan dapat mengurangi volume buangan sampah ke TPA Klotok di Kelurahan Pojok; (4) pembentukan dan pembinaan Bank Sampah di masing-masing RT, serta melakukan remediasi (penambangan) sampah pada zona yang aktif.

Penurunan volume sampah dan produksi sampah selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41.
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014*	2015	2016
1	Jumlah sampah yang ditangani (m ³)	640,46	659	680	168.392	151.032
2	Jumlah Volume Timbunan Sampah (m ³)	756	778	709	205.293	172.765
3	Persentase Sampah yang ditangani (%)	84,72	84,70	95,91	82,02	87,42

Sumber : DLHKP Kota Kediri

11). **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Peningkatan pelayanan publik dengan pemenuhan standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah yang tinggi merupakan salah satu komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu masalah yang perlu dicermati dan diperhatikan untuk mewujudkan sistem *good governance* adalah masalah demografi (kependudukan). Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42.
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Kediri, Tahun 2013-2017**

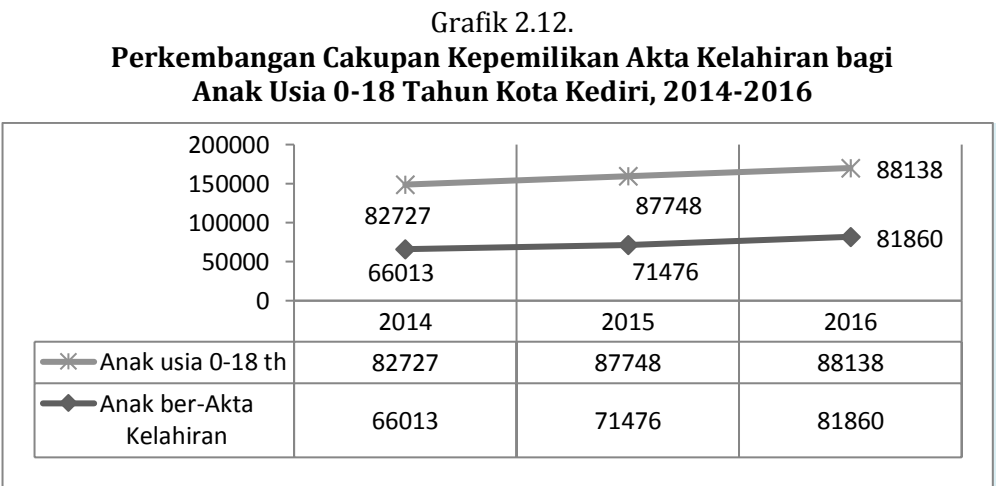
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	85	75	87	90,92	90,73
	Penduduk Usia > 17 yang ber KTP (jiwa)	169.145	192.470	203.310	214,544	193.030
	Penduduk wajib memiliki KTP	198.994	218.671	233.689	235.972	212.729
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	99,33	95,83	94,72	98,00	98,25
	Bayi lahir yang ber-akta	2.081	6.348	3.138	3.290	6.414
	Jumlah Kelahiran	2.095	6.624	3.313	3.357	6.528
3.	Kepemilikan KK (%)	83,26	83,26	82,76	82,19	94,94
	Penduduk yg. Memiliki KK	87.871	92.386	96.987	102.041	90.569
	Penduduk wajib memiliki KK	105.533	110.836	117.185	124.150	95.396
4.	Kepemilikan KTP El	85	88,01	87	90,92	90,73
	Penduduk yg. Memiliki KTP El	169.145	192.470	203.310	214,544	193.030
	Penduduk Wajib Memiliki KTP El	198.994	218.671	233.689	235.972	212.729

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

Sejak tahun 2010 Pemerintah Kota Kediri telah mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi, serta penggunaan Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi) berbasis web sejak tahun 2016. Aplikasi SAKTI berfungsi sebagai pusat data dan informasi kegiatan administrasi kependudukan di Kota Kediri yang digunakan untuk mendata warga yang akan membuat Akta Kelahiran, Surat Kematian, dan KTP. Aplikasi ini dapat diakses melalui dispendukcapil.kedirikota.go.id/sakti sehingga memudahkan pengajuan pembuatan surat permohonan dokumen kependudukan bagi warga Kota Kediri, karena memungkinkan pendaftaran dan upload dokumen persyaratan pengajuan oleh warga, validasi perubahan susunan Kartu Keluarga oleh Kelurahan dan Kecamatan, validasi pengajuan oleh Kedispendukcapil, hingga upload dokumen kependudukan secara *online*. Bahkan pada tahun 2017 Pemerintah Kota Kediri semakin memberikan kemudahan kepengurusan dokumen kependudukan dengan adanya layanan pengiriman dokumen hingga ke rumah pemohon dengan menggunakan jasa kurir bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia.

Pemerintah Kota Kediri merupakan satu dari 50 Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai *final project* dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada tahun 2017 sebanyak 68.385 anak atau 86,02% telah memiliki Kartu Identitas Anak dari keseluruhan anak yang wajib KIA di Kota Kediri sebanyak 79.487 anak. Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri sebagai salah satu *pilot project* KIA dikarenakan tercapainya cakupan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran sesuai target Nasional. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun di Kota Kediri selama tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan hingga 24,01%. Rasio anak usia 0-18 tahun yang ber-akta kelahiran pada tahun 2014 sebesar 66.013 dari 82.727 anak usia 0-18 tahun yang wajib ber-akta kelahiran atau terealisasi sebesar 79,80%. Pada tahun 2015 cakupan meningkat 8,28%, yaitu sebanyak 71.476 anak usia 0-18 tahun yang ber-akta kelahiran dari 87.748 anak usia 0-18 tahun yang wajib ber-akta kelahiran atau terealisasi sebesar 81,46%. Dan terus meningkat pada tahun 2016 dengan cakupan anak usia 0-18 tahun yang wajib ber-akta kelahiran mencapai 92,88%, yaitu sebanyak 81.860 anak ber-akta kelahiran dari 88.138 anak usia 0-18 tahun yang wajib ber-akta kelahiran.

Perkembangan jumlah kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 di Kota Kediri selama tiga tahun terakhir dapat digambarkan melalui grafik berikut :



Sumber : Dispendukcatpil Kota Kediri

12). Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan diarahkan untuk peningkatan keberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dengan membimbing masyarakat dalam pembangunan dan memberikan stimulan dalam mempercepat proses kemandirian masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Program unggulan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) pada seluruh RT di 46 Kelurahan se-Kota Kediri.

Capaian kinerja program pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi pada tahun 2017 sebesar 100% sesuai dengan yang target yang ditetapkan. Program pemberdayaan masyarakat dari yang telah ditargetkan pada tahun ini bisa terfasilitasi secara keseluruhan. Program-program pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi meliputi : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas). Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) adalah program pemberdayaan yang direncanakan oleh masyarakat dalam lingkup tingkat RT, dilaksanakan oleh masyarakat dan dijaga keberlanjutannya oleh masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per RT per tahun.

Program fasilitasi pemberdayaan masyarakat (Prodamas) pada tahun 2017 meliputi 1442 RT se Kota Kediri. Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya Prodamas adalah :

- Mempercepat proses pembangunan di wilayah Kota Kediri karena pembangunan bisa dilaksanakan secara serempak di seluruh wilayah mulai dari tingkatan yang bawah yaitu dilingkungan RT;
- Bidang infrastruktur / fisik, meningkatnya kualitas infrastruktur di tingkat lingkungan RT yang rata-rata didominasi kegiatan pembangunan ataupun rehab saluran air, paving jalan, poskamling, tempat ibadah, MCK, Dll;
- Bidang Sosial, tercukupinya sarana prasarana yang menunjang kegiatan sosial masyarakat antara lain pengadaan sound sistem, tenda, gerobak sampah, dll serta bantuan makanan tambahan untuk lansia dan bantuan anak sekolah yang berupa peralatan sekolah;
- Bidang Ekonomi, terfasilitasinya kegiatan yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat antara lain kegiatan pelatihan usaha produksi makanan, kerajinan, perikanan, peternakan, serta bantuan peralatan produksi, bantuan bibit perikanan, peternakan, dll.

13). Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2017 sebanyak 290.147 jiwa, mengalami penurunan sebanyak 25.406 jiwa dibanding jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2016 sebanyak 315.553 jiwa.

Sehingga LPP tahun 2017 adalah -0,09% yaitu selisih kenaikan jumlah penduduk sebanyak 25.406 jiwa dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 290.147 jiwa. Adapun target LPP yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 0,93% berhasil terlampaui dengan capaian kinerja sebesar 209,42%.

Keberhasilan program KB sebagai salah satu upaya pengendalian penduduk menyebabkan akses terhadap kontrasepsi meningkat, namun demikian pada tahun 2017 cakupan peserta KB aktif di Kota Kediri mengalami penurunan namun masih sesuai target yang ditetapkan. Jika pada tahun 2012, cakupan peserta KB aktif mencapai 72,89%, di tahun 2017 turun sebesar 70,99%.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk juga dilakukan dengan kampanye penundaan usia perkawinan. Penekanan proporsi perempuan yang menikah kurang dari usia 20 tahun juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak kesehatan yang negatif pada perempuan yang melakukan pernikahan usia dini.

Pada tahun 2017 wanita kawin usia muda (di bawah usia 20 tahun) terealisasi sebesar 0,47%, yaitu sebanyak 201 wanita kawin usia muda (di bawah usia 20 tahun) dibanding keseluruhan PUS yang ada pada tahun 2017 sebanyak 42.911 pasangan. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 0,51%, maka capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan sebesar 107,85%. Hal ini ini tidak terlepas dari adanya kerjasama OPD terkait antara BPPKB Kota Kediri, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, KPAD Kota Kediri, Kementerian Agama Kota Kediri, Dinas Sosial, Insan GenRe Joyoboyo Kota Kediri, anggota maupun pengurus Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (SMP, MTs, SMA, SMK, MA, PT, masyarakat) se-Kota Kediri dan didukung terbitnya Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja. Pengendalian tersebut didukung oleh adanya kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa Kota Kediri seperti sosialisasi, kordinasi, Pelatihan Pendidik Sebaya, Pelatihan Konselor Sebaya, serta Pelatihan Life Skill seperti membuat blog/web, cetak pin/gantungan kunci, sablon souvenir, id card press mug, dll.

Bahkan, atas keberhasilan dalam menjalankan program generasi remaja, Kota Kediri berhasil memperoleh Juara 1 Penghargaan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Jalur Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Timur, serta Juara 3 PIK-R Jalur Pendidikan Tingkat Nasional yang diraih oleh PIK-R SMADAH CARE SMA Pawyatan Daha Kota Kediri.

Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Kediri selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43.
**Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Kediri Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	-	0,96	0,70 (1.974/ 280.004)	-0,09 (25.406/ 290.147)
2.	Cakupan peserta KB aktif	73,02	72,38	72,90	68,87	68,87
	Jumlah peserta KB Aktif	34.670	30.608	31.146	29.706	29.911
	Jumlah PUS	47482	42.289	42.726	43.134	42.133
3.	Jumlah Wanita Kawin Usia di bawah 20 tahun	0,63 (297/ 47.482)	0,53 (223/ 42.289)	0,41 (174/ 42.726)	0,51 (218/ 43.134)	0,47 (201/ 42.911)

Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri

14). **Urusan Perhubungan**

Pembangunan di bidang perhubungan dapat mempengaruhi kelancaran di berbagai bidang dan lintas sektoral. Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, baik kendaraan roda dua maupun roda empat serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.

Di Kota Kediri saat ini terdapat beberapa ruas jalan yang tingkat pelayanannya kurang memadai, meliputi jalan arteri primer, arteri sekunder dan jalan kolektor primer. Kondisi layanan angkutan umum berbasis jalan dapat dilihat dari tren arus penumpang masuk dan keluar di Terminal Tamanan yang fluktuatif pada tahun 2012-2015 dan cenderung menurun. Namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan signifikan sebanyak 726.181 penumpang dari 681.856 penumpang pada tahun 2015. Hal ini merupakan wujud upaya Pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan kelayakan dan kenyamanan terminal melalui perbaikan dan rehabilitasi fasilitas terminal penumpang serta peningkatan akses dan mobilitas penumpang melalui penambahan 3 rute angkutan umum perkotaan berbasis Bus Rapid Transit berdasarkan Peraturan Walikota Kediri No. 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Bus Rapid Transit, yaitu :

- a. Koridor I (Terminal Tamanan – Jalan Merbabu);
- b. Koridor II (Pasar Bawang – Jalan Sersan Suharmaji);
- c. Koridor III (Terminal Tamanan – Blabak).

Penambahan 3 trayek angkutan umum baru sebagai tindak lanjut bantuan 3 (tiga) unit Bus Pelajar dari Pemerintah Pusat pada tahun 2016 serta adanya program angkutan gratis bagi pelajar melalui subsidi BBM kepada angkutan kota yang telah berjalan sejak tahun 2015, berpengaruh pada peningkatan Rasio Ijin Trayek, yaitu sebesar 44,44 pada tahun 2015 menjadi 58,33 pada tahun 2016. Dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor, maka jumlah uji kir angkutan umum periode dua tahun terakhir mengalami peningkatan dari 188 menjadi 191. Tarif biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama dua tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp.35.000,00 untuk Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) JBB 35.000 kg. demikian juga tarif biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama dua tahun terakhir untuk jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) JBB 35.000 kg tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.45.000,00. Dalam kondisi normal, waktu pengerjaan uji kir rata-rata 30 menit per kendaraan.

Dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan di wilayah Kota Kediri, Dinas Perhubungan setiap tahun melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah maupun rambu petunjuk. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan serta pengamanan lalu lintas juga terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan keselamatan dan kenyamanan transportasi di Kota Kediri. Transportasi kereta api yang ada di Kota Kediri secara umum digunakan untuk menunjang arus lalu lintas kereta api wilayah timur Pulau Jawa.

Secara lengkap data perkembangan pelayanan umum bidang perhubungan di Kota Kediri pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.44.
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan
Kota Kediri, Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	903.950	903.950	681.856	726.181	1.024.239
2.	Rasio ijin trayek	48,54	48,54	40	58,33	66,67
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	144	144	188	216	191
4.	Lama Uji KIR (menit)	30	30	30	30	30
5.	Biaya Uji KIR : Mobil penumpang JBB ≤35000 kg	Rp.35Rb	Rp.35Rb	Rp.35Rb	RP. 35Rb	RP. 35Rb
	Mobil penumpang JBB ≥35000 kg	Rp.45Rb	Rp.45Rb	Rp.45Rb	Rp. 45Rb	Rp. 45Rb
4.	Jumlah Terminal Bis	1	1	1	1	1
5.	Angkutan darat	143.733	143.733	159.647	166.998	161.409
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	15	15	32	51	52
7.	Pemasangan Rambu	1.322	1.322	583	1.065	1.187

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri

15). **Urusan Komunikasi dan Informasi**

Kemajuan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang berperan memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait berita, permasalahan dan informasi yang membangun mendorong munculnya globalisasi dalam berbagai perspektif yang ada. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi baik media cetak seperti surat kabar maupun media elektronik seperti radio, TV Lokal maupun kepemilikan website.

Tabel 2.45.
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Kediri Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	6	6	9	32	48
2.	Jumlah penyiaran radio/TV local	5-4	6-5	5-5	7-13	7-14
3.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

16). **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Pemerintah Kota Kediri memfasilitasi pengembangan koperasi dan usaha mikro melalui program penyertaan modal bergulir, yaitu kemudahan bagi pengusaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal dengan bunga ringan melalui lembaga keuangan/perbankan yang dijamin oleh Pemerintah. Jumlah pemohon perkuatan permodalan KUMKM yang disetujui pada tahun 2017 adalah sebanyak 15 dari 19 KUMKM yang mengajukan atau terealisasi 78,95%. Sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2017 sebesar 78%,57, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,48%.

Keberhasilan program penyertaan dana bergulir menimbulkan dampak positif semakin bertambahnya jumlah UKM berkualitas di Kota Kediri. UKM berkualitas dalam dalam hal ini didefinisikan sebagai UKM yang kompetitif, yang diukur melalui peningkatan kualitas produksi, jalur distribusi yang digunakan, lingkup pemasaran, peningkatan omset dan aset, kualitas manajemen usaha, dan inovasi.

Selain UKM, keberadaan koperasi sebagai salah satu usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang bisa dirasakan sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat di Kota Kediri juga terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2017 jumlah koperasi sehat sebanyak 355 koperasi. Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebanyak 209 koperasi. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 169,86%.

Apabila dibandingkan dengan jumlah koperasi sehat pada tahun 2016 sebanyak 177 koperasi, pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 178 koperasi menjadi 355 koperasi. Kinerja pelayanan umum bidang koperasi dan usaha mikro di Kota Kediri selama tahun 2013-2017 dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46.
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Kediri Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah UKM berkualitas	-	-	180	195	205
2.	% Koperasi berkualitas	35,60	50,55	56,46	41,01	59,20
3.	Jumlah KUKM yang mengakses penyertaan modal	62,50	-	85,51	76,67	78,95

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

17). **Urusan Penanaman Modal**

Upaya yang dilakukan untuk mendorong penanaman modal di Kota Kediri dilakukan melalui promosi potensi daerah, perbaikan regulasi perijinan termasuk penyederhanaan proses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kesiapan infrastruktur sampai dengan perwujudan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha.

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting dan menimbulkan *multiplier effect* bagi sistem perekonomian daerah. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai salah satu pelaku ekonomi dirasa semakin penting, sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap dan menciptakan lapangan kerja dan mendayagunakan sumber daya lokal dalam proses produksi.

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal tidak bisa terlepas dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri di

suatu daerah maka semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Penanaman modal di Kota Kediri pada dua tahun terakhir tidak menunjukkan adanya peningkatan, yaitu jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 53 investor dengan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar Rp.689.292.500.000,00.

Tabel 2.47.

**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal
Kota Kediri, Tahun 2013-2017**

Uraian		Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
Tahun	2013	24	199.632.000.000	(230.444.051.747)
	2014	53	2.128.699.000.000	174.804.000.000
	2015	53	689.292.500.000	(1.439.406.500.000)
	2016	53	689.292.500.000	-
	2017	57	689.292.500.000	-

Sumber : DPM PTSP Kota Kediri

18). Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda sebagai generasi penerus harus mampu menunjukkan eksistensinya melalui berbagai prestasi di semua bidang dan ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk olahraga perlu digali atlet dan cabang olahraga daerah yang menonjol dan berprestasi untuk dibina dan dikembangkan sehingga dapat mengangkat nama daerah.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui bekerjasama dengan KONI Kota Kediri dan Organisasi persatuan olahraga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul atlet daerah yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Pembangunan pemuda dan olah raga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda melalui even seleksi pemuda berprestasi yaitu pemuda pelopor.

19). Urusan Kebudayaan

Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya diperlukan sebagai upaya melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya adat masyarakat serta pengembangan kesenian daerah sekaligus menjadi daya tarik wisata daerah.

Urusan kebudayaan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya daerah melalui pemeliharaan situs-situs sejarah dan penyelenggaraan even budaya. Untuk menjaga kekayaan seni dan budaya daerah maka harus ada upaya untuk memelihara keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya.

Festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Kediri pada tahun 2017 adalah sebanyak 73 kegiatan, meningkat 4 kegiatan jika dibandingkan penyelenggaraan event tahun 2016.

20). **Urusan Perpustakaan**

Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan Indeks Minat Baca masyarakat. Indeks ini menggambarkan tendensi penduduk suatu wilayah untuk membiasakan diri membaca.

Data UNESCO menyebutkan bahwa Indeks Minat Baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu berkisar 0,001%. Artinya, dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Sejalan dengan data tersebut, riset berbeda bertajuk *Most Littered Nation In the World* yang dilakukan oleh *Central Connecticut State Univesity* pada bulan Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara terkait minat membaca.

Rendahnya minat membaca tidak hanya dipengaruhi oleh infrastruktur seperti ketersediaan perpustakaan, perpustakaan keliling maupun taman baca, melainkan juga harus dilakukan pembiasaan anak membaca sejak dini. Pembiasaan ini akan menjadi karakter dan apabila dipupuk terus maka akan terwujud budaya baca. Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat dan budaya baca khususnya pembiasaan membaca siswa di sekolah, Pemerintah Kota Kediri mencetuskan program literasi sekolah, yaitu penyediaan pojok buku di masing-masing kelas dalam rangka membiasakan siswa untuk membaca.

Infrastruktur terus ditingkatkan dengan keseluruhan perpustakaan yang ada di Kota Kediri pada tahun 2017 sebanyak 177 perpustakaan, meliputi perpustakaan umum, perpustakaan di kelurahan dan perpustakaan di sekolah. Dari total 177 perpustakaan tersebut, seluruhnya telah memiliki tenaga pengelola yang mempunyai kemampuan teknis pengelolaan perpustakaan. Pengembangan Taman Baca Masyarakat yang tersebar di 46 Kelurahan serta adanya layanan Perpustakaan Keliling pada sekolah-sekolah maupun fasilitas umum seperti taman kota dan tempat wisata di Kota Kediri juga diintensifkan. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan penunjang seperti kunjungan anak TK/PAUD ke perpustakaan, kunjungan ke Lembaga Pemasarakatan, pameran buku, kegiatan lomba, penambahan koleksi buku, otomasi pelayanan, serta layanan perpustakaan hari sabtu, dan kegiatan membaca kreatif lainnya.

Harapannya persentase minat baca di perpustakaan terus akan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan dari sebanyak 24.151 orang pada tahun 2016 menjadi 184.880 orang pada tahun 2017.

21). **Urusan Kearsipan**

Penyelenggaraan tata kearsipan yang baik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri ditunjukkan dengan keseluruhan 85 OPD di Kota Kediri telah menerapkan penyimpanan dan pengelolaan arsip secara baku atau mencapai 100%. Dari total 85 OPD seluruhnya telah menerapkan penyelamatan dan pelestarian arsip sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan bimbingan teknis kearsipan kepada petugas pengarsipan yang ada di seluruh OPD yang ada di Kota Kediri.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1). Urusan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kolam-kolam baru dan penerapan teknologi budidaya dengan sistim Probiotik mendorong keberhasilan peningkatan produksi ikan yang ditunjang dengan adanya rehab UPTD Pembenihan dan Kolam Ikan, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas benih ikan yang bermutu. Produksi Ikan menunjukkan peningkatan sebanyak 43,5 kw yaitu dari 1.859,50 kw menjadi 1.903,00 kw pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.48.
Produksi Ikan Kota Kediri Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Meningkatnya produksi ikan (Kw)	1.390,30	1.498,10	1.506,5	1.859,50	1.903,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

2). Urusan Pariwisata

Pariwisata di Kota Kediri meliputi wisata alam, wisata budaya (wisata religi, cagar budaya) dan wisata minat khusus. Beberapa obyek wisata yang ada di Kota Kediri antara lain :

- a). Wisata Alam : Kawasan Wisata Selomangleng, Dermaga Joyoboyo, Sumber Alam Sumber Bulus, Sumber Cakarsi, Mata Air (sumber) Lo, Gunung Klotok, Sumber Gayam dan Jalan Tembus Lebak Tumpang;
- b). Wisata Budaya : Museum Airlangga (Cagar Budaya dilindungi), Makam Kuno Eyang Boncolono, Komplek Makam Islam Kuno Mbah Wasil, Makam Sunan Geseng, Masjid Aulia Setonogedong, Gereja Merah, Gereja Vicencius, Pura Sekartaji, Klenteng Tri Dharma, Masjid Agung Kota Kediri, Goa Padedean, Goa Selobale;
- c). Wisata Minat Khusus : Taman Wisata Selomangleng, Taman Wisata Paggora, Taman Wisata Tirtoyoso Pabrik Rokok Gudang Garam, Taman Sekartaji, Taman Alun-alun Kota, Soto Bok Ijo.

Jumlah kunjungan wisatawan dapat menjadi ukuran untuk meningkatkan pariwisata daerah maka dari itu perlu dikembangkan obyek-obyek pariwisata daerah untuk menarik kunjungan wisatawan yang merupakan pelecut bagi Pemerintah Kota untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan lagi potensi wisata yang ada agar lebih menarik wisatawan.

Potensi Obyek wisata yang dikembangkan pada Tahun 2017 bertambah sebanyak 2 obyek wisata yaitu Candi Klotok yang terletak di Kelurahan Pojok dan Kampung Tenun di Kelurahan Bandar Kidul.

Kinerja layanan umum bidang pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49.

Kinerja Layanan Umum Pariwisata Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kunjungan wisata	91.571	91.545	264.647	273.564	285.123
2	Meningkatnya potensi obyek wisata (%)	-	-	100%	100%	100%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata (%)	-	-	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri

3). Urusan Pertanian

Upaya untuk melestarikan lahan pertanian yang semakin menyempit sangat diperlukan agar sektor pertanian ini tidak punah oleh adanya alih fungsi lahan yang terus meningkat, sebab oleh itu pembangunan sektor pertanian perlu dilaksanakan untuk lebih meningkatkan partisipasi atau swadaya petani dan masyarakat agar petani dan masyarakat mampu untuk mengembangkan dan menjalankan usahanya secara professional, efisien serta berdaya guna dengan lebih memanfaatkan ilmu dan teknologi secara tepat dan ramah lingkungan. Untuk melihat keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan pertanian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.50.

Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan

No.	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Meningkatnya produksiTanaman Padi (ton)	-	-	12.936	13.225	13.401
2.	Meningkatnya produksi Tanaman Jagung (ton)	-	5.713	5.577	5.618	7.547
3.	Peningkatan produksi tanaman tebu (Kw)	-	1.278.035	1.343.728	1.357.728	1.360.400
4.	Kelompok tani yang dibantu pemasarannya (Klp)	-	-	13	7	7
5.	Kelompok tani yang mengikuti Pelatihan Ketrampilan (%)	-	-	100	59	100
6.	Demplot yang dibuat oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (buah)	-	-	4	4	5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

4). Urusan Kehutanan

Konservasi hutan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi-fungsi dasarnya seperti perlindungan sumber daya alam, tanah dan tata guna air sangat melalui reboisasi hutan. Luasan hutan yang direboisasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.51.
Terwujudnya perlindungan hutan dan sumber daya alam

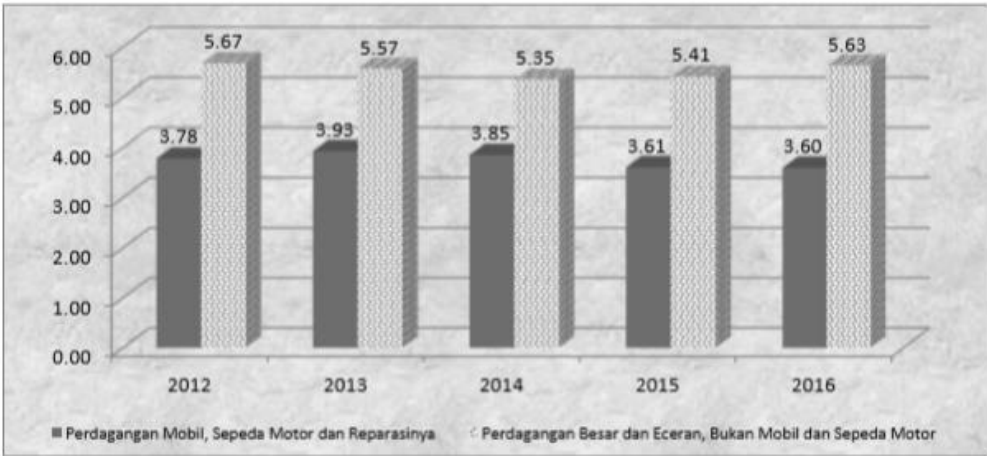
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya areal tanaman hutan yang direboisasi (ha)	-	-	-	115	115

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

5). **Urusan Perdagangan**

Kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 sebesar 9,23%, meningkat jika dibandingkan tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 9,01%. Dalam perhitungan PDRB dengan metode baru, terdapat 2 (dua) subkategori dalam sektor perdagangan yaitu pertama Subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya, kedua Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor. Distribusi Persentase PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor didominasi oleh subkategori Perdagangan Besar dan Eceran dengan pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 6,76 persen sebagaimana gambar dan tabel dibawah ini :

Grafik 2.13.
Distribusi Persentase PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2012 – 2016



Sumber : BPS Kota Kediri

Tabel 2.52.
Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tahun 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,56	6,56	3,57	4,95	6,04
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya	8,75	6,10	3,99	1,31	4,86
2. Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor	11,77	6,86	3,30	7,30	6,76

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Pada tahun 2016 sebagian besar penduduk Kota Kediri bekerja pada sektor usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran. Kota Kediri yang dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur, memiliki aktivitas perdagangan yang difasilitasi oleh beragam pasar tradisional maupun pasar modern, mulai dari Pasar Pagi Kelurahan, Pasar Pasar Setonobetek, Pasar Pahing, Pasar Banjaran, Pasar Induk Buah dan Sayur Ngronggo, pusat perdagangan Jl. Dhoho, Hayam Wuruk Trade Center, Joyoboyo Trade Center, Transmart Kediri Mall, Dhoho Plaza, Kediri Town Square-Hypermart-Matahari, Ramayana, serta sejumlah sentra ekonomi komoditas unggulan lokal daerah.

6). Urusan Perindustrian

Ekonomi masyarakat Kota Kediri lebih dominan digerakkan oleh aktivitas sektor industri dan perdagangan. Kota Kediri terus berupaya meningkatkan peran sektor industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Selain 20 unit Industri besar yang merupakan penyumbang PDRB terbesar untuk sektor industri, di Kota Kediri juga terbentuk jaringan IKM dan industri besar untuk 4 jenis komoditas yaitu furniture, kayu olahan, tenun ikat dan gula pasir. Pemerintah Kota Kediri terus mendorong pertumbuhan sentra industri kreatif lainnya dengan didukung pembentukan Dewan Kerajinan Daerah (DEKRANASDA) Kota Kediri dan Asosiasi Pengrajin Kota Kediri (ASPEKORI).

Sesuai dengan Review Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri Tahun 2014-2019, sasaran strategis urusan perindustrian yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perindustrian Terutama Industri Kreatif.

Pertumbuhan industri di Kota Kediri meningkat cukup signifikan sebanyak 79 unit dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 3.105 unit industri pada tahun 2016 menjadi 3.184 unit di tahun 2017.

Faktor pendorong keberhasilan indikator pertumbuhan industri yaitu :

- a). Adanya peran serta masyarakat untuk bisa mengusulkan program-program pemberdayaan perekonomian di lingkungan tempat tinggalnya melalui program PRODAMAS;
- b). Tumbuhnya Wira Usaha Baru (WUB) terutama industri makanan dan minuman sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang sudah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri;
- c). Mendorong peningkatan kualitas produk dan desain dengan terlaksananya pelatihan seperti workshop desain motif tenun dengan proses pengerjaan yang berbeda menggunakan benang emas dan workshop packaging yang memberikan pengetahuan tentang pengemasan produk sesuai dengan standar SNI;
- d). Pemerintah Kota Kediri terus mendorong pelaku industri untuk berinovasi menciptakan produk baru misalnya dengan mengadakan seminar dan festival tahu yang bekerja sama dengan Omar Niode Foundation serta menghadirkan chef dari Australia dan Italia guna memberikan pengetahuan tentang aneka olahan makanan berbahan dasar tahu khas Kota Kediri sehingga olahan tahu menjadi lebih beragam;
- e). Terlaksananya study banding Aspekmtari IKM mamin di Kota Batu dan Kota Malang yang bertujuan memberikan wawasan kepada IKM tentang proses produksi dan pengemasan produk makanan seperti pia, minuman buah, keripik tempe dan keripik buah;

- f). Meningkatnya pelaku industri yang sudah mengurus izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan serta Hak Merk dari Kemenkum HAM ataupun Sertifikat Halal dari MUI.

Selain itu untuk lebih menguatkan julukan Kediri sebagai Kota Tahu maka, Pemerintah Kota Kediri menciptakan inovasi-inovasi produk unggulan seperti produk Tahu Kaleng Kota Kediri (TAKAKORI) sebagai icon baru produk olahan tahu dalam kemasan kaleng sehingga mempunyai daya tahan yang lebih lama. Dengan adanya TAKAKORI yang mempunyai varian rasa seperti oseng-oseng tahu lombok abang, oseng-oseng tahu lombok ijo dan oseng-oseng tahu mercon diharapkan masyarakat yang berada di luar daerah maupun di luar negeri tetap bisa menikmati produk olahan tahu Kota Kediri.

Pemerintah Kota Kediri terus berupaya mempromosikan tenun ikat dan batik khas Kota Kediri dengan mengikutsertakan dalam *Jakarta Fashion Week* (JFW) dengan menggandeng desainer Hannie Hananto serta Lenny agustine.

Dan untuk lebih memotivasi masyarakat Kota Kediri agar lebih mencintai tenun ikat dan batik khas Kota Kediri, maka Pemerintah Kota Kediri melaksanakan acara “*Dhoho Street Fashion 2nd*” dengan menampilkan karya-karya dari desainer dan Siswa SMK wilayah Kota Kediri serta karya dari desainer Hannie Hananto (mewakili pecinta muslim fashion) dan Lenny Agustine (mewakili fashion dengan kesan *chic* dan *fancy*) yang sebelumnya sudah ditampilkan dalam *Jakarta Fashion Week* (JFW).

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang

1). Urusan Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan reformasi birokrasi Otonomi Daerah merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat, penguatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui implementasi SAKIP yang direpresentasikan oleh nilai SAKIP, dan Adapun perwujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya melalui penetapan produk hukum daerah. Sementara itu, peningkatan laba BUMD yang berkontribusi pada sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diupayakan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

a). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan penyelenggara berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Metode survey IKM mengacu pada SK Menpan No.Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Unsur layanan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat mencakup 14 indikator yaitu : prosedur layanan, persyaratan layanan, kejelasan petugas layanan, kedisiplinan petugas layanan,

tanggungjawab petugas layanan, kemampuan petugas layanan, kecepatan layanan, keadilan layanan, kesopanan dan keramahan layanan, kewajaran biaya layanan, kepastian biaya layanan, kepastian jadwal layanan, kenyamanan layanan, dan keamanan layanan.

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan layanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Dengan kata lain IKM merupakan data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil survey IKM tahun 2017, Nilai IKM Kota Kediri adalah B. Nilai IKM ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan nilai IKM tahun 2016 dengan dengan kategori B juga.

Keberhasilan pencapaian nilai IKM didorong oleh adanya komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk dilakukannya pengukuran IKM. Kedepan guna meningkatkan nilai IKM koordinasi antar PD terkait akan lebih ditingkatkan lagi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b). Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 seluruh PD di lingkup pemerintahan daerah wajib melaksanakan SAKIP pada kelembagaannya.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dari Propinsi Jawa Timur yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan diketuai oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun anggota Tim Evaluasi SAKIP terdiri dari PD terkait dan instansi lain sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2014 serta unsur dari Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kepemimpinan dan RB.

Tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk menilai akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2017 sebesar 60,90 atau dengan predikat penilaian B (baik). Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang cukup memadai dan masih memerlukan beberapa perbaikan. Namun demikian pencapaian nilai SAKIP pada tahun 2017 ini merupakan pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Dimana pada

tahun 2012-2014 hasil evaluasi SAKIP menunjukkan predikat D, dan tahun 2015 baru mencapai predikat C dan 2016 CC.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP dalam upaya lebih mengoptimalkan implementasi SAKIP di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kediri, langkah perbaikan yang harus segera dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah;
- Meningkatkan pemahaman SAKIP di tiap PD melalui workshop dan pelatihan-pelatihan;
- Meningkatkan kualitas dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Meningkatkan kualitas dokumen Perjanjian Kinerja;
- Meningkatkan kualitas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
- Meningkatkan kualitas evaluasi internal terhadap penyelenggaraan SAKIP;
- Melakukan monitoring pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

c). Persentase Penetapan Produk Hukum Daerah

Salah satu indikator dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah persentase penetapan produk hukum daerah. Untuk tahun 2017 jumlah draft produk hukum yang diajukan untuk ditetapkan adalah sebanyak 75 buah dan semuanya ditetapkan seluruhnya atau 100%. Hal ini didukung dengan adanya kerjasama, koordinasi dan intensifikasi pembahasan yang baik dengan PD yang mengajukan produk hukum.

d). Peringkat LPPD

Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri yang dilakukan dan direlease pada Tahun 2017 adalah **3,1545 (*Sangat Tinggi*)**. Pemerintah Kota Kediri menduduki peringkat 12 dari 38 pemerintah Daerah di Jawa Timur, dan 15 besar Tingkat Nasional. Naik empat peringkat dari tahun 2016, Nilai yang diperoleh tahun 2016 sebesar 3,0615 pada peringkat 16 dari 38 Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Dengan kenaikan nilai capaian ini semakin memacu kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Kediri untuk dapat menembus lima besar peringkat terbaik di Jawa Timur.

Capaian EKPPD Kota Kediri tahun 2017 merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir, dimana selama tahun 2013-2016 capaian LPPD Pemerintah Kota Kediri masih berada pada kategori “tinggi”. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Kediri perlu terus ditingkatkan capaiannya agar bisa menembus lima besar peringkat terbaik di Jawa Timur. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Kediri antara lain :

- Meningkatkan kinerja terhadap capaian kinerja yang skornya berprestasi R (Rendah) dan S (Sedang) dari hasil EKPPD;

- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam LPPD pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan;
- Melakukan monitoring pencapaian IKK secara periodik.

e). BUMD yang Menetapkan GCG

Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan PAD sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya alam yang dimilikinya.

Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah Kota Kediri telah berupaya dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan bagian laba dari BUMD.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan dan dibina oleh Pemerintah Kota Kediri antara lain :

- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR); dan
- Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar).

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, utamanya Pasal 343 tentang Pengelolaan BUMD menegaskan bahwa Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi BUMD untuk mengelola perusahaan dengan baik dengan mengimplementasikan GCG dalam pengelolaan perusahaan.

Penerapan azas GCG yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ini meliputi sejumlah prinsip dasar antara lain transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajiban. *Transparansi atau keterbukaan*, bisa diwujudkan melalui penyediaan informasi yang relevan serta dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, penerbitan laporan-laporan secara berkala dan tepat waktu, serta publikasi informasi publik melalui media cetak maupun elektronik. *Akuntabilitas*, dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Prinsip GCG juga mensyaratkan bahwa perusahaan selalu memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ atau divisi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak maupun bidang lain.

f). Peningkatan Jumlah Laba BUMD

Indikator kinerja pembinaan terhadap layanan BUMD diukur dengan membandingkan jumlah penerimaan laba BUMD secara total dengan jumlah seluruh total penyertaan modal BUMD.

Keberhasilan pencapaian kinerja ketiga BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Kontribusi PDAM pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan bagian laba BUMD dari PDAM tahun 2017 sebesar Rp 432.014.422,00 ada penurunan 4,87 % dibanding tahun 2016 sebesar Rp.454.116.730,00 sedangkan jumlah seluruh Penyertaan Modal Daerah pada BUMD-PDAM sebesar Rp. 18.940.273.429,- sehingga realisasi kinerja tercapai 2,28%.

Target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 2,32%. Berarti capaian kinerja sebesar 98,17% atau dapat dikatakan berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2016 sebesar 2,40%, maka keberhasilan kinerja pada tahun 2017 untuk BUMD-PDAM mengalami penurunan 0,12 point. Faktor yang mendorong keberhasilan kinerja BUMD-PDAM yakni tersedianya sumber dan kualitas air yang cukup, dan PDAM merupakan satu-satunya pengelola air minum di Kota Kediri. Adapun kendala untuk mendorong percepatan kinerja PDAM adalah sulitnya meningkatkan jumlah pelanggan dikarenakan sumber air bawah tanah di Kota Kediri mudah didapat sehingga masyarakat enggan menjadi pelanggan PDAM. Namun PDAM akan tetap terus bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan berinovasi dalam pemasaran serta lebih memperhatikan pelayanan kepada

2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Kediri

Sebagai lembaga keuangan milik daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Dengan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Kediri kepada PD BPR diharapkan adanya tambahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari bagian laba PD BPR Kota Kediri.

Jumlah penerimaan bagian laba menurut data sebelum audit BUMD-BPR dengan jumlah seluruh penyertaan modal BUMD-BPR pada tahun 2017 sebesar Rp 229.150.000,-. Secara kumulatif PD BPR KOTA mengalami laba sebesar Rp 458.225.497,69 ,- (Sebelum Audit) atau sebesar 4,58 %. Dengan target sebesar 16,82 % , maka capaiannya sebesar 27,23 %. Sedangkan jumlah penerimaan bagian laba BUMD-BPR pada tahun 2016 (tahun lalu), sebesar 355.000.000,- dari jumlah seluruh penyertaan modal BUMD-BPR sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (8,25)%.

Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Non Personal Loan(NPL) atau kredit yang bermasalah dari kondisi kurang lancar sampai macet yang masih tinggi dari ketentuan yang seharusnya. Tingginya Persentase NPL tersebut dikarenakan masih banyaknya jumlah nasabah dengan kondisi kredit kurang lancar sampai macet dan nominal yang tinggi. Penyebab kedua adalah masih banyak tunggakan

bunga kredit yang belum terbayarkan. Hal tersebut karena keadaan ekonomi dan usaha masing-masing nasabah yang mengalami penurunan, dikarenakan sebagian besar dari nasabah adalah wirausaha. Selain itu, masih kurangnya penyaluran dana kredit. Hal tersebut dikarenakan persaingan dengan bank-bank lainnya yang sangat ketat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pelayanan prima kepada nasabah ataupun calon nasabah dengan cara jemput bola. Selain itu harus meningkatkan promosi dengan mengadakan even khusus dengan pemberian bunga yang murah dan tepat sasaran kepada masyarakat.

3. Perusahaan Daerah Pasar (PD. PASAR) Kota Kediri

Suatu Perusahaan Daerah yang dibentuk untuk memenuhi pelayanan umum di bidang perekonomian, PD. Pasar diharapkan dapat memperlancar distribusi pangan, memperlancar roda perekonomian serta menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri.

Pemerintah Kota Kediri melalui PD. Pasar mengelola 9 Pasar yang lokasinya tersebar diseluruh wilayah Kota Kediri, dan masing-masing mempunyai karakter tersendiri. Pasar-pasar tersebut adalah Pasar Grosir, Pasar Setono Betek, Pasar Pahing, Pasar Banjaran, Pasar Bawang, Pasar Bandar, Pasar Bandar Ngalim, Pasar Hewan, dan Pasar Mrican.

Keberhasilan kinerja BUMD-PD Pasar dapat dilihat dari indikator :

a. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana diukur dengan :

- Prosentase pengguna Kios, Los, Pelataran dibanding jumlah keseluruhan. Hasilnya diperoleh capaian 94%. Hal ini dinilai kurang memenuhi harapan dikarenakan masih adanya faktor penghambat yaitu adanya keluhan pedagang yang merasa letak kiosnya kurang strategis serta ada beberapa bangunan yang sudah lapuk;
- Prosentase tingkat kebutuhan pokok masyarakat terhadap pasar dibanding jumlah rata-rata pengguna pasar. Hasilnya tercapai sebesar 155%. Faktor pendorong tercapainya target adalah kemudahan masyarakat dalam bertransaksi jual beli barang kebutuhan dengan pedagang pasar.

b. Optimalisasi kebersihan pasar diukur dengan :

- Jumlah personil petugas kebersihan yang ada di pasar dibanding jumlah ideal petugas yang sesuai. Capaian kinerja sebesar 115%, tercapai karena jumlah personil/petugas kebersihan yang ada dipasar sudah sesuai dengan luas area;
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan yang ada dibanding jumlah sampah yang dihasilkan disemua pasar. Hasilnya dapat dicapai sebesar 52%. Faktor penyebabnya adalah sebagian peralatan mengalami kerusakan berat.

c. Peningkatan tarif jasa pelayanan pasar :

- Capaian indikator ini baru mencapai 82% dikarenakan sebagian pasar belum memenuhi target yang telah ditentukan.

Keberhasilan BUMD PD. Pasar dapat pula dilihat dari perkembangan pendapatan PD. Pasar. Selama tiga tahun terakhir Pendapatan PD Pasar terus menunjukkan peningkatan, secara berturut-turut pendapatan yang diperoleh BUMD PD Pasar adalah Rp.4.086.835.089,00 (2014), Rp.5.663.864.550,00 (2015); Rp.6.589.375.920,00 (2016); Rp.7.510.903.113,- (2017) Pendapatan PD Pasar tahun 2017 mengalami kenaikan 14% bila dibanding pendapatan tahun 2016.

Tahun 2017, jumlah penerimaan PAD dari bagian Laba BUMD-PD Pasar sebesar Rp. 581.315.980,- dari jumlah penyertaan modal BUMD-PD Pasar berupa dana senilai Rp. 5.000.000.000,- dan berupa asset yang diserahkan senilai Rp. 148.773.057.000,- (Total penyertaan modal Rp. 153.773.057.000,). Berarti kontribusi PAD BUMD-PD. Pasar masih relatif kecil hanya sebesar 0,38%. Namun realisasi PAD dari BUMD PD. Pasar bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 521.315.090,-, maka kinerja melampaui target yang ditetapkan sebesar 111,51%. Untuk meningkatkan kontribusi BUMD PD. Pasar terhadap penerimaan daerah ke depan perlu dilakukan :

- Revitalisasi bangunan dan los;
- Memperbaiki/pengadaan peralatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan pasar;
- Mengoptimalkan pendapatan dari parkir dilingkungan pasar.

2). Urusan Pengawasan

a). Opini BPK

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintah Kota Kediri senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun prestasi kinerja yang diraih, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Pemerintah Kota Kediri telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD Kota Kediri.

Opini WTP atas LKPD Kota Kediri yang dicapai 2 tahun berturut-turut tersebut lebih cepat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kota Kediri menargetkan opini BPK atas LKPD-Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tercapai pada tahun 2017. Diperolehnya opini WTP tersebut, selain sebagai prestasi yang membanggakan juga merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankannya kinerja yang telah dicapai selama ini.

Faktor pendorong tercapainya Opini WTP atas LKPD Kota Kediri tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah meningkatnya kesadaran dan kepatuhan PD di

lingkup Pemerintah Kota Kediri dalam penyelesaian laporan keuangan serta inventaris aset daerah.

b). Perangkat Daerah yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pengawasan yang difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan (objek) di seluruh PD perlu dilakukan agar kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2016 jumlah PD yang melaksanakan SPIP sebanyak 10 adapun kesepuluh PD yang dimaksud antara lain :

1. Dinas Pendidikan;
2. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Bagian Organisasi;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Asset;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Inspektorat;
7. Bappeda;
8. Kecamatan Pesantren;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
10. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

3). Urusan Perencanaan

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diuraikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Kota Kediri telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Kediri 2005-2025, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025. Walaupun demikian, Kota Kediri selama 3 tahap RPJPD berjalan yaitu di RPJMD 2005-2009, RPJMD 2009-2014, dan RPJMD 2014-2019 sudah dilaksanakan dengan baik. Demikian pula dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota. Sehingga seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplementasikan lebih lanjut dalam RKPD.

Tabel 2.53.
Dokumen Perencanaan Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Belum	Ada	ada	ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERWALI	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada

Sumber : Barenlitbang Kota Kediri

4). **Urusan Keuangan**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk melakukan belanja daerah merupakan salah satu indikator kemandirian keuangan daerah sebagai wujud semangat desentralisasi pengelolaan keuangan di daerah.

Selama tiga tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri terus mengalami peningkatan, yaitu dari Rp.207.529.193.679,15 pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.221.476.777.596,40 pada tahun 2015 dan mencapai Rp.238.332.092.825,41 pada tahun 2016 serta naik lagi pada tahun 2017 menjadi Rp.265.607.023.061,81

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk mengoptimalkan penerimaan daerah terutama sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- a. Melaksanakan pemutakhiran data pajak dan retribusi;
- b. Membangun basis data yang didukung teknologi informasi;
- c. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, khususnya Bidang Pelayanan;
- d. Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi pajak/retribusi baru yang strategis;
- e. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung terhadap Wajib Pajak/Retribusi;
- f. Mendekatkan tempat pembayaran PBB Berbasis Aplikasi On Line dengan menempatkan petugas pemungut di tiap kelurahan;
- g. Penagihan secara langsung door to door untuk pajak dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo;
- h. Ledang dan pembayaran pajak melalui mobil keliling;
- i. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Berbasis IT.

5). **Urusan Kepegawaian**

Untuk mengetahui kualitas dan kompetensi pegawai, Pemerintah Kota Kediri akan melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sejalan dengan program Badan Kepegawaian Nasional. Indeks ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu

organisasi sehingga tersedia indikator kualitas pegawai negeri sipil yang lebih terukur serta ketersediaan data yang kredibel.

Indeks ini dimaksudkan untuk menambah informasi mengenai tingkat pencapaian profesionalitas ASN sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan pengembangan profesionalitas ASN dalam organisasi pada masa mendatang.

Komponen penghitungan indeks profesionalitas meliputi hasil penilaian obyektif potensi pegawai berdasarkan pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan pelatihan kepemimpinan, serta sasaran kinerja pegawai. Selain itu juga diperhitungkan selisih gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan tambahan penghasilan, secara internal pada kompleksitas pekerjaan dan risiko yang setara dan tingkat pelanggaran individu di dalam lembaga.

6). **Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

Untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM aparatur maka dilakukan pengadaan CPNS; Diklat Formal, Diklat Kader, tes kompetensi Kenaikan Pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data. Adapun rincian Diklat Aparatur Kota Kediri sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.54.
Diklat Aparatur Kota Kediri 2014-2017

No.	Uraian	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1.	Diklat Kepemimpinan	67,50%	73%	83,10%	89,29%
2.	Diklat prajabatan	98,20%	98,60%	100%	100%
3.	Ijin belajar/tugas belajar	9%	11%	13%	55%

Sumber : BKP2D Kota Kediri

2.4. **Aspek Daya Saing Daerah**

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan kemampuan kemandirian daerah. Peningkatan kemandirian dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha optimalisasi sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan ekonomi daerah dan/atau kota. Letak geografis Kota Kediri sangat strategis karena berada di tengah dan menjadi jalur perlintasan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Kondisi ini memungkinkan Kota Kediri untuk melakukan peningkatan dan pengembangan sektor perdagangan dan jasa guna menyerap pangsa pasar daerah *hinterlandnya*.

Melalui peningkatan daya saing daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Kota Kediri yang diorientasikan sebagai pusat penyedia layanan jasa dan perdagangan, sekaligus meningkatkan produktivitas daya beli dan kemampuan berwirausaha masyarakat.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, diukur berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita.

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Kota Kediri sebagian besar pada golongan Rp.1.000.000,00 ke atas yaitu sebesar 36,05%. Sedangkan golongan pengeluaran dengan persentase terkecil adalah pada golongan 200.000-299.999 rupiah per kapita per bulan yaitu sebesar 2,46%. Tidak ada penduduk yang termasuk dalam golongan pengeluaran di bawah 200.000 per kapita per bulan.

Pengeluaran penduduk dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok konsumsi makanan dan kelompok konsumsi non makanan. Proporsi rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan di Kota Kediri pada tahun 2016 hampir berimbang antara pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan, yaitu sebesar 42,78% pada kelompok konsumsi makanan dan 57,22% konsumsi non makanan.

Rata-rata pengeluaran per kapita kelompok makanan di Kota Kediri, tertinggi berada pada jenis makanan dan minuman jadi yaitu hampir 38%, kedua padi-padian sekitar 10%, dan ketiga adalah rokok juga hampir 10%. Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita konsumsi non makanan di Kota Kediri tahun 2016 tertinggi pada perumahan dan fasilitas rumah tangga sekitar 50%, diikuti aneka barang dan jasa sebesar 29%, barang tahan lama sekitar 8%, dan pajak dan asuransi hampir 6%.

Secara absolut, rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita per bulan di Kota Kediri sebesar Rp.612.056,00 lebih tinggi dibanding rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita per bulan di Kota Kediri sebesar Rp.457.589,00. Angka ini berada di atas Provinsi Jawa Timur yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita per bulan sebesar Rp.443.221,00 dan konsumsi makanan per kapita per bulan sebesar Rp.427.191,00.

Tingginya rata-rata pengeluaran untuk konsumsi non makanan di Kota Kediri menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan penduduk Kota Kediri. Secara ekonomi terdapat hubungan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, maka semakin tinggi pula persentase pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Sebaliknya jika pendapatan semakin rendah, maka persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin tinggi, bahkan pada kondisi rumah tangga tertentu hampir semua pendapatannya dikeluarkan untuk pemenuhan konsumsi makanan.

Selain itu, berdasarkan hasil Survey Biaya Hidup Tahun 2012 oleh Badan Pusat Statistik, bahwa rata-rata biaya hidup (nilai konsumsi rumah tangga) di Kota Kediri sebesar Rp.3.577.703,80 per bulan dengan jumlah anggota keluarga 3,8. Nilai tersebut masih jauh lebih rendah daripada rata-rata biaya hidup secara nasional yang mencapai Rp.5.580.037,00 per bulan.

Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita Sebulan di Kota Kediri dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55.
Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita Sebulan dan Jenis Pengeluaran (Makanan dan Non Makanan) di Kota Kediri Tahun 2016

No.	Jenis Pengeluaran	Kota Kediri		Prov. Jatim	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Pengeluaran Makanan	457.589	100,00	427.191	100,00
	a. Padi-padian	47.168	10,31	58.238	13,63
	b. Umbi-umbian	3.770	0,82	3.499	0,82
	c. Ikan	16.010	3,50	24.438	5,72
	d. Daging	26.516	5,79	19.043	4,46
	e. Telur dan sus	31.788	6,95	25.618	6,00
	f. Sayur-sayuran	31.562	6,90	31.289	7,32
	g. Kacang-kacangan	16.185	3,54	15.108	3,54
	h. Buah-buahan	22.503	4,92	17.612	4,12
	i. Minyak dan lemak	12.959	2,83	13.352	3,13
	j. Bahan minuman	15.374	3,36	16.067	3,76
	k. Bumbu-bumbuan	7.809	1,71	9.388	2,20
	l. Konsumsi lainnya	7.254	1,59	8.677	2,03
	m. Makanan dan minuman jadi	173.404	37,90	128.021	29,97
	n. Rokok	45.287	9,90	56.840	13,31
2	Pengeluaran Non Makanan	612.056	100,00	443.221	100,00
	Jumlah	1.069.645		870.412	

Sumber: Susenas BPS, 2016

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi dengan baik mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Dalam hal ini keberadaan infrastruktur telah berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antar wilayah.

1). Perhubungan

Untuk mendukung aksesibilitas antar wilayah di Kota Kediri, tersedia infrastruktur jalan yang memadai dengan 88% dalam kondisi baik dari 338.583 km jalan di Kota Kediri dengan 49 jembatan yang ada dalam kondisi baik. Secara lengkap fasilitas jalan dapat dicermati pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.56.
Fasilitas Jalan di Kota Kediri Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
I. JENIS PERMUKAAN					
1. Diaspal	331,345	334,097	335,077	338,394	338,394
2. Kerikil	-	-	-	-	-
3. Tanah	-	-	-	-	-
4. Beton Rabat	-	-	0,187	0,187	0,187
Jumlah	331,345	334,097	335,264	338,581	338,581
II. KONDISI JALAN					
1. Baik	236,920	282,745	292,740	297,637	311.414
2. Sedang	62,595	34,342	23,774	21,724	21,724

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
3. Rusak	29,245	15,755	17,700	17,171	5.445
4. Rusak Berat	2,585	1,255	1,050	2,051	0
Jumlah	331,345	334,097	335,264	338,583	338,583
III. KELAS JALAN					
1. Kelas I	-	-	-		
2. Kelas II	125,252	125,252	125,252		
3. Kelas III	-	-	-		
4. Kelas III A	47,795	47,795	47,795		
5. Kelas III B	50,446	50,446	50,446		
6. Kelas III C	92,934	92,934	92,934		
7. Kelas IV	-	-	-		
8. Tidak Dirinci	14,918	17,670	18,837		
Jumlah	331,345	334,097	335,264		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri

2). **Penataan Ruang**

Pemerintah Kota Kediri melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030.

Tingkat ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar 51% pada tahun 2015 menjadi 60,17% pada tahun 2016. Pada tahun 2015 dari luas lahan sebesar 6.340 Ha ketaatan terhadap RTRW sejumlah 3.254 Ha dan pada tahun 2016 ketaatan terhadap RTRW meningkat menjadi 3.815 Ha. Hal ini didorong dengan telah disusunnya Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) pada tahun 2016 sehingga dapat mengurangi penyimpangan atas rencana tata ruang yang telah disahkan.

Berdasarkan RTRW Kota Kediri tahun 2011–2030, Kota Kediri memiliki 3 kawasan strategis Ekonomi (kawasan perdagangan jasa, kawasan industri dan kawasan pariwisata) dan kawasan strategis lingkungan.

a. **Luas Wilayah Produktif**

Luas wilayah produktif di Kota Kediri pada tahun 2009 seluas 3.888,05 Ha, terdiri dari wilayah pertanian ±3.085 Ha, wilayah perkebunan (ladang/kebun) ± 638,87 ha, dan wilayah kehutanan ± 163,44 ha. Sehingga rasio luas wilayah produktif sebesar 61,32% dari luas kawasan budidaya diusahakan menjadi lahan produktif.

b. **Luas Wilayah Industri**

Pengembangan kawasan industri di Kota Kediri dengan mempertimbangkan fungsi Kota Kediri sebagai pusat distribusi potensi kabupaten dan kota. Kawasan peruntukan industri Kota Kediri meliputi pengembangan kawaan industri rumah tangga di beberapa kelurahan, pengembangan industri ringan, dan mempertahankan industri besar seperti industri rokok, pabrik makanan, pengolahan kayu serta pabrik gula. Pengembangan kawasan industri rokok di Kelurahan Semampir seluas ±29 Ha dan di Kelurahan Dandangan seluas ±24 Ha. Selain itu untuk pengembangan industri makanan yang dipusatkan di Kecamatan Pesantren seluas ±47 Ha.

Kawasan perkotaan di Kota Kediri yang terbagi berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah terdiri dari pemukiman, pemusatan distribusi jasa, pemerintahan, pelayanan umum dan kegiatan wilayah.

3). Jasa Akomodasi dan Restoran

Sebagai kota perdagangan dan jasa yang mengusung jargon “Harmoni Kediri *The Service City*”, Kota Kediri menjadi persinggahan wisatawan dan menjadi pusat perekonomian dan bisnis di regional Kediri. Sektor jasa akomodasi di Kota Kediri pada tahun 2015 semakin berkembang dibandingkan tahun sebelumnya. Munculnya investor hotel berbintang sebagai penyedia jasa akomodasi menjadi salah satu indikator tumbuhnya perekonomian di Kota Kediri. Peningkatan jumlah hotel di Kota Kediri pada tahun 2015 sebanyak 4 unit hotel, dengan keseluruhan penyedia jasa akomodasi yang tersedia di Kota Kediri pada tahun 2015 sebanyak 25 hotel, 4 diantaranya berada di Kecamatan Mojoroto, 19 hotel di kecamatan Kota dan 2 hotel berada di Kecamatan Pesantren. Total jumlah kamar yang tersedia pada tahun 2015 sebanyak 1.048 unit atau meningkat 11,13 persen dibanding tahun 2014 dan jumlah tempat tidur sebanyak 1.493 unit atau meningkat 5,81 persen dibanding tahun 2014. Selain itu, di Kota Kediri juga terdapat 50 restoran yang tersebar di beberapa kawasan dengan menawarkan beragam variasi kuliner masakan dan minuman yang dapat menarik wisatawan serta memberikan keunikan berwisata kuliner di Kota Kediri.

4). Lingkungan Hidup (Air Bersih)

Air bersih menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, sehingga harus diperhatikan kualitas higienitasnya, distribusi maupun pemerataan pelayanannya. Akses air bersih yang digunakan masyarakat kota Kediri pada tahun 2017 berasal dari sumur gali terlindung sebanyak 8.238 keluarga, sumur gali dengan pompa sebanyak 62.287 keluarga, dan perpipaan sebanyak 42,536 keluarga. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2017 sebesar 94,66% yaitu sebanyak 86.785 rumah dari total jumlah rumah tangga yang ada di Kota Kediri sebanyak 89.612 rumah.

Sejumlah sungai melintasi Kota Kediri, yaitu Sungai Brantas, Sungai Kresak, Parang, Kedak dan Sungai Ngampel, disamping itu juga terdapat sumber-sumber air yang difungsikan untuk pengairan dan penyediaan air bersih serta sarana pariwisata. Sumber-sumber air yang ada tersebar di Kecamatan Pesantren sebanyak 15 sumber mata air, di Kecamatan Mojoroto sebanyak 7 sumber mata air, dan di Kecamatan Kota sebanyak 5 sumber mata air. Untuk menjaga agar kelestarian debit airnya tetap terjaga, dilakukan konservasi di lingkungan sumber-sumber air yang ada.

PDAM Kota Kediri terus berupaya memenuhi kebutuhan air selama 24 jam non stop, menekan tingkat kehilangan air, terus meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaiki sistem distribusi. Jumlah pelanggan PDAM Kota Kediri pada tahun 2017 sebanyak 13.806 Sambungan Rumah (SR). Komposisi pelanggan terbanyak di kecamatan kota sebanyak 7.073 SR sednagkan di kecamatan mojoroto sebanyak 5.772 SR dan kecamatan pesantren 961 SR.

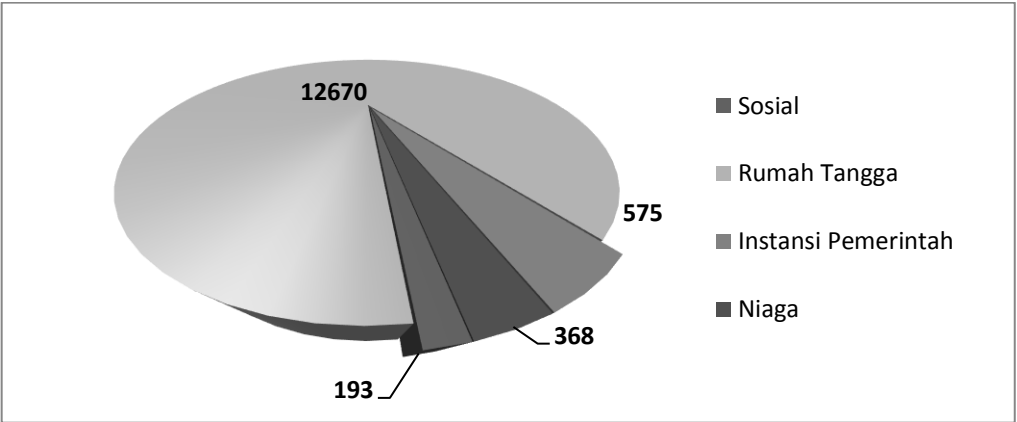
Berikut ini merupakan data pelanggan dan volume pemakaian air bersih dari PDAM Kota Kediri pada tahun 2016-2017 :

Tabel 2.57.
**Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih
Kota Kediri Tahun 2016-2017**

Kategori Pelanggan		Jumlah Pelanggan	
		2016	2017
1.	Sosial	193	193
2.	Rumah Tangga	12.550	12.670
3.	Instansi Pemerintah	575	575
4.	Niaga	368	368
5.	Industri	0	0
6.	Khusus	0	0
Jumlah		13.686	13.806

Sumber : PDAM Kota Kediri

Grafik 2.14.
Pelanggan PDAM 2017



Sumber : PDAM Kota Kediri

5). **Komunikasi dan Informatika**

Infrastruktur jaringan listrik menjadi syarat mutlak pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Konsumsi listrik akan semakin meningkat seiring meningkatnya aktivitas dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, sehingga kebutuhan energi listrik di Kota Kediri dari waktu ke waktu semakin besar, yang ditunjukkan dengan kenaikan jumlah pelanggan layanan listrik PLN yang terus meningkat.

Data tahun 2013 menunjukkan bahwa seluruh wilayah di Kota Kediri telah terlayani listrik. Jumlah pelanggan layanan listrik PLN di Kota Kediri terbanyak adalah dari golongan tarif Rumah Tangga, kemudian Bisnis, Sosial, Perkantoran, Multiguna dan Industri. Namun dari sisi jumlah pemakaian KWh per bulan, golongan tarif Industri menempati posisi tertinggi. Selama kebutuhan energi listrik di Kota Kediri untuk kebutuhan semua golongan tarif selalu bisa terpenuhi sehingga kota ini memiliki daya tarik investasi cukup tinggi. Sampai tahun 2013 besarnya KWh yang terpakai sebesar 289.143.481 Kwh.

Sedangkan kondisi perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Kota Kediri hampir sama dengan dinamika bisnis pelayanan telekomunikasi umumnya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dimana telah terjadi pergeseran fokus bisnis penyedia layanan telekomunikasi dari berbasis kabel beralih ke telekomunikasi bergerak berbasis nirkabel. Teknologi telekomunikasi seluler dapat melayani seluruh wilayah di Kota Kediri oleh beberapa operator seluler. Hal tersebut mengakibatkan bermunculan beberapa tower di Kota Kediri.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1). Angka Kriminalitas

Tingkat kejadian dan penanganan kriminalitas akan mempengaruhi kondusivitas keamanan suatu daerah akan mempengaruhi iklim investasi daerah tersebut. Kota Kediri merupakan daerah yang relatif aman dan kondusif dengan tingkat penanganan terhadap kriminalitas di Kota Kediri dapat dilihat dari jumlah penyelesaian tindak pidana sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.58.
Jumlah Penanganan Tindak Pidana di Kota Kediri 2013-2016

Kecamatan	2013		2014		2015		2016	
	Jml Kasus	Jml penyelesaian	Jml Kasus	Jml penyelesaian	Jml Kasus	Jml penyelesaian	Jml Kasus	Jml penyelesaian
Mojoroto	60	26	29	22	32	26	36	31
Kota	87	34	67	36	48	22	40	31
Pesantren	41	21	38	26	38	29	33	21

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka, 2017

2). Lama Proses Perijinan

Pelayanan perijinan merupakan gerbang utama untuk melakukan investasi. Pengurusan proses perizinan yang cukup lama telah menjadi salah satu kendala utama dalam iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kota Kediri menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Namun dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian kewenangan urusan pemerintahan daerah yang berubah sehingga mempengaruhi perizinan yang menjadi kewenangan daerah. Terdapat 17 sektor Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPM PTSP dalam rangka pengoptimalan pelayanan publik dibidang perizinan serta penanaman modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis perizinan dan non perizinan tersebut antara lain :

Tabel 2.59.
Lama Proses Perijinan Kota Kediri

No	Jenis Izin	Lama Proses (hari)	Retribusi (Rp.)
A	Sektor Perdagangan		
1	SIUP	3	Nol
2	SIUP MB	3	Nol
3	IUTM	3	Nol
4	IUP2T	3	Nol
5	IUPP	3	Nol
6	TDP	3	Nol
7	STPW	3	Nol
8	TDG	8	Nol
9	Izin Penyelenggaraan Pameran	8	Nol
B	Sektor Industri		
1	IUI	8	Nol
2	TDI	8	Nol
C	Sektor Jasa Konstruksi		
1	IUJK	7	Nol
D	Sektor Pertanian		
1	Izin Usaha Obat Hewan dan/atau Pakan Ternak	7	Nol
2	Izin Tempat Usaha/Operasional Jasa Medik Veteriner	10	Nol
3	STR Tenaga Kesehatan Hewan	7	Nol
4	Izin Usaha Peternakan	14	Nol
5	Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat	7	Nol
6	Surat Izin Usaha Perikanan	2	Nol
7	Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan	2	Nol
E	Sektor Pariwisata		
1	TDUP	5	Nol
F	Sektor Pendidikan		
1	Izin Pendirian Pendidikan Formal	9	Nol
2	Izin Operasional Pendidikan Formal	9	Nol
3	Izin Pendirian Pendidikan Non Formal	9	Nol
4	Izin Operasional Pendidikan Non Formal	9	Nol
5	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus	10	Nol
6	Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus	10	Nol
G	Sektor Ketenagakerjaan		
1	Perpanjangan Izin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing	10	Nol
H	Sektor Kesehatan		
1	Izin Pendirian Rumah Sakit	14	Nol
2	Izin Operasional Rumah Sakit	14	Nol
3	Izin Pendirian Klinik	15	Nol
4	Izin Operasional Klinik	14	
5	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas	14	Nol
6	Izin Pendirian Laboratorium Klinik	14	Nol
7	Izin Apotek	10	Nol
8	Izin Penyelenggaraan Optikal	15	Nol
9	Izin Penyelenggaraan laboratorium Optik	15	Nol
10	Izin Toko Obat	10	Nol
11	Izin Toko Alat Kesehatan	10	Nol
12	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	10	Nol
13	Izin Operasional Pemberantasan Hama/ Pestisida	7	Nol
14	Izin Pengobatan Tradisional	10	Nol
15	Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Perorangan	2	Nol
I	Sektor Kominfo		
1	Rekomendasi Titik Koordinat Pembangunan Menara Telekomunikasi	9	Nol
J	Sektor Perhubungan		
1	Izin Usaha Angkutan Barang/Orang	14	Nol
K	Sektor Penanaman Modal		
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	2	Nol
L	Sektor Bangunan		
1	IMB	15	Retribusi=L x IT x Tk x HSbg

No	Jenis Izin	Lama Proses (hari)	Retribusi (Rp.)
M	Sektor Lingkungan		
1	Izin Gangguan	14	Retribusi=LRT U x TL x IG
2	Izin Pembuangan Limbah Cair	14	Nol
3	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	14	Nol
N	Sektor tata Ruang		
1	Rekomendasi Lokasi	30	Nol
2	Izin Prinsip Tata Ruang	30	Nol
O	Sektor Perolehan Tanah		
1	Izin Lokasi	30	Nol
2	IPPT	30	Nol
P	Sektor Reklame		
1	Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil	1	Nol*
2	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen	7	Nol*
Q	Sektor Penelitian		
1	Izin Penelitian, PKL dan KKN	2	Nol

Sumber: DPM-PTSP Kota Kediri

Pemerintah Kota Kediri berupaya meningkatkan PTSP melalui perijinan berbasis teknologi “Kediri Single Window for Investment (KSWI)” yang dilaunching secara resmi pada tanggal 16 Desember 2016. Implementasi KSWI didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik, serta dilaksanakan sesuai SOP yang didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KSWI memiliki dua jalur, yaitu web base pada alamat website kswi.dpm.kedirikota.go.id dan berbasis android dengan aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Perizinan Online). Pelayanan perijinan online memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, selain dapat diakses dimana saja dan kapan saja, pembayaran retribusi dan pajak perijinan dapat dilakukan melalui teller atau ATM bekerjasama dengan Bank Jatim, bahkan dokumen perijinan yang diterbitkan disampaikan langsung ke alamat pemohon melalui kurir bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Tidak hanya itu, KSWI juga menawarkan menu monitoring izin dan pengaduan. Menu monitoring izin berfungsi untuk menelusuri (tracking) proses izin yang telah pemohon ajukan dengan memasukkan resi perijinannya. Sedangkan menu pengaduan, berfungsi sebagai media pengaduan pemohon terkait izin yang telah diajukan atau diproses. Sehingga proses perizinan makin transparan dan akuntabel.

Sejak diimplementasikan pada tahun 2017, progress migrasi perizinan ke offline menuju online telah melampaui target. Pada semester pertama 2017 ditargetkan 25% perizinan telah dilaksanakan secara online terealisasi 33% perizinan sudah dapat dilayani secara online.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1). Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Perkembangan jumlah lulusan S1/S2/S3 Kota Kediri selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan tiap

tahunnya meskipun tidak signifikan. Rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap keseluruhan penduduk Kota Kediri sebesar 0,084 pada tahun 2016, meningkat 0,005 poin dibanding tahun 2012. Adanya kenaikan rasio lulusan S1/S2/S3 mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan tinggi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia semakin baik.

Tabel 2.60.
Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Kediri

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	23.025	19.856	22.058	23.917	24.796
2.	Jumlah lulusan S2	1.485	1.484	1.571	1.651	1.759
3.	Jumlah lulusan S3	52	53	53	54	58
4.	Julah lulusan S1/S2/S3	24.562	21.393	23.682	25.622	26.613
5.	Jumlah penduduk	312.331	267.310	293.282	312.999	315.553
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,079	0,080	0,081	0,082	0,084

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

2). Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan sebuah ukuran yang mencerminkan seberapa besar beban penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan ≥ 65 tahun).

Semakin tinggi persentase tingkat ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Kediri usia produktif (usia 15-64 tahun) relatif tinggi yaitu berjumlah 202.527 orang atau sekitar 69,8% dibandingkan dengan besaran penduduk pada usia non produktif yang hanya 30,2% atau sebanyak 87.620 orang. Dengan demikian angka ketergantungan tahun 2017 sebesar 43,37. Artinya, bahwa di tahun 2017 setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan atau tidak produktif. Angka ketergantungan pada tahun 2017 menurun 2,20 poin dibanding tahun 2013 sebesar 45,57, dengan penurunan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 0,58%, selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.61.
Rasio Ketergantungan Kota Kediri, Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	70.682	61.090	69.999	69.764	65.261
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	22.279	18.727	24.247	25.532	22.359
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	92.961	79.817	94.246	95.296	87.620
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	219.370	187.493	218.753	220.257	202.527
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,424	0,426	0,431	0,433	0,433

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

2.5. Aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan standar dan alat ukur kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar bagi warga negaranya. Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 65 Tahun 2005 bahwa SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Terdapat 15 (Lima Belas) bidang SPM Pemerintah Kab/Kota yang diimplementasikan sesuai SE Mendagri Nomor : 100/1023/SJ tentang Pelaksanaan Percepatan Penerapan SPM di Daerah, dan harus terukur capaiannya setiap tahun sebagai bagian dari instrumen penilaian kinerja. Adapun capaian SPM Kota Kediri tahun 2016 pada 15 bidang pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62.
Capaian SPM Tahun 2016

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator		Nilai	Capaian SPM 2016
1. SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	94%	92,31%
		2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	80%	93,23%
		3	Cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	95%	94,17%
		4	Cakupan pelayanan Nifas	95%	93,52%
		5	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	80%	110,81%
		6	Cakupan kunjungan bayi.	90%	98,88%
		7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	95	97,83%
		8	Cakupan pelayanan anak balita.	87%	87,09%
		9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%	95,00%
		10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100,00%
		11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	99,88%
		12	Cakupan peserta KB Aktif	70%	64,88%
		13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit		
			- <i>Acute Flacid Paralysis</i> (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2	4,59 per 100.000 penduduk
			- Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	78,35%
	- Penemuan dan penanganan pasien TB BTA Positif	85%	75,08%		
	- Penderita DBD yang Ditangani	100%	100,00%		
	- Penemuan Penderita Diare	100%	94,51%		
	14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	18,52%	
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100%	2,84%
		16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100%	58,33%
3	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/ KLB	17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	0,00%
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif	18	Cakupan Desa Siaga Aktif	70%	100,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan		Indikator	Nilai	Capaian SPM 2016
2. SPM Bidang Sosial					
1	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial:				
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	90	92,7
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80	80
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:				
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	3	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	35	44,44
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	40	26,09
3	Penanggulangan korban Bencana:				
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/ Kota	5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	90	98,62
	b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/ Kota	6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	90	100
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:				
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kab/Kota	7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	30	23,08
3. SPM Bidang Lingkungan Hidup					
1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	1	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	100%
2	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	2	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	100%
3	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	3	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	0	0

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator		Nilai	Capaian SPM 2016
4	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	4	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100
4. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri					
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	82%	83,26%
		2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	78%	79,30%
		3	Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	15%	6,59%
		4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	10%	7,77%
2	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat	5	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	N/A	100%
		6	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	N/A	100%
5. SPM Bidang Perumahan Rakyat					
1	Rumah layak huni dan terjangkau	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,5	90,3
		2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	83,5	82,67
2	Lingkungan yang Sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, sarana dan Utilitas umum (PSU)	3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	19,5	19,79
6. SPM Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100
		1.1	Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/ laporan masyarakat	100	60
2	Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100
		2.1	Cakupan Puskesmas Mampu Tata Laksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A)	100	100
		2.2	Cakupan RSU vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan	100	27,3
		2.3	Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang Tata Laksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) di Puskesmas	100	50
		2.4	Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang Tata Laksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit	100	100
3	Rehabilitasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan	3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75	75
		3.1	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang terlatih	75	100
		4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75	75
		4.1	Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	75	75
4	Penegakan dan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	100
		5.1	Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian	80	100
		5.2	Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda/Polres/ta	80	100
		5.3	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)	80	100

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator		Nilai	Capaian SPM 2016
		5.4	Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender	80	100
		5.5	Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	80
		5.6	Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	80
		6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50	26,7
		6.1	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada aksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	50	50
5	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	7	Cakupan layanan pemulangan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan	50	50
		8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan	100	100
		8.1	Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	100	100
7. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial					
1	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	0	17%
		2	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif	0	112%
		3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	0	540%
		4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	0	121%
		5	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	0	96%
		6	Rasio petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/Kelurahan	0	130%
		7	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di etiap 2 desa/Kelurahan	0	374%
2	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	0	0
3	Penyediaan Informasi Data Mikro	9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/Kelurahan 100% setiap tahun	0	100%
8. SPM Bidang Pendidikan Dasar					
1	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;		
			SD	100	100
			MI	100	100
			SMP	100	100
			MTs	100	100
		2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;		
			SD	100	50,36
			MI	100	50
			SD	100	89,93
			MI	100	93,75
			SMP	100	100
			MTS	100	12,5
			SMP	100	92,86
			MTS	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator	Nilai	Capaian SPM 2016
		3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;		
		SMP	100	100
		MTS	100	37,5
		SMP	100	100
		MTs	100	37,5
		4 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;		
		SD	100	100,00
		MI	100	100,00
		SMP	100	100,00
		MTs	100	100,00
		5 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan		
		SD	100	58,99
		MI	100	100,00
		SD	100	55,40
		MI	100	100,00
		6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;		
		SMP	100	100,00
		MTs	100	100,00
		7 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik		
		SD	95	89,21
		MI	95	
		SD	95	
		MI	95	
		8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%		
		SMP	98	96,43
		MTS	98	100
		SMP	98	96,43
		MTs	98	100
		9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn		
		SMP	100	89,29
		MTs	100	100
		10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		
		SD	100	100
		MI	100	93,75
		11 Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;		

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator		Nilai	Capaian SPM 2016		
			SMP	100	100,00		
			MTs	100	100,00		
		12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 - D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik				
			SD	100	100,00		
			MI	100	100,00		
		13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif (100 bila Kab/Kota memiliki rencana dan telah melaksanakna kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan, 0 bila tidak memiliki rencana)				
			SD	100	100,00		
			MI	100	100,00		
			SMP	100	100,00		
			MTs	100	100,00		
		14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;				
			SD	100	100,00		
			MI	100	100,00		
			SMP	100	100,00		
			MTs	100	100,00		
		2	Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan	15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik		
					SD	95	90,19
					MI	95	0
					SD	95	89,93
	MI			95	0		
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;						
	SMP			100	100,81		
	MTs			100	0		
	SMP			100	80,65		
	MTs			100	0		
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;						
	SD			90	89,93		
	MI			90	12,5		
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;						
	SD			100	100,00		
	MI			100	100,00		
	SMP			100	89,29		
	MTs			100	100		
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;						

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator	Nilai	Capaian SPM 2016
		SD	95	94,96
		MI	95	93,75
		SMP	95	100,00
		MTs	95	100,00
		20 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :		
		Kelas I - II : 18 jam per minggu		
		Kelas III : 24 jam per minggu		
		Kelas IV – VI : 27 jam per minggu		
		Kelas VII – IX : 27 jam per minggu		
		SD	100	100,00
		MI	100	100,00
		SMP	100	100,00
		MTs	100	100,00
		21 Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku		
		SD	100	100,00
		MI	100	100,00
		SMP	100	100,00
		MTs	100	100,00
		22 Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya (Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya)		
		SD	100	100,00
		MI	100	100,00
		SMP	100	100,00
		MTs	100	100,00
		23 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		
		SD	100	94,96
		MI	100	100,00
		SMP	100	100,00
		MTs	100	100,00
		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester		
		SD	100	100,00
		MI	100	100,00
		SMP	100	100,00
		MTs	100	100,00
		25 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik (Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester)		
		SD	100	100,00
		MI	100	100,00
		SMP	100	100,00
		MTs	100	100,00
		26 Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau satuan pendidikan		

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator		Nilai	Capaian SPM 2016
			SD	100	100,00
			MI	100	100,00
			SMP	100	100,00
			MTs	100	100,00
		27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		
			a. IP 27.1		
			- SD	100	100,00
			- MI	100	100,00
			- SMP	100	100,00
			- MTs	100	100,00
			b. IP 27.2		
			- SD	100	100,00
			- MI	100	100,00
			- SMP	100	100,00
			- MTs	100	100,00
			c. IP 27.3		
			- SD	100	100,00
			- MI	100	100,00
			- SMP	100	100,00
			- MTs	100	100,00
9. SPM Bidang PU dan Penataan Ruang					
1	Sumber Daya Air				
	- Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat	1	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	100	43,14%
		2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70	97,47%
2	Jalan				
	A. Jaringan - Aksesibilitas	3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100	110%
	B. Ruas - Kondisi jalan	4	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60	93%
3	Air minum				
	- Cluster Pelayanan : sangat buruk, buruk, sedang, baik, sangat baik	5	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	40 (sangat buruk), 50 (buruk), 70 (sedang), 80 (baik), 100 (sangat baik)	28%
4	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)				
	- Air Limbah Permukiman	6	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60	80%
	- Pengelolaan Sampah	7	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20	71%
		8	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.		46%
	- Drainase	9.1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota		22,44%
		9.2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50	39,52%

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator		Nilai	Capaian SPM 2016
5	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	10	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10	2,25 Ha
6	Penataan Bangunan dan Lingkungan				
	- Izin Mendirikan Bangunan	11	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100	39,64%
7	Jasa Konstruksi				
	- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	12	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100	100%
	- Sistem Informasi Jasa Konstruksi	13	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) setiap tahun	100	-
8	Penataan Ruang				
	- Informasi Penataan Ruang	14.1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog	100	0%
		14.2	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Digital	100	0%
	- Penyediaan RTH Publik	15	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25	28%
10. SPM Bidang Ketenagakerjaan					
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80	79,77%
		2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	80	100,00%
		3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	95	100,00%
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50	50,18%
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50	100,00%
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	6	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	74	56,73%
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	7	Besaran pemeriksaan perusahaan	58	66,46%
		8	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	80	78,38%
11. SPM Bidang Komunikasi dan Informasi					
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian infomasi nasional melalui :		
		a.	Media baru seperti website (media online)	setiap hari	100%
		b.	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali/th	-
		c.	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12kali/th tiap Kecamatan	100%
		d.	Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12 kali/th	-
2	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	50	-
12. SPM Bidang Ketahanan Pangan					
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90	80,50
		2	Penguatan Cadangan Pangan	60	60,00
2	Distribusi dan Akses Pangan	3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90	88,00
		4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	89,00

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator		Nilai	Capaian SPM 2016
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	87,00
		6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	75,00
4	Penanganan Kerawanan Pangan	7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	58,00
13. SPM Bidang Kesenian					
1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1	Cakupan Kajian Seni (50%)	60	100,00
		2	Cakupan Fasilitas Seni (30%)	60	100,00
		3	Cakupan Gelar Seni (75%)	100	100,00
		4	Misi Kesenian (100%)	100	100,00
2	Sarana dan Prasarana	5	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	60	100,00
		6	Cakupan Tempat (100%)	100	100,00
		7	Cakupan Organisasi	100	100,00
14. SPM Bidang Perhubungan					
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	89,82% (261/ 290.583 km)
2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	2	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	63,64% (14/22)
		3	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	5% (2/40 unit)
3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	4	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	71,85%
			a. Rambu		75,48% (1.065/ 1.411 unit)
			b. Marka		104,48% (47.014,73/ 45.000 m)
			c. APILL		91,43% (32/35 unit)
			d. Guardrill		16% (40/250 unit)
4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	5	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	100% (1/1)
5	Sumber Daya Manusia (SDM)	6	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	100% (51/51 orang)
		7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	100% (9/9 orang)
		8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLl, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40%	100% (238/238 orang)
		9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	100% (9/9 orang)
6	Keselamatan	10	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	100% (40/40 unit)

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan		Indikator	Nilai	Capaian SPM 2016
15. SPM Bidang Penanaman Modal					
1	Kebijakan penanaman modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah	1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :	0	100%
		-	Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)	0	1
		-	Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)		1
		-	Ketersediaan Lahan (Ha)	0	1
	Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/ bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (<i>comparative advantage</i>) di daerahnya.	-	Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya	0	1
		-	Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)	0	1
	Informasi Peluang Usaha Mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi	-	Potensi Pasar	0	1
		-	Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)	0	1
2	Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/ Nasional	2	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan:		
			- Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat propinsi dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	0	100%
			- Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	0	100%
			- Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota	0	100%
3	Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra Kabupaten/Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/Kota tersebut	3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat provinsi.	0	100%
		4	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat kabupaten/kota.	0	100%
		5	Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis kegiatan Promosi)	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator		Nilai	Capaian SPM 2016
4	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat Propinsi. Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM /5 X 100%		0	0
		6	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM		
		-	Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri	0	sudah / belum (1/0)
		-	Palayanan penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	0	sudah / belum (1/0)
		-	Pelayanan penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	0	sudah / belum (1/0)
		-	Pelayanan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)	0	sudah / belum (1/0)
		-	Pelayanan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota	0	sudah / belum (1/0)
5	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten/kota. Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM /6 X 100%		0%	83%
		7	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM	0	5
		-	Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri	0	1
		-	Palayanan penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	0	1
		-	Pelayanan penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	0	1
		-	Pelayanan penerbitan TDP	0	1
		-	Pelayanan penerbitan SIUP	0	1
		-	Pelayanan Perpanjangan IMTA yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota	0	0
6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhdap pelaksanaan	8	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.	0	100%
7	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%		0%	100%
		9	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE	0%	4
		-	Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.	0	100%
		-	Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.	0	100%
		-	Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.	0	100%
		-	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).	0	100%
8	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha		0	100%

2.6. Analisis Gambaran Umum

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dapat disajikan capaian indikator kinerja memuat bidang urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri Tahun 2012-2017 yang tercermin dalam ketiga aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Analisis Gambaran Umum Kota Kediri Tahun 2012-2017

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi					Target 2017	Interpretasi : belum tercapai ($<$); Sesuai ($*$); Melampaui ($>$)	
			2012	2013	2014	2015	2016			2017
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	1.1	Pertumbuhan PDRB	12,68	6,01	5,47 - 7,10	5,20 - 7,64	4,93 - 8,18	-	4,66 - 8,72	-
			6,98	4,10	3,91 - 4,87	3,72 - 5,63	2,53 - 6,40	-	3,34 - 7,17	-
	1.2	Laju Inflasi IHK Kota Kediri	4,63	8,05	7,49	1,71	1,3	-	3,5	-
	1.3	PDRB per kapita ADHK (Juta Rupiah)	72.241.437,20	57,92	62,65	67,32	75,92	-	76,94	-
	1.4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,93	7,51	5,85%	5,36%	5,50%	5,14%	6,00	$<$
	1.5	Penduduk Miskin (%)	7,47	8,20	7,95%	8,51%	8,40%	8,49%	8,49%	$<$
	1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,66	74,18	74,62	75,67	76,33	77,13	77,01	$>$
	1.7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,64	95,05	95,15	95,29	95,51*	-	95,73	-
1.8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,5	80,92	80,92	81,52	81,82*	-	82,13	-	
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	1. Fokus Layanan Urusan Wajib									
	1.1	URUSAN PENDIDIKAN								
	1.1.1	Indeks Pendidikan	-	0,69	0,70	0,73	0,74	0,75	0,75	-
	1.1.2	Angka melek huruf	97,46	99,54	100%	100%	100%	100%	100%	*
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):								
		a. APK PAUD (%)	Na	91,15	93,31	103,29	101,30	101,71	98,00	$>$
		b. APK TK (%)	108,45	105,44	105,44	106,00	111,76	108,34	105,44	$>$
		Pendidikan Dasar								
		APK SD/MI/Paket A	116,01	112,45	125,81	112,45	111,87	111,50	113.55	$>$
		APK SMP/MTs/Paket B	144,44	131,61	154,01	131,61	131,34	131,34	133.31	$<$

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi						Target 2017	Interpretasi : belum tercapai (<); Sesuai (*); Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		APM SD/MI/Paket A	106,35	102,95	117,3	102,95	104,53	104,44	106.10	>
		APM SMP/MTs/Paket B	103,05	103,33	121,18	103,33	102,46	101,52	104.00	>
		Pendidikan Menengah								
		APK SMA/SMK/MA/Paket C	256,67	260,55	260,55	244,44	222,31	-	-	-
		APM SMA/SMK/MA/Paket C	195,44	191,93	191,93	180,53	172,03	-	-	-
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	96,27	98,21	99,00	99,00	99,00	-	-	-
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/SMK /MA (%)		193,03	194,00	196,00	197,00	-	-	-
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	-	-	-
		Rasio guru/murid pendidikan menengah	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 13	1 : 13	-	-	-
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	95,02	96,57	96,60	93,22	86,76	94,28	98,80	<
	1.2	URUSAN KESEHATAN								
	1.2.1	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran	8,35 permil	5,05 permil	5,22 permil	5,38 permil	5,22 permil	6,29 permil	8 permil	>
	1.2.1	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	183	74,9	83,46	70,14	94,92	93,17	98	>
	1.2.1	Persentase balita gizi buruk	0,092	3,30%	4,20%	3,60%	8,00%	6%	< 15%	>
	1.2.1	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*
	1.2.1	Meningkatnya cakupan rumah sehat (%)	69,82	71,28%	90,65%	89,60%	89,63%	83,41	86%	<
	1.2.1	Rasio dokter per satuan penduduk	1,11	58,28%	1:847	1:1131	1:1993	1 : 1500	1 : 2500	>
	1.2.1	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	3,66	1 : 1000	1 : 1000	1 : 1000	1 : 1000	-	1 : 1000	-

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi						Target 2017	Interpretasi : belum tercapai (<); Sesuai (*); Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.2.1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,8	94%	95%	95%	95%	94,70	95%	*
	1.2.1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	79,4	86,4%	100%	100%	100%	100	70%	>
	1.2.1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	*
	1.2.1	Cakupan penemuan dan penanganan HIV dan AIDS	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	*
	1.2.1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	7%	15%	15%	15%	-	15%	-
	1.2.1	Rasio Jumlah Posyandu Terhadap Jumlah Balita	-	1 : 70	1:70	1:50	1:54	1 : 61	1 : 64	>
	1.2.1	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	-	11,11%	11,11%	11,11%	44,44%	100	100%	*
	1.2.1	Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes		81,9%	81,9%	100%	100%	100%	100%	>
	1.2.1	Angka kunjungan pasien ke RSUD :								
		- BOR rawat Inap	73,45	76,67%	66,99%	66,88%	74,83%	73,5	75%	<
		- Rawat Jalan (orang)	124.511	143.204	126.250	174.137	175.986	186.426	165.777	>
		- Rawat Darurat (orang)	20.152	21,143	19385	22204	22557	21.011	24.476	<
		Angka kematian di RSUD :								
		- NDR (%)	31,43	38,09%	42,48	33,89	30,76	30,55	≤ 25%	<
		- GDR (%)	76,58	76,85%	83,72	83,70	63,60	62,93	≤ 49%	<
		Jenis dan Standarisasi pelayanan RSUD								
		- Akreditasi	Perencanaan	Perencanaan	Pembimbingan	Simulasi Survey	Lulus Paripurna	Survey verifikasi	Survey Verifikasi	*

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi					Target 2017	Interpretasi : belum tercapai (<); Sesuai (*); Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Panjang jalan dalam kondisi baik/mantap (Km)	233.099	236.919	243.919	250.919	257.919	311.414	264.919	>
	Jembatan yang berfungsi dengan baik (unit)	511,1 meter	41	43	45	47	55	49	>
	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar (%)	13,7	13,83%	13,95%	14,00%	14,05%	14,16	14,44%	<
	Persentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (%)	52,35	51%	52.63%	53,23%	53,84%	51,43	54,44%	<
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	814,84	99,43%	100	30,02	75	122,39	99,77	>
	Persentase peningkatan jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik	-	28,19	29,78	30,59	51,99	35,244	60,00	<
	Prosentase luas lahan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	-	45%	82,4%	51%	60,17%	70,27	65,00	>
	Persentase luasan RTH dari luas kota (Rasio RTH dibanding (luas wilayah kota – luas kawasan lindung) RTH Publik	7,07	7,20%	8,61	7,29	8,52	8,52	7,22	>
	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	38,46	38,84	39,64	40,00	41,61	42,49	40,90	>
	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	-	95,31	95,31	93,27	97,89	96,85	96,5	>
	1.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
	Persentase rusun terbangun (%)	55	55	62,50	62,50%	70%	-	100%	-
	Rumah tangga bersanitasi (%)	92,16	93	94	94,65	96,79	95,78	97	<

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi						Target 2017	Interpretasi : belum tercapai (<); Sesuai (*); Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rumah Layak Huni (%)	85,07	95,30	85,11	85,11	90,00	93,51	97,50	<
		Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang (titik)	-	4.640	4.799	7.902	8.567	8.732	9.060	<
	1.5	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
		Prosentase penanganan potensi kasus SARA	-	100%	100%	100%	100%	100	100%	*
		Persentase Ormas dan LSM yang terbina	32,1	31,25%	32,65	34,62	36,65	38,49	37,98	>
		Menurunnya tingkat pelanggaran Perda	42,5	55,31%	51,06%	47,93%	62,38%	49,81	47%	<
		Rasio Jumlah personil Pol PP per 10.000 penduduk	2,79	2,8	2,81	2,9	5,23	6,72	5,5	>
		Rasio Jumlah linmas per 1.000 penduduk	38	56,5%	4,48	4,50	4,50	5,07	4,50	>
		Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keamanan)	100	100%	100	100	98,64%	100	100%	*
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) bencana kebakaran	25 menit	25 menit	30 menit	25 menit	25 menit	20 menit	20 menit	*
	1.6	URUSAN SOSIAL								
		% Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	6.205	2,17%	1,62	1,51	1,50	1,62	2,00%	>
		% Penurunan jumlah penduduk miskin	7,47	- %	3,0%	-7,0%	1,3%	-1%	-1%	>
		PMKS yang memperoleh Bantuan (%)	4,71	54,40	65,93	86,29	100	100	80	>
	1.7	URUSAN TENAGA KERJA								
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,85	8,00%	7,65%	8,46%	8,22%	4,68%	4,68%	>

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi						Target 2017	Interpretasi : belum tercapai ($<$); Sesuai (*); Melampaui ($>$)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun (%)	6 kasus	33%	100%	100%	100%	100	100%	*
	1.8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
		Prosentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	*
		Prosentase Capaian Indikator Kota Layak Anak	-	-	-	54,84	54,84	54,84	50%	$>$
	1.9	URUSAN PANGAN								
		Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)	90	80	80,5	116,67	117,65	112	91,50	$>$
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	0	88	88	90,59	91,33	94,67	91,50	$>$
		Stabilitas Harga dan Askes Pangan di Daerah (%)	130	88	89	90,20	91,10	92,1	91,50	$>$
		Skor PPH (%)	88,25	88	89,20	81,50	87	87	91,50	$<$
	1.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
		Persentase capaian layanan persampahan perkotaan (Cakupan penanganan sampah) :								
		- Luas area yang dilayani dibagi luas wilayah Kota Kediri	68	70	72	74	76	87,42	77%	$>$
		Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan								
		- Pelaku Usaha yang mempunyai UKL-UPL	-	20%	-	28%	45%	-	-	-

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi						Target 2017	Interpretasi : belum tercapai ($<$); Sesuai (*); Melampaui ($>$)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- Pelaku Usaha yang mempunyai IPAL	-	20%		23%	28%	-	-	-
		Indeks Kualitas Air	-	-	-	50	45	-	-	-
		Indeks Kualitas Udara	-	-	-	88,31	99	-	-	-
		Cakupan Konservasi (penghijauan sumber mata air/titik).	-	500 pohon		550	610	-	-	-
	1.12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
		Rasio penduduk ber KTP-EL per satuan penduduk	-	85%	88,01%	87%	90,92%	90,73	97%	Tahun 2012-201x realisasi rasio penduduk ber KTP
		Rasio bayi berakte kelahiran	98,15	99,00%	95%	94,72%	98%	98,25	98,25%	*
		Rasio pasangan berakte nikah	52,63	100%	100%	100%	100%	-	100%	-
		Persentase Kepemilikan KK	100	83,26%	83,35%	82,76%	82,19%	94,94	90%	$>$
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	95	99,25%	-	-	-	-	99,27%	-
		Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	86,02	-	$>$
	1.13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
		Persentase fasilitasi program pemberdayaan masyarakat	90%	90%	90%	90%	90%	100	90%	$>$
	1.14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
		Laju pertumbuhan penduduk (%)	-	0,96	0,96	0,96	0,70	-0,09	0,93	$>$
		Cakupan peserta KB aktif(%)	72,89	73,02	72,90	72,90	68,87	68,87	73,2	$<$
		Persentase jumlah wanita kawin usia dibawah 20 tahun (%)	-	0,63	0,53	0,42	0,51	0,47	0,51	$>$

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi					Target 2017	Interpretasi : belum tercapai (<); Sesuai (*); Melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016			2017
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.15	URUSAN PERHUBUNGAN								
		Rasio ijin trayek	67,96	48,54	39,81	40	58,33	66,67	58,54	>
		Jumlah uji kir angkutan umum	104	144	188	188	191	191	135	>
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit	30	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	*
		Jumlah rambu-rambu (buah)	1.334	1,322	257	583	1065	1.187	1.436	<
	1.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI								
		Jumlah SKPD yang terkoneksi melalui <i>web site</i> pemkot	13	61 dari 87 (70,11)	70,11	71,26	77,01	100	80%	>
		Prosentase penerapan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK secara terpadu	-	-	-	22	24	85	27%	>
	1.17	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH								
		Jumlah UKM berkualitas	10.343	0	0	180	195	205	-	>
		Persentase koperasi berkualitas	77	35,60%	50,55	56,46	41,01	59,20	-	>
		Jumlah KUKM yang mengakses penyertaan modal (%)	169	62,50%	85,30	85,51	76,67	78,95	-	>
	1.18	URUSAN PENANAMAN MODAL								
		Nilai investasi	-	488.773.732.468	2.537.780.732.468	3.227.073.232.468	3.787.568.819.695	3.987.568.819.695	3.987.568.819.695	>
		Indeks Kepuasan pelayanan Perijinan	-	76,00	81,25	78,89	85,75	86,00	86,00	
	1.19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA								
		% Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	-	85	90	94,5	97	100	98	>
		Meningkatnya prestasi olahraga	-	90	90	92	94	100	96	>
	1.20	URUSAN STATISTIK								
	1.21	URUSAN PERSANDIAN								

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi						Target 2017	Interpretasi : belum tercapai (<); Sesuai (*); Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.22	URUSAN KEBUDAYAN								
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali kegiatan)	38	51	50	50	69	73	70	>
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	18	10	235	275	292	292	292	*
	1.23	URUSAN PERPUSTAKAAN								
		Indeks Minat Baca		-	-	-	-	-	40	-
	1.24	URUSAN KEARSIPAN								
		Persentasi SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan	43,40	65	100	100%	100%	100	100%	*
	2. Fokus Layanan Urusan Pilihan									
	2.1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
		Produksi perikanan (kw)	1.389,90	1.390,60	1.486,9	1506,5	1859	1903	1.548,72	>
	2.2	URUSAN PARIWISATA								
		Kunjungan wisata	-	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	<
		Meningkatnya potensi obyek wisata (%)	-	85	88	90	94	100	96	>
	2.3	URUSAN PERTANIAN								
		Produksi tanaman pangan padi (ton)	7.316,00	13,483	11.917	12936	13225	13.401	13.337	>
		Produksi tanaman pangan jagung (ton)	6.803,50	6,408	6.382	5577	5618	7.547	4.868	>
		Produksi tanaman perkebunan tebu (kw)	1.275.100	1.420.701	1.048.110	1.343.728	1.357.728	1.360.400	1.400.000	<
		Jumlah produksi peternakan (kg)	4048,35	2.713.924	2.713.947	3028310	3191420	3.250,48	2.906.595	>

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi						Target 2017	Interpretasi : belum tercapai (<); Sesuai (*); Melampaui (>)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	-	2.2	1,76	2,53	3,60	-	4,51	-
	2.4	URUSAN KEHUTANAN								
		Reboisasi Areal Hutan dan lahan kritis (Ha)	113,40	113,4	-	115	115	-	117	-
	2.5	URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL								
	2.6	URUSAN PERDAGANGAN								
		Persentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	-	6,56	3,57	4,95	6,04	-	6,50	-
	2.7	URUSAN PERINDUSTRIAN								
		Pertumbuhan Industri (%)	1,87	1,52	1,12	1,58	1,92	2,54	2,39	>
		Persentase pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	-	2,57	6,13	5,39	5,36	-	5,50	-
	3. Fokus Layanan Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang									
	3.1	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (2,53)	B (2,76)	B	B (2,93)	*
		Nilai SAKIP	D	D	D	C	CC	B	B	*
		Persentase penetapan produk hukum daerah	23	44	75	80	85	100	90	>
		Peringkat LPPD	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	>
	BUMD yang menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik	-	-	-	-	-	-	1 BUMD	-	
	Peningkatan jumlah laba BUMD	-	-	-	-	-	-	10%	-	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Realisasi					Target 2017	Interpretasi : belum tercapai (<); Sesuai (*); Melampaui (>)	
			2012	2013	2014	2015	2016			2017
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	3.2	URUSAN SEKRETARIAT DEWAN								
		Persentase Penyelesaian Peraturan Daerah	-	70	100	100	100	100	84	>
	3.3	URUSAN PENGAWASAN								
		Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	*
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	-	-	-	-	Lv.2	Lv.2	Lv.2	*
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	74,53	70%	86,93	78,35%	87,21%	90,42	95%	<
	3.4	URUSAN PERENCANAAN								
		Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	99,02	90,64	>
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan	-	-	-	-	-	-	70%	-
	3.5	URUSAN KEUANGAN								
		Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	122.152.872,94	100%	146%	151,72	164,91	183,73	169,97%	>
	3.6	URUSAN KEPEGAWAIAN								
		Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	-	-	60	-
	3.7	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
		Meningkatnya kompetensi ASN	-	-	-	-	-	-	73%	-
	3.8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan kecamatan dan kelurahan	-	73%	75%	78,7%	79,7%	-	83,1%	-

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi						Target 2017	Interpretasi : belum tercapai ($<$); Sesuai (*); Melampaui ($>$)	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
	1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	314.006	45,38	45	44,8	44,6	-	44,4	-
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
	1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	0,0782	0,0782	0,0854	0,08952	-	0,09212	-
	2	Luas wilayah produktif (Ha)	-	57,30	57,25	57,07	56,92	61,32	56,84	$>$
	3	Luas wilayah industri	-	2,80	2,85	2,90	2,95	2,95	3,00	$<$
	4	Luas wilayah banjir (m ²)	-	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	*
	5	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	90	97	100	110	120	-	130	-
	6	Jenis, kelas, jumlah penginapan/ hotel	28	30	30	31	32	-	33	-
	Fokus Iklim Berinvestasi									
	1	Angka kriminalitas per 100 penduduk	0,13	0,17	0,17	0,16	0,16	-	0,16	-
	2	Lama proses perijinan	3-15	3 - 15 hari	3 - 15 hari	3 - 15 hari	3 - 15 hari	3 - 15 hari	3 - 15 hari	*
	Fokus Sumber Daya Manusia									
	1	Rasio lulusan S1/S2/S3	7,9	8,00	8,10	8,20	8,30	-	8,40	-
	2	Rasio ketergantungan	42,4	42,60	42,70	42,80	43,00	43,3	43,20	$>$

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.). Tingkat kemampuan keuangan daerah diukur dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Adanya otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lainnya dari masyarakat atau swasta merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Prinsip Desentralisasi Fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 2, antara lain :

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan

dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi Neraca Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD meliputi struktur dan akurasi Belanja (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung), Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi Aset Pemerintah Daerah, kondisi Kewajiban Pemerintah Daerah serta kondisi Ekuitas Dana yang tersedia.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, serta Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah utamanya sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dari dana perimbangan kenaikannya sangat tergantung kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan untuk mampu melakukan inovasi dan terobosan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian sebelumnya, realisasi penerimaan tahun sebelumnya serta ketentuan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2012-2016, yang didukung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PAD mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Kediri dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 65,75%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 26,93% serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 19,68%. Realisasi pendapatan Kota Kediri rata-rata diatas nasional. Kedepan tetap perlu meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kediri dari tahun 2012-2016 sebagaimana pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Kediri Tahun 2012 s/d Tahun 2016

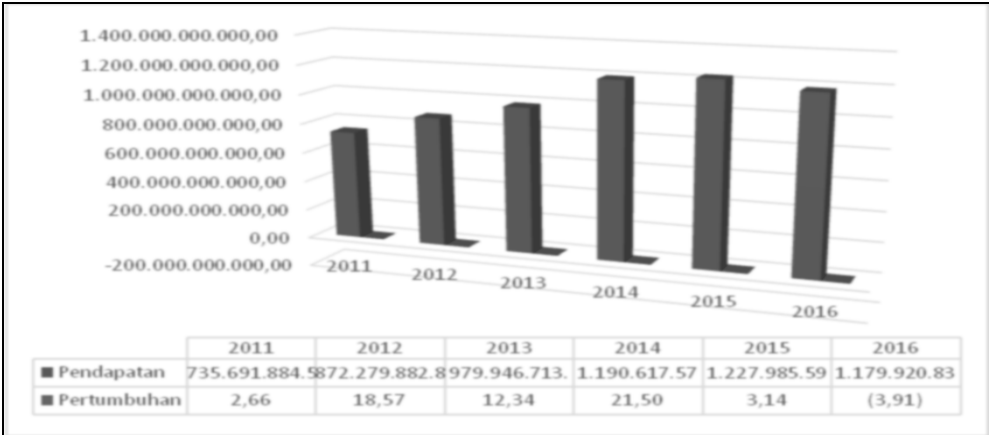
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumb. (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	872.279.882.803,27	979.946.713.953,62	1.190.617.578.862,15	1.227.985.595.702,59	1.179.920.839.071,41	8,27
1.1	Pendapatan Asli Daerah	122.522.872.935,27	144.562.729.326,62	207.529.193.679,15	221.927.133.610,59	238.318.315.508,41	18,97
1.1.1	Pajak Daerah	35.750.228.963,39	57.840.761.515,71	68.984.286.098,43	70.437.104.843,27	87.639.179.627,82	26,90
1.1.2	Retribusi Daerah	9.481.856.261,50	9.631.747.601,76	8.469.711.723,00	9.445.300.595,00	9.989.929.184,67	1,70
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	1.347.499.790,84	587.390.769,02	785.635.046,99	997.859.588,73	1.517.999.708,70	14,12
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	75.943.287.919,54	76.502.829.440,13	129.289.560.810,73	141.046.868.583,59	139.171.206.987,22	19,38
1.2	Dana Perimbangan	609.818.992.587,00	701.013.438.199,00	778.752.526.381,00	774.087.250.166,00	842.341.149.826,00	8,57
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	119.023.129.587,00	108.070.739.199,00	118.165.747.381,00	112.202.429.166,00	125.649.030.826,00	1,77
1.2.2	Dana Alokasi Umum	490.371.763.000,00	562.943.089.000,00	634.351.539.000,00	634.461.169.000,00	617.780.644.000,00	6,22
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	424.100.000,00	29.999.610.000,00	26.235.240.000,00	27.423.652.000,00	98.911.475.000,00	1806,59
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	139.938.017.281,00	134.370.546.428,00	204.335.858.802,00	231.971.211.926,00	99.261.373.737,00	1,10
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	40.752.706.281,00	49.201.611.428,00	83.510.636.802,00	72.682.839.926,00	79.760.622.737,00	21,81
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71.136.871.000,00	81.492.920.000,00	116.856.415.000,00	115.436.169.000,00	439.121.000,00	-10,72
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	28.048.440.000,00	3.676.015.000,00	3.968.807.000,00	43.852.203.000,00	14.061.630.000,00	214,51
1.3.6	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	-

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Dari Tabel 3.1. dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Kediri cenderung mengalami peningkatan. Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 8,27%. Pada tahun 2012 Pendapatan daerah sebesar Rp.872.279.882.803,27, sedangkan Tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi Rp.979.946.713.953,62, begitu pula pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp.1.190.617.578.862,15 dan tahun 2015 sebesar Rp.1.227.985.595.702,59 namun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp.1.179.920.839.071,41 (-3,91%) dari tahun 2015. Salah satu faktor yang menyebabkan, yaitu pada tahun 2016 pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdapat penurunan alokasi khususnya pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Hal ini karena adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut ketentuan UU No 23 Tahun 2014 pasal 404 bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut serta kesiapan pelaksanaan pengalihan kewenangan, maka tahun 2017 Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Kediri kewenangannya berpindah ke Provinsi Jawa Timur. Sehingga mulai tahun 2017 SMAN/SMKN tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kota Kediri sedangkan untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD mulai tahun 2016 tidak dialokasikan.

Gambaran Pendapatan Daerah Kota Kediri dan pertumbuhannya selama tahun 2012-2016 berdasarkan struktur APBD Kota Kediri, dapat dilihat pada Grafik 3.1. berikut :

Grafik 3.1.
Grafik Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Tahun 2012-2016



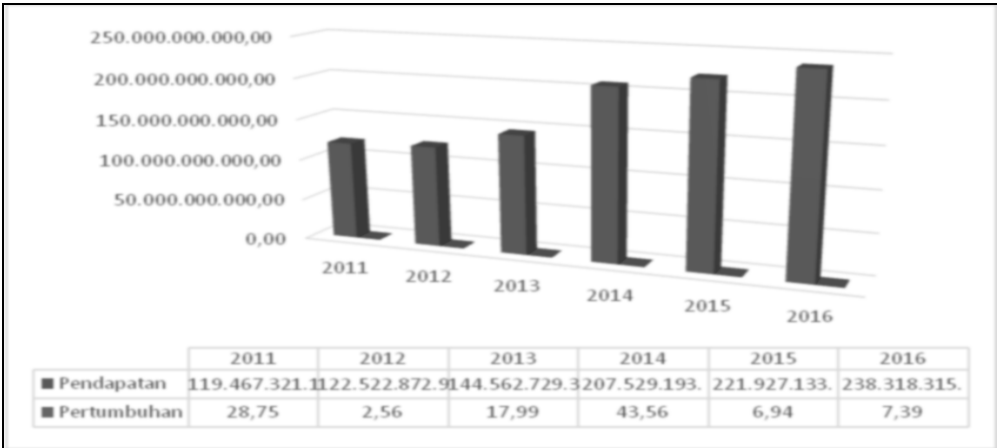
Salah satu komponen utama dari pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli daerah. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2012-2016 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih didominasi oleh sumbangan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Persentase rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri sebesar 18,97%, pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan optimalisasi sumber-sumber PAD yang cukup efektif.

Untuk memaksimalkan perolehan PAD, pemerintah Kota Kediri telah menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Urutan kedua yang memberikan sumbangan terbesar untuk PAD adalah pajak daerah, berikutnya adalah retribusi daerah, dan yang terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD). Perkembangan pendapatan dari BUMD cukup baik, namun mengingat kontribusinya yang masih rendah maka perlu untuk lebih ditingkatkan.

Adapun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2016 sebagaimana pada grafik 3.2. berikut ini :

Grafik 3.2.
Grafik Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Tahun 2012-2016

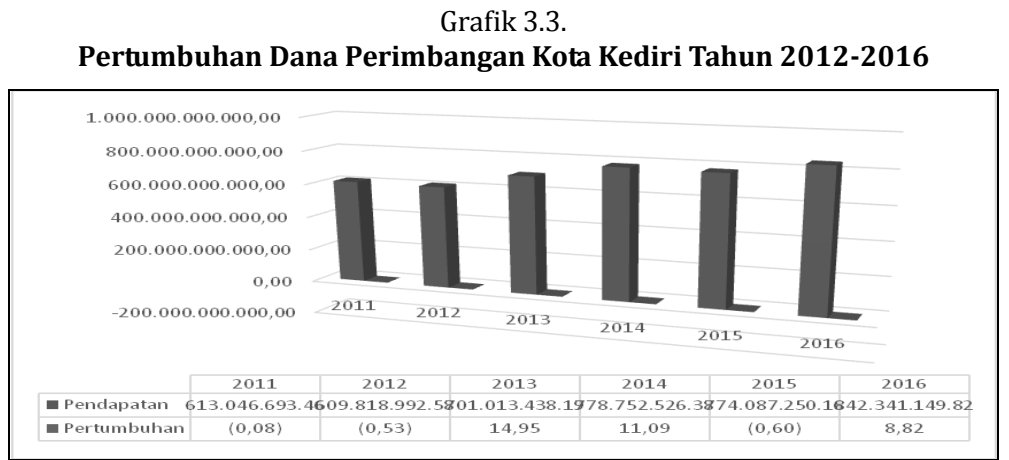


Untuk Dana Perimbangan, selama tahun 2012-2016 mengalami peningkatan Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) masih menduduki penyumbang pendapatan terbesar untuk Kota Kediri, hal ini menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kota Kediri cukup tinggi. Aspek kinerja tata kelola keuangan daerah menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat untuk menentukan besaran dana perimbangan yang diterima masing-masing Kota/Kabupaten.

Untuk alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selama kurun waktu 2012-2016 cukup tinggi. Penggunaannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana ini dialokasikan untuk program dan kegiatan tertentu serta disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah daerah.

Selain itu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, Peraturan Menteri Keuangan ini juga berlaku untuk seluruh dana transfer baik Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Gambaran pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Kediri selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik 3.3. berikut :



Komponen ketiga pada struktur Pendapatan Daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam tahun 2012-2016 mengalami tren pertumbuhan yang fluktuatif.

Gambaran Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



B. Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Belanja Daerah adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiaya program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib atau pilihan yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD.

Tabel 3.2.

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Kediri Tahun 2012 s/d Tahun 2016

No	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumb. (%)
	BELANJA	843.607.977.748,33	871.479.638.834,04	979.743.351.877,89	1.120.702.813.857,83	1.484.725.405.962,16	15,65
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	446,690,739,019.02	489,841,023,298.83	528.700.186.564,81	528.261.178.165,07	561.753.904.614,90	5,96
1	Belanja Pegawai	406,698,607,542.02	433,860,233,045.95	471.777.388.803,29	490.502.785.923,65	503.214.970.483,54	5,49
2	Belanja Hibah	30,138,541,067.00	33.478,908.352.00	32.291.379.113,00	21.711.780.000,00	29.589.010.0000,00	2,76
3	Belanja Bantuan Sosial	9,158,220,000.00	21.937.183.975.88	23.577.323.977,52	15.202.566.312,42	27.517.848.910,36	48,12
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	562,886,060.00	564,697,925.00	557.947.900,00	727.060.675,00	727.060.675,00	7,36
5	Belanja Tak Terduga	132,484,350.00	0.00	496.146.771,00	116.985.254,00	705.014.555,00	-
B	BELANJA LANGSUNG	396,917,238,729.31	381.638.615.535,21	451.043.165.313,08	592.441.635.692,76	922.971.501.347,26	25,37
1	Belanja Pegawai	65,392,346,002.99	79,733,436,604.70	80.628.201.199,00	102.547.907.299,00	126.098.632.251,00	18,30
2	Belanja barang dan jasa	141,679,338,198.32	177.406.623.310,51	216.865.911.968,08	315.430.879.038,76	415.027.359.366,76	31,12
3	Belanja Modal	189,845,554,528.00	124,498,555,620.00	153.549.052.146,00	174.462.849.355,00	381.845.509.729,50	30,35

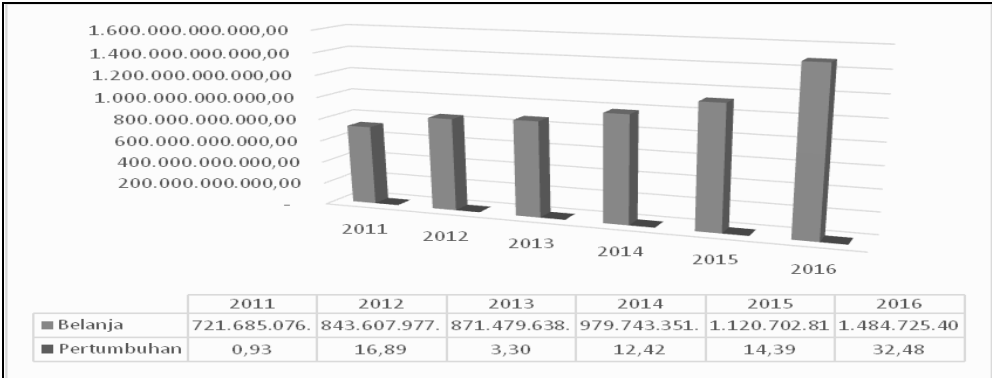
Sumber : BPKAD Kota Kediri

Selama kurun waktu tahun 2012-2016 APBD Pemerintah Kota Kediri mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2012 belanja daerah sebesar Rp.843.607.977.748,33 dan tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.1.484.725.405.962,16 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 15,65%. Sedangkan pada sisi Belanja Langsung pertumbuhan belanja barang dan jasa cukup tinggi mencapai 31,12%.

Pada Tabel 3.2. dapat diketahui bahwa pada tahun 2012-2016 untuk realisasi Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 5,96%, demikian juga untuk Belanja Langsung setiap tahunnya juga mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 25,37%.

Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah sebagaimana pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5.
**Grafik Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 s/d Tahun 2016**



Untuk pelaksanaan Belanja Daerah Kota Kediri dapat dilihat pada tabel 3.2, yaitu perbandingan antara target dan realisasi :

Tabel 3.3.
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 - 2016**

TA	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2012	923.217.374.040,73	843.607.977.748,33	91,38	(79.609.396.292,40)
2013	1.097.475.966.315,67	871.479.638.834,04	79,41	(225.996.327.481,63)
2014	1.350.291.714.232,04	979.743.351.877,89	72,56	(370.548.362.354,15)
2015	1.618.913.077.843,30	1.120.702.813.857,83	69,23	(498.210.263.985,47)
2016	1.732.232.242.102,23	1.484.725.405.962,16	85,71	(247.506.836.140,07)

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan program pembangunannya mendukung program Nawacita dari Pemerintah Pusat. Bentuk perwujudan nawacita itu salah satunya ada pada program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu memfokuskan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Kota Kediri.

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2012-2016, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah cenderung mengalami peningkatan meskipun belum mencapai 100%, yaitu realisasi Belanja rata-rata sebesar 79,66%, prosentase terendah terjadi pada tahun 2015, hal ini disebabkan tidak terealisasinya beberapa kegiatan pembangunan yang anggarannya cukup besar. Jika dibandingkan dengan realiasai belanja nasional, realisasi belanja Kota Kediri masih berada dibawahnya. Oleh karena itu, kedepan harus diperhatikan waktu penetapan APBD dan pendukung kesiapan pelaksanaan APBD.

Kecenderungan peningkatan prosentase antara realisasi dan target mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semakin baik dari tahun ke tahun.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Kediri Tahun 2012 - 2016

TA	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2012	70,830,606,298.31	65,392,346,002.99	92.32	(5,438,260,295.32)
2013	85,732,509,588.09	79,733,436,604.70	93.00	(5,999,072,983.39)
2014	90.448.540.866,68	80.628.201.199,00	89.14	(9,820,339,667.68)
2015	114.093.625.331,20	102.547.907.299,00	89.88	(11,545,718,032.20)
2016	136.859.249.210,00	126.098.632.251,00	92.14	(10,760,616,959.00)

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Belanja Pegawai Kota Kediri untuk kurun waktu 2010-2013 mengalami rata-rata realisasi sebesar 91,30%. Ini dikarenakan terdapatnya pegawai yang purna tugas ataupun meninggal dunia sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun anggaran tersebut.

C Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, transfer dari Dana Cadangan (DCD), Penyertaan Modal, Pembayaran Hutang Pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Fungsi pembiayaan adalah sebagai penyeimbang antara pendapatan dengan belanja. Kebijakan yang dilakukan pengeluaran anggaran harus mempertimbangan aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan.

Tabel 3.5.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 s/d 2016

NO	URAIAN	REALISASI					Rata-rata pertumb.
		2012	2013	2014	2015	2016	
III	PEMBIAYAAN	90.665.951.748,26	118.087.856.803,20	224.554.931.922,78	428.429.158.907,04	535.711.940.751,80	260,33
A	PENERIMAAN DAERAH	100.465.951.748,26	119.337.856.803,20	226.554.931.922,78	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80	227,73
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	100.465.951.748,26	119.337.856.803,20	226.554.931.922,78	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80	227,73
B	PENGELUARAN DAERAH	9.800.000.000,00	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	-73,85
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah						
	- BPR	-	1.250.000.000,00	-	5.000.000.000,-	-	-
	- PD Pasar	-	-	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	-	-
	Pembayaran Pokok Utang	9.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Berdasarkan tabel 3.5 Pemerintah Kota Kediri melakukan pembiayaan selama kurun waktu 2012-2016. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, besarnya SiLPA tahun lalu cenderung mengalami peningkatan, rata-rata per tahun hingga mencapai 227,73%. Hal ini disebabkan oleh capaian atas pelampauan dari target penerimaan serta penghematan belanja program dari perangkat daerah. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal yang bersifat produktif serta meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan Daerah BPR dan Pasar.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa Aset, Kewajiban (utang), dan Ekuitas Dana pada tanggal Neraca tersebut dikeluarkan. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Daerah secara efisien dan efektif.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kota Kediri pada tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan yang positif, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.6
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 s/d Tahun 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumb.
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	142,497,269,429.15	282.510.375.076,43	473.143.229.609,57	574.453.818.793,92	271.137.917.991,37	33,59
1.1.1	Kas	119,338,220,781.20	226.571.918.620,78	435.439.296.817,94	536.397.256.279,14	231.315.581.902,41	37,09
1.1.2	Piutang	16.230.064.049,25	48.010.239.809,17	26.542.932.804,00	22.007.930.347,00	17.664.728.500,99	28,57
1.1.3	Persediaan	6,922,484,598.70	7.923.216.646,48	11.160.999.987,63	16.048.632.167,78	22.157.607.509,97	34,29
1.1.6.	Bagian lancer tuntutan kerugian daerah	6.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	35,136,740,034.47	31.481.500.174,81	179.434.455.859,02	188.857.336.453,71	190.447.189.864,86	116,41
1.2.1	Investasi Non Permanen	8,323,085,587.91	8.531.489.009,62	8.614.087.125,29	8.777.412.534,93	8.672.396.208,78	1,04
1.2.2	Investasi Permanen	26,813,654,446.56	22.950.011.165,19	170.820.368.733,73	180.079.923.918,78	181.774.793.656,08	159,07
1.3.	ASET TETAP	2,243,652,548,549.37	2.365.071.685.958,37	2.535.390.787.200,98	2.184.269.406.741,75	2.509.498.112.443,53	3,41
1.3.1	Tanah	933,137,301,444.38	933.191.653.444,38	933.270.130.229,38	1.014.111.248.443,38	1.013.991.312.194,38	2,17
1.3.2	Peralatan dan mesin	243,651,854,968.56	305.110.286.846,56	382.315.982.880,17	452.286.428.683,02	566.148.462.447,10	23,50
1.3.3	Gedung dan bangunan	444,488,614,277.69	471,672,984,735.69	517.953.046.578,69	565.592.507.867,18	921.810.626.710,61	22,03
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	317,494,101,733.26	334,243,380,875.26	361.635.651.400,26	451.848.324.181,99	561.883.300.052,72	15,69
1.3.5	Aset tetap lainnya	27,808,646,257.48	28,731,906,217.48	32.813.339.100,48	36.968.221.526,51	44.539.864.261,81	12,67
1.3.5	Konstruksi dalam pengerjaan	277,072,029,868.00	292,121,473,839.00	307.402.637.012,00	304.911.785.555,00	160.603.175.369,00	-9,37
1.3.6	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	(641.449.109.515,33)	(759.478.628.592,09)	
1.4	ASET LAINNYA	91,020,789,238.75	93.772.636.889,52	26.962.051.032,85	37.549.408.564,92	39.457.161.927,47	-5,97
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran						
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah	0,00	369.052.000,00	365.302.000,00	0,00	0,00	
1.4.3	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	276.100.000,00	243.187.500,00	0,00
1.4.4	Kemitraan dengan pihak ketiga	1,827,863,859.23	1,827,863,859.23	1.827.863.859,23	7.573.603.859,23	7.573.603.859,23	78,59
1.4.5	Aset tak berwujud	2,832,652,561.92	3,206,702,561.92	3.728.077.561,92	1.673.914.776,00	2.889.301.125.71	11,74
1.4.6	Aset lain-lain	86,360,272,817.60	88,303,134,818.37	21.040.807.611,70	28.025.789.929,69	28.751.069.442,53	-9,53

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumb.
	JUMLAH ASET DAERAH	2,512,307,347,251.74	2,757,493,446,528.72	3.214.930.523.702,42	2.985.129.970.554,30	3.010.540.382.227,23	5,01
2.	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,452,044,201.98	10,638,810,589.37	11.684.101.548,11	44.930.454.254,39	18.090.484.580,43	82,44
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	363,978.00	13,329,898.00	917.449,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Uang muka dari kas daerah			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka		35.052.158,50	0,00	4.745.392.480,75	6.006.586.158,73	0,00
2.1.4	Utang Beban			0,00		0,00	0,00
2.1.5	Utang jangka pendek lainnya	5.451.680.223,98	10.699.697.399,87	11.683.184.099,11	226.666.550,00	0,00	27,27
2.1.6	Utang Belanja			0,00	25.887.913.553,64	11.616.934.961,70	
2.1.7	Utang Pengadaan Aset Tetap			0,00	14.297.148.220,00	466.963.460,00	
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.452.044.201,98	10.748.079.456,37	11.684.101.548,11	44.930.454.254,39	18.090.484.580,43	82,66
3.	EKUITAS DANA	2.506.855.303.049,76	2.762.088.118.642,76	3.203.246.422.154,31	2.940.199.516.299,91	2.992.449.897.646,80	4,93
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.512.307.347.251,74	2.772.836.198.099,13	3.214.930.523.702,42	2.985.129.970.554,30	3.010.540.382.227,23	5,00

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Aset Daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang nilainya diukur dengan uang. Selama tahun 2012-2016 pertumbuhan rata-rata jumlah Aset Daerah Pemerintah Kota Kediri mencapai 5%. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Pemerintah pusat menekankan perlunya peningkatan alokasi belanja modal sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan aset daerah. Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan belanja infrastruktur sehingga dapat meningkatkan aset daerah. Namun, dalam rangka meningkatkan infrastruktur dasar masyarakat, terdapat belanja infrastruktur yang pada akhirnya diserahkan kepada masyarakat sehingga tidak dicatat dalam aset daerah.

Pertumbuhan rata-rata Aset Lancar tahun 2012-2016 mencapai 33,59% kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor penunjang kinerja Pemerintah Kota Kediri secara maksimal. Pertumbuhan rata-rata yang tertinggi terletak pada investasi jangka panjang, dimana pertumbuhan rata-ratanya mencapai 116,41%. Pertumbuhan pada Aset Tetap mencapai 3,41% namun aset lainnya mengalami pertumbuhan negatif yaitu -5,97%, hal ini disebabkan adanya penghapusan terhadap aset-aset rusak.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang memberikan informasi tentang Utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Ke-3 atau Klaim Pihak Ke-3 terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Kota Kediri dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2016) dengan rata-rata sebesar 82,66%, ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut Pemerintah telah maksimal dalam melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek. Dalam rangka pembiayaan pembangunan, pemerintah pusat menggunakan hutang untuk menutup defisit, hal ini berbeda dengan Pemerintah Kota Kediri yang cenderung memanfaatkan selisih lebih perhitungan anggaran untuk menutup defisit anggaran sehingga tidak menambah beban hutang daerah. Dalam rangka percepatan pembangunan, maka kedepan perlu mempertimbangkan penggunaan pendanaan dengan skema *Public Private Partnership* atau menggunakan dana *Coporate Social Responsibility* (CSR).

Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar dan Dana Investasi, merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kota Kediri selama kurun waktu 5 tahun mengalami pertumbuhan sebesar 4,93%

Gambaran Analisis Rasio Keuangan Kota Kediri sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
**Analisis Rasio Keuangan Kota Kediri
Tahun 2012 s/d Tahun 2016**

NO	Uraian	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	Rata-rata pertumb
1.	Rasio lancar (current ratio)	5,67	10,19	14,72	19,24	9,01	11,77
2.	Rasio quick (quick ratio)	5,40	9,90	14,37	18,71	8,27	11,33
3.	Rasio total hutang terhadap total asset	0,22	0,39	0,36	1,51	0,60	0,62
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,22	0,39	0,36	1,53	0,60	0,62

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas atau dapat disebut dengan Rasio Hutang. Rasio Likuiditas terdiri Rasio Lancar (Current Ratio), dan Rasio Cepat (Quick Ratio). Rasio Likuiditas adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah Pemerintah Daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendek ataukah tidak. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Dari hasil analisis rasio menunjukkan bahwa Rasio Lancar Kota Kediri tahun 2012-2016 mempunyai nilai lebih dari 1 (satu), yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Kediri telah dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar pada tahun 2012 sebesar 5,67% yang artinya Aset Lancar Pemerintah Kota Kediri adalah 5,67 kali lipat bila dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek (Tabel 3.5.) dan mencapai 10,19% pada tahun 2013, serta mengalami peningkatan menjadi 14,72% pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 menjadi 19,24% dan sebesar 9,01% pada tahun 2016.

Rasio Quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah Pemerintah Daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat. Pemerintah Kota Kediri mempunyai nilai yang baik untuk Rasio Quick (Quick Ratio) pada tahun 2015 yaitu mencapai 18,71%.

Perbandingan Total Aset dengan Total Utang disebut Rasio Solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh Kewajiban Jangka Panjang. Sebagaimana Tabel 3.5. menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Total Kewajiban terhadap Total Aset dan Rasio Kewajiban terhadap Modal

adalah 0,62%. Hal ini berarti bahwa Total Kewajiban Pemerintah Kota Kediri dapat ditutupi oleh Total Aset ataupun oleh Modal Pemerintah Kota Kediri.

Kondisi keuangan yang dicerminkan melalui Rasio Neraca dan APBD dapat ditunjukkan melalui Rasio Keuangan Pemerintah Kota Kediri terhadap APBD. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Kediri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Kediri.

Tabel 3.8
**Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kediri
Tahun 2012-2016**

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	Rasio Kemandirian (2/3*100)
2012	122,522,872,935.27	721,708,569,868.00	16,98
2013	144,562,729,326.62	831,707,969,627.00	17,38
2014	207.529.193.679,15	979.119.578.183,00	21,20
2015	221.927.133.610,59	962.206.259.092,00	23,06
2016	238.318.315.508,41	842.341.149.826,00	28,29

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Dari tabel 3.6. di atas menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kediri masih tergolong rendah, ini menunjukkan Kota Kediri masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, komponen terbesar masih berasal dari dana perimbangan. Namun demikian rasio kemandirian keuangan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

3.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi dari kebijakan belanja daerah Kota Kediri pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, antara lain :

1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
- Gambaran tentang Belanja Daerah Kota Kediri dalam kurun waktu 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Kediri Tahun Anggaran 2012 s.d Tahun 2016

URAIAN	REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH														
	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA	923,217,374,040.73	843,607,977,748.33	91.38	1,097,475,966,315.67	871,479,638,834.04	79.41	1,350,291,714,232,04	979,743,351,877,89	72.56	1,618,913,077,843,30	1,120,702,813,857,83	69,22	1,732,232,242,102,23	1,484,725,405,962,16	85,71
BELANJA TIDAK LANGSUNG	481,738,466,482.94	446,690,739,019.02	92.72	568,211,680,039.16	489,841,023,298,83	86,21	683.874.549.461,04	528,700,186,564,81	77,31	681.616.589.910,12	528.261.178.165,07	77,50	643.218.529.095,25	561.753.904.614,90	87,33
Belanja Pegawai	437,202,911,992.94	406,698,607,542.02	93.02	495,534,128,483.72	433,860,233,045.95	87.55	608.393.182.732,45	471,777,388,803,29	77.54	605.583.176.687,12	490,502,785,923,65	81,00	571,020,718,626,25	503,214,970,483,54	88.13
Belanja Hibah	32,629,584,563.00	30,138,541,067.00	92.37	46,604,358,640.00	33,478,908,352,00	71,84	36,306,461,073,00	32,291,379,113,00	88.94	27,658,986,000,00	21,711,780,000,00	78.50	30,660,220,000,00	29,589,010,000,00	96.51
Belanja Bantuan Sosial	10,210,599,517,00	9,158,220,000,00	89,69	24,862,553,390,44	21,937,183,975,88	88,23	35,510,726,760,71	23,577,323,977,52	66,39	35,590,277,448,00	15,202,566,312,42	42,72	35,210,770,000,00	27,517,848,901,36	78,15
Belanja Bantuan Keuangan	562,886,060.00	562,886,060.00	100.00	564,697,925.00	564,697,925.00	100.00	570,969,950,00	557,947,900,00	97.72	727,060,675,00	727,060,675,00	100.00	727,060,675,00	727,060,675,00	100.00
Belanja Tak Terduga	1,132,484,350.00	132,484,350.00	11.70	645,941,600.00	-	-	3,093,208,944,88	496,146,771,00	16.04	12,057,089,100,00	116,985,254,00	0.97	5,599,759,794,00	705,014,555,00	12.59
BELANJA LANGSUNG	441,478,907,557.79	396,917,238,729.31	89.91	529,264,286,276.51	381,638,615,535,21	72,11	666.417.164.771,00	451.043.165.313,08	67,68	937.296.487.933,18	592.441.635.692,76	63,21	1,089,013,713,006,98	922,971,501,347,26	84,75
Belanja Pegawai	70,830,606,298.31	65,392,346,002.99	92.32	85,732,509,588.09	79,733,436,604.70	93.00	90,448,540,866,68	80,628,201,199,00	89.14	114,093,625,331,20	102,547,907,299,00	89.88	136,859,249,210,00	126,098,632,251,00	92.14
Belanja barang dan jasa	155,708,217,150.00	141,679,338,198.32	90.99	197,702,526,677.42	177,406,623,310,51	89,73	267,671,242,316,40	216,865,911,968,08	81.02	399,512,932,329,39	315,430,879,038,76	78.95	471,716,311,038,28	415,027,359,366,76	87.98
Belanja Modal	214,940,084,109.48	189,845,554,528.00	88.32	245,829,250,011.00	124,498,555,620.00	50.64	308,297,381,587,92	153,549,052,146,00	49.81	423,689,930,272,59	174,462,849,355,00	41.18	480,438,152,758,70	381,845,509,729,50	79.48

Berdasarkan tabel 3.9 tersebut, aktivitas terbesar ada pada Realisasi Belanja Tidak Langsung hal ini mencerminkan aktivitas terbesar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan serta Belanja Tak Terduga. Pencapaian rata-rata diatas 90% ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan.

2. Proporsi Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang Belanja Daerah yang menggambarkan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.10
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Kediri Tahun 2012 s/d Tahun 2016*

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumb.
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	Belanja Tidak Langsung	406.709.312.686,02	433.860.233.045,95	471.777.388.803,29	490.502.785.923,65	503.214.970.483,54	5,49
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	308.425.919.605,00	328.644.034.397,00	345.147.033.169,00	366.129.364.938,00	380.308.177.681,00	5,38
2	Belanja Tambahan Penghasilan	93.310.914.808,00	100.385.270.990,00	120.885.527.357,00	117.066.039.535,00	116.105.605.554,00	6,01
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.911.000.000,00	1.896.720.000,00	2.667.000.000,00	2.667.000.000,00	2.868.000.000,00	11,85
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi	3.061.478.273,02	2.934.207.658,95	3.077.828.277,29	4.640.381.450,65	3.933.187.248,54	9,07
B	Belanja Langsung	104.701.916.197,99	123.037.409.461,70	135.814.139.731,00	159.831.039.830,00	212.109.473.540,00	19,57
1	Belanja Honorarium PNS	16,509,441,400.00	20.733.961.700,00	24.022.405.836,00	33.070.004.917,00	39.361.030.933,00	24,53
2	Belanja Honorarium NON PNS	25.051.505.500,00	30.048.882.700,00	19.896.572.200,00	27.815.934.900,00	34.300.326.595,00	12,32
3	Belanja Uang Lembur	3,091,395,600.00	3,046,633,000.00	3.560.222.500,00	3.924.214.333,00	4.206.475.000,00	8,21
4.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	20.611.203.502,99	25.540.584.204,70	33.066.050.663,00	37.737.753.149,00	48,230,799,723.00	23,83
5.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3,695,717,430.00	2,389,434,324.00	2.565.181.720,00	3.177.840.650,00	3.657.796.000,00	2,75
6.	Belanja premi asuransi kesehatan	505,800,000.00	345,000,000.00	3.000.000,00	4.106.000,00	8.830.000,00	5,25
7.	Belanja makanan dan minuman pegawai (tanpa pegawai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja pakaian dinas dan atributnya	2.822.038.400,00	2,776,142,550.00	2.922.772.700,00	296.962.500,00	400.178.000,00	-12,86
9.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1,838,015,000.00	3,013,827,200.00	2.506.549.000,00	449.313.800,00	471.338.000,00	-7,51
10.	Belanja perjalanan dinas	16,498,963,715.00	19,336,382,661.00	22.121.996.014,00	25.727.535.987,00	40.074.512.131,00	25,92
11.	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)**	14.077.835.650,00	15.806.561.122,00	25.149.389.098,00	27.627.373.594,00	41.398.187.158,00	32,77
	TOTAL	511.411.228.884,01	556.897.642.507,65	607.591.528.534,29	650.333.825.753,65	715.324.444.023,54	8,76
	TOTAL TANPA BELANJA MODAL	497.333.393.234,01	541.091.081.385,65	582.442.139.436,29	622.706.452.159,65	673.926.256.865,54	7,89

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Tabel 3.11
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Kediri
Tahun 2012 s/d Tahun 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumb.
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Tidak Langsung Pegawai	406,698,607,542.02	433,860,233,045.95	471.777.388.803,29	490.502.785.923,65	503.214.970.483,54	5,49
2	Belanja Langsung Pegawai	65.263.546.002,99	79.370.061.604,70	80.545.251.199,00	102.547.907.299,00	126.098.632.251,00	18,34
	Total	471.972.858.689,01	513.230.294.650,65	552.322.640.002,29	593.050.693.222,65	629.313.602.734,54	7,46

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Tabel 3.12
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Kediri
Tahun 2012 s/d Tahun 2016

No.	Uraian	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran	%
		A	B	(A/B) x 100%
1.	TA 2012	511.411.228.884,01	843.607.977.748,33	60,62
2.	TA 2013	556.897.642.507,65	871.479.638.834,04	63,90
3.	TA 2014	607.591.528.534,29	979.743.351.877,89	62,02
4.	TA 2015	650.333.825.753,65	1.120.702.813.857,83	58,03
5.	TA 2016	715.324.444.023,54	1.484.725.405.962,16	48,18

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Selama kurun waktu tahun 2012-2016, rata-rata belanja untuk memenuhi Kebutuhan Aparatur adalah 58,55%. artinya bahwa alokasi belanja untuk memenuhi Kebutuhan Aparatur relatif besar dibandingkan dengan Belanja untuk Masyarakat (Belanja Publik). Apabila dianalis lebih lanjut kontribusi rata-rata terbesar Belanja Daerah selama tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 ada pada Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah menunjukkan peningkatan positif. Proporsi Belanja Langsung mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 47,90% setiap tahunnya.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan
- 3) Kelompok-Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui :

- 1) Optimalisasi Pendapatan Daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
(2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah;
- 2) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, maka beberapa kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain :

- a) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
 1. Melaksanakan pendataan untuk menjangkau wajib pajak/retribusi baru;
 2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi daerah;
 3. Melaksanakan pemutakhiran data pajak dan retribusi;
 4. Melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/retribusi daerah;
 5. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur;
 6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah;
 7. Penerapan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan dan peningkatan PAD;
 8. Meningkatkan sarana prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD;
 9. Melaksanakan pembinaan kepada BUMD.
- b) Meningkatkan koordinasi, informasi dan pelaporan Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat, sehingga Dana Perimbangan maupun dana lain dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap penganggaran harus Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dan Belanja Publik. Belanja Aparatur dipergunakan untuk Belanja Gaji Pegawai, sedangkan Kebijakan Belanja Publik diarahkan untuk :

- a. Menunjang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Menjamin ketersediaan dana untuk pelayanan dasar bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja serta pengurangan tingkat kemiskinan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada program dan kegiatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap penganggaran harus Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dan Belanja Publik. Belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja.

Untuk Pembiayaan Daerah selama kurun waktu 2012-2016, terlihat bahwa surplus riil anggaran Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2012 mencapai Rp.18.871.905.054,94 sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi

Rp.107.217.075.119,58. Kenaikan surplus riil anggaran yang cukup tinggi hingga mencapai Rp. 208.874.226.984,26 terjadi pada tahun 2014. Untuk tahun 2015 mencapai Rp. 100.282.781.844,76. Sedangkan tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp. 304.804.566.890,75.

Pada tahun 2012 sampai dengan 2015 menunjukan bahwa realisasi belanja Pemerintah Kota Kediri masih lebih kecil (kurang) dari pada realisasi pendapatan sehingga pada periode tersebut Kota Kediri mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada tahun 2012 sampai 2015 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Suprlus/ Defisit Riil Anggaran Kota Kediri selama tahun 2012-2016 digambarkan pada Tabel 3.13 :

Tabel 3.13
Defisit Riil Anggaran Kota Kediri
Tahun 2012 s/d Tahun 2016

No.	URAIAN	TH 2012	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016
1	Realisasi Pendapatan Daerah	872.279.882.803,27	979.946.713.953,62	1.190.617.578.862,15	1.227.985.595.702,59	1.179.920.839.071,41
Dikurangi						
2	Belanja Daerah	843.607.977.748,33	871.479.638.834,04	979.743.351.877,89	1.120.702.813.857,83	1.484.725.405.962,16
3	Pembiayaan	9.800.000.000,00	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
Surplus/(defisit) riil		18,871,905,054.94	107,217,075,119.58	208,874,226,984.26	100,282,781,844.76	(304,804,566,890.75)

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Sesuai dengan tabel 3.13, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Kediri selama periode 2012-2016 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan antara lain adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Tabel 3.14
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Kediri
Tahun 2012 s/d Tahun 2016

No	URAIAN	Proporsi dari total surplus riil				
		TH 2012	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100.465.951.748,26	119.337.856.803,20	226.554.931.922,78	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80
2	Pencairan dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Utang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah		100.465.951.748,26	119.337.856.803,20	226.554.931.922,78	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Untuk realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Daerah Kota Kediri, selama tahun 2012-2016, gambarannya sebagaimana tabel 3.13 :

Tabel 3.15
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Kediri
Tahun 2012 S/D Tahun 2016**

URAIAN	TH. 2012		TH 2013		TH 2014		TH 2015		TH 2016	
	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
Jumlah SiLPA	119.337.856.803,20	100,00	226.554.931.922,78	100,00	435.429.158.907,04	100,00	535.711.940.751,80	100,00	230.907.373.861,05	100,00
Pelampauan penerimaan PAD	11.454.178.052,20	9,60	7.662.109.557,15	3,38	39.765.512.489,42	9,13	37.827.643.848,41	7,06	28.811.710.142,98	12,48
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	28.509.261.935,60	23,89	4.868.439.331,00	2,15	2.528.398.927,00	0,58	(21.816.527.834,00)	(4,07)	(61.902.911.628,00)	(26,81)
Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah	(2.234.979.477,00)	(1,87)	(11.971.944.447,00)	(5,28)	22.586.885.136,47	5,19	21.490.560.751,92	4,01	16.491.739,20	7,14
Penghematan Belanja	79.609.396.292,40	66,71	225.996.327.481,63	99,75	370.548.362.354,15	85,10	498.210.263.985,47	93,00	247.506.836.140,07	100,19
Pengeluaran pembiayaan	2.000.000.000,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Selama tahun 2012-2016, yang berkontribusi terhadap bertambahnya penerimaan SiLPA, antara lain :

- Rata-rata pelampauan penerimaan PAD secara keseluruhan mengalami kenaikan, konstribusinya sebesar 8,33%;
- Peningkatan rata-rata pelampauan penerimaan Dana Perimbangan pada SiLPA memberikan kontribusi sebesar 0,85%;
- Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata konstribusi sebesar 1,84%;
- Belanja memberi kontribusi terbesar yaitu 11,05%.

Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.13, tabel 3.14 dan tabel 3.15 dapat diketahui bahwa pertumbuhan Pembiayaan Pemerintah Kota Kediri mengalami surplus riil anggaran setiap tahunnya. Dalam analisis ini terdapat jumlah SiLPA yang cukup tinggi, dengan kondisi ini harapannya untuk pembiayaan kedepannya dapat ditingkatkan kembali dalam penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien sehingga tidak mengalami pertumbuhan SiLPA yang cukup tinggi.

Dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan di Kota Kediri, untuk pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat serta dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema, antara lain :

- Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Publik Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah;
- Kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

Kebijakan umum kerjasama pembiayaan pembangunan tersebut, yaitu :

- Kebijakan umum kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*), kerjasama ini diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah serta menurunkan disparitas wilayah sekaligus meningkatkan perekonomian daerah;

2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan;
3. Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada kerangka pendanaan ini akan dijelaskan berkaitan dengan pendapatan serta belanja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dan sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, maka beberapa kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain :

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
 1. Melaksanakan pendataan untuk menjangkau wajib pajak/retribusi baru;
 2. Melaksanakan tata kelola pemungutan yang berorientasi pada sistem pembayaran pajak/retribusi secara non tunai;
 3. Meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak/retribusi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan;
 4. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi daerah;
 5. Melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/retribusi daerah;
 6. Penerapan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan dan peningkatan PAD;
 7. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur;
 8. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah;
 9. Meningkatkan sarana prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD;
 10. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan PAD. Melalui optimalisasi kinerja BUMD, diharapkan BUMD mampu berperan secara optimal sebagai badan usaha yang sehat dan profesional dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- b. Melakukan kerjasama dengan investor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka membuka lapangan kerja yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Belanja Aparatur dipergunakan untuk Belanja Gaji Pegawai, sedangkan Belanja Publik ditekankan pada :

- a. Pencapaian target prioritas pembangunan, yaitu :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat;

4. Peningkatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur fisik prasarana, sosial dan ekonomi masyarakat;
 5. Penataan Kota yang Ramah Lingkungan dan berbasis Ekologi;
 6. Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan kreatif, merata dan berkeadilan;
 7. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik;
 8. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 9. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni dan budaya.
- b. Pengalokasikan/penganggaran Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat;
 - c. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana-prasarana perdagangan;
 - d. Belanja Tidak Langsung dialokasikan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis Belanja Periodik yang Wajib dan Mengikat, serta Pengeluaran Periodik Prioritas Utama. Pengeluaran periodik Pemerintah Daerah yang dibebankan pada keuangan daerah saat RPJMD tahun 2014-2019 dibuat, memperlihatkan kondisi seperti berikut :

Tabel 3.16
Pengeluaran Periodik, Wajib, Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Kediri Tahun 2011 S/D 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	Belanja Tidak Langsung	318,844,077,073.00	358,858,940,740.70	406,558,085,859.52	433,860,233,045.95	10.85
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	248,184,240,445.00	284,606,098,775.00	308,425,919,605.00	328,644,034,397.00	9.87
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	66,435,999,450.00	70,144,292,529.00	93,310,914,808.00	100,385,270,990.00	15.40
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2,070,600,000.00	1,906,800,000.00	1,911,000,000.00	1,896,720,000.00	(2.81)
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	2,153,237,178.00	2,201,749,436.70	2,910,251,446.52	2,934,207,658.95	11.75
B	Belanja Langsung	58,168,204,984.05	67,330,913,950.00	71,664,128,593.00	75,558,558,957.00	9.21
1	Belanja Honorarium PNS**)	14,247,124,422.00	14,815,646,400.00	16,509,441,400.00	20,733,961,700.00	13.67
2	Belanja Uang Lembur**)	1,415,640,500.00	1,841,418,000.00	3,091,395,600.00	3,046,633,000.00	32.17
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	2,289,189,750.00	3,205,071,327.00	3,695,717,430.00	2,389,434,324.00	6.66
5	Belanja premi asuransi kesehatan	498,999,990.00	519,934,200.00	505,800,000.00	345,000,000.00	(10.10)
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	5,813,942,392.00	5,467,892,609.00	5,741,521,000.00	6,437,715,900.00	3.73
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	569,946,000.05	2,353,603,500.00	3,336,708,400.00	2,776,142,550.00	112.64
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1,154,196,000.00	348,865,000.00	1,838,015,000.00	3,013,827,200.00	140.35
9	Belanja perjalanan dinas**)	14,054,930,878.00	16,422,207,842.00	16,498,963,715.00	19,336,382,661.00	11.50
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	18,124,235,052.00	22,356,275,072.00	20,446,566,048.00	17,479,461,622.00	0.10
	TOTAL	377,012,282,057.05	426,189,854,690.70	478,222,214,452.52	509,418,792,002.95	10.59

3.3.2. **Proyeksi Data Masa Akan Datang**

Pada perubahan RPJMD tahun 2014-2019 ini, untuk proyeksi pendapatan, belanja serta pembiayaan, ditampilkan data tahun 2015-2019, adapun untuk tahun 2015-2016 merupakan data realisasi, sedangkan tahun 2017 merupakan target dan untuk proyeksi ditampilkan data tahun 2018-2019. Berikut data dimaksud :

- a. Proyeksi Pendapatan 2015 - 2019

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2015 - 2019

Uraian	PENDAPATAN
Rata-rata Pertumbuhan (%)	-2.20%
Tahun Dasar (2015)	1.227.985.595.702,59
2016	1.179.920.839.071,41
2017	1.152.340.169.254,62
2018	1.121.265.861.625,17
2019	1.268.386.235.480,93

Sumber : BPKAD Kota Kediri

- b. Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang Periodik, Wajib, Mengikat dan Prioritas Utama

Tabel 3.18
Proyeksi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Yang Periodik, Wajib, Mengikat Serta Prioritas Utama

No	Uraian	Data Tahun Dasar /2013 (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Realisasi		Target	Proyeksi	
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	433,860,233,045.95	1,32	490.502.785.923,65	503.214.970.483,54	446.127.515.000,00	479.197.173.980,33	510.883.524.000,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	328,644,034,397.00	3,63	366.129.364.938,00	380.308.177.681,00	411.038.031.000,00	402.697.294.810,33	421.207.766.000,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	100,385,270,990.00	21,78	117.066.039.535,00	116.105.605.554,00	25.928.420.170,00	64.719.260.170,00	75.070.268.000,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,896,720,000.00	29,17	2.667.000.000,00	2.868.000.000,00	4.002.000.000,00	5.892.000.000,00	7.209.516.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	2,934,207,658.95	13,92	4.640.381.450,65	3.933.187.248,54	5.159.063.830,00	5.888.619.000,00	7.395.974.000,00
B	Belanja Langsung	75,558,558,957.00	6,77	94.277.351.781,00	128.254.672.195,00	120.248.859.597,00	98.386.831.144,00	113.615.526.000,00
1	Belanja Honorarium PNS**)	20,733,961,700.00	9,74	33.070.004.917,00	39.361.030.933,00	41.488.181.600,00	40.525.123.100,00	47.361.586.000,00
2	Belanja Uang Lembur**)	3,046,633,000.00	0,02	3.924.214.333,00	4.206.475.000,00	4.858.681.000,00	3.581.439.200,00	3.713.017.000,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00		0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	2,389,434,324.00	-12,25	3.177.840.650,00	3.657.796.000,00	3.564.834.000,00	1.641.050.000,00	1.516.574.000,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	345,000,000.00	5,71	4.106.000,00	8.830.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	2.695.000,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	2,776,142,550.00	-2,35	296.962.500,00	400.178.000,00	345.803.000,00	287.313.000,00	248.081.000,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	3,013,827,200.00	-15,93	449.313.800,00	471.338.000,00	383.535.000,00	245.845.000,00	211.197.000,00
9	Belanja perjalanan dinas**)	19,336,382,661.00	20,60	25.727.535.987,00	40.074.512.131,00	43.745.411.332,00	43.244.270.675,00	51.293.596.000,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll	17,479,461,622.00	-12,89	27.627.373.594,00	40.074.512.131,00	25.823.413.665,00	8.858.790.169,00	9.268.780.000,00
	TOTAL	509,418,792,002.95	4,95	584.780.137.704,65	631.469.642.678,54	566.376.374.597,00	577.584.005.124,33	624.499.050.000,00

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukkan dalam Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya akan digambarkan Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2019 mendatang, yaitu pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2015 s/d 2019

No	URAIAN	REALISASI		TARGET	PROYEKSI	
		2015	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1.227.985.595.702,59	1.179.920.839.071,41	1.152.340.169.254,62	1.121.265.861.625,17	1.268.386.235.480,93
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total penerimaan	1.227.985.595.702,59	1.179.920.839.071,41	1.152.340.169.254,62	1.121.265.861.625,17	1.268.386.235.480,93
Dikurangi:						
4	Belanja Tidak langsung	528.261.178.165,07	561.753.904.614,90	518.893.504.275,00	592.578.254.882,33	624.264.604.902,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	699.724.417.537,52	618.166.934.456,51	633.446.664.979,62	528.687.606.742,84	644.121.630.578,93

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Dengan melihat Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif mungkin. Berikut disajikan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan :

Tabel 3.20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kediri Tahun 2015-2019

No	Uraian	Proyeksi				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	699.724.417.537,52	618.166.934.456,51	633.446.664.979,62	528.687.606.742,84	644.121.630.578,93
II	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	592.441.635.692,76	922.971.501.347,26	824.110.999.443,00	685.227.817.036,00	738.022.399.081,42
II.b	Pembentukan dana cadangan					
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	94.277.351.781,00	128.254.672.195,00	120.248.859.597,00	98.386.831.144,00	113.615.526.000,00
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat sr prioritas utama					
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	498.164.283.911,76	794.716.829.152,26	703.862.139.846,00	593.326.901.892,00	624.406.873.081,42
III	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	201.560.133.626,24	-176.549.894.695,26	-70.415.474.866,38	-58.153.379.149,16	19.714.757.497,51
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	528.261.178.165,07	561.753.904.614,90	518.893.504.275,00	592.578.254.882,33	594.722.854.882,33
	Dikurangi:					

No	Uraian	Proyeksi				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	490.502.785.923,65	503.214.970.483,54	446.127.515.000,00	479.197.173.980,33	510.883.524.000,00
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	37.758.392.241,42	58.538.934.131,36	72.765.989.275,00	113.381.080.902,00	83.839.330.882,33
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	163.801.741.384,82	-235.088.828.826,62	-143.181.464.141,38	-171.534.460.051,16	-64.124.573.384,82

Sumber : BPKAD Kota Kediri

Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kediri untuk 5 tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2014-2019 yang dipergunakan untuk membiayai Kebutuhan Belanja Kota Kediri selain pada Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, yaitu :

1. Realisasi Tahun 2015 sebesar Rp. 699.724.417.538 atau sebesar 56,98% dari Total Penerimaan yang besarnya Rp. 1.227.985.595.702,59;
2. Realisasi Tahun 2016 sebesar Rp. 618.166.934.457 atau sebesar 52,39% dari Total Penerimaan yang besarnya Rp. 1.179.920.839.071,41;
3. Target Tahun 2017 sebesar Rp 633.446.664.979,62 atau sebesar 54,97% dari Total Penerimaan yang besarnya Rp. 1.152.340.169.254,62;
4. Proyeksi Tahun 2018 sebesar Rp. 528.687.606.743 atau sebesar 47,15% dari Total Penerimaan yang besarnya Rp. 1.121.265.861.625,17;
5. Proyeksi Tahun 2019 sebesar Rp. 644.121.630.579 atau sebesar 50,78% dari Total Penerimaan yang besarnya Rp. 1.268.386.235.480,93.

Jumlah kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

- a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk Prioritas Bidang Pendidikan 20% (duapuluh persen);
- b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, berkaitan dengan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per-urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu ;
- c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi Belanja Tidak Langsung seperti: Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga. Pengalokasian dana pada Prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terpenuhi.

Dengan tersusunnya Rencana Anggaran Pemerintah Kota Kediri untuk tahun 2015-2019 diharapkan menjadi acuan dalam penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *performance budgeting*.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan terjadi karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam perencanaan yang telah disusun. Gap terjadi karena tidak atau kurang tercapainya target pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dimasa datang. Pada umumnya permasalahan pembangunan daerah timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah/eksternal yang tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, permasalahan pembangunan daerah harus diidentifikasi agar dapat dicarikan solusinya. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan agar rencana pembangunan yang akan disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah serta demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah maka diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Bidang Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

1. Keterbatasan sarana prasarana PAUD (*indoor dan outdoor*) baik di TK, KB (Kelompok Bermain), TPA (Taman Penitipan Anak) maupun SPS (PAUD);
2. Belum semua tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, KB, TPA dan SPS (PAUD) memahami kebutuhan essensial anak dalam belajar;

3. Masih perlu peningkatan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan TK, KB, TPA dan SPS (PAUD); serta
4. Masih terbatasnya jumlah pengawas dan penilik TK, KB, TPA, SPS (PAUD) yang memahami konsep dasar PAUD;
5. Kualitas pendidikan baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah masih perlu ditingkatkan;
6. Belum tercukupinya sarana dan prasarana sekolah (Perpustakaan, Laboratorium, Peralatan praktek, Penambahan daya listrik, dan lainnya yang tercukupi 100%). Belum semua sekolah menggunakan TI dalam Proses Belajar Mengajar;
7. Belum tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan pertama dan menengah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, cacat fisik, cacat mental dan anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum secara merata sehingga menyebabkan masih kurang meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan yang diharapkan;
8. Manajemen pendidikan belum dapat berjalan secara efektif dan efisien sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran lembaga pendidikan masih rendah;
9. Lembaga-lembaga pendidikan non formal dalam menunjang keterampilan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kelulusannya belum terkoordinasi, terpadu dan terintegrasi dalam menunjang penurunan pengangguran di Kota Kediri.

Urusan Kesehatan

Permasalahan di urusan kesehatan antara lain sebagai berikut :

1. Sarana prasarana pelayanan kesehatan yang ada baik di puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan poskeskel belum sesuai dengan standart sehingga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, dengan pengadaan, peningkatan maupun perbaikan sarana dan prasarananya serta menjalin kemitraan dalam penyediaan layanan kesehatan;
2. Masih kurang standarnya peralatan medis maupun non medis yang tersedia di dalam sarana kesehatan terutama puskesmas sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, termasuk ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
3. Belum tersedianya secara memadai Dokter Spesialis yang dapat diperbantukan di masing-masing puskesmas;
4. Belum memadainya tenaga kesehatan pada unit-unit pelayanan kesehatan baik dari segi jumlah dan kompetensi, guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
5. Belum optimalnya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan ditandai dengan masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta belum optimalnya Pengelolaan tempat-tempat umum yang sehat dan lingkungan yang sehat;
6. Masih terdapatnya angka kematian ibu dan bayi, serta belum optimalnya pelayanan komplikasi dan kegawatdaruratan pada obstetri dan neonatal termasuk rujukan berjenjang;
7. Masih ditemukannya balita dengan gizi kurang dan gizi buruk di masyarakat;

- Maraknya penggunaan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional (jamu), bahan kimia terlarang dalam kosmetikadan bahan tambahan pangan terlarang dalam makanan/minuman memerlukan perhatian dan peningkatan pengendaliannya;
- Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam pembiayaan kesehatan khususnya masyarakat miskin, sehingga perlu adanya Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang mencukupi.

Layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah :

- Kurang memadainya bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), ditunjukkan dengan tingkat hunian yang overload dari kapasitas yang tersedia (terutama untuk ruang kelas III);
- Kurangnya fasilitas pendukung untuk pengunjung RSUD (fasilitas parkir, fasilitas keselamatan pengunjung, keamananan terhadap kebakaran);
- Kurang nyamannya bangunan RSUD yang ada untuk pemberian pelayanan kesehatan karena keterbatasan lokasi untuk pengembangan;
- Lamanya waktu tunggu antrian di poli RSUD (rata-rata waktu tunggu pengunjung poli adalah 2 jam sampai terlayani oleh dokter) dan ketepatan jam kerja dokter di RSUD;
- Kurangnya sistem rujukan berjenjang dari puskesmas ke RSUD sehingga sering mengakibatkan overloaddnya pasien RSUD;
- Kurangnya ketrampilan pegawai RSUD dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
- Keterbatasan Lahan di RSUD Gambiran diatasi dengan pembangunan RSUD Gambiran II, namun sampai dengan akhir tahun 2016 RSUD Gambiran II belum selesai pembangunannya

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa pekerjaan menjadi fokus urusan pekerjaan umum diantaranya jalan, jembatan, drainase, penataan ruang, serta penataan sarana prasarana permukiman. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya jalan, jembatan, drainase merupakan prasarana dasar yang penting yang harus selalu dioptimalkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum antara lain sebagai berikut :

- Ruas-ruas jalan kota di Kota Kediri yang menghubungkan antar wilayah kecamatan dan kelurahan yang dalam kondisi baik pada tahun 2013 sebanyak 86,91%, sehingga masih diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemeliharaan jalan;

Fasilitas Jalan di Kota Kediri Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
I. JENIS PERMUKAAN					
1. Diaspal	331,345	334,097	335,077	338,394	338,394
2. Kerikil	-	-	-	-	-
3. Tanah	-	-	-	-	-
4. Beton Rabat	-	-	0,187	0,187	0,187
Jumlah	331,345	334,097	335,264	338,581	

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	
II. KONDISI JALAN						
1. Baik	236,920	282,745	292,740	297,637	297,637	
2. Sedang	62,595	34,342	23,774	21,724	21,724	
3. Rusak	29,245	15,755	17,700	17,171	17,171	
4. Rusak Berat	2,585	1,255	1,050	2,051	2,051	
Jumlah	331,345	334,097	335,264	338,583		338,583
III. KELAS JALAN						
1. Kelas I	-	-	-	-	-	
2. Kelas II	125,252	125,252	125,252	125,252	125,252	
3. Kelas III	-	-	-	-	-	
4. Kelas III A	47,795	47,795	47,795	47,795	47,795	
5. Kelas III B	50,446	50,446	50,446	50,446	50,446	
6. Kelas III C	92,934	92,934	92,934	92,934	92,934	
7. Kelas IV	-	-	-	-	-	
8. Tidak Dirinci	14,918	17,670	18,837	22,156	22,156	
Jumlah	331,345	334,097	335,264	338,583	338,583	338,583

- Ruas jalan utama yang menghubungkan antara Kota Kediri dengan wilayah Kabupaten banyak yang berada dalam kondisi kurang baik. Perbaikan terhadap kerusakan jalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri karena status jalan yang merupakan kewenangan Provinsi dan Pusat (Jalan Provinsi dan Jalan Nasional);

Hal ini mengakibatkan ketimpangan antara capaian indikator kinerja dengan kondisi riil, dimana secara data statistik kualitas dan kondisi jalan yang menjadi kewenangan kota berkondisi mantap dan berkualitas baik jumlahnya sangat banyak, namun kenyataan di lapangan kondisi eksisting jalan-jalan protokol masih banyak yang mengalami rusak ringan dan rusak berat karena bukan merupakan kewenangan kota untuk memelihara;
- Tingginya frekuensi terjadinya pelanggaran muatan berlebih (overload) pada hampir semua ruas jalan di Kota yang mengakibatkan kerusakan dini jalan dan berakibat berkurangnya umur pakai jalan;

Tidak beroperasinya jembatan-jembatan timbang di Jawa Timur mengakibatkan kuranya pengawasan terhadap kendaraan dengan muatan berlebih;
- Meningkatnya kerusakan jalan sebagai akibat bencana gunung meletus, banjir dan genangan di badan jalan sehingga semakin meningkatkan frekuensi kerusakan jalan;
- Pertumbuhan kapasitas layanan jalan lebih rendah/tidak seimbang dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan pengguna jalan;

Data dari Dinas Perhubungan tahun 2017, Kediri tercatat masuk dalam 3 besar di wilayah Jawa Timur, untuk pembelian sepeda motor terbanyak setelah Surabaya dan Sidoarjo.

Sedangkan menurut data statistik jumlah Kendaraan di Kota Kediri pada tahun 2016 sebagai berikut:

Kecamatan	Jenis Kendaraan			
	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
Mojoaroto	6381	44	1373	55151
Kota	7454	84	4041	48838
Pesantren	4630	157	1513	40824
KOTA KEDIRI	18465	285	6927	144813

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri

6. Belum semua perlintasan kereta api di jalan kelas II dan kelas III terdapat palang pintu pengaman sehingga membahayakan pengguna jalan;
7. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur;
8. Konstruksi beberapa jembatan yang ada kurang mampu menampung pertumbuhan pengguna lalu lintas jembatan;
9. Kerusakan lingkungan (banjir/longsor) yang mengakibatkan menurunnya umur pakai jembatan;
10. Terdapat drainase jalan nasional di kawasan perkotaan yang berada di bawah kewenangan provinsi, dengan kondisi yang kurang optimal dalam mengalirkan air limpasan serta kapasitas yang kurang dibandingkan dengan debit air limpasan mengakibatkan genangan dan memicu banjir di dalam kota;
11. Belum adanya stasiun pompa untuk mengatasi genangan banjir dalam kota, peningkatan pembangunan saluran pembuangan di sebabkan kuantitas limbah industri dan RT meningkat;
12. Kondisi jembatan yang perlu peningkatan dan pembangunan jembatan brawijaya yang belum terselesaikan;
13. Kurang tercukupinya kebutuhan irigasi yang baik untuk meningkatkan produksi pertanian;
14. Semakin sempitnya *catchment area* akibat dari cepatnya pertumbuhan kawasan terbangun di kawasan perkotaan serta penurunan kualitas daya serap tanah terhadap air hujan;
15. Terjadi kerusakan lingkungan di kawasan sumber air yang mengakibatkan penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air bersih;
16. Kurang pedulinya masyarakat yang bertempat tinggal disepanjang saluran induk drainase terhadap kebersihan saluran. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada badan saluran sehingga mengakibatkan saluran tersumbat;
17. Terjadi kerusakan hutan yang mengakibatkan pada menurunnya potensi sumber air baku;
18. Kualitas air bersih perpipaan di beberapa lokasi kurang baik, karena kontaminasi benda asing pada jaringan pipa distribusiyang bocor serta tua dan proses perbaikan jaringan;
19. Terjadi idle capacity air bersih sebesar 29 liter/detik pada PDAM, hal ini disebabkan pipa distribusi yang kurang cukup untuk melayani pelanggan baru;
20. Kondisi eksisting sarana dan prasarana distribusi air minum sudah banyak yang rusak berupa jaringan perpipaan serta meteran air pelanggan yang sudah tidak akurat;
21. Infrastruktur drainase kota yang kurang memadai baik dari kapasitas maupun dari kualitas;

Secara umum, saluran drainase Kota Kediri adalah merupakan saluran irigasi pertanian yang telah dimodifikasi menjadi saluran drainase kota, hal ini disebabkan karena pada awalnya sebagian besar dari Kota Kediri merupakan konversi dari lahan pertanian.

Sistem dari saluran irigasi pertanian berbeda dengan sistem drainase kota, untuk saluran irigasi pertanian makin ke hilir makin kecil dimensinya, sedangkan saluran drainase perkotaan makin ke hilir makin besar dimensinya. Sehingga ada suatu keadaan yang berlawanan, oleh karena itu ada beberapa kapasitas saluran drainase yang ada saat ini sudah tidak mencukupi kapasitasnya (SSK Kota Kediri, 2014).

Kondisi saluran drainase pada Kota Kediri umumnya saluran tertutup. Bentuk saluran drainase pada umumnya berbentuk lingkaran/ bulat dan berbentuk trapesium. Secara fisik dapat terlihat bahwa sebagian besar saluran drainase di

Kota Kediri sudah diplengseng atau diperkuat dengan pasangan, namun karena kurang perawatan sebagian telah rusak, tertimbun sampah dan terjadi sedimentasi. Sebagian dari saluran ini merupakan saluran alami atau irigasi yang tidak pernah dirawat terutama yang melewati daerah pemukiman penduduk dan jauh dari saluran primer, bentuknya secara umum tidak beraturan dan masih berupa saluran tanah.

Beberapa saluran drainase khususnya yang berada di pusat kota yang merupakan saluran sekunder, diatasnya sudah didirikan bangunan-bangunan besar sehingga sulit untuk melakukan pemeliharaan. Selain itu, terdapat saluran yang sudah diapit oleh bangunan besar, sehingga tidak mungkin untuk dilebarkan jika kapasitasnya tidak memenuhi sesuai yang diperlukan nantinya. Diijumpai juga saluran yang melintang jalan dimana ukuran gorong-gorongnya terlalu kecil dibanding dengan dimensi salurannya, bahkan diantaranya saluran telah tersumbat oleh sedimen dan sampah

22. Meningkatnya sedimentasi yang berakibat pada peluapan air ke badan jalan sehingga menimbulkan genangan air;

Titik-titik genangan di beberapa wilayah di Kota Kediri, antara lain :

Kecamatan Mojovento :

No	Lokasi	Kedalaman	Lama Genangan	Sub Sistem
1	Jl. Bandar Kidul	40-50 cm	2 jam	Inspeksi 3
2	Perempatan Bandar Kidul - Wakhid Hasyim	40-50 cm	1 jam	Inspeksi 3
3	Jl. Semeru	20 cm	30 menit	Hasyim Asyari
4	Jl. Raung - Jl. Gor Jayabaya (Arah Selatan ke Muning)	30 cm	1 jam	Hasyim Asyari
5	Jl. Sersan Bahrin	20-30 cm	30 menit	Mrican
6	Jl. Merbabu	20 cm	30 menit	Mrican
7	Jl. Gatot Subroto	45 cm	2 jam	Kali Ngampel
8	Jl. Veteran Bag. Barat	30 cm	1 jam	Kali Kedak
9	Bundaran Sekartaji	30 cm	1 jam	Inspeksi 3
10	Jl. Mojovento Utara (Pom Bensin Ngampel)	45 cm	1 jam	Inspeksi 1

Kecamatan Kota :

No	Lokasi	Kedalaman	Lama Genangan	Sub Sistem
1	Jl. Hasanuddin	30 cm	1 jam	Mayor Bismo
2	Perempatan Jl. SIngosari (Petra)	30 cm	30 menit	Mayor Bismo
3	Jl. KKO Usman – Dandangan Gg 1	40 cm	30 menit	Mayjen Sungkono 3 & 4
4	KKO Harun	40 cm	1 jam	Mayjen Sungkono 3 & 4
5	Jl. Sam Ratulangi	30-40 cm	1 jam	Panglima Sudirman 1
6	Jl. Trunojoyo	30 cm	1 jam	Kali Glodok
7	Jl. Sersan Suharmaji (selatan UNISKA)	40 cm	3 jam	Kali Tawang
8	Jl. Tembus Kaliombo	30 cm	1 jam	Kali Parung
9	Jl. Balowerti Gang 1	30 cm	1 jam	Mayor Bismo
10	Jl. Ir. Sutami (Kodim 0809)	30 cm	1 jam	Kali Kresek
11	Pertigaan Jl, Mayor Bismo - Jl. Semampir	30 cm	30 menit	Mayor Bismo
12	Jl. Chairil Anwar	30 cm	1 jam	Kali Tawang
13	Jl. Sultan Agung	30 cm	1 jam	Panglima Sudirman 3 & 4
14	Jl. Pattimura	30 cm	1 jam	Panglima Sudirman 3 & 4

Kecamatan Pesantren :

No	Gambaran lokasi	Kedalaman	Lama Genangan	Sub Sistem
1	Jl. HOS Cokroaminoto	30 cm	1 jam	Kali Tawang
2	Jl. Betet – Bawang	40 cm	1 jam	Kali Tawang
3	Jl. Letjen Sutoyo Gang 4 (Balai Kelurahan Burengan Arah Makam)	30 cm	1 jam	Kali Kresek

23. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan air limbah dan limbah tinja.

Adapun beberapa permasalahan terkait dengan penataan ruang di Kota Kediri antara lain :

1. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan bangunan di Kota Kediri; Hal ini dapat dilihat dari Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan yang hanya berkisar di angka 60-65% dalam kurun waktu 2014-2018.
2. Belum terwujudnya kawasan-kawasan strategis di Kota Kediri; Sebagaimana diatur dalam pasal 58 Perda Kota Kediri nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030, Kota Kediri telah menetapkan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup, tetapi hingga 2018, pengembangan kawasan perdagangan jasa dan kawasan peruntukan industri baru sebagaimana direncanakan di Kecamatan Pesantren belum terwujud.
3. Belum optimalnya pemanfaatan peraturan kawasan strategis; Hingga tahun 2018, Rencana Rinci Pengembangan Kawasan Strategis sebagai amanat tindak lanjut Perda Kota Kediri nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030 belum tersusun.
4. Kurangnya pemahaman dari segenap stakeholder dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengaturan tata ruang bagi keseimbangan, keserasian, kenyamanan dan berkelanjutan program pembangunan, kurangnya RTH di perkotaan, belum optimalnya perwujudan kawasan permukiman/industri di Kota Kediri, dengan RTRK sebagai dokumen tata ruang sebagai acuan perencanaan pembangunan.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya. Permasalahan terkait dengan perumahan dan permukiman di Kota Kediri antara lain :

1. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman di Kota Kediri;
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman;
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan pemukiman (RTLH, air bersih, dan air limbah);
4. Kurang kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan yang mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh;
5. Kurangnya tersedia animas, peningkatan kesadaran masyarakat masih rendah mengenai sistem pengamanan kebakaran di lingkungan padat penduduk. (kebersihan, air limbah dan drainase);
6. Masih kurangnya Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman Umum yang dikelola Pemkot (Semampir, Setonogedong dan Makam Cina Klotok);
7. Belum tersedianya regulasi berupa Perda yang mengatur tentang tata tertib Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Masih kurangnya integrasi pendataan tentang kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan kebutuhan alokasi pendanaan;

9. Masih terdapat sebagian wilayah di 10 kelurahan yang masuk dalam kategori Kawasan Kumuh Ringan dan Kumuh Sedang pada program nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sehingga perlu penanganan dengan mengoptimalkan anggaran pada Kelurahan;
10. Belum terbentuknya kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi program yang beranggotakan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana amanat UU no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Masih terdapat warung-warung liar, peredaran miras, pelacuran dan tindak asusila terselubung, bangunan tanpa ijin, gepeng dan disiplin PNS serta pelajar;
2. Masih maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda, misalnya masih banyak pelanggaran dalam pemasangan reklame serta kawasan bebas reklame, kawasan bebas PKL serta masih tingginya jumlah pelanggaran Perda;
4. Kecilnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk;
5. Kecilnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk;
6. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan yang belum memadai;
7. Cenderung meningkatnya Angka kriminalitas;
8. Unjuk rasa masyarakat (demo) yang cenderung meningkat;
9. Personil Polisi Pamong Praja masih belum mencukupi dan kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan.

Urusan Sosial

Beberapa permasalahan sosial di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Belum tuntasnya penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Kediri. Berdasarkan data susenas jumlah penduduk miskin di Kota Kediri sebanyak 23.770 jiwa (2015) dan menurun menjadi 23.640 jiwa (2016). Angka tersebut masih cukup tinggi 8,40% jika dibanding dengan jumlah penduduk Kota Kediri yang mencapai 281.978 jiwa pada tahun 2016;
2. Belum optimalnya verifikasi dan validasi data masyarakat miskin sehingga pemberian bantuan kurang tepat sasaran;
3. Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum ditangani oleh Pemerintah Kediri. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila yang beroperasi di Kota Kediri;
4. Kota Kediri belum mempunyai tempat penampungan dan rehabilitasi bagi PMKS yang dirazia;
5. Masih kurangnya kesadaran dari PMKS di Kota Kediri. Tercermin dari adanya penolakan dari PMKS untuk mengikuti program pelatihan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Kediri;
6. Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Tenaga Kerja

Beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Kota Kediri antara lain :

1. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Kediri. Pada tahun 2016 TPT Kota Kediri mencapai 8,46%, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan TPT Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 4,21%;
2. Pencari kerja masih berorientasi pada lapangan kerja di sektor formal;
3. Belum adanya BLK di Kota Kediri;
4. Masih adanya perusahaan khusus bergerak di sektor perdagangan kecil yang belum memahami tentang peraturan ketenagakerjaan khususnya dalam pemberian upah sesuai UMK dan pemberian jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja;
5. Belum adanya regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri terhadap perusahaan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja, pentingnya fungsi dan peran lembaga kerjasama bipartit bagi kelangsungan perusahaan;
6. Minimnya tenaga pengawas dan pengawas spesialis ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri sehingga pemeriksaan perusahaan dan pengujian peralatan produksi yang dimiliki oleh perusahaan kurang maksimal untuk dilaksanakan;
7. Belum dilibatkannya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam proses penerbitan ijin perusahaan di Kota Kediri. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk menjalin kerjasama dengan dunia usaha dalam perekrutan tenaga kerja lokal.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuh-kembang anak. Beberapa permasalahan di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Masih minimnya SDM tentang pemahaman peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai aparat yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Masih banyaknya kasus tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
4. Masih rendahnya pengetahuan tentang KHA pada Satgas PPA kelurahan;
5. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta belum maksimalnya kinerja Pokja PUG Kota Kediri;
6. Tidak adanya tenaga fungsional di lapangan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan, sehingga berpengaruh terhadap pembinaan lanjut sasaran garapan.

Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial dan politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi krisis pangan, energi dan finansial. Kemandirian pangan ini belum bisa optimal mengingat produksi panen yang belum stabil, dikarenakan anomali cuaca dan banyaknya organisme pengganggu tumbuhan yang menyebabkan gagal panen serta kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber cadangan pangan tingkat rumah tangga. Adapun permasalahan ketahanan pangan yang muncul adalah :

1. Belum optimalnya penguatan penyediaan cadangan pangan dan energi yang mencukupi untuk masyarakat Kota Kediri sepanjang tahun serta kurangnya inovasi masyarakat untuk memanfaatkan ketersediaan sumber pangan alternatif dalam memenuhi sebagai sumber gizi dan kalori keluarga;
2. Persediaan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan belum maksimal;
3. Keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan masih kurang;
4. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras;
5. Kurang optimalnya pengawasan distribusi dan akses pangan masyarakat.

Urusan Pertanahan

Identifikasi masalah pada bidang pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi lahan sebagai kepastian dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Beberapa permasalahan antara lain :

1. Proses pengadaan tanah memerlukan waktu yang relatif panjang;
2. Sering terjadinya perubahan peraturan dan kurangnya sistem informasi.

Urusan Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan terkait dengan fokus lingkungan hidup di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran pengusaha dalam mengelola limbah industrinya, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan;
Kota Kediri memiliki Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebanyak 102 kerajinan batik, 34 kerajinan tenun dan 9 pengusaha industri tahu.
Dan jumlah tersebut hanya 1 (satu) IKM yang memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC) yakni industri tahu POO.
Sehingga dibutuhkan upaya dari Pemerintah Kota Kediri untuk mensosialisasikan pentingnya IPLC bagi IKM di Kota Kediri demi terlindungnya kualitas lingkungan hidup dan kepastian hukum dalam berusaha
2. Kapasitas SDM yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas sesuai dengan beban kerja khususnya di bidang teknis dan fungsional lingkungan;
3. Belum optimalnya pendataan, pengawasan dan pengendalian terhadap jenis kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari maupun yang wajib AMDAL, UKL/UPL dan SPPL;

- 4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terakreditasi untuk pemantauan kualitas lingkungan baik yang berkaitan dengan air, tanah, maupun udara;
- 5. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup;
- 6. Masih minimnya tenaga PPNS dan PPLH di bidang lingkungan hidup;
Saat ini Kota Kediri hanya memiliki Tenaga PPNS 1 orang dan PPLH 1 orang yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.
- 7. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dunia usaha dalam penyusunan dokumen AMDAL, UKL/UPL dan SPPL;
Sejak UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan, Kota Kediri terus melakukan sosialisasi secara intens ke pengusaha untuk menyusun dokumen AMDAL, UKL/UPL dan SPPL namun sampai saat ini jumlah pengusaha yang telah menyusun AMDAL/DELH sebanyak 7, Dokumen UKL/UPL sebanyak 489 dan dokumen SPPL sebanyak 1.816 pengusaha.
- 8. Belum tertanganinya secara tuntas lahan-lahan kritis yang ada sehingga rentan erosi, longsor dan banjir;
- 9. Menurunnya kualitas lingkungan (udara dan air) akibat aktifitas industri, banyaknya kendaraan bermotor serta limbah industri dan domestik;
- 10. Kurangnya armada untuk layanan pertamanan dan kurangnya optimalnya petugas pertamanan dalam merawat/memelihara taman;
Armada untuk layanan pertamanan di Kota Kediri terdapat 3 truk tangki penyiram air dan 1 tangki roda 3, sedangkan untuk personil pertamanan terdapat 125 orang. Sehingga dalam pengelolaan taman publik di Kota Kediri jumlah tersebut masih dirasa kurang.
- 11. Masih adanya lahan-lahan di fasilitas publik yang belum diperindah dengan taman-taman sebagai peningkatan RTH;
- 12. Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungannya yang mengakibatkan lingkungan permukiman yang kumuh dan fungsi drainase yang tidak maksimal;
Salah satu indikator permukiman kumuh adalah drainase lingkungan yang kurang baik. Dampak dari tidak maksimalnya fungsi drainase sebagai akibat dari kondisi konstruksi maupun kurang pedulinya masyarakat adalah terjadinya genangan di beberapa wilayah di Kota Kediri, antara lain :

Kecamatan Mojoroto :

No	Lokasi	Kedalaman	Lama Genangan	Sub Sistem
1	Jl. Bandar Kidul	40-50 cm	2 jam	Inspeksi 3
2	Perempatan Bandar Kidul - Wakhid Hasyim	40-50 cm	1 jam	Inspeksi 3
3	Jl. Semeru	20 cm	30 menit	Hasyim Asyari
4	Jl. Raung - Jl. Gor Jayabaya (Arah Selatan ke Muning)	30 cm	1 jam	Hasyim Asyari
5	Jl. Sersan Bahrin	20-30 cm	30 menit	Mrican
6	Jl. Merbabu	20 cm	30 menit	Mrican
7	Jl. Gatot Subroto	45 cm	2 jam	Kali Ngampel
8	Jl. Veteran Bag. Barat	30 cm	1 jam	Kali Kedak
9	Bundaran Sekartaji	30 cm	1 jam	Inspeksi 3
10	Jl. Mojoroto Utara (Pom Bensin Ngampel)	45 cm	1 jam	Inspeksi 1

Kecamatan Kota :

No	Lokasi	Kedalaman	Lama Genangan	Sub Sistem
1	Jl. Hasanuddin	30 cm	1 jam	Mayor Bismo
2	Perempatan Jl. Slingosari (Petra)	30 cm	30 menit	Mayor Bismo
3	Jl. KKO Usman – Dandangan Gg 1	40 cm	30 menit	Mayjen Sungkono 3 & 4
4	KKO Harun	40 cm	1 jam	Mayjen Sungkono 3 & 4
5	Jl. Sam Ratulangi	30-40 cm	1 jam	Panglima Sudirman 1
6	Jl. Trunojoyo	30 cm	1 jam	Kali Glodok
7	Jl. Sersan Suharmaji (selatan UNISKA)	40 cm	3 jam	Kali Tawang
8	Jl. Tembus Kaliombo	30 cm	1 jam	Kali Parung
9	Jl. Balowerti Gang 1	30 cm	1 jam	Mayor Bismo
10	Jl. Ir. Sutami (Kodim 0809)	30 cm	1 jam	Kali Kresek
11	Pertigaan Jl, Mayor Bismo - Jl. Semampir	30 cm	30 menit	Mayor Bismo
12	Jl. Chairil Anwar	30 cm	1 jam	Kali Tawang
13	Jl. Sultan Agung	30 cm	1 jam	Panglima Sudirman 3 & 4
14	Jl. Pattimura	30 cm	1 jam	Panglima Sudirman 3 & 4

Kecamatan Pesantren :

No	Gambaran lokasi	Kedalaman	Lama Genangan	Sub Sistem
1	Jl. HOS Cokroaminoto	30 cm	1 jam	Kali Tawang
2	Jl. Betet – Bawang	40 cm	1 jam	Kali Tawang
3	Jl. Letjen Sutoyo Gang 4 (Balai Kelurahan Burengan Arah Makam)	30 cm	1 jam	Kali Kresek

13. Adanya pedagang kaki lima yang belum tertata, sehingga kurang memperindah wajah kota;
Kota Kediri sebenarnya telah memiliki Perwali no 37 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, namun penegakan hukum untuk pelanggaranannya masih dirasa kurang.
14. Masih kurangnya armada angkutan sampah yang berfungsi secara optimal karena faktor usia kendaraan;
Saat ini sarana transportasi sampah berjenis roda 4 di Kota Kediri berjumlah 19 armada yang terdiri dari 10 Dump truck, 6 Arm Roll, 1 truck, 1 cery dan 1 pick up.
Dengan spesifikasi armada pengadaan diatas tahun 2010 sebanyak 4 buah dan dibawah tahun 2010 sebanyak 15 buah.
Sedangkan untuk sarana pengangkut sampah jenis roda tiga (Tosa) sebanyak 21 buah dengan spesifikasi pengadaan diatas tahun 2010 sebanyak 4 buah dan dibawah tahun 2010 sebanyak 17 buah.

Sarana Transportasi Sampah di Kota Kediri

No	Kendaraan Bermotor		
	Merk/Type	Roda 4	Tahun
1	Isuzu Nkr 71	Dump Truck	2006
2	Isuzu Nkr 71	Dump Truck	2006
3		Cery	
4	Isuzu Nkr 71	Arm Roll	2006
5	Isuzu Nkr 71	Arm Roll	2006
6	Daihatsu /V82rh	Dump Truck	1998
7	Daihatsu /V82rh	Dump Truck	1994
8	Daihatsu /V82rh	Arm Roll	1999
9	Daihatsu /V82rh	Dump Truck	1993
10	Daihatsu /V82rh	Arm Roll	1998
11	Daihatsu /V82rh	Arm Roll	1998

No	Kendaraan Bermotor		
	Merk/Type	Roda 4	Tahun
12	Isuzu Nkr 66	Dump Truck	2003
13	Toyota Dyna Ryno by 43	Dump Truck	2000
14	Toyota Dyna Ryno by 43	Dump Truck	2000
15	Isuzu Nkr 71 B2	Dump Truck	2007
16	Hino	Arm Roll	2012
17	Isuzu Nkr 71 E2-2	Dump Truck	2014
18	Isuzu Nkr 71 E2-2	Dump Truck	2014
19	Grand Max		2013

15. Pengelolaan sampah di TPA belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan lahan;
Kota Kediri memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA I) seluas 2,6 Ha yang saat ini sudah dalam kondisi overload. Pada tahun 2014 telah dibangun TPA II seluas 2,1 Ha dengan system sanitary landfill.
Volume produksi sampah di Kota Kediri pada tahun 2017 sebanyak ± 127.273 m³ , sehingga dapat diperkirakan TPA II Kota Kediri akan penuh sampai bulan November – Desember tahun 2018. Dengan kondisi tersebut diperlukan lahan baru untuk perluasan TPA di Kota Kediri
16. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga dan lingkungan sebelum dibuang ke TPS atau TPA;
Sesuai Perda Kota Kediri No 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
Namun dalam kenyataanya banyak warga yang langsung membuang sampah ke TPS atau TPA tanpa melalui pengurangan dan penanganan sampah sehingga dapat memperbesar volume sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Kota Kediri
17. Belum optimalnya pemanfaatan TPS untuk pengelolaan berbasis 3 R (*Reduce, Reuse dan Recycle*);
18. Masih minimnya evaluasi terhadap kebijakan terkait dengan pengintegrasian aspek lingkungan hidup (kajian lingkungan hidup strategis).

Sesuai UU no 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap perencanaan pembangunan harus menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna pengintegrasian Kebijakan Rencana dan Program (KRP) kedalam aspek lingkungan Hidup namun saat ini KLHS baik RPJMD maupun RTRW hanya digunakan sebagai prasyarat dalam penyusunan kebijakan tanpa adanya evaluasi dampak dari kebijakan tersebut.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam menilai tertib administrasi kependudukan di Kota Kediri, indikator yang dapat digunakan adalah jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan akte nikah. Persentase penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2016 sebesar 90,92%. Kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa penduduk tersebut telah terdaftar sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil Kota Kediri sudah sangat baik, namun perlu peningkatan sehingga seluruh penduduk yang tinggal di Kota Kediri secara administrasi terdaftar dalam data base kependudukan. Beberapa permasalahan di bidang catatan sipil dan kependudukan antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi kebijakan kependudukan kurang tepat sasaran;
2. Kurangnya frekuensi sosialisasi secara langsung kepada masyarakat;
3. Belum optimalnya pelayanan dalam penyelesaian KK dan KTP dalam jangka waktu satu hari;
4. Belum optimalnya perekaman KTP el.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Permasalahan terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan secara partisipatif dari tingkat kelurahan belum menyentuh substansi kebutuhan dari masyarakat, sebagai akibat masih lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (masyarakat kelurahan dalam mengelola pembangunan);
2. Rendahnya realisasi usulan masyarakat kelurahan yang disampaikan melalui forum musrenbang untuk diakomodasi di dalam Renja OPD dan RAPBD;
3. Masih besarnya ketergantungan masyarakat kelurahan terhadap bantuan pemerintah, khususnya dalam upaya menggalang keswadayaan masyarakat;
4. Masih lemahnya manajemen di tingkat pemerintah kelurahan;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan SDA dan TTG dalam proses pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat kelurahan;
6. Belum tercatatnya dan terhitungnya secara akurasi nilai swadaya masyarakat dalam mendukung penyertaan program-program pemberdayaan masyarakat;
7. Belum optimalnya pengelolaan unit keuangan (UPKU) di kelurahan untuk dapat menjadi Badan Usaha Milik Masyarakat Kelurahan.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) yang digalakkan secara nasional menganjurkan setiap keluarga memiliki 2 (dua) orang anak. Pada tahun 2016, jumlah akseptor KB mencapai 68,87% dari seluruh pasangan usia subur di Kota Kediri. Prosentase keikutsertaan KB tersebut sudah cukup tinggi, namun perlu ditingkatkan lagi. Beberapa permasalahan di urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain sebagai berikut :

1. Penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal;
2. Adanya momentum Baby Boom karena bayi yang dilahirkan masa permulaan program KB saat ini telah dewasa dan menjadi Pasangan Usia Subur Berparieteras rendah (PUSMUPAR);
3. Terbatasnya tenaga fungsional Penyuluh KB/PLKB sebagai dampak banyaknya petugas yang purna tugas dan alih peran yang sangat berpengaruh dalam operasional tugas bidang KB di lapangan;
4. Peran remaja dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja kurang optimal;
5. Kurangnya akses permodalan kelompok UPPKS untuk pengembangan usaha, serta masih rendahnya kemampuan bersaing produk kelompok UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera);
6. Sering berganti-gantinya kader TRIBINA (BKB,BKR,BKL).

Urusan Perhubungan

Baiknya pelayanan pemerintah daerah pada sektor perhubungan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Permasalahan pada urusan perhubungan antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan tertib lalu lintas;
2. Sarana dan prasarana kurang dan atau perlu perbaikan (perlengkapan jalan, sub-terminal, Perlengkapan Pengujian UPT-PKB);
3. Kurang tertibnya pemungutan parkir kendaraan roda dua dan roda empat;
4. Masih kurang tersedianya halte bis ditempat-tempat strategis, serta perlunya perawatan yang optimal untuk fasilitas penumpang (halte);
5. Sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan angkutan perkotaan masih kurang (bus sekolah dan angkota);
6. Perlunya sarana aplikasi untuk peningkatan kinerja layanan angkutan perkotaan.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan terkait dengan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Belum terkoneksi jaringan intranet di seluruh SKPD. Infrastruktur jaringan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan layanan data dan informasi di lingkup internal Pemkot Kediri, ke depan perlu dikembangkan dan dibangun Fiber Optik (FO);
2. Dokumen masterplan pengembangan TIK sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini, dan belum disusun *blue print*nya secara rinci, sehingga perlu adanya review serta penyusunan blue print pengembangan TIK;
3. Belum terkoordinasinya OPD dalam menangani pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Kota Kediri yang terpadu dan sistematis yang dapat menjadi basis pengelolaan data dan informasi;
4. Belum dikembangkannya *e-government* secara menyeluruh yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dan pendanaan kegiatan pembangunan;
5. Infrastruktur perangkat keras yang ada kurang memadai dalam hal pengelolaan keamanan sehingga kemungkinan besar terjadinya kehilangan data, perlu dikembangkan manajemen pemanfaatan server, back up dan data center;
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi oleh SKPDf;
7. Terbatasnya kanal akses masyarakat terhadap informasi publik, sehingga ke depan perlu diperluasnya kanal akses melalui loket, sms, telpon, email, website, atau surat yang didukung sistem informasi;
8. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur pengguna aplikasi maupun SDM TIK masih kurang;
9. Penggiat TI belum diberdayakan dan komunitas TIK belum dikelola dengan baik. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) perlu diarahkan pada program yang tepat.

Urusan Koperasi, Usaha Mikro

Permasalahan terkait dengan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya daya saing Usaha Mikro dan Koperasi, karena kualitas SDM yang rendah dalam pengelolaan manajemen, kelembagaan, pemasaran, dan penguasaan teknologi informasi;
2. Rendahnya daya saing Usaha Mikro dan Koperasi, berakibat kurang kompetitif dalam persaingan global yang mempunyai turbulensi tinggi dalam hal inovasi, efisiensi, diversifikasi produk maupun dalam penciptaan dan membangun jaringan pasar dalam berbagai kawasan strata ekonomi;

3. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan;
4. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan Usaha Mikro belum sepenuhnya terwujud;
5. Terbatasnya akses Usaha Mikro dan Koperasi terhadap sumber daya produktif yang meliputi tiga aspek penting, yaitu modal kerja, informasi dan pasar;
6. Pengembangan kewirausahaan, jaringan kerjasama dan informasi pemasaran bagi usaha kecil menengah masih kurang optimal;
7. Kurangnya pemahaman koperasi tentang perubahan sistem penilaian dan penentuan koperasi berkualitas.

Urusan Penanaman Modal

Permasalahan terkait dengan bidang penanaman modal di Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi pengembangan kerjasama penanaman modal antar lembaga terkait yang berdampak pada optimalisasi pelayanan publik;
2. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah ataupun dengan pihak ketiga untuk mewujudkan kegiatan investasi yang terintegrasi dan berkesinambungan;
3. Masih adanya regulasi dari pemerintah pusat yang tidak selaras satu dengan yang lain sehingga menyulitkan pembentukan kebijakan pemerintah daerah terkait investasi dan penanaman modal;
4. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk melaporkan secara periodik kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan dalam rangka pengkinian data investasi untuk tujuan pemantauan realisasi investasi, pembentukan strategi meningkatkan investasi dan memelihara iklim investasi yang kondusif;
5. Semakin meningkatnya peran teknologi data dalam proses bisnis yang menyebabkan semakin perlunya antisipasi pemerintah daerah terhadap diversifikasi model dan pola investasi yang baru yang mungkin akan merugikan iklim investasi daerah yang sehat;
6. Perlunya antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi era keterbukaan investasi internasional agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan terkait dengan kepemudaan dan olah raga antara lain adalah :

1. Jumlah organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada di Kota Kediri masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kediri perlu mendorong para pemuda/pemudi di Kota Kediri agar lebih aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan dan olahraga di wilayahnya;
2. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya;
3. Masih sedikitnya atlet berprestasi yang berasal dari Kota Kediri.

Urusan Statistik

Permasalahan Terkait dengan statistik adalah sebagai berikut :

1. Sering terjadi perbedaan data antara data BPS dan data OPD Pemkot Kediri;

2. Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) data di BPS memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan kebutuhan pengambilan keputusan yang memerlukan data tersebut;
3. Tidak semua data penting yang diperlukan tersedia dalam BPS Kota Kediri dan Belum optimalnya ketersediaan dan kelengkapan data statistik yang mutakhir;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam pengelolaan Pembangunan.

Urusan Persandian

Permasalahan terkait dengan persandian adalah sebagai berikut :

1. ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi yang terbatas;
2. Pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan; belum semua komponen eselon I memanfaatkan fungsi sandi telekomunikasi (santel) untuk mengirimkan informasi yang harus diamankan; belum dioptimalkan fitur *kriptograf* pada *palsan kriptosoft* untuk menyimpan dan pemusnahan data; serta belum membuat kebijakan atau menjalankan prosedur back-up dengan aman;
3. Pengembangan aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas.

Urusan Kebudayaan

Permasalahan terkait Urusan Kebudayaan di Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan budaya lokal sebagai aset daerah dalam membangun jati diri dan menjadi daya tarik khas Kota Kediri, belum dioptimalkan;
2. Masih perlu dioptimalkan lagi terintegrasinya pembangunan kebudayaan dengan pengembangan kepariwisataan;
3. Kurangnya kepedulian masyarakat lingkungan sekitar obyek wisata untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan obyek wisata budaya;
4. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional di bidang budaya maupun kepariwisataan dalam upaya pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan serta masih kurangnya promosi potensi daerah untuk pengembangan daya tarik wisatawan;
5. Belum adanya informasi pariwisata lewat website resmi.

Urusan Perpustakaan

Permasalahan terkait dengan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat masih terkendala kurangnya khasanah bacaan yang ada di Perpustakaan Umum Daerah;
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya manfaat dari membaca;
3. Kurangnya promosi layanan dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang belum maksimal sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk memanfaatkan informasi dan bahan bacaan yang tersedia;
4. Personil yang kurang dan keterbatasan keahlian;
5. Tempat/ruang baca yang kurang representative;
6. Belum dikembangkan e-perpustakaan di Kota Kediri untuk lebih mendorong minat baca masyarakat.

Urusan Kearsipan

Permasalahan terkait dengan kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi dengan PD yang menyerahkan dan menyimpan arsipnya di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Kediri;
3. Sarana pengelolaan yang belum optimal dalam menunjang volume arsip yang ada;
4. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah perlu ditingkatkan.

4.1.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Kediri

Urusan Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan Kelautan dan Perikanan di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan;
2. Masih kurangnya pemahaman terhadap sistem budidaya ikan yang baik;
3. Harga pakan masih terlalu tinggi;
4. Belum adanya pasar ikan yang representative;
5. Harga ikan air tawar tidak stabil;
6. Tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih rendah.

Urusan Pariwisata

Permasalahan Pariwisata di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kemampuan membaca peluang untuk menarik investor sehingga pariwisata lebih dapat ditingkatkan;
2. Kurang kepedulian lingkungan masyarakat sekitar obyek wisata untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan obyek wisata;
3. Kurangnya tenaga profesional di bidang Pariwisata antara lain Pemandu Wisata, Perhotelan dan Jasa Pariwisata;
4. Kurang seriusnya penggalian potensi dan penanganan objek wisata dan terbatasnya obyek wisata yang ada di Kota Kediri;
5. Kurang tersedianya informasi terkait hal-hal menarik dari tempat tempat wisata di Kota Kediri.

Urusan Pertanian

Urusan pertanian mencakup aspek pertanian dan peternakan. Dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi pembangunan urusan pertanian dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin kuat, sehingga usaha pertanian diarahkan agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar baik domestik maupun Luar Negeri.

Dalam menghadapi era persaingan yang semakin kuat tersebut, Pembangunan Pertanian ditekankan pada pembangunan pertanian sebagai pembangunan komoditas guna mewujudkan ketahanan pangan dan mengembangkan sistem dan usaha tani yang memiliki daya saing berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Beberapa permasalahan pada urusan pertanian antara lain sebagai berikut :

1. Semakin rendahnya minat masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadi pelaku pembangunan pertanian yang diakibatkan oleh kurang menariknya sektor pertanian jika dilihat dari aspek ekonomi dan sosio kultural sehingga sulit mencari tenaga kerja saat musim tanam dan panen;

2. Semakin berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan menjadi permukiman dan industri serta komoditas lainnya akibat permintaan pasar;
3. Skala usaha pertanian yang relatif kecil karena kepemilikan lahan yang rata-rata sempit yakni sebagian besar berada pada luasan kurang dari 0.5 hektar;
4. Kesuburan tanah yang semakin berkurang karena kadar organik tanah yang rendah; akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia;
5. Banyaknya organisme pengganggu tumbuhan yang mengakibatkan turunnya produktivitas;
6. Belum optimalnya kelembagaan petani sebagai wahana penguatan kapasitas dan kapabilitas petani;
7. Kurangnya penguasaan petani terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang modern dan efisien yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk-produk pertanian;
8. Belum optimalnya kinerja penyuluh pertanian yang disebabkan oleh degradasi kelembagaan dan stagnasi pengembangan kompetensi penyuluh pertanian;
9. Semakin berkurangnya jumlah penyuluh pertanian PNS dari tahun ke tahun;
10. Belum optimalnya penggunaan alat mesin pertanian modern (*rice transplanter, power thresher, combine harvester*) dalam pengolahan lahan;
11. Sempitnya aksesibilitas petani terhadap produk-produk pertanian yang disebabkan oleh kualitas produk yang tidak kompetitif dan strategi pemasaran yang tidak efektif dan efisien;
12. Kurang maksimalnya upaya-upaya penerapan teknologi pasca panen untuk memberikan nilai tambah pada produk pertanian;
13. Lemahnya tingkat permodalan yang dimiliki dalam usaha tani serta sistem tata niaga/mata rantai pemasaran yang panjang menyebabkan harga di tingkat petani sangat rendah;
14. Pemeliharaan tanaman yang belum dilakukan secara intensif yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman lambat dan produktivitas rendah;
15. Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian (penyuluh PNS berkurang);
16. Kurangnya koordinasi antar petani dalam mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
17. Anomali iklim yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian dan gagal panen;
18. Pengelolaan ternak oleh masyarakat belum dilaksanakan secara efisien;
19. Pasar Hewan dikuasai tengkulak yang pembeliannya tidak berdasar timbangan;
20. Sumber daya manusia pembudidaya ikan masih rendah;
21. Tingkat konsumsi ikan masih dibawah standar Nasional;
22. Harga pakan masih terlalu tinggi;
23. Pasar masih tergantung pada tengkulak;
24. Masih terjadi pemotongan hewan diluar rumah potong hewan;
25. Kurangnya sarana Rumah Potong Hewan (RPH) yang standart untuk memenuhi kebutuhan daging yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (ASUH);
26. Kurangnya sarana pendukung dalam kegiatan Puskesmas;
27. Pemanfaatan lahan-lahan kosong/kritis untuk hijauan makanan ternak masih kurang.

Urusan Perdagangan

Permasalahan perdagangan di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Peranan pasar yang belum maksimal dalam pertumbuhan ekonomi;

2. Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat;
3. Antisipasi struktur pasar yang cenderung berpihak kepada pemodal besar (kartel pada komoditas tertentu) sebagai dampak importasi;
4. Belum optimalnya pembinaan PKL;
5. Makin besarnya persaingan baik produk maupun harga antara barang import dan buatan dalam negeri yang jadi komoditas perdagangan;
6. Terbatasnya akses IKM dalam kegiatan ekspor impor serta terbatasnya diversifikasi tujuan pasar ekspor;
7. Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan regional;
8. Fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem pada hari besar keagamaan tertentu;
9. Rendahnya harga jual komoditas tertentu di saat over supply ketika panen raya;
10. Kurangnya sarana dan tenaga teknis penera metrologi.

Urusan Perindustrian

Permasalahan sektor Industri di Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan TTG, sebagai upaya untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi;
2. Lemahnya kualitas SDM dalam pengolahan produk, peningkatan kualitas/mutu, diversifikasi produk dan packaging;
3. Masih lemahnya motivasi masyarakat Kota Kediri untuk dapat memulai usaha/berwirausaha secara mandiri;
4. Masih banyak potensi alam hasil-hasil pertanian yang belum diolah secara maksimal;
5. Belum adanya standar mutu produk sesuai dengan keinginan konsumen;
6. Kurangnya kualitas dan mutu produk IKM (Industri Kecil Menengah) dan industri kreatif sehingga kurang mampu berdaya saing;
7. Belum optimalnya sarana perdagangan yang bisa menampung hasil produk IKM;
8. Kurangnya kesadaran pelaku industri untuk melengkapi ijin usaha yang dimiliki;
9. Lemahnya pengetahuan teknologi informasi pemasaran serta lemahnya akses pemasaran terhadap hasil-hasil produksi;
10. Masih tingginya import bahan baku penolong;
11. Adanya kenaikan TDL (tarif dasar listrik) dan BBM;
12. Adanya kenaikan UMR yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan/pelaku industri.

Urusan Transmigrasi

Salah satu permasalahan di Bidang Transmigrasi yang dihadapi oleh Kota Kediri adalah :

1. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Program Transmigrasi sebagai salah satu upaya alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan sumberdaya;
2. Kurangnya Minat masyarakat Kota Kediri untuk memperbaiki perekonomian melalui program transmigrasi;

3. Masih ditemukan kendala terkait kesiapan daerah penempatan transmigrasi yang menyebabkan keterlambatan pemberangkatan transmigran.

4.1.4. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Fungsi Penunjang

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah didokumentasikan melalui buku-buku rencana yang disusun secara bertahap. Buku-buku rencana tersebut terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Setelah disusun dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, buku rencana ini kemudian ditetapkan (dilegalisasi) menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Peraturan ini menjadi sarana publikasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah sehingga masyarakat dan pihak swasta mengetahui dan dapat berpartisipasi mengimplementasikan rencana pembangunan daerah tersebut. Beberapa permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah :

1. Adanya dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan mendahului legalisasi dokumen perencanaan nasional maupun provinsi yang seharusnya dijadikan acuan. Sehingga dengan terbitnya RPJMN maupun RPJMD Provinsi yang baru perlunya penyesuaian atau perubahan terhadap dokumen perencanaan lima tahunan yang telah ditetapkan;
2. Kurangnya kesesuaian perencanaan jangka pendek (tahunan) dan perencanaan jangka menengah dan panjang. Masih adanya program jangka pendek yang telah ditetapkan dalam RKPD tahunan tidak ada dalam RPJMD dimasa RKPD berkenaan;
3. Kurangnya evaluasi dan pengendalian terhadap hasil perencanaan yang telah berjalan sehingga tidak ada feedback terhadap permasalahan yang muncul terhadap perencanaan tahap berikutnya;
4. Kurangnya koordinasi antara OPD terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kota, sehingga OPD hanya melaksanakan program rutin yang menjadi bidang tugasnya saja, dan pencapaian indikator utama yang dimaksud akan sulit untuk dicapai;
5. Kurangnya validitas data perencanaan dari organisasi perangkat daerah karena belum adanya kesamaan paham terhadap data yang dibutuhkan, dan belum ada standar metodologi pengumpulan data berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dengan validitas data yang kurang memadai maka kualitas kebijakan dan perencanaan yang ditetapkan juga akan menjadi kurang optimal;
6. Penentuan program dan kegiatan perlu adanya peran aktif dan konsisten Organisasi Perangkat Daerah dalam perumusan perencanaan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
7. Pemanfaatan data dan dokumen perencanaan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal dilaksanakan;
8. Masih rendahnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi perencanaan horisontal dan vertikal serta lintas sektoral dalam perumusan rencana pembangunan daerah;
9. Kurang terintegrasinya sistem informasi tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan secara berkesinambungan;
10. Kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan;
11. Belum berkembangnya budaya IPTEK di masyarakat serta lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang maksimal.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan terkait bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya dimantapkan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dialog antar tokoh masyarakat dan tokoh agama dan organisasi masyarakat dalam menjalin dan melestarikan kerukunan dan persatuan sehingga tidak terjadi konflik yang menjurus SARA maupun lainnya;
2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik;
4. Belum optimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
5. Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban;
6. Aktivitas Ormas/LSM belum semua melaporkan;
7. Kurang berdayanya institusi-institusi demokrasi, peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM;
8. Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian

Permasalahan terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Kurang efisiensinya penggunaan anggaran dimasing-masing perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi belanja langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat masih relatif kurang;
2. Belum semua organisasi perangkat daerah menyusun Standart Operasional Pelaksanaan (SOP) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
3. Masih rendahnya penerapan budaya kerja di organisasi perangkat daerah, dan belum semua PD pelayanan melakukan survey kepuasan masyarakat;
4. Belum optimalnya implementasi SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
5. Masih kurangnya ketaatan Obyek Pemeriksaan (Obrik) terhadap aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun kinerja, sehingga selama ini masih sering terjadi adanya temuan yang berulang;
6. Terlalu lamanya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan daya tanggap obyek pemeriksaan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan;
7. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat seringkali mengalami keterlambatan penanganan dikarenakan masih sering terjadi kendala dalam menghadirkan pihak-pihak eksternal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan lambatnya penanganan pengaduan tersebut;

8. Disiplin aparatur yang kurang baik, budaya kerja yang terjalin belum optimal, koordinasi di lingkungan staf masih terhambat, kurang optimal memanfaatkan peluang, adanya pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja aparat serta koordinasi antar instansi sering terlambat;
9. Untuk aspek pendapatan asli daerah : kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah penghasil;
10. Untuk aspek dana perimbangan : penyerahan menjadi sepenuhnya urusan daerah untuk BPHTB mulai tahun 2012 dan PBB mulai tahun 2013 belum benar-benar dapat dilaksanakan dengan mulus tanpa hambatan, koordinasi dan konsolidasi internal masih perlu dibenahi dengan baik serta masih diperlukan sosialisasi mengenai pelaksanaannya dengan semua stakeholder terkait;
11. Pada bidang keuangan masih sering dijumpai kekurangan bukti-bukti transaksi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan;
12. Untuk manajemen asset : Pendataan/sensus barang milik daerah memang telah selesai, namun demikian masih memerlukan rekonsiliasi belanja modal dengan pertambahan asset;
13. Untuk aspek pengelolaan kas dan perbendaharaan : manajemen waktu pelaksanaan kegiatan/proyek yang belum teragendakan oleh PD secara teratur menyebabkan penumpukan berkas pengajuan SP2D yang cukup banyak pada akhir tahun anggaran, sehingga memaksa bekerja keras hingga batas akhir tahun anggaran pukul 24.00 WIB.
14. Peraturan perundang-undangan pemerintah yang sering berubah-ubah;
15. Masih adanya produk-produk hukum lama yang kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini;
16. Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui produk-produk hukum di daerahnya dan kesadaran hukum masyarakat relatif masih kurang;
17. Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik, IT dan Protokol;
18. Adanya kasus permasalahan hukum pada pemerintah daerah yang belum terselesaikan;
19. Masih adanya produk-produk hukum pusat yang Peraturan Pelaksanaannya belum diterbitkan;
20. Lambatnya pendistribusian/penyebarluasan produk-produk hukum pusat sampai ke daerah;
21. Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan;
22. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional;
23. Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat serta belum optimalnya penerapan SOP pelayanan yang ditetapkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing PNS;
24. Masih adanya SOTK yang tumpang tindih dengan Perangkat Daerah lain serta belum optimalnya implementasikan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
25. Masih kurangnya Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan barang/jasa pemerintah yang lulus sertifikasi nasional ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Kediri melalui berbagai pertimbangan diantaranya dengan mempertimbangkan dinamika internasional, mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan regional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, kemungkinan dan kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

4.2.1. Penelaahan Agenda Internasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional

Penentuan isu strategis didahului dengan penelaahan atau mengkaji agenda pembangunan internasional dan kebijakan pembangunan nasional dan regional yang relevan dan dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang dalam memberi arah pembangunan Kota Kediri.

a. Penelaahan Isu Strategis Internasional

Penentuan isu strategis didahului dengan penelaahan atau mengkaji agenda pembangunan internasional dan kebijakan pembangunan nasional dan regional yang relevan dan dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang dalam memberi arah pembangunan Kota Kediri.

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan daerah antara lain : pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs), Lingkungan Hidup, Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan, Energi, serta ketersediaan Sumber Daya Air untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan serta untuk memastikan kelestarian lingkungan.

1). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam perumusan isu strategis RPJMD Kota Kediri, salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi adalah komitmen pemerintah dalam melaksanakan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs sebagai agenda pencapaian tujuan pembangunan global. Komitmen Pemerintah ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai kesepakatan pada saat pertemuan dunia di bulan September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB/SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan TPB/SDGs dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.

Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi di Indonesia pada tahun 2000, pemerintah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah masing-masing. Pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan bermakna di berbagai sektor tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan, tetapi juga memperluas berbagai kemajuan. Transisi pembangunan pasca MDGs memungkinkan penyelarasan berbagai prioritas pembangunan nasional dengan agenda TPB/SDGs dunia, lebih lanjut upaya-upaya intensif untuk mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan sesuai kondisi permasalahan dan kebutuhan daerah. Implementasi TPB/SDGs di daerah dilakukan dengan 3 penekanan : Pengarusutamaan, Percepatan pencapaian TPB/SDGs dan dukungan kebijakan.

Implementasi TPB/SDGs oleh pemerintah membawa konsekuensi bagi seluruh daerah di Indonesia termasuk Kota Kediri untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan dalam TPB/SDGs sebagai referensi dalam penetapan target pembangunan daerah.

Ketujuhbelas tujuan yang hendak dicapai pada TPB/SDGs tercermin dalam 20 prioritas pembangunan nasional yaitu : 1). Pembangunan Manusia; 2). Pertumbuhan Ekonomi; 3). Kependudukan dan KB; 4). Pendidikan; 5). Kesehatan; 6). Gender; 7). Perlindungan Anak; 8). Pangan dan Nutrisi; 9). Energi; 10). Maritim; 11). Infrastruktur; 12). Air dan Sanitasi; 13). Lingkungan Hidup; 14). Ketidaksetaraan; 15). Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan; 16). Tata Kelola Pemerintahan; 17). Politik dan Demokrasi; 18). Keamanan dan Pertahanan; 19). Kemiskinan, dan 20). Kemitraan Global. Sehingga 96 dari 169 target SDGs telah terintegrasi dalam tujuan pembangunan nasional.

Berdasar atas hal tersebut dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Kota Kediri, sebagian atau seluruh tujuan SDGs dipilih sebagai aspek yang memperoleh perhatian besar dalam pembangunan Kota Kediri selama 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini diawali dengan menjadikan isu SDGs sebagai isu strategis RPJMD Kota Kediri dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai amanat Perpres 59/2017 bahwa sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 harus selaras dengan TPB/SDGs.

Sedangkan dari 17 tujuan yang ada pada SDGs yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Kediri antara lain: Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan , Tujuan 2 - Tanpa kelaparan , Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera, Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas , Tujuan 5 - Kesetaraan gender , Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak , Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi , Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur , Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan , Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab , Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim.

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Pengentasan segala bentuk kemiskinan. Memberantas segala bentuk kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kediri. Meskipun jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Kota Kediri telah berkurang dari 23.770 jiwa (2015) dan menurun menjadi 23.640 jiwa (2016). Jumlah ini dirasa masih terlalu banyak yang masih harus berjuang bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi. Banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan riil dan tingginya tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan.

Tujuan SDGs nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub ke dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani diantaranya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB), terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian, yaitu: 1) Kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); 2) Penyalahgunaan narkoba dan alkohol; 3) Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; 4) Universal Health Coverage; 5) Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih.

Program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.

- Paradigma sehat merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah proses pembangunan;

- Pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan. Dalam hal pelayanan kesehatan primer diarahkan untuk upaya pelayanan promotif dan preventif, melalui pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan baik dalam tatanan tata kelola klinis, tata kelola manajemen dan tata kelola program;
- Jaminan Kesehatan Nasional, negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya.

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Pendidikan dewasa ini merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif.

Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda sebagai agent of change yang membawa perubahan, namun generasi muda harus bisa menjadi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata.

Pendidikan harus bisa menjadi patron bukan hanya dalam hal pendidikan formal tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak bangsa dan pendidikan inovatif yang mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Generasi muda sebagai agen inovasi yang dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif.

Tujuan 5 - Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki.

Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua mau-pun muda.

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku.

Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. Pembangunan ekonomi yang

inklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan dan sebisa mungkin terbarukan. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah besar dalam mengurangi intensitas energi. Apabila semua teknologi efisiensi energi yang tersedia saat ini diterapkan, konsumsi energi secara signifikan bisa dipangkas menjadi sekitar sepertiga. Namun hanya sebagian kecil dari potensi ini yang terealisasi. Melalui kombinasi beberapa teknologi efisiensi energi, desain bangunan yang baik, dan teknologi atap terbarukan yang baru, gedung zero net energy sudah bisa dibangun. Dalam banyak kasus, gedung-gedung tersebut menghasilkan tenaga matahari yang dialirkan ke dalam jaringan untuk dipakai pihak lain. Tentunya selain efisiensi energi, reformasi kebijakan dan penghapusan subsidi, perlu juga memastikan bahwa negara-negara beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Kemajuan teknologi yang pesat telah menurunkan biaya energi terbarukan bagi tiap orang. Kita sekarang melihat investasi skala besar dalam energi terbarukan yang sudah umum – seperti tenaga air – juga teknologi maju seperti tenaga panas bumi, matahari dan angin. Antara tahun 2010 dan 2012, kenaikan sebesar 4 persen secara global dalam penggunaan energi terbarukan yang modern – tiga perempat disediakan oleh tenaga angin, matahari dan air.

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus dibagi bersama. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahunnya, diperkirakan lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan, juga perlu ditingkatkan. Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua”.

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Saat ini lebih dari setengah populasi dunia tinggal di perkotaan, karena itu transportasi massal dan energi terbarukan menjadi sangat penting, begitu juga dengan pertumbuhan industri baru serta teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. Mempromosikan industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan.

Tujuan 10 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Lebih dari setengah populasi dunia kini tinggal di wilayah perkotaan. Pada tahun 2050, angka tersebut akan naik menjadi 6,5 miliar orang, dua per tiga dari jumlah penduduk dunia. Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa perubahan signifikan dalam cara kita membangun dan mengatur wilayah perkotaan. Pertumbuhan kota-kota yang sangat cepat di negara berkembang, ditambah dengan meningkatnya urbanisasi, mengakibatkan terjadinya ledakan jumlah megapolitan. Pada 1990, terdapat sepuluh megapolitan dengan jumlah penduduk 10 juta atau lebih. Pada 2014, ada 28 megapolitan yang merupakan rumah bagi sekitar 453 juta orang. Kemiskinan ekstrem seringkali terpusat di wilayah perkotaan, dan pemerintahan nasional serta kota berjuang keras mengakomodasi pertumbuhan populasi di wilayah-wilayah ini. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Ini juga melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak.

Tujuan 11 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan Meraih pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berarti kita harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pertanian adalah pengguna air terbesar di seluruh dunia, dan saat ini irigasi mengambil sekitar 70% penggunaan air bersih yang layak digunakan manusia. Pengelolaan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama, dan cara kita membuang sampah beracun dan polutan adalah

target penting untuk meraih tujuan ini. Selain itu mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah sama pentingnya, seperti halnya juga mendukung negara-negara berkembang untuk bergerak menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan pada 2030. Masih banyak penduduk dunia yang bahkan konsumsi kebutuhan dasarnya pun belum bisa dikatakan layak. Mengurangi sisa makanan perkapita global dari pedagang dan konsumen hingga setengahnya juga penting untuk menciptakan produksi dan rantai pasokan yang lebih efisien. Ini bisa membantu menjaga ketahanan pangan dan membawa kita menuju ekonomi dengan sumber daya efisien.

Tujuan 12 - Penanganan perubahan iklim

Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat, dan saat ini levelnya berada pada 50% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Lebih jauh lagi, pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensi yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan.

Memperkuat kegigihan dan kapasitas adaptasi wilayah-wilayah yang lebih rentan, seperti negara-negara di tengah benua dan negara kepulauan, harus berjalan beriringan dengan usaha meningkatkan kesadaran dan memasukkan langkah-langkahnya pada kebijakan dan strategi nasional. Dengan adanya kehendak politik dan penggunaan langkah teknologi secara luas, masih mungkin bagi kita untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata secara global pada dua derajat Celcius di atas level masa pra-industri. Ini membutuhkan tindakan bersama dengan segera.

Tujuan 13 – ekosistem daratan

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Kehidupan manusia bergantung pada tanah sama seperti kita bergantung pada laut untuk bahan makanan dan mata pencaharian. Tumbuhan menyediakan 80 persen bahan makanan untuk manusia, dan kita bergantung pada pertanian sebagai sumber penting perekonomian dan alat pembangunan. Hutan meliputi 30 persen permukaan bumi, dan merupakan habitat bagi jutaan spesies serta menjadi sumber air dan udara bersih, dan juga sangat penting untuk melawan perubahan iklim. Belum pernah kita melihat penurunan kualitas tanah seperti saat ini, dan hilangnya tanah yang bisa ditanami mencapai 30 hingga 35 kali jumlah rata-rata dalam sejarah. Kemarau panjang dan perubahan lahan menjadi gurun juga meningkat tiap tahun, mencapai 12 juta hektar dan memengaruhi komunitas miskin di seluruh dunia. Dari 8.300 hewan yang diketahui, 8 persen telah punah dan 22 persen berada di ambang kepunahan. SDGs berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan dan gunung pada 2020. Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim. Harus segera dilakukan tindakan untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan kita bersama.

2). Lingkungan Hidup

Isu Internasional lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, disertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim.

Untuk membatasi peningkatan suhu global perlu dilakukan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih terus terjadi, penurunan kondisi lingkungan hidup (*pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan SDA, bencana lingkungan*). Selama ini proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan untuk dapat lebih memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 15 ayat (1) menegaskan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana maupun program, oleh karenanya KLHS digunakan untuk dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Kota Kediri, lingkungan hidup merupakan aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Kota Kediri 5 (lima) tahun mendatang, pembangunan yang dilaksanakan akan mendudukkan isu kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Kediri.

Memperhatikan nilai-nilai penting yang tercermin dalam pembangunan berkelanjutan yaitu : keterkaitan, keseimbangan dan keadilan, maka penyusunan Review RPJMD Kota Kediri 2014-2019 diikuti dengan penyusunan KLHS yang penyusunan berbarengan dengan pelaksanaan penyusunan Review RPJMD, sehingga bilamana didalam Review RPJMD terdapat kebijakan, rencana dan program pembangunan yang tidak sesuai dengan KLHS dapat segera dilakukan perbaikan.

3). Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Situasi produksi pangan di dunia diperkirakan relatif membaik tahun 2014. Total produksi cerealia di dunia akan meningkat 8,4% di periode 2013/2014 dibanding 2012/2013. Peningkatan terjadi 2,6% di negara berkembang dan 17,4% di negara maju (FAO Crop Prospects and Food Situation, Desember 2013). Stok cerealia di dunia pada akhir musim 2014 diperkirakan meningkat 13,4% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, harga cerealia dunia terutama gandum, beras dan jagung akan menurun di tahun 2014. Harga kedelai internasional serta minyak nabati akan menurun juga (FAO Food Price Index, 9/1/2014).

Mengantisipasi terjadinya krisis pangan, sebagai isu strategis di Kota Kediri perlu dipermantap dengan upaya-upaya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

4). Energi

Isu internasional energi dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan energi dan pengembangan energi baru terbarukan, pertambangan illegal dan pertambangan berkelanjutan.

Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud tahun 2012 ditetapkan sebagai tahun energi terbarukan internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas energi modern, melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi global sebelum 2030. Di level regional (APEC) juga mengagendakan isu energi dan ketahanan pangan disamping isu-isu perekonomian.

Terhadap keterbatasan energi, isu strategis yang perlu disikapi adalah memberikan perhatian untuk pengembangan energi alternative yang terbarukan.

5). Air

Isu strategis yang perlu diantisipasi adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya air yang ada di Kota Kediri agar terwujudnya kehidupan yang nyaman, indah dan ramah lingkungan.

Untuk akses air bersih baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan cakupan air bersih Kota Kediri saat ini mencapai 95,81%.

Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Bersih Kota Kediri

NO	PUSKESMAS	JUMLAH KK	JUMLAH KELUARGA DIPERIKSA	% KELUARGA DIPERIKSA	% AKSES AIR BERSIH					
					% AKSES AIR BERSIH	% LEDENG	% SPT	% SGL	% PAH	% LAINNYA
1	CAMPUREJO	9.836	8.031	81,65	100,00	23,94	75,65	0,41	0	0
2	SUKORAME	14.467	14.042	97,06	99,31	20,41	69,06	9,83	0	0
3	MRICAN	5.122	5.076	99,10	97,72	8,93	48,39	42,68	0	0
4	KOTA WIL.SELATAN	9.854	4.563	46,31	100,00	11,17	54,42	34,40	0	0
5	KOTA WIL. UTARA	10.496	5.251	50,03	98,07	1,27	98,41	0,32	0	0
6	BALOWERTI	12.471	10.707	85,86	100,00	21,68	78,22	0,10	0	0
7	PESANTREN I	8.001	6.066	75,82	100,00	5,64	94,19	0,17	0	0
8	PESANTREN II	11.307	2.822	24,96	100,00	15,44	84,56	0,00	0	0
9	NGLETIH	6.917	3.629	52,46	52,46	0,00	96,80	3,20	0	0
JUMLAH PKM : 9		88.471	60.187	68,03	95,81	14,00	77,44	8,44	0	0

Isu-isu strategis dan permasalahan dari kondisi penyelenggaraan dan pelayanan air minum di Kota Kediri, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tujuh permasalahan umum, yaitu:

1. Peningkatan Akses Aman Air Minum
- Dalam aspek peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan meliputi :
- Akses aman air minum pada tahun 2015 adalah 96,06% dengan Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 29,58% terdiri dari PDAM 26,75% dan Non PDAM 2,83%, sedangkan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi 66,48%.
 - Cakupan pelayanan SPAM Kota Kediri Jaringan Perpipaan (JP) oleh PDAM adalah 26,75% dan non PDAM adalah 2,83% atau 83.742 jiwa (13.957 sambungan) dari total jumlah penduduk Kota Kediri 312.999 jiwa pada tahun 2015.
 - Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan air baku yang berasal dari sumur, pompa, air sungai, air hujan, dan lain-lain masih cukup tinggi yaitu 66,48% terlindungi, dan 3,94% tidak terlindungi.
 - Pelayanan air minum melalui perpipaan sebagian besar masih dinikmati oleh masyarakat di tengah kota, sementara pelayanan air minum untuk masyarakat di wilayah lain masih sangat terbatas.
 - SPAM non-perpipaan selama beberapa tahun terakhir berkembang lebih pesat daripada SPAM perpipaan dikarenakan ketersediaan air sumur dangkal sangat mudah didapat, namun perkembangan SPAM non-perpipaan terlindungi masih memerlukan pembinaan.

- Pada tahun 2015 tingkat kehilangan air PDAM masih cukup tinggi yaitu sekitar 46%.
- Ketersediaan data SPAM BJP dan Non PDAM masih perlu diverifikasi kevalidannya.

2. Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan mengenai pengembangan pendanaan antara lain :

- Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, operasional dan pemeliharaan.
- Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah kota dalam pengembangan SPAM masih minim.
- Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung dari alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan dari APBD, serta belum mengoptimalkan pengembangan sumber pendanaan dari PDAM serta potensi masyarakat dan dunia usaha/swasta.
- Pemkot dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan-kebijakan pendanaan yang diperlukan bagi pengembangan SPAM.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dari peningkatan kapasitas kelembagaan adalah:

- Pengembangan SPAM di Kota Kediri masih lemah karena belum adanya lembaga atau dinas terkait yang memiliki tupoksi khusus bidang Air Minum sebagai penyelenggara SPAM.
- Pemkot belum memiliki dokumen perencanaan khusus sub Bidang air minum antara lain RISPAM, Jakstrada, FS/DED.
- Penyelenggaraan dan pelayanan SPAM masih lemah dalam hal pelayanan, manajemen, keuangan, dan teknis, termasuk rekrutmen SDM belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM.
- Koordinasi yang belum optimal antar stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan SPAM.

4. Pengembangan dan Penerapan Perundangan

Isu strategis dan permasalahan mengenai pengembangan penerapan perundangan adalah :

- NSPK bidang air minum (PP 122/2015 dan PP 38/2007) belum ditindak lanjuti dengan pengaturan di daerah yang lebih operasional.
- Belum adanya regulasi daerah yang spesifik untuk mengatur penyelenggaraan SPAM, terutama pengaturan dalam rangka pemenuhan air baku air minum serta pengaturan kelembagaan pengelola air minum berbasis masyarakat.
- Pengaturan Pemanfaatan mata air dan air permukaan di daerah belum ada.
- SPAM masih belum memenuhi K-4 (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan), hal ini disebabkan karena kehilangan air yang masih cukup tinggi.

5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum meliputi :

- Kapasitas daya dukung dan kualitas sumber air baku air permukaan semakin menurun dan kontinuitasnya tidak terjaga terutama pada musim kemarau.
- Menurunnya debit mata air yang digunakan sebagai air baku.
- Upaya perlindungan sumber air baku melalui kegiatan konservasi masih minim.
- Sumber Air Permukaan / sungai bila kemarau airnya terbatas, bila musim hujan sedimennya tinggi atau keruh sehingga tidak layak.
- Pemanfaatan sumber air baku dari beberapa mata air masih belum optimal.

6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha serta Masyarakat

Isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat meliputi :

- Potensi masyarakat & dunia usaha belum diberdayakan secara optimal.
- Pembinaan tentang penyelenggaraan SPAM belum sepenuhnya menyentuh masyarakat seperti pembinaan untuk perlindungan air baku, penghematan penggunaan air dan pengamanan kualitas air agar layak minum.
- Pembinaan Pemkot / PD kepada masyarakat sebagai penyelenggara SPAM individual dan komunal masih kurang.

7. Pengembangan SPAM melalui Inovasi dan Teknologi

Isu strategis dan permasalahan mengenai pengembangan SPAM melalui inovasi dan teknologi adalah :

- Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan.
- Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan air minum belum berkembang.
- Pemanfaatan teknologi pengolahan air permukaan sebagai air baku masih belum ada
- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

b. Penelaahan Isu Strategis Regional

1). Daya Saing Nasional dalam AEC (Asean Economic Community)

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti

tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.

Ruang lingkup Asean Economic Community meliputi :

- Pasar Tunggal dan Basis Produksi, yaitu adanya aliran bebas : barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terlatih;
- Kawasan ekonomi yang kompetitif meliputi : kebijakan kompetisi, proteksi konsumen, hak kekayaan intelektual (HAKI), pembangunan infrastruktur, perpajakan dan E-Commerce;
- Pembangunan ekonomi yang merata : pembangunan UMKM, initiative for ASEAN Integration (IAI) “mengurangi gap pembangunan internal ASEAN”;
- Integrasi dengan perekonomian global : pendekatan koheren dalam hubungan ekonomi eksternal “negosiasi FTA dan CEP dengan pihak non-ASEAN”, meningkatkan partisipasi dalam global supply network.

Di era perekonomian Global yang makin kompetitif, membutuhkan kerjasama antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti AEC tersebut. Sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (preference) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti AEC bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat Internasional hingga lokal.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang-barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non-tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, HACCP dan lain-lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri.

Yang perlu diantisipasi dan sebagai isu strategis bagi Kota Kediri adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan dan memiliki daya saing tinggi baik daya saing lokal maupun regional dan internasional serta bagaimana produk-produk UMKM yang ada memenuhi standart ISO, eco labelling, atau standart-standart yang dipersyaratkan untuk dapat menembus pasaran ekspor.

c. Penelaahan Isu Strategis Nasional dan Propinsi

1). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dari visi tersebut kemudian ditetapkan 7 misi untuk mewujudkannya yang meliputi :

- a). Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- b). Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c). Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d). Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e). Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f). Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g). Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan 9 agenda Nawacita dengan sub agenda sebagai berikut :

- a). Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dengan sub agenda :
 - Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif;
 - Penguatan sistem pertahanan;
 - Memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
 - Meningkatkan kualitas perlindungan warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;
 - Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran;
 - Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional;
 - Meminimalisasi dampak globalisasi;
 - Membangun industri pertahanan nasional;
 - Membangun Polri yang professional;
 - Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan.
- b). Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sub agenda :
 - Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
 - Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
 - Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
 - Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c). Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, dengan sub agenda :
 - Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris
 - Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia
 - Penanggulangan kemiskinan
- d). Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan sub agenda :
 - Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan;
 - Pencegahan dan pemberantasan korupsi;

- Pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
 - Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah;
 - Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal.
- e). Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dengan sub agenda :
- Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
 - Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
 - Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat;
 - Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja.
- f). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan sub agenda :
- Membangun konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
 - Membangun transportasi massal perkotaan;
 - Membangun infrastruktur/prasarana dasar;
 - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur;
 - Memperkuat peran investasi;
 - Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan;
 - Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi;
 - Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional;
 - Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional;
 - Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- g). Peningkatan kedaulatan pangan, dengan sub agenda :
- Peningkatan kedaulatan pangan;
 - Peningkatan ketahanan air;
 - Melestarikan sumber daya alam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
 - Penguatan sektor keuangan.
- h). Melakukan revolusi karakter bangsa.
Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan.
- i). Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat Negara.

Pada setiap prioritas nasional, dilengkapi dengan substansi inti yang berisi aspek-aspek dan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus diupayakan oleh seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali Kota Kediri.

2). Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, hal ini merupakan jawaban dari transisi

kepemimpinan nasional yang menetapkan kebijakan baru. Perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang nasional sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap RTRWN.

Perlu menjadi catatan bahwa pada RTRWN terdahulu, sebagian proyek-proyek strategis nasional yang belum terwadahi, sehingga menyulitkan implementasi di lapangan. Dengan terbitnya PP ini, Pemerintah akan dapat mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN yang secara umum berorientasi pada penyediaan infrastruktur. Perubahan PP ini juga mengatur serta mengakomodasi proyek-proyek yang sudah ada di pemerintahan sebelumnya maupun proyek yang ada pada pemerintahan sekarang serta yang direncanakan pada masa yang akan datang.

Dengan terbitnya PP ini maka seluruh proyek infrastruktur strategis bisa segera dilaksanakan, mulai dari pembebasan lahan, pembangunan hingga pengelolaannya. PP ini juga memayungi secara hukum pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang telah termuat di dalamnya tetapi belum diakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun RTRW Kab/Kota, karena PP ini bersifat *override* terhadap hirarki Rencana Tata Ruang di bawahnya.

Salah satu proyek strategis nasional yang tertuang dalam PP ini adalah rencana pembangunan Tol Kertosono-Kediri yang tentunya akan mengubah pola pergerakan, pola konsumsi dan jalur distribusi manusia, barang dan jasa dari dan keluar Kota Kediri, dampak besar lain yang ditimbulkan dari rencana ini adalah adanya perubahan pola investasi terutama pada industri dan perdagangan. Beberapa industri skala besar mulai melirik Kota Kediri sebagai lokasi investasi, mengingat dengan adanya jalan TOL Kertosono-Kediri akan memudahkan akses distribusi sumberdaya, bahan baku dan faktor-faktor produksi maupun hasil-hasil produksi dari industri tersebut, selain itu kawasan-kawasan industri di area Gerbang Kertosusila telah menerapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang sangat tinggi dibanding dengan Kota Kediri, membuat Kota ini menjadi lebih menarik sebagai lokasi investasi. Hal ini bukan hanya berdampak terhadap infrastruktur maupun ekonomi, tetapi juga akan mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan dan kompetisi tenaga kerja dari dalam kota dan wilayah-wilayah sekitar.

3). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Tantangan yang dihadapi Kota Kediri seperti kabupaten/kota lain dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kota Kediri adalah :

- a). Mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif;
- b). Mengelola sumber daya aparatur menjadi lebih profesional, kompetitif, akuntabel;
- c). Pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel;
- d). Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel sangat dibutuhkan.

4). *Standar Pelayanan Minimum (SPM)*

Penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pelaksanaannya, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD);

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sampai dengan Tahun 2013, telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu SPM bidang :

- a). Kesehatan di Kabupaten/Kota
- b). Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota
- c). Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
- d). Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota
- e). Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota
- f). Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- g). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota
- h). Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- i). Pekerjaan Umum
- j). Ketenagakerjaan
- k). Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota
- l). Komunikasi dan Informasi
- m). Kesenian
- n). Penanaman Modal
- o). Perhubungan Daerah

Penerapan SPM di Kota Kediri :

Untuk RPJMD Kota Kediri 2014-2019 pencapaian SPM menjadi salah satu tolok ukur untuk menjadi target pemenuhannya. Melalui RPJMD dan Renstra OPD akan diupayakan pencapaian SPM secara menyeluruh sebagaimana tolok ukur kinerja yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

5). *Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia(MP3EI)*

MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk sepuluh besar negara di dunia pada tahun 2025. Selain itu, MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional

dengan orientasi berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkeadilan, berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air.

Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan akan dikembangkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya. Industri unggulan di berbagai wilayah di bangun untuk memperkuat struktur perekonomian domestik. Dalam kaitan itu ditawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha dan dengan memperbaiki iklim investasi di daerah-daerah.

Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan delapan program utama yang meliputi sektor manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasyarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu :

- a). Strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi;
- b). Strategi memperkuat konektivitas nasional; serta
- c). Strategi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan IPTEK.

Prasyarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri termasuk salah satu dari 8 KPI (Kawasan Perhatian Investasi) yang mendukung arah pembangunan MP3EI untuk Propinsi Jawa Timur dalam koridor ekonomi Jawa yaitu pendorong industri dan jasa nasional. Oleh karena itu, diharapkan Kota Kediri dapat memberikan kontribusi nyata bagi perwujudan keberhasilan pelaksanaan MP3EI tersebut, terutama dalam pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa.

6). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)*

Dokumen MP3EI bertujuan mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan beragam investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan MP3KI bertujuan untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat secara langsung dan menerima manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua dokumen ini dirancang sebagai dokumen kebijakan afirmatif dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang *pro-growth, pro-poor, pro-job* dan *pro-environment*.

MP3KI merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan konsep dan desain, arah kebijakan, strategi penanggulangan kemiskinan, Rencana Kerja Pemerintah dan sebagainya. MP3KI menitikberatkan pada pengembangan *livelihood* melalui berbagai kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Transformasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini dilakukan dengan tiga strategi utama, yaitu: pengembangan sistem perlindungan sosial secara menyeluruh, peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan (*sustainable livelihood*) masyarakat miskin dan rentan.

7). *Situasi Pangan Nasional*

Situasi pangan di Indonesia pada 2014 tidak lebih baik dibandingkan 2013. Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor lima komoditas pangan utama. Hal ini disebabkan sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “*jebakan impor pangan*”. Pembelajaran selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hal tersebut. Hanya dalam tempo yang relatif singkat terjadi peningkatan impor serelia yang luar biasa. Impor serelia meningkat 60,45% hanya dalam kurun waktu empat tahun (nilai rata-rata impor serelia periode 2011-2013 dibandingkan dengan periode 2007-2009).

Di tahun 2014 diperkirakan impor beras akan kembali naik di atas 1,5 juta ton, kedelai di atas 1,6 juta ton dan jagung mendekati 3 juta ton. Impor gandum juga akan meningkat menjadi sekitar 6,5 juta ton, sedangkan impor gula relatif stabil di angka sekitar 3 juta ton. Hal tersebut sebagian disebabkan harga yang cenderung menurun di pasar global yang akan berdampak pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya distorsi impor pangan karena memanfaatkan kecenderungan penurunan harga pangan di pasar global (*Kompas, 21 Januari 2014*).

Dalam perkembangannya, pada tahun 2016 kinerja industri pangan Indonesia terlihat sudah semakin produktif dan mengalami pertumbuhan. Baru baru ini The Economist Intelligence Unit merilis data ketahanan pangan internasional yang di beri nama Global Food Security Index (GFSI), dari hasil tersebut, tercatat posisi ketahanan pangan Indonesia saat ini berada pada posisi ke 71 dari total 113 negara yang telah di observasi sepanjang tahun 2016 ini. Hasil tersebut terlihat ketahanan pangan nasional mengalami pertumbuhan walaupun masih di peringkat terendah. Peringkat tersebut bisa di bilang masih rendah, namun jika di bandingkan tahun sebelumnya Indonesia masih berada di peringkat 76-80. Secara keseluruhan, ketahanan pangan nasional mengalami kenaikan poin sekitar 50.6. tahun 2015 lalu hanya 47.9 poin. meningkatnya nilai ketahanan pangan nasional di lihat berdasarkan 3 jangkauan utama seperti, Ketersediaan, Keterjangkauan serta kualitas dan keamanan. Dari segi keterjangkauan, Indonesia mendapatkan nilai 50.3 poin dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat 46.8 poin. Untuk ketersediaan Indonesia mendapat sekitar 54.1 poin dari sebelumnya sekitar 51.2 poin dan kualitas dan keamanan naik tipis ke 42 dari sebelumnya 41,9.

Terkait dengan situasi pangan nasional, maka untuk menjaga stabilitas ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga di masyarakat maka

distribusi komoditas pangan harus tetap dijaga kelancarannya serta menggerakkan masyarakat untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan lestari, antara lain melalui pemanfaatan lahan-lahan pekarangan dengan tanaman pangan produktif.

8). *Indek Pembangunan Manusia*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Terhitung sejak tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) merubah metode penghitungan IPM yang disebabkan karena ada beberapa indikator yang dianggap tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar penghitungan. Perubahan tersebut terdapat pada indikator Angka Melekat Huruf yang tidak lagi digunakan sebagai salah satu indikator pendidikan, diganti dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah. Perubahan lainnya adalah PDRB per kapita tidak lagi digunakan sebagai dasar penghitungan indeks daya beli, yang digantikan oleh Produk Domestik Regional Netto (PDRN) per Kapita, karena dianggap lebih akurat dalam menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

9). *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Kota Kediri yang terdiri dari 3 (tiga) wilayah Kecamatan dan 46 kelurahan, melaksanakan program fasilitasi pemberdayaan masyarakat, yaitu mengalokasikan dana sebesar 50 juta per RT per tahun dimasing-masing kelurahan untuk pembangunan prasarana fisik lingkungan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan sosial.

10). *Penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Timur*

RPJMD Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014, dengan visi **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**, yang ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan :

- a). Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- b). Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
- c). Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
- d). Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- e). Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Isu strategis didalam RPJMD Provinsi Jawa Timur yang relevan untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kota Kediri 2014-2019 antara lain :

a). Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009-2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi

pertumbuhan ekonomi nasional. Tingginya kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah serta peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Namun demikian kualitas pertumbuhan Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan", belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b). Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM

Isu strategis Jawa Timur dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah bagaimana meningkatkan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi, penataan tata kelola kelembagaan serta peningkatan skala usaha UMKM. Keberadaan UMKM memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.

c). Disparitas Wilayah

Disparitas antar wilayah dilihat dari perkembangan nilai PDRB perkapita masing-masing kabupaten/kota. Kota Kediri termasuk didalam daerah yang memiliki PDRB perkapita besar bersama kota-kota yang ada di wilayah utara Jawa Timur yaitu Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Tingginya PDRB per kapita Kota Kediri dikarenakan adanya kontribusi nilai hasil barang dan jasa industri rokok/tembakau PT. Gudang Garam yang memberikan kontribusi sebesar 70% lebih dalam pembentukan PDRB di Kota Kediri, sehingga untuk ketahanan ekonomi Kota Kediri diperlukan adanya pengembangan usaha kecil, menengah dan industri kreatif berbasis lingkungan.

d). Infrastruktur

Arahan kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur, dalam pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian, Kota Kediri termasuk didalam Cluster Regional Kelud. Cluster Regional Kelud terdiri dari Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar dengan arahan wilayah pengembangan sebagai berikut :

- Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru;
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

- Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
- Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- Pengendalian alih fungsi kawasan pertanian;
- Pengembangan energi baru terbarukan;
- Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
- Pembangunan infrastruktur transportasi;
- Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- Pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan yang meliputi industri, perdagangan dan jasa sesuai arahan RTRW;
- Peningkatan kegiatan yang diarahkan pada perkebunan, pertanian, pertambangan, pariwisata alam dan perikanan;
- Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal secara optimal dan mendukung pengembangan industri kecil dan menengah sebagai pemasok utama pasar regional.

Sejalan arahan wilayah pengembangan Cluster Regional Kelud, yang menjadi isu strategis Kota Kediri adalah perlu adanya TPA regional dan penataan infrastruktur transportasi (*outer ring road*). Diharapkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapatnya mengawali dan memfasilitasi kemungkinan dijalinnya kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam cluster regional kelud untuk penyediaan kedua fasilitas tersebut.

e). Pengangguran dan Kemiskinan

Data RPJMD Provinsi Jawa Timur, menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur terus menunjukkan perbaikan dari 13,08% (2012), kemudian menurun menjadi 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen. Namun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada September 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% tahun 2013.

Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari Rp.243.783 per kapita per bulan pada September 2012 menjadi Rp.273.758 per kapita per bulan. Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, dilihat dari Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2014, sedangkan indeks keparahan mengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan September 2013.

Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin membutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan merupakan isu strategis yang akan dikembangkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam

memperbaiki nasibnya yang akan dilaksanakan melalui program-program pengentasan kemiskinan terpadu dan sistematis.

Terkait dengan isu strategis Jawa Timur, pengurangan pengangguran dan kemiskinan juga merupakan isu strategis Kota Kediri yang kinerja percepatan penurunannya akan ditingkatkan antara lain melalui : (a) pengembangan industri kreatif berbasis lingkungan; (b) bantuan atau perkuatan permodalan UMKM, koperasi dan pedagang kaki lima dengan sasaran dapat terserapnya 30.000 tenaga kerja; (c) membangun Balai Latihan Kerja atau menyertakan para pencari kerja di lembaga pelatihan kerja atau di BLK-BLK yang telah ada; (d) membangun kerjasama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk merekrut tenaga kerja lokal.

4.2.2. Isu berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah

a. Isu Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Penyusunan substansi dasar pembangunan jangka menengah daerah tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Sejauh mana hasil-hasil pembangunan jangka menengah 5 tahun sebelumnya mampu memberikan kontribusi yang positif dan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memacu serta mendorong peningkatan, pengembangan dan percepatan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dengan tetap melihat isu permasalahan/strategis yang berkembang.

Tahapan pelaksanaan pembangunan jangka menengah berdasarkan periodisasi RPJPD Kota Kediri, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Tahap I (Tahun 2005-2009)

Periode pertama RPJPD Kota Kediri diawali dari RPJMD 2005-2009 sebagai Tahap Pertama Pembangunan Jangka Panjang. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, secara umum, prioritas Tahap I diarahkan pada (1). terwujudnya Kota Kediri sebagai kota yang memiliki SDM yang cerdas, produktif, didukung sarana-prasarana pendidikan serta pelayanan publik yang berkualitas; (2). Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui *e-services* dalam pelayanan publik walaupun belum sepenuhnya tercapai, sebagai modal dasar yang positif untuk pengembangan lebih lanjut; (3). Terwujudnya peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi, Komunikasi dan Sistem informasi harus terus dikembangkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang prima melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan kredibel; (4). Terwujudnya infrastruktur sarana dan prasarana (transportasi, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur TIK dan penunjang kawasan strategis); (5). Tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi, penegakan hukum, penataan kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur); serta (6). Terjalinnya kerjasama antara pemerintah, swasta & masyarakat dalam berbagai bidang demi menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

2). Tahap II (Tahun 2010-2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan Tahap I, Tahap II yang merupakan pelaksanaan RPJMD tahun 2010-2014, prioritas utama pembangunan diarahkan pada : (1). terwujudnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat Kota Kediri melalui pembebasan biaya SPP dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa tingkat SD sampai dengan SMA terutama masyarakat miskin; (2). Terwujudnya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; (3). Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima dan berbasis teknologi informasi, melalui : (a). Percepatan dan kemudahan proses pelayanan perijinan, dengan cara memberikan sosialisasi dan informasi mengenai tarif dan prosedur pelayanan peijinan berbasis IT; (b). Memberikan pembebasan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; (c). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui kerjasama dengan media elektronika; (4). Terwujudnya peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan cara memberikan perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui dana bergulir, peningkatan kualitas SDM pelaku Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta memperluas lapangan kerja; (5). terwujudnya peningkatan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan beberapa kawasan strategis perekonomian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kawasan penunjang lainnya yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan menuju *green-city*.

3). Tahap III (Tahun 2015-2019)

Untuk melanjutkan pelaksanaan Tahap II, maka kebijakan pembangunan pada tahap III diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah yang didukung oleh keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri, sarana dan prasarana yang berkualitas dengan diimbangi kemampuan ilmu dan teknologi yang dikembangkan secara berkelanjutan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan kawasan budidaya (perdagangan, jasa, pariwisata) dan pemantapan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan. Terwujudnya Kota Kediri menjadi kota yang sehat, bersih, asri, dengan penataan ruang yang selaras antara lingkungan terbangun dan lingkungan alamiahnya, yang didukung oleh aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, akuntabel dan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Timur.

b. Isu Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Kediri dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, perkembangan/ perluasan jaringan komunikasi - transportasi dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan baik secara fisik

maupun non fisik melalui kegiatan manusia didalamnya. Pertumbuhan ini akan memiliki konsekuensi pada perubahan tatanan ruang. Secara umum bila tidak ditata dengan sebaik-baiknya, maka perkembangan yang terjadi menjadi tidak terarah dan kualitas ruang juga akan semakin menurun atau tidak terkelola dengan baik.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 telah memberikan arahan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kota Kediri. Adapun tujuan dan kebijakan penataan ruang yang termuat dalam RTRW Kota Kediri adalah mewujudkan Kota Kediri sebagai sentra pendidikan, industri, perdagangan-jasa dan pariwisata berskala regional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi :

- 1). Kebijakan penataan struktur ruang wilayah kota;
- 2). Kebijakan penataan pola ruang wilayah kota; dan
- 3). Kebijakan penetapan kawasan strategis

Kebijakan struktur ruang wilayah kota meliputi: Pengembangan kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pengembangan kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Kediri – Tulungagung – Blitar; Pengembangan sistem pusat pelayanan kota; Dan pengembangan sistem prasarana wilayah.

Kebijakan pola ruang wilayah Kota meliputi : pemantapan kawasan lindung; dan pengembangan kawasan budidaya. Kebijakan penetapan kawasan strategis meliputi : pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi; dan pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup.

4.2.3. Isu-Isu Strategis Kota Kediri

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda internasional, nasional dan provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri dan Kebijakan Penataan Ruang Kota Kediri, serta memperhatikan janji-janji politik yang perlu diwujudkan Walikota dan Wakil Walikota Kediri, maka isu strategis dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun 2014-2019 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik

Terindikasinya beberapa kasus kolusi, korupsi dan nepotisme yang ditengarai terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dekade yang lalu, menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Kediri agar kedepan dapat diwujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas KKN. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka Komitmen Pemerintah Kota Kediri ke depan adalah menata Kota Kediri tanpa korupsi, dengan pembenahan kinerja pada :

- 1). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, penataan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik utamanya pada :
 - a). *Layanan Administrasi Kependudukan, untuk pengurusan KTP; Akte Kelahiran; Catatan Sipil; Akte Kematian; Akte Nikah/Cerai; Kartu Keluarga dan lain-lain layanan adminduk;*

- b). *Layanan Perindustrian, Perdagangan & Koperasi* (SIUP, SITU, Tanda Daftar Perusahaan; Metrologi/Tera; Pengujian Hasil Industri; Kredit Usaha; dan lain-lain)
 - c). *Layanan Kesehatan Rumah Sakit; Puskesmas; Posyandu, Jamkesmas/Jamkesda, dan lain-lain*
 - d). *Layanan Perhubungan meliputi Ijin Usaha Angkutan Darat; Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor; dan lain-lain*
 - e). *Layanan Ketenagakerjaan meliputi Kartu Kuning (Pencari Kerja); Informasi Kesempatan Kerja; Penempatan Tenaga Kerja; Pelayanan TKI; dan lain-lain*
 - f). *Layanan Pertanahan, Tata Ruang dan Permukiman, berupa Pengurusan Sertifikat Tanah; Pengurusan Pengalihan atas Tanah; IMB; Ijin Lokasi Industri/Perdagangan; HO; AMDAL; dan lain-lain*
 - g). *Layanan Pendidikan, meliputi layanan Pendidikan Dasar; Pendidikan Luar Sekolah; dan lain-lain*
 - h). *Layanan Perizinan dan Penanaman Modal meliputi : Ijin PMA; Ijin PMDN; Informasi Potensi Investasi; dan lain-lain.*
- 2). *Penataan Sistem Keuangan Daerah, melalui penyempurnaan mekanisme perencanaan dan penganggaran di daerah, Perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa publik melalui pengembangan mekanisme pengadaan secara elektronik (*electronic procurement*) maupun unit pengadaan barang dan jasa, penataan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga penatausahaan/pelaporan, perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan aset daerah dan perbaikan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah baik dari sektor pajak, retribusi, bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah maupun sumber-sumber lain seperti Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus maupun Pinjaman Daerah;*
- 3). *Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan, difokuskan pada :*
- a). *Mekanisme rekrutmen CPNS dan Mekanisme penetapan mutasi dan promosi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Kediri telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan yang berlaku, namun belum sesuai dengan formasi yang dibutuhkan karena Dokumen Pola Karir dan Dokumen Pemetaan Jabatan belum disusun;*
 - b). *Meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN sesuai peraturan yang berlaku;*
 - c). *Penilaian dan evaluasi kinerja PNS Kota Kediri belum sesuai dengan standart dan belum berbasis online sehingga tidak memungkinkan adanya pemberian kompensasi secara adil;*
 - d). *Penyusunan perencanaan/pemetaan jabatan PNS Kota Kediri, sehingga rekrutmen ASN dapat berdasarkan pada kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensi;*
 - e). *Mekanisme rekrutmen CPNS dan Mekanisme penetapan mutasi dan promosi jabatan di Kota Kediri telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan yang berlaku, namun belum sesuai dengan formasi yang dibutuhkan karena Dokumen Pola Karir dan Dokumen Pemetaan Jabatan belum disusun.*

- 4). Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi melalui Pengembangan Pilot Project PD/Perangkat Daerah bebas korupsi, Penetapan contoh program atau kegiatan bebas korupsi pada sektor prioritas, Penetapan pilot project daerah bebas korupsi.

Komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk membangun dan menata pemerintahan daerah tanpa korupsi, diawali dengan membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat melalui transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengoptimalkan pengembangan *e-government*. Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dijelaskan bahwa *e-Government* merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi dari sisi masyarakat, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena melalui penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik akan dapat diketahui prosedur pelayanan yang baku dan standar yang jelas dari sisi waktu penyelesaian maupun biaya yang harus dikeluarkan. Dari sisi pemerintah daerah, dapat meningkatkan transparansi yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Kediri perlu membangun, mengembangkan dan mengoptimalkan *e-Government* dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Selanjutnya, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, permasalahan mendasar yang dihadapi Kota Kediri dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan struktur kelembagaan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa dampak perubahan dalam penataan dan pengelolaan jabatan perangkat daerah di Kota Kediri. Hal ini membawa kepada pilihan-pilihan alternatif model, struktur, organisasi perangkat daerah yang dibentuk baik gabungan atau tidak. Merupakan tantangan bagi kemampuan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan kewenangan yang dimiliki.

Selain penataan kelembagaan, beberapa kebijakan kewenangan sektoral juga sudah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terhadap kewenangan sektoral daerah, antara lain : a). penarikan kewenangan sekolah menengah ke Provinsi; b). penarikan kewenangan bidang kelautan, kehutanan, sampai pertambangan dan energi ke pemerintah pusat; c). dinas komunikasi dan informatika yang harus berdiri sendiri sebab akan menjadi *leading sector* keterbukaan informasi publik

(KIP); d). serta penarikan kewenangan urusan kesatuan bangsa dan politik agar lebih netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Isu kelembagaan ini akan berpengaruh terhadap perubahan dan distribusi kewenangan setiap organisasi perangkat daerah dan akhirnya juga akan berdampak terhadap pengelolaan dan alokasi penganggaran daerah.

Permasalahan lain adalah belum dikembangkannya secara baik manajemen SDM yang mengarah pada peningkatan profesionalitas aparatur, transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, masih terjadinya inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, masih lemahnya sistem pengawasan internal, masih kurangnya kapasitas dan rendahnya integritas aparatur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN. dengan memperhatikan unsur efektifitas, efisiensi dan ketercakupan pelayanan publik dan aspirasi masyarakat. Disisi lain etos dan budaya kerja yang baik perlu lebih ditingkatkan.

Sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang didukung oleh etos dan budaya kerja aparatur yang baik, perlu dipermantap pelaksanaannya dengan :

- a). Meningkatkan profesionalisme, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- b). Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya;
- c). Mewujudkan pelayanan publik prima dengan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat;
- d). Menempatkan aparatur kelurahan yang berbasis kompetensi dan kewilayahan;
- e). Mewujudkan tata kelola birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tercipta jenjang karir yang pasti.

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini diprediksi bersumber dari faktor manusia yaitu terkait dengan perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, pembuangan limbah industri ke aliran sungai, pendirian rumah hunian disepanjang daerah aliran sungai, dan pendirian bangunan liar yang tidak mentaati peraturan perundangan. Meskipun dana APBD yang dipergunakan untuk menangani pengelolaan persampahan dari tahun ke tahun semakin besar, tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak dibarengi dengan meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan lingkungan hidup.

Dampak kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan aktivitas manusia dan perubahan iklim adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air seperti sumber air tengis dan moyo, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Kualitas air sungai juga telah mengalami pencemaran dari akibat limbah domestik dan limbah industri. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan kualitas air sungai kresak yang melebihi

ambang batas yaitu BOD sebesar 89,55 mg/L dari ambang batas sebesar 6 mg/L dan COD sebesar 499,55 mg/L dari ambang batas sebesar 50 mg/L;

Lima tahun ke depan Kota Kediri akan menghadapi banyak permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk, disisi lain dengan semakin padatnya arus lalu lintas, akan menimbulkan terjadinya peningkatan polusi udara, air dan tanah. Selain itu, akan terjadi pergeseran tata ruang kota yang berpengaruh pada ekosistem dan kehidupan organisme. Akibat semakin menyempitnya ruang kota, maka keanekaragaman hayati akan menurun jumlahnya karena beberapa spesies hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan lagi. Di samping itu, kerusakan lapisan ozon yang semakin meluas, memicu terjadinya pemanasan global yang berdampak pada perubahan musim, cuaca, dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan harus tetap berprinsip pada pembangunan berwawasan lingkungan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Permasalahan sumber daya dan lingkungan meskipun menjadi masalah lokal Kota Kediri, namun demikian untuk efektivitas manajemennya tidak dapat mengabaikan potensi kerjasama dengan daerah-daerah lain terutama yang terkait secara langsung dengan keberadaan sumber daya lingkungan yang dibutuhkan masyarakat kota Kediri. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa permasalahan air, terutama Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak dapat dipahami sekedar dari batas administratif. Permasalahan sumber daya air, misalnya perlu adanya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dan daerah-daerah lainnya.

Terkait dengan kondisi wilayah Kota Kediri, khususnya pada wilayah disekitar lereng Gunung Klotok dengan ketinggian 672 meter dan Gunung Maskumambang dengan ketinggian 300 meter. Daerah-daerah tersebut memiliki kelerengan diatas 40%. Meskipun kedua Gunung tersebut tidak aktif namun apabila tidak ada pencegahan terhadap perambahan dan kerusakan hutan secara liar serta tidak diimbangi dengan adanya reboisasi yang tepat dan optimal, maka kemungkinan besar akan terjadinya tanah longsor atau erosi yang secara langsung akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kota Kediri. Oleh karena itu, pembangunan kota harus senantiasa mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas masyarakat yang tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Disamping itu, disepanjang daerah aliran sungai brantas dan sungai-sungai yang ada di Kota Kediri diantaranya Sungai Kresek (panjang 9 km), Sungai Parang (panjang 7,5 km) dan Sungai Kedak (panjang 8 km) rawan terjadi bencana longsor dan banjir yang sewaktu-waktu dapat mengancam kehidupan masyarakat di sekitar bantaran sungai. Tingginya kebutuhan ruang hidup yang dihadapkan pada ketersediaan lahan menjadi semakin berkurang, mengakibatkan munculnya pemukiman liar di lahan yang seharusnya bukan untuk tempat tinggal. Sehingga perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin terhadap munculnya rumah-rumah penduduk yang berada di bantaran sungai. Kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, penurunan daya dukung alam, isu pemanasan global, permasalahan bencana alam, dan berbagai permasalahan lain yang terkait dengan *space of life* merupakan isu strategis yang harus dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan.

Disisi lain, kepadatan penduduk yang terpusat di perkotaan, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, menyebabkan daerah perkotaan

menjadi rawan/rentan terhadap bencana. Permintaan lahan untuk perumahan dan industri juga menyebabkan bertambahnya area yang potensial terhadap bencana. Terjadinya kebakaran gedung dan permukiman penduduk perlu diantisipasi khususnya pada musim kemarau. Hal ini terkait dengan kecerobohan manusia diantaranya pembangunan gedung/rumah yang tidak mengikuti standart keamanan bangunan serta perilaku manusia. Kepadatan bangunan yang terlalu tinggi, hubungan arus pendek listrik, meledaknya kompor serta kobaran api akibat lilin/lentera untuk penerangan merupakan sebab umum terjadinya kebakaran pemukiman dan gedung.

Oleh karena itu kelestarian lingkungan hidup merupakan aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Kota Kediri pada 5 (lima) tahun mendatang, pembangunan yang dilaksanakan akan mendudukkan isu kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Kediri.

Pembangunan berkelanjutan hanya mungkin dilakukan pada wilayah dengan kapasitas daya dukung lingkungan yang cukup hingga baik. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penataan ruang yang baik, rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup, serta mencegah tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Aspek pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait secara terintegrasi, terpadu, menyeluruh dan simultan mulai dari penyusunan peraturan, implementasinya secara teknis, hingga pengawasan dan evaluasi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kota Kediri sebagai kota yang layak huni bagi masyarakatnya maka akan dilakukan :

- 1). Pelaksanaan pembangunan termasuk berbagai aktivitas kegiatan perekonomian dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan;
- 2). Menjaga ekosistem dengan meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman-taman kota hingga 30% dari luasan kota;
- 3). Menyediakan infrastruktur sanitasi kota yang memadai;
- 4). Peningkatan kesadaran dan budaya masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat dan sadar lingkungan untuk kehidupan generasi yang akan datang.

c. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan struktur pembentuk ruang untuk mendukung aktivitas kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kota Kediri dalam pembangunan infrastruktur adalah belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur sejalan dengan dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengembangan wilayah. Penyediaan infrastruktur meliputi ketersediaan infrastruktur fisik, infrastruktur non fisik dan infrastruktur teknologi informasi.

Ketersediaan infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur fisik juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk, dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain.

Pengembangan prasarana transportasi khususnya jalan dan jembatan merupakan tantangan penting karena dari prasarana transportasi inilah akan terjamin kelancaran pendistribusian barang dan jasa. Terjadinya pengelompokan atau pemusatan fasilitas pada daerah pusat kota di Kota Kediri (terutama Kecamatan Kota), menimbulkan disparitas pembangunan. Ketidakserasian pertumbuhan antar wilayah serta tersentralisasinya aktivitas di pusat kawasan perdagangan, jasa dan pelayanan publik, mengakibatkan terjadinya kemacetan di beberapa titik simpul jalan sehingga dalam lima tahun ke depan diperlukan revitalisasi dan penambahan jembatan dan prasarana jalan yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik kota serta mempercepat pertumbuhan wilayah, melalui pembangunan jalan lingkar maupun peningkatan jaringan jalan dalam kota. **Pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Ngronggo dan Kelurahan Banjarmlati serta pengembangan jalan lingkar** dapat menjadi alternatif untuk mengurai simpul kemacetan yang terjadi pada saat ini. Alternatif solusi tersebut juga akan mempermudah pengaturan jalur bagi kendaraan-kendaraan angkutan berat yang akan melintas di Kota Kediri, terutama setelah direalisasikannya TOL Kertosono-Kediri yang telah dimanatkan dalam PP Noor 13 Tahun 2017 tentang PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Disamping itu penyediaan Infrastruktur fisik yang berkualitas dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan diantaranya: pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan umur pakai panjang, pengendalian pemakaian trotoar oleh PKL, perkerasan jalan dengan teknologi resapan, pembuatan dan peningkatan drainase, gorong-gorong dan saluran pembuangan air limbah serta peningkatan infrastruktur hijau dengan menyediakan jalur pejalan kaki (pedestrian), jalur sepeda dan jalur hijau. Disamping masih perlunya **penambahan atau pemerataan ketersediaan lampu penerangan jalan umum di jalan-jalan utama dan lingkungan di seluruh wilayah Kota Kediri**. Disamping itu, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya banjir di Kota Kediri perlu **peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem drainase terpadu di Kota Kediri**.

Buruknya kualitas infrastruktur berimbas pada permasalahan yang dirasakan semakin besar yang nampak belakangan ini yaitu terjadinya kemacetan lalu lintas yang dapat menghambat aktivitas keseharian masyarakat serta menyebabkan kerugian materi akibat penggunaan bahan bakar yang tidak optimal, belum lagi permasalahan polusi sampai dengan gangguan kejiwaan yang merusak kesehatan masyarakat.

Selanjutnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dirasa penting untuk membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berbasis masyarakat khususnya di lingkungan tingkat RT dan RW dengan melakukan penataan dan perbaikan lingkungan kumuh; pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, selokan dan drainase sehingga dari segi fisik tercipta kondisi lingkungan yang terjaga kebersihan, keindahan dan kesehatannya, dan dari segi ekonomi dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Infrastruktur Non Fisik, terkait dengan penyediaan fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial, antara lain : pemenuhan kualitas prasarana sarana pendidikan baik bangunan sekolah, ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung (perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer) yang masih belum optimal dan merata; belum terpenuhinya prasarana dan sarana di Puskesmas

PONED dan Rumah Sakit PONEK serta jumlah dan sebaran Puskesmas yang masih kurang; belum optimalnya penanganan dan kondisi panti-panti sosial sehingga memerlukan upaya peningkatan; serta belum optimalnya prasarana dan sarana publik yang kurang sesuai dengan standar pelayanan.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Kediri adalah **ketersediaan data sebagai basis perencanaan pembangunan infrastruktur**. Data yang akurat dan selalu terkini merupakan kunci dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran, efektif dan efisien baik dari sisi waktu, anggaran maupun sumber daya yang lain. Oleh karena itu penyediaan database dan pemutakhirannya menjadi salah satu agenda penting yang tidak dapat diabaikan oleh Pemerintah Kota.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan bagi penyediaan infrastruktur, oleh karena itu Pemerintah Kota perlu memprioritaskan pelaksanaan pembangunan. Berinvestasi dan berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar menjadi salah satu pilihan yang penting, karena selain memberikan daya ungkit untuk penanganan kemiskinan, penyediaan infrastruktur dasar juga merupakan kewajiban dan tugas utama dari Pemerintah kepada masyarakatnya. **Penyediaan infrastruktur dasar yang perlu difokuskan oleh Pemerintah Kota Kediri adalah penyediaan akses terhadap air bersih, penyediaan sanitasi yang sehat dan penyediaan serta peningkatan kualitas tempat tinggal yang layak huni**. Penyediaan akses terhadap air bersih perlu dilakukan tidak hanya melalui PDAM, mengingat saat ini Pemerintah Kota telah memiliki PD dengan tupoksi penyediaan air minum untuk dapat segera mewujudkan akses universal terhadap air bersih.

Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi hal yang mengemuka seiring dengan terbentuknya PD baru yang memiliki tupoksi khusus dalam menangani urusan ini. Dalam rangka menjaga tertibnya penyelenggaraan urusan ini serta menegaskan aturan main, kelembagaan, tugas, kewajiban, tata cara peran serta dan sanksi, maka **perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Perumahan dan Kawasan Permukiman**.

Infrastruktur Teknologi Informasi (TI), antara lain : masih terbatasnya kapasitas *bandwidth* intranet dan internet di lingkungan Pemerintah Kota Kediri; sebaran infrastruktur jaringan yang belum memadai; belum adanya *data center* yang dikelola secara terpusat dan profesional; tingkat keamanan data dan informasi yang kurang memadai terhadap aset fisik dan non fisik; belum adanya *sistem recovery* yang mampu menyediakan data dan informasi mendekati kondisi terakhir sebelum bencana terjadi di kemudian hari.

Disisi lain, masih terdapat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM aparatur serta masyarakat dalam bidang TI, kelembagaan yang masih tumpang tindih dalam hal tupoksi sehingga dalam lima tahun kedepan diperlukan penyediaan infrastruktur TI, pengembangan aplikasi, penyediaan informasi yang terintegrasi, peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan menjadi satu PD yang mandiri.

d. Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas)

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha berhasil dinilai

sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau sebagai subyek dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Subyek berarti masyarakat sebagai motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri perlu mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, agar potensi yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan Kota Kediri.

Pemberdayaan sebagai implementasi dari pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi rakyat akan meningkat menjadi emansipasi rakyat.

RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Sebagai sebuah institusi lembaga kemasyarakatan, RT/RW memiliki volume yang tinggi dalam berinteraksi dengan masyarakat di wilayahnya. Hal ini tentu dapat menjadi modal utama untuk menunjang keberhasilan pembangunan kota secara keseluruhan disamping sebagai pendeteksi dini terhadap potensi timbulnya konflik dimasing-masing wilayah. Pemberdayaan RT/RW sebagai implementasi dari pembangunan yang berpusat masyarakat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi masyarakat akan meningkat menjadi emansipasi rakyat. Sehingga untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya perlu adanya peningkatan fasilitasi agar masyarakat lebih mampu memberdayakan dan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik. Dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka program pemberdayaan masyarakat yang ada perlu lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Selama ini warga masyarakat di tingkat RT/RW kurang terlibat dalam melakukan perencanaan pembangunan di lingkungannya, bahkan tidak jarang pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Kediri diperlukan adanya program terobosan yang bersifat partisipatif yang dikenal dengan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). Prodamas adalah program pemberdayaan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar 50 juta rupiah tiap tahunnya untuk pembangunan di wilayah RT yang dilaksanakan oleh warga masyarakat lingkungan RT, dikoordinasikan dan diawasi oleh RW serta diverifikasi oleh kelurahan. Program ini diusulkan dan dibahas melalui mekanisme Musrenbang tingkat kelurahan. Sasaran program ini meliputi pembangunan bidang infrastruktur/lingkungan, bidang ekonomi dan bidang sosial. Dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan berkelanjutan.

Filosofi dari Prodamas adalah mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan essential masyarakat yang sering tidak terakomodasi dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Disamping itu Prodamas juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada tahap : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan keberlanjutan/kelestarian pembangunan. Tujuan akhir dari Prodamas adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pembangunan di Kota Kediri.

e. Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran

Tantangan pembangunan dibidang sosial adalah masih adanya kesenjangan sosial, dan kondisi sebagian masyarakat yang menghadapi tekanan kemiskinan, pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap untuk bersaing di era global yang makin kompetitif. Kesenjangan sosial, dalam banyak hal akan melahirkan proses eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin karena posisi mereka yang rentan dan ter subordinasi. Sedangkan kemiskinan, disisi yang lain akan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan, yang ujung-ujungnya akan memperlebar jurang perbedaan antar strata sosial masyarakat, serta melahirkan efek domino lain berupa peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi disektor riil, terpuruknya kualitas sumber daya manusia yang ada, rendahnya akses masyarakat ke berbagai layanan publik dan bahkan hilangnya kesempatan si miskin untuk meningkatkan posisi tawar dan melakukan mobilitas vertikal untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Rendahnya kualitas SDM masyarakat miskin yang rata-rata tingkat pendidikannya rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang profesional seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai (*mismatch*) dengan kebutuhan pasar.

Upaya mengatasi kemiskinan juga terkait dengan pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan data susenas BPS tahun 2012, secara kuantitas jumlah penduduk Kota Kediri yang hidup dibawah garis kemiskinan terus menurun tiap tahun, dari 24.900 jiwa pada tahun 2010, menjadi 23.300 jiwa (2011) dan menurun lagi menjadi 22.100 (2012), namun perlu dicermati potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan sebagai dampak kebijakan ekonomi pemerintah. Selain menimbulkan masalah ekonomi kemiskinan juga memicu masalah sosial, ketentraman, dan ketertiban umum sehingga harus ditangani secara serius dan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan.

Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat miskin seperti kenaikan BBM secara langsung akan berpengaruh pula terhadap kemungkinan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin.

Untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan posisi tawar (*bargaining*) masyarakat miskin terhadap semua bentuk eksploitasi adalah memberikan kemudahan ekonomi yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial yang memihak kepada masyarakat miskin dan pengangguran. Diperlukan kemudahan ekonomis berupa adanya kesempatan dan terbukanya akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

Sebagai upaya serius untuk menangani masalah kemiskinan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kota Kediri, maka strategi yang dimantapkan dalam pembangunan ekonomi adalah *pro poor, pro job, pro growth*,

dan pro environment yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), serta Millenium Development Goals (MDGs) yang di Kota Kediri dijabarkan lebih lanjut di dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (OPD) yang arahnya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh akses dalam menikmati pelayanan dasar yang menjadi hak seluruh warga negara.

Disisi lain, peningkatan jumlah angkatan kerja harus dibarengi dengan peningkatan kualitas baik ilmu pengetahuan maupun keterampilan hidup. Dengan demikian, dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan mampu menciptakan lapangan kerja. Untuk menekan angka pengangguran dilakukan melalui peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan ketrampilan, penyalarsan pendidikan vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja, pengembangan semangat wirausaha masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong lingkungan yang kondusif untuk peningkatan investasi dalam daerah yang akan menyerap tenaga kerja lokal.

Dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta permasalahan sosial terkait dengan pembangunan ekonomi masyarakat di Kota Kediri, selain akan ditingkatkannya fasilitasi atau bantuan berbasis masyarakat, khususnya **peningkatan bantuan atau kesejahteraan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (anak yatim, piatu, panti werdha, para lansia dan lain-lain)**, penanggulangan kemiskinan juga dilakukan dengan mendorong, menggerakkan dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya para pelaku usaha di masing-masing kelurahan yang nantinya secara bertahap akan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Untuk mempercepat penanganan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial ke depan perlu **penambahan alokasi dana untuk Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah** yang disalurkan kepada masyarakat, kelompok masyarakat atau kelembagaan.

f. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Penilaian IPM akan menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Komponen IPM terdiri dari tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia. Ketiga komponen tersebut berkaitan dengan peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*).

Berdasarkan metode perhitungan baru nilai IPM Kota Kediri tahun 2015 sebesar 75,67 atau meningkat sebesar 1,05 dari nilai IPM tahun 2014. Perkembangan nilai IPM Kota Kediri mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 berturut-turut adalah sebesar 72,93 (tahun 2011), 73,66 (tahun 2012), 74,18 (tahun 2013), 74,62 (tahun 2014), dan 75,67 (tahun 2015). Adapun untuk nilai dari masing-masing komponen IPM adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Kediri Tahun 2011-2015 Dengan Metode Baru

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil yang Disesuaikan (000)
2011	73,46	12,90	9,34	10.098,00
2012	73,49	13,09	9,49	10.432,00
2013	73,51	13,27	9,57	10.670,00
2014	73,52	13,52	9,70	10.702,00
2015	73,62	14,30	9,88	10.733,00

Sumber : BPS Jawa Timur

Angka Harapan Hidup Kota Kediri tahun 2015 mengalami peningkatan 0,10 poin dari sebesar 73,52 pada tahun 2014 menjadi sebesar 73,62 pada tahun 2015. Peningkatan capaian AHH ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Kediri pada tahun 2015 telah mencapai 14,30 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah 9,88 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk Kota Kediri telah menempuh pendidikan dasar 9 tahun dan kualitas pendidikan Kota Kediri berada pada tingkatan di atas rata-rata. Dengan standar BPS nilai pengeluaran per kapita disesuaikan minimum Rp.1.007.436,00 dan maksimum Rp.26.572.352,00 rupiah, tingkat daya beli masyarakat Kota Kediri masuk dalam kategori Menengah Atas yang memiliki kemampuan daya beli relatif tinggi dan mampu mengimbangi perubahan kebijakan makro ekonomi, seperti kebijakan fiskal, moneter dan inflasi, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam periode 2011-2015 angka IDB Kota Kediri meningkat secara stabil.

Selanjutnya, berdasarkan data BPS, IPM Kota Kediri tahun 2016 tercatat sebesar 76,33 point, lebih tinggi dari capaian IPM rata-rata Jawa Timur sebesar 69,74 point.

Meskipun IPM Kota Kediri menunjukkan peningkatan yang cukup baik, namun demikian masih terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan peningkatannya agar IPM Kota Kediri mengalami peningkatan yang lebih baik lagi. Kenaikan pencapaian IPM dikarenakan adanya dukungan program pada pembangunan bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana dan prasarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dipotret dalam angka IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya, namun akan terasa pada beberapa tahun kemudian.

Untuk pencapaian IPM maka isu strategis yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas pada pelayanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat, bagaimana pencapaiannya secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja.

Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Untuk itu, **akses layanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan** bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan.

Permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Adanya *brand image* sekolah-sekolah favorit yang menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di suatu sekolah, telah menciptakan perbedaan dalam kuantitas dan kualitas layanan dalam pendidikan, telah menutup akses bagi kelompok siswa yang membutuhkan peningkatan kualitas pendidikannya tetapi tidak mampu mengakses akibat adanya persaingan dalam sistem yang belum terevaluasi objektivitasnya.

Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah antar lembaga pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan pendidikan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Melalui *replacement* manajemen sekolah diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pelayanan pendidikan antara lembaga pendidikan di Kota Kediri. Diharapkan dengan berkurangnya ketimpangan kualitas pendidikan antar lembaga sekolah, maka para siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dalam setiap lembaga pendidikan yang ada di Kota Kediri. Adanya standarisasi pelayanan pendidikan khususnya di lembaga sekolah negeri.

Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan secara berkelanjutan. Fokus penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kota Kediri diarahkan pada dua hal yaitu pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam hal pemerataan kesempatan belajar, kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan menjadi titik fokus utama, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kota Kediri, termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Hal ini mengingat sejak tahun 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyiratkan bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK ada pada Pemerintah Provinsi. Pemerintah Daerah hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pendidikan dasar.

Upaya Pemerintah Kota Kediri menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, antara lain melalui (1) Dukungan program Bantuan Operasional Sekolah; (2) Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diantaranya merupakan sekolah inklusi. Sedangkan upaya Peningkatan akses pendidikan dilakukan melalui : (1) Penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara gratis; (2) Program subsidi angkot gratis dan penyediaan bus sekolah gratis bagi seluruh pelajar di Kota Kediri; (3) Program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kota Kediri yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan di Kota Kediri maupun di luar wilayah Kota Kediri hingga jenjang S3; (4). Bantuan seragam gratis bagi siswa baru untuk jenjang pendidikan SD, SMP serta aktif menyelenggarakan program English Massive (E-Mas), yaitu kursus bahasa Inggris secara gratis bagi seluruh elemen masyarakat Kota Kediri tanpa batasan usia melalui penyediaan tutor dan sarana pendukung kursus. (5) Menginisiasi Kampung Pendidikan pada beberapa Kelurahan di Kota Kediri, sebagai komitmen warga untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk anak belajar. Antara lain dengan penerapan jam belajar bagi anak-anak mulai pukul 18.00-20.00 WIB, pendampingan orang tua dan keluarga dalam kegiatan belajar anak, mematikan TV, Radio dan gadget pada jam belajar anak, serta kesepakatan tidak ada anak yang putus sekolah di wilayah lingkungannya masing-masing.

Kedepan perlu adanya penambahan atau pengembangan sekolah agar jumlah sarana pendidikan selaras dan seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

Disisi lain dalam upaya untuk menjamin semua warga Kota Kediri memperoleh pendidikan, maka siswa-siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu dibiayai oleh Pemerintah Daerah baik mereka yang bersekolah di lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta, baik mereka yang bersekolah didalam kota maupun di luar kota Kediri.

Selain akses layanan pendidikan yang belum merata dan berkeadilan, rendahnya mutu pelayanan pendidikan, belum optimalnya tata kelola lembaga pelayanan pendidikan juga masih kurangnya pengayaan materi dan metode pembelajaran yang mengarah pada pendidikan berkarakter, masih menjadi persoalan penting untuk pencapaian target urusan pendidikan.

Selanjutnya untuk menjadikan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan yang berkualitas secara bertahap prasarana dan sarana bagi pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang memenuhi mutu standar pelayanan minimal menjadi tugas pemerintah Kota Kediri. Indikasi Kota Kediri tumbuh menjadi pusat pendidikan adalah terdapat beberapa perguruan tinggi di wilayah Kota Kediri yang berpotensi untuk menjadikan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan. Diharapkan dengan terealisasinya proses penegrian Poli Teknik Kota Kediri sebagai Poltek Negeri serta terwujudnya kerjasama dengan dengan Kemenristek Dikti untuk pendirian Universitas Brawijaya di Kota Kediri, secara tidak langsung akan memberikan multiplier effect bagi aktivitas perekonomian masyarakat yang mendorong peningkatan arus perputaran uang, barang dan jasa yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjadikan daya tarik sebagai pusat pendidikan khususnya dalam pengembangan perguruan tinggi, maka upaya nyata yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri adalah **memfasilitasi pendirian dan pengembangan Perguruan Tinggi Negeri di Kota Kediri khususnya Universitas Brawijaya** yang sudah MoU antara Pemerintah Kota Kediri dengan Rektor Universitas Brawijaya Malang dalam pengembangan pendidikan di Kota Kediri.

Sedangkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga akan diberikan beasiswa di perguruan tinggi bagi mahasiswa berprestasi dari kalangan tidak mampu dengan target (sebanyak 1.500 mahasiswa) hingga tahun 2019.

2). Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan Manusiawi

Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola meliputi antara lain : peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan masyarakat berkebutuhan khusus yang diharapkan pada gilirannya nanti, masyarakat memiliki kualitas hidup yang sehat dan produktifitas yang tinggi.

Angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Kota Kediri pada tahun 2016 tercapai sebesar 94,92 per 100.000 kelahiran hidup, kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 70,14 per 100.000 kelahiran hidup. Kurang tercapainya kinerja ini disebabkan pencacatan kematian ibu melahirkan dihitung sesuai dengan KTP domisili sehingga tidak bisa diintervensi dalam penanganannya.

Beberapa hal yang perlu dicarikan solusinya antara lain masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih perlu perhatian serius. Meskipun mengalami peningkatan kinerja dari 5,38 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 5,22 per 1000 kelahiran di tahun 2016. Beberapa hal terkait adanya kematian bayi antara lain disebabkan *asfiksia* (sesak napas saat lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR), infeksi neonatus; *pneumonia*, diare dan gizi buruk.

Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas PONEK dan Rumah Sakit PONEK. Namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan.

Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular seperti penemuan kasus TB paru dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan rumah sakit; masih tingginya kasus DBD dikarenakan adanya iklim tidak stabil dan curah hujan cukup banyak yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti* serta tidak maksimalnya kegiatan PSN; tingginya kasus HIV/AIDS dikarenakan upaya penemuan atau pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit.

Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan dan penyediaan pelayanan rawat inap kelas III khususnya untuk masyarakat miskin (Jamkesmas dan jamkesda) masih belum optimal.

Untuk mendorong peningkatan nilai IPM pada indeks kesehatan, maka program prioritas Pemerintah Kota Kediri lima tahun ke depan :

- a). Jaminan Kesehatan Daerah dengan menggratiskan pelayanan kesehatan di Puskesmas, RSUD dan RS Swasta;
- b). Penyediaan dokter spesialis di Puskesmas;
- c). Peningkatan alokasi dana untuk revitalisasi posyandu anak, ibu dan lansia;
- d). Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas di setiap Kecamatan;
- e). Peningkatan kualitas tenaga medis dan non-medis.

3). Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perekonomian, adalah belum adanya efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi, serta masih sangat tergantung pada perkembangan aktivitas PT. Gudang Garam. Pada kisaran 80% perekonomian Kota Kediri masih tergantung pada aktivitas PT. Gudang Garam. Tahun 2016, Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 81,64% pada pembentukan PRDB Kota Kediri, dengan sumbangan terbesar dari sub kategori industri pengolahan tembakau yaitu 79,98%. Sedangkan sub kategori industri lainnya total sebesar 1,49%, sehingga dapat dikatakan bahwa jalannya perekonomian Kota Kediri tergantung dari sub kategori industri ini.

Struktur perekonomian Kota Kediri akan sulit berkembang ketika dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil-hasil produksi maupun pada peningkatan investasi dalam era perdagangan bebas dan perekonomian dunia yang semakin terbuka. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, disamping meruntuhkan fondasi perekonomian nasional juga berpengaruh besar pada kondisi perekonomian di daerah, tidak terkecuali di Kota Kediri, tercatat bahwa pada tahun 1996 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri hingga mencapai sebesar 13,96%. Akhir tahun 2007 turun menjadi sebesar 11,81% bahkan sebagai dampak krisis tersebut pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri turun drastis hingga menjadi minus 2,49%.

Struktur perekonomian Kota Kediri sangat tergantung pada pertumbuhan sektor industri, perdagangan dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri memang dapat dicapai melalui peningkatan dan pengembangan peran, aktivitas, dan efisiensi sektor industri, perdagangan dan jasa. Sedangkan sektor-sektor lainnya memberikan kontribusi yang sangat rendah, sehingga untuk eksistensi dan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri ke depan, pertumbuhan ekonomi dari pada sektor industri, perdagangan dan jasa harus lebih dapat dipacu peningkatannya.

Tantangan lain adalah permasalahan dalam pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu masih rendahnya kapasitas UMKM Kota Kediri dalam

era persaingan global. Saat ini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Kota Kediri.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, di Kota Kediri terdapat 39.932 usaha/perusahaan non pertanian. Terdiri dari Usaha Menengah Besar (UMB) 1.126 (2,82%) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) 38.806 (97,18%). Secara keseluruhan bila dibanding capaian sensus ekonomi tahun 2006 sebesar 33.411 usaha, jumlah unit usaha tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 19,51%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor UMK memberikan sumbangan yang sangat besar. pada tahun 2016, total tenaga kerja yang terlibat di sektor itu mencapai 85.255 orang, artinya rata-rata setiap satu unit usaha UMK bisa menyerap 2,19 orang sebagai tenaga kerja. Ke depan Pemkot Kediri akan berusaha meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor UMK menjadi 3 orang per satu unit usaha, dengan menciptakan situasi kondusif untuk berusaha di kota Kediri.

Terkait dengan pengembangan usaha menengah besar, yang dilakukan Pemkot Kediri adalah dengan mempermudah dan menyederhanakan perijinan, dari 153 perijinan pada tahun 2015 telah disederhanakan menjadi tinggal 56 perijinan. Ini penting karena Kota Kediri sudah melakukan *rebranding* sebagai kota perdagangan dan jasa. dengan kebijakan itu, akan mendorong investor untuk tertarik masuk sehingga modal dan uang akan berputar di Kota Kediri. serta pada akhirnya ekonomi akan terus tumbuh dan bergerak. Dari total 1.126 UMB di tahun 2016 jumlah serapan tenaga kerjanya mencapai 61.240 orang.

Upaya-upaya yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan berkembangnya sektor ekonomi di kota Kediri antara lain melalui peningkatan kemampuan pelaku industri mikro, kecil dan menengah. mereka tidak lagi sekedar diberi pelatihan-pelatihan tetapi juga diajak mengikuti pameran-pameran besar seperti *inacraft*, pameran terbesar kerajinan di Indonesia. Bahkan untuk kerajinan batik dan tenun didatangkan desainer-desainer terkemuka lalu produknya diikutkan dalam *Jakarta fashion weeks*. Dalam forum seperti itu para pelaku UMKM akan bisa belajar dari para kompetitornya sehingga tergerak untuk lebih maju lagi.

Untuk mewadahi kreatifitas dan inovasi para pelaku UMKM, Kota Kediri harus terus bergerak, ramai, dan tidak diam. oleh karena itu di sepanjang tahun melalui satker-satker yang ada diselenggarakan festival, karnival, pameran dan aktivitas ekonomi lain agar para pelaku UMKM bisa pameran dan berjualan pada moment-moment tersebut. Disamping itu pemkot juga memberikan fasilitasi berupa kredit murah atau bantuan permodalan untuk pengembangan usaha. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, tumbuhnya usaha modern seperti bisnis *online* juga memberikan andil yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian di Kota Kediri. Melalui diskominfo, Pemkot Kediri akan terus berupaya untuk memberikan pelatihan maupun fasilitasi kerjasama dalam pengembangan transaksi *online*.

Sebagai daerah yang tidak kaya akan sumber daya alam, kegiatan usaha produksi yang berbasis sumber daya alam di Kota Kediri kurang berkembang. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tiada lain yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan peran dan potensi UMKM.

Peningkatan kemampuan dan daya saing UMKM diarahkan untuk dapat : (a). Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk UMKM melalui peningkatan inovasi dan standarisasi produk; (b). Akses ke layanan pembiayaan dan perkuatan permodalan kepada UMKM, Koperasi dan pedagang kaki lima, dengan target penyerapan tenaga kerja sebesar 30.000 tenaga kerja; (c). Penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan; (d). perluasan pemasaran serta (e). Membangun kerjasama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk merekrut tenaga kerja lokal; (f). Mengembangkan usaha kecil, menengah dan industri kreatif berbasis lingkungan serta; (g). Penataan sarana dan prasarana pasar tradisional dan pembangunan pasar tradisional dengan manajemen modern yang berbasis kelurahan.

Kontribusi UMKM sebagai penyedia kesempatan kerja, keberadaannya juga berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Peranan yang sangat penting tersebut tidak akan tercapai bilamana masih terdapat kendala-kendala bisnis atau usaha, baik pada masalah modal maupun akses pasar serta pengembangan ketrampilan usaha. Untuk itu pembinaan terhadap UMKM harus terus dikembangkan agar bisa tumbuh menjadi usaha yang efektif dan efisien, yang pada akhirnya memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian Kota Kediri, regional dan nasional. Sebagai kelanjutan dari program perkuatan permodalan UMKM dilakukan dengan **penambahan penyertaan modal untuk UMKM.**

g. Penggalian dan pengembangan potensi wisata, seni dan budaya serta pembentukan icon Kota Kediri

Banyak potensi wisata di Kota Kediri yang cukup bagus untuk dikembangkan, baik potensi wisata alam, wisata budaya (wisata religi, cagar budaya) dan wisata minat khusus. Beberapa obyek wisata yang ada di Kota Kediri antara lain, potensi Wisata Alam yaitu Kawasan Wisata Selomangleng, Dermaga Joyoboyo, Sumber Alam Sumber Bulus, Sumber Cakarsi, Mata Air (sumber) Lo, Gunung Klotok, Sumber Gayam dan Jalan Tembus Lebak Tumpang. Wisata Budaya : Museum Airlangga (Cagar Budaya dilindungi), Makam Kuno Mbah Boncolono, Komplek Makam Islam Kuno Mbah Wasil, Makam Sunan Geseng, Masjid Aulia Setonogedong, Gereja Merah, Gereja Vincentius, Pura Sekartaji, Klenteng Tri Dharma, Masjid Agung Kota Kediri, Goa Padedean, Goa Selobale. Wisata minat khusus : Taman Wisata Selomangleng, Taman Wisata Paggora, Taman Wisata Tirtoyoso Pabrik Rokok Gudang Garam, Taman Sekartaji, Taman Alun-alun Kota, Kawasan Soto Bok Ijo serta berbagai potensi wisata industri, wisata belanja dan kuliner yang tersebar diberbagai wilayah Kota Kediri.

Sebenarnya, jauh sebelum potensi-potensi wisata tersebut berkembang, Kota Kediri telah memiliki potensi yang cukup dikenal yaitu sebagai Kota Kerajaan Tertua di Pulau Jawa yang keberadaannya sangat diperhitungkan pada masanya, kondisi tersebut jauh sebelum berkembangnya kerajaan Mojopahit dan Sriwijaya. Kediri sudah cukup dikenal dengan rajanya yang termasyhur yaitu Prabu Joyoboyo. Dalam perkembangannya seni karya tulis juga cukup berkembang di Kota Kediri, seperti Tan Khoen Shio dengan karya-karyanya cukup dikenal sampai dengan saat ini.

Namun sayangnya baik potensi sejarah, budaya dan seni Kota Kediri yang ada pada saat ini belum dikembangkan dan dilestarikan sebagaimana layaknya.

Belum dilakukannya publikasi dan promosi potensi-potensi wisata secara kreatif, inovatif dan spektakuler, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa daerah dengan motto dan slogan cukup spektakuler untuk menjadi destinasi wisatawan. Disamping itu juga belum adanya standarisasi dalam pelayanan wisata.

Melihat potensi Kota Kediri yang sudah dikenal sebagai pusat pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan bernafaskan agama islam, pengembangan pariwisata di Kota Kediri tentunya harusnya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, berorientasi kepada kenyamanan, ketenangan, penyegaran dan pencerahan, menghindari maksiat seperti zina, pornografi, miras, judi, narkoba, menjaga perilaku hedonisme, bersifat universal dan inklusif, menjaga kelestarian lingkungan serta menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Agar memberikan kesan dan mudah dikenang, setiap daerah haruslah memiliki icon yang menjadi ciri khas bagi para pengunjungnya, ikon dapat berupa souvenir, oleh-oleh, makanan khas, budaya, seni, bangunan, artefak atau suasana kota lainnya. Di Kota Kediri potensi-potensi tersebut belum dikemas secara baik sehingga mendorong minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Kediri.

Oleh karena itu, selaras dengan sejarah, potensi dan budaya masyarakat Kota Kediri perlu adanya **penggalian dan pengembangan potensi wisata, seni dan budaya** serta pengkajian untuk **membentuk ikon yang tepat bagi Kota Kediri**.

h. Menjaga dan meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Masalah stabilitas keamanan dan ketertiban Kota Kediri merupakan tantangan yang sangat penting untuk direspon dalam pencapaian visi dan misi Kota Kediri ke depan. Keamanan dan ketertiban masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Kondisi wilayah yang aman dan tertib ditandai dengan terwujudnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman berupa kemampuan untuk membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum berikut bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat. Terkait dengan upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, masih dijumpai permasalahan yaitu terbatasnya jumlah personil aparat keamanan sehingga masih diperlukan dukungan masyarakat dalam berperan aktif untuk mewujudkan kondusivitas daerah.

Kota Kediri merupakan pusat dari berbagai kegiatan agama : Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khong Hu Chu dan penghayat aliran kepercayaan, namun kondisi daerah tetap aman dan terkendali. Tidak adanya konflik dalam menjalankan aktivitas keagamaan, bahkan untuk agama Islam, Kota Kediri merupakan pusat kajian pendidikan agama Islam di Indonesia. Keberadaan pondok-pondok pesantren besar tumbuh berkembang seperti Pondok Lirboyo, Pondok Kedunglo, Pondok LDII, namun antar pemeluk tetap terbina keharmonisan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hal ini tidak terlepas dari para tokoh dan pemuka agama untuk bersatu padu membina kerukunan antar umat beragama yang terakumulasi dalam forum-forum keagamaan seperti Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan YME (PAUB), Forum Komunikasi

Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) dan forum-forum lainnya yang secara rutin mengadakan koordinasi dan pertemuan untuk tetap terbina kenyamanan dalam menjalankan ibadah dan keyakinan masing-masing pemeluknya. Stabilitas keamanan dan ketertiban yang relatif baik dan terjaga, yang tercermin dari tidak terjadinya konflik-konflik yang berbau SARA dan yang menimbulkan kerusuhan massal. Sehingga untuk menjaga dan melestarikan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan akhlak, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ke depan Pemerintah Kota Kediri akan memberdayakan organisasi keagamaan dan meningkatkan sarana prasarana ibadah; bantuan untuk sarana dan prasarana ibadah, seperti: Masjid, Musholla, Gereja, Klenteng dan sebagainya. Disamping peningkatan bantuan untuk sarana prasarana ibadah, maka perlu pula adanya **peningkatan kesejahteraan untuk pendidikan islam (TPA/TPQ), sekolah minggu, kristen, hindu, pasraman dan pemimpin doa serta peningkatan bantuan operasional aktivitas keagamaan.**

Tekanan ekonomi dan tingkat persaingan hidup yang semakin tinggi akan memicu permasalahan dan potensi konflik yang berkembang di masyarakat diantaranya dapat dilihat dari tindak kriminalitas dan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sebagai pusat kota dan kegiatan bagi daerah-daerah sekitarnya, di Kota Kediri rawan terjadi tindakan kejahatan, asusila, peredaran Narkoba dan penyebaran Virus HIV/AIDS. Sehingga untuk mengantisipasi agar suasana kehidupan masyarakat Kota Kediri tetap terjaga dan kondusif kewaspadaan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban harus tetap ditingkatkan.

i. Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Kediri sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, seperti halnya daerah lain di Indonesia, merupakan wilayah yang rawan bencana; baik yang diakibatkan oleh karena bencana alam maupun bencana sosial. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana dari 497 Kabupaten/Kota di Indonesia, Kota Kediri termasuk daerah resiko bencana tinggi dengan skor 74. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana yang diakibatkan oleh faktor alam antara lain berupa : gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Bencana non alam antara lain gagal teknologi dan modernisasi (seperti kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi), epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan karena konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan terror.

Didalam RTRW Kota Kediri 2011-2030, diuraikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung, di dalam wilayah Kota Kediri tidak memiliki kawasan rawan bencana yang memerlukan perhatian khusus. Kawasan rawan bencana yang mungkin terjadi adalah di bagian barat Kecamatan Mojoroto pada kawasan yang memiliki ketinggian $\geq 40\%$ dan peka terhadap erosi.

Kepadatan penduduk yang terpusat di perkotaan, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, menyebabkan daerah perkotaan menjadi rawan/rentan terhadap bencana. Permintaan lahan untuk perumahan dan industri juga menyebabkan bertambahnya area yang potensial terhadap bencana.

Kebakaran gedung dan permukiman penduduk sangat marak pada musim kemarau. Hal ini terkait dengan kecerobohan manusia diantaranya pembangunan gedung/rumah yang tidak mengikuti standart keamanan bangunan serta perilaku manusia. Kepadatan bangunan yang terlalu tinggi, hubungan arus pendek listrik, meledaknya kompor serta kobaran api akibat lilin/lentera untuk penerangan merupakan sebab umum terjadinya kebakaran pemukiman dan gedung. Disamping itu kurangnya RTH baik publik maupun privat. Di Kota Kediri juga terdapat daerah rawan kebakaran, daerah tersebut adalah Kelurahan Dandangan, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Kemas, Kelurahan Setono Pande, Kelurahan Ringin Anom, Kelurahan Bandar Lor. Di mana untuk penanggulangannya, Kota Kediri bekerjasama dengan Kabupaten Kediri dengan cara pelaksanaan tugas bantuan Pemadam Kebakaran melalui kordinasi sesuai dengan permintaan daerah yang membutuhkan.

Beberapa Isu Strategis yang terkait dengan kebencanaan di Kota Kediri antara lain :

- 1). Penanganan masalah bencana yang sering terjadi di wilayah-wilayah tertentu, seperti banjir dan kebakaran;
- 2). Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
- 3). Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi kebencanaan dalam upaya penanggulangan bencana;
- 4). Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana;
- 5). Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan.

Sejalan dengan sasaran penanggulangan bencana dalam RPJMN III (2015-2019), maka untuk mengurangi resiko korban jiwa dan potensi dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana di Kota Kediri, dilakukan melalui :

- 1). Sinkronisasi dan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah dengan Provinsi dan Nasional;
- 2). Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana;
- 3). Penguatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana;
- 4). Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya kesadaran dan keselamatan dimasyarakat dalam menghadapi bencana;
- 5). Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6). Meningkatnya alokasi anggaran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Sebagai daerah yang termasuk didalam indeks resiko bencana tinggi yang cenderung rentan terkena dampak bencana di Kota Kediri telah dibentuk

lembaga yang khusus bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibentuk sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam pengurangan resiko bencana perlu mengintegrasikan peningkatan aspek ketangguhan terhadap bencana (*resilience*) untuk meningkatkan pengurangan resiko bencana yang komprehensif. Beberapa hal penting dalam aspek ketangguhan untuk membuat sebuah kota menjadi resilient adalah konsep untuk mengurangi dampak bencana terhadap kota, seperti perlindungan infrastruktur dan pengendalian tata guna lahan, serta perlindungan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dianggap sangat penting. Hal ini juga mengarah pada konsep pembangunan berkelanjutan karena ketangguhan bangsa akan meningkatkan daya dukung lingkungan, kemampuan ekonomi masyarakat dan meningkatkan peran aspek sosial, kelembagaan dan pendanaan.

j. Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah

Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan PAD sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya alam yang dimilikinya.

Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD antara lain :

- 1). Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (*public services*) dan mencari keuntungan (*provit motive*);
- 2). Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas;
- 3). Alasan *budget*, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Pemerintah Kota Kediri telah berupaya dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan bagian laba dari BUMD. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan dan dibina oleh Pemerintah Kota Kediri adalah :

- 1). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- 2). Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR); dan
- 3). Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar).

Adapun indikator kinerja pembinaan terhadap layanan BUMD diukur dengan membandingkan jumlah penerimaan laba BUMD secara total dengan jumlah seluruh total penyertaan modal BUMD. Kinerja dari ketiga BUMD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

PDAM merupakan BUMD yang secara terus menerus dituntut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja perusahaan serta berusaha memberikan kontribusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016, jumlah penerimaan bagian laba BUMD dari PDAM sebesar Rp. 454.116.730,- sedangkan jumlah seluruh Penyertaan Modal Daerah pada BUMD-PDAM sebesar Rp. 18.940.273.429,-- realisasi kinerja tercapai 2,40%. Target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 2,62%. Berarti capaian kinerja sebesar 91,59%. Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2015 sebesar 1,96%, maka pada tahun 2016 kinerja untuk BUMD-PDAM mengalami kenaikan 0,44 point. Faktor yang mendorong keberhasilan kinerja ini yakni tersedianya sumber dan kualitas air yang cukup, dan PDAM merupakan satu-satunya pengelola air minum di Kota Kediri. Adapun kendala untuk mendorong percepatan kinerja PDAM adalah sulitnya meningkatkan jumlah pelanggan dikarenakan sumber air di Kota Kediri mudah didapat sehingga masyarakat enggan menjadi pelanggan PDAM. Namun PDAM akan tetap terus bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan berinovasi dalam pemasaran serta lebih memperhatikan pelayanan kepada pelanggan.

2). Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri

Sebagai lembaga keuangan milik daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Dengan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Kediri kepada PD BPR diharapkan adanya tambahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari bagian laba PD BPR Kota Kediri.

Pada tahun 2016, jumlah penerimaan PAD dari bagian Laba BUMD-BPR (*data sebelum diaudit*) dari jumlah seluruh penyertaan modal BUMD-BPR sebesar Rp.355.000.000,00. Secara kumulatif dari penyertaan modal sebesar Rp.10.000.000.000,00 PD. BPR Kota Kediri memperoleh laba sebesar Rp.825.327.514,00 atau 8,25% (laba tahun 2016 sebelum audit sebesar Rp.1.528.998.633,02 dikurangi dengan kerugian akumulatif tahun sebelumnya sebesar Rp.703.671.119,12). Laba yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.1.592.698.000,00. Berarti target kinerja hanya tercapai 51,82%. Ketidak berhasilan pencapaian target ini dikarenakan keuntungan tahun 2016 masih banyak dipergunakan untuk menutup tunggakan kredit yang belum terlunasi, NPL Non Personil Loan (NPL) masih tinggi. Strategi yang dilakukan adalah penagihan secara efektif dan berkelanjutan untuk nasabah kredit yang bermasalah, meningkatkan mutu pelayanan serta mencari terobosan pemasaran melalui produk-produk baru yang saling menguntungkan.

3). Perusahaan Daerah Pasar (PD PASAR) Kota Kediri

Suatu Perusahaan Daerah yang dibentuk untuk memenuhi pelayanan umum di bidang perekonomian, PD. Pasar diharapkan dapat memperlancar distribusi pangan, memperlancar roda perekonomian serta menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri.

Pemerintah Kota Kediri melalui PD. Pasar mengelola 9 Pasar yang lokasinya tersebar diseluruh wilayah Kota Kediri, dan masing-masing mempunyai

karakter tersendiri. Pasar-pasar tersebut adalah Pasar Grosir, Pasar Setono Betek, Pasar Pahing, Pasar Banjaran, Pasar Bawang, Pasar Bandar, Pasar Bandar Ngalim, Pasar Hewan, dan Pasar Mrican.

Kinerja BUMD-PD Pasar dilihat dari indikator :

- a). Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana diukur dengan :
 - Prosentase pengguna Kios, Los, Pelataran dibanding jumlah keseluruhan. Hasilnya diperoleh capaian 94%. Hal ini dinilai kurang memenuhi harapan dikarenakan masih adanya faktor penghambat yaitu adanya keluhan pedagang yang merasa letak kiosnya kurang strategis serta ada beberapa bangunan yang sudah lapuk;
 - Prosentase tingkat kebutuhan pokok masyarakat terhadap pasar dibanding jumlah rata-rata pengguna pasar. Hasilnya tercapai sebesar 155%. Faktor pendorong tercapainya target adalah kemudahan masyarakat dalam bertransaksi jual beli barang kebutuhan dengan pedagang pasar.
- b). Optimalisasi kebersihan pasar diukur dengan :
 - Jumlah personil petugas kebersihan yang ada di pasar dibanding jumlah ideal petugas yang sesuai. Capaian kinerja sebesar 115%, tercapai karena jumlah personil/petugas kebersihan yang ada dipasar sudah sesuai dengan luas area;
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan yang ada dibanding jumlah sampah yang dihasilkan disemua pasar. Hasilnya dapat dicapai sebesar 52%. Faktor penyebabnya adalah sebagian peralatan mengalami kerusakan berat.
- c). Peningkatan tarif jasa pelayanan pasar :
 - Capaian indikator ini baru mencapai 82% dikarenakan sebagian pasar belum memenuhi target yang telah ditentukan.

Dari sisi perkembangan pendapatan, selama tiga tahun terakhir Pendapatan PD Pasar terus menunjukkan peningkatan, secara berturut-turut pendapatan yang diperoleh BUMD PD Pasar adalah Rp.4.086.835.089,00 tahun 2014, Rp.5.663.864.550,00 tahun 2015; Rp.6.589.375.920,00 tahun 2016. Pendapatan PD Pasar tahun 2016 mengalami kenaikan 25% bila dibanding pendapatan tahun 2015.

Tahun 2016, jumlah penerimaan PAD dari bagian Laba BUMD-PD Pasar sebesar Rp.581.315.980,00 dari jumlah penyertaan modal BUMD-PD Pasar berupa dana senilai Rp.5.000.000.000,00 dan berupa asset yang diserahkan senilai Rp.148.773.057.000,00 (Total penyertaan modal Rp.153.773.057.000,00). Berarti kontribusi PAD BUMD-PD. Pasar masih relatif kecil hanya sebesar 0,38%. Namun realisasi PAD dari BUMD PD. Pasar bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.521.315.090,00, maka kinerja melampaui target yang ditetapkan sebesar 111,51%. Untuk meningkatkan kontribusi BUMD PD. Pasar terhadap penerimaan daerah ke depan perlu dilakukan :

- Revitalisasi bangunan dan los;
- Memperbaiki/pengadaan peralatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan pasar;
- Mengoptimalkan pendapatan dari parkir dilingkungan pasar.

Ke depan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk semakin profesional dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kontribusi pendapatan daerah dengan mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Arah pengembangan BUMD Kota Kediri antara lain meliputi :

1). Penguatan tugas dan fungsi BUMD

- a). Memberikan pelayanan jasa atau menghasilkan produk untuk kepentingan umum dan meraih laba guna memenuhi tujuan perusahaan;
- b). Mengembangkan perekonomian daerah, yang berarti harus mampu menjadi motor penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah;
- c). Menambah penghasilan daerah, yang berarti harus mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian guna menjalankan tugas pokoknya maka BUMD harus benar-benar mampu berfungsi optimal dalam :

- a). Mengelola dirinya secara berdaya guna dan berhasil guna, yakni dengan menerapkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat dan professional, sehingga mampu menempatkan dirinya sebagai penyumbang PAD yang handal;
 - b). Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan antar BUMD, BUMN, swasta (khususnya UMKM) sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2). Memasuki era pasar bebas yang makin kompetitif dibutuhkan sebuah strategi khusus yang dilakukan oleh BUMD antara lain melalui aliansi strategis agar mampu menghadapi tantangan global dan mampu meningkatkan daya saing untuk menghadapi perubahan dan pesaing baru;
- 3). Menghadapi perubahan yang sedang melanda dunia bisnis saat ini terdapat tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan kinerja BUMD yakni : Restrukturisasi, Profitisasi dan Privatisasi.

Restrukturisasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha dan penciptaan core competencies.

Profitisasi yakni upaya meningkatkan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang optimal.

Sedangkan Privatisasi adalah peningkatan kegiatan penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat umum, maupun swasta sehingga memudahkan perusahaan untuk akses pendanaan, teknologi, manajemen modern dan pasar internasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pengelolaan BUMD membutuhkan keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik Pemerintah, manajemen BUMD, karyawan BUMD, akademisi, parlemen, dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap BUMD serta adanya sinergitas program antara Organisasi Perangkat Daerah dengan keberadaan BUMD.

k. Kerjasama Daerah Perbatasan, Antar Daerah, dan Pemerintah dengan Swasta

Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah yang lebih optimal. Kerjasama daerah dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi perekonomian global kerjasama daerah dengan luar negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Dalam mendukung perekonomian Kota Kediri, diperlukan kerja sama dengan daerah perbatasan, terutama terkait dengan prasarana perhubungan yang berupa jembatan. Jembatan yang dimaksud adalah jembatan yang menghubungkan antara Kota Kediri bagian Selatan (Kelurahan Manisrenggo) dengan Kabupaten Kediri, sehingga dapat mengurai arus lalu lintas di sekitar jembatan di Bandar Ngalim. Selain itu juga diperlukan pembahasan secara intensif tentang kerjasama persampahan. Hal ini beralasan, karena Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kecamatan Mojoroto sudah "overload," sehingga perlu kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri atau daerah sekitarnya untuk mengatasinya.

Kerjasama dengan pihak swasta perlu dirintis atau dikembangkan, sebagai alternatif pembiayaan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengingat dana dari Pemerintah Pusat relatif terbatas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif juga belum dapat diharapkan untuk membiayai pembangunan di Kota Kediri secara keseluruhan. Dari komposisi pendapatan daerah rata-rata PAD Kota Kediri sebesar 13,35% dan Dana Perimbangan rata-rata sebesar 76,68% sehingga diperlukan kerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha dalam pembiayaan pembangunan di Kota Kediri.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dengan Swasta ini seiring dengan perkembangan dari konsep "*Local Government*" menuju konsep "*Local Governance*", di mana yang bertanggungjawab dalam mengatasi kebutuhan publik (*public needs*) atau barang publik (*public goods*), bukan semata-mata dipundak Pemerintah, melainkan menjadi tanggungjawab bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu : pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*civil society*).

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah di masa depan.

Berpijak pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri 2005-2025, yaitu terwujudnya **“Kota Kediri Yang Aman, Sejahtera, Adil, Demokratis, Bermartabat dan Berdaya Saing”**, melalui lima tahapan periodisasi, maka periode 2014-2019 merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga. Pembangunan tahap ketiga dilaksanakan dengan berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua. Pembangunan pada tahap ketiga ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah yang didukung oleh keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri, sarana dan prasarana yang berkualitas dengan diimbangi kemampuan ilmu dan teknologi yang dikembangkan secara berkelanjutan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Selanjutnya memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres Nomor 2 Tahun 2015), yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Perda Nomor 3 tahun 2014) dengan visi terwujudnya **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**, serta berpedoman pada arah pembangunan daerah Kota Kediri sebagaimana termuat dalam RPJPD Kota Kediri, dan capaian kinerja pembangunan periode 2009-2014 potensi, isu-isu strategis, serta tantangan Kota Kediri lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota Kediri terpilih (2014-2019), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis dengan menata Kota Kediri untuk menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah **“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”**.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Kota Kediri Lebih Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Terpenuhinya kebutuhan

dasar manusia (*basic needs*) menjadi prasyarat untuk mencapai kondisi sejahtera dengan standar hidup yang layak. Sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Kediri yang lebih sejahtera, hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa dan makmur. Isu-isu yang terkait dengan urusan pendidikan kesehatan dan ekonomi diharapkan dapat diselesaikan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Kota Kediri Lebih Berkeadilan

Adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan mewujudkan keadilan, terutama pada layanan publik, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perbedaan kuantitas dan kualitas layanan publik sebagaimana diuraikan pada isu strategis.

Kota Kediri Lebih Berdaya Saing

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Kota Kediri, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Hal tersebut menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor, khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015.

Di samping itu Kota Kediri Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio-Cultural Community* pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN maupun budaya asing lainnya.

Kota Kediri Lebih Berakhlak

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual. Dengan akhlak yang baik maka akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga proses pembangunan maupun pemerintahan akan terhindar dari permasalahan dan konflik sara.

Kota Kediri Tanpa Korupsi

Adalah bahwa penataan Kota Kediri melalui upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Kediri pada dasarnya merupakan tujuan yang ingin dipenuhi oleh Pemerintah Kota Kediri saat ini. Kondisi tersebut secara ideal dapat terwujud bila dalam pelaksanaan pemerintahan dapat bersih dan bebas dari korupsi. Dimana untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi maka perwujudan reformasi birokrasi dan *good governance* mutlak diperlukan. Perbaikan tata kelola pemerintahan ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik yang nantinya penting dalam pencegahan kolusi, nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Sehingga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*) maka upaya menata Kota Kediri tanpa korupsi akan terwujud.

5.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sesuai dengan harapan untuk mewujudkan “Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkannya. Keterkaitan visi dan misi dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi dan Misi

Visi	Misi
Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan
	Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan
	Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan
	Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif

Makna dari Visi “Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”, secara substansi terjabarkan didalam 4 (misi) pembangunan. Lebih lanjut makna yang terkandung didalam 4 (empat) misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi 1

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang sangat penting saat ini, dimana rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan itu sendiri. Isu perlunya pengembangan manajemen SDM yang mengarah pada peningkatan profesionalitas aparatur, transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, sistem pengawasan internal yang baik, serta peningkatan integritas aparatur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN menjadi perhatian untuk melaksanakan misi ini. Sehingga melalui misi ini dimaksudkan untuk menghadirkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani masyarakat. Wujud nyata dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Elemen terpenting untuk memperbaiki tata kelola pemerintah ini yaitu melalui pembangunan birokrasi yang kuat. Upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan didukung kompetensi aparat yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta adanya sistem modern berbasis IPTEK menuju pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) merupakan aspek utama dalam *bureaucration reform*. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik, yang nantinya penting dalam pencegahan kolusi,

nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Hal tersebut didukung pula melalui peran serta masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan.

Sehingga melalui perbaikan tata kelola pemerintahan maka dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*). Perwujudan misi ini, sebagai upaya Pemerintah Kota Kediri untuk mewujudkan makna dari visi **“Kota Kediri Tanpa Korupsi”** dapat tercapai.

Misi 2

Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan

Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Kota Kediri melalui pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini adalah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang termarginalisasi.

Pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat tersebut, utamanya dilakukan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan yang mampu mendukung pengembangan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut dalam pembangunan masih terdapat isu kurangnya pemahaman dari segenap stakeholder dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengaturan tata ruang bagi keseimbangan, keserasian, kenyamanan dan berkelanjutan program pembangunan, kurangnya RTH di perkotaan, belum optimalnya perwujudan kawasan permukiman/industri di Kota Kediri, dengan dokumen tata ruang sebagai acuan perencanaan pembangunan. Dengan memperhatikan isu tersebut maka dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat merwujud pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah dan ramah terhadap lingkungan.

Perwujudan misi ini, sebagai upaya Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mewujudkan makna dari visi **“Kota Kediri lebih Berkeadilan”** dapat tercapai.

Misi 3

Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan

Melalui misi ini, dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang agamis, bermoral, memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, dan berbudaya, serta mewujudkan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan. Hal tersebut dapat tercapai melalui peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan derajat kehidupan keluarga berakhlak dan bermoral, serta melalui pengembangan dan pelestarian budaya lokal. Isu tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi serta keamanan dan ketertiban diharapkan dapat diselesaikan melalui pelaksanaan misi ini. Sehingga melalui pencapaian misi ini pemerintah Kota Kediri dapat mewujudkan visi yang telah disusun, yaitu untuk mewujudkan **“Kota Kediri Lebih Sejahtera dan Lebih Berakhlak”**.

Misi 4

Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif

Dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri kreatif. Keadaan ini sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing yang ada di Kota Kediri melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif guna meningkatkan investasi di Kota Kediri, peningkatan usaha ekonomi kerakyatan, peningkatan produktifitas pertanian, peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan pertumbuhan usaha perdagangan, serta peningkatan

usaha perindustrian. Isu tentang dominasi industri tembakau dalam perekonomian Kota Kediri diharapkan dapat diselesaikan dengan mengembangkan sektor ekonomi lainnya. Melalui misi ini Pemerintah Kota Kediri berusaha untuk mewujudkan visi yang telah disusun, yaitu untuk mewujudkan **“Kota Kediri Lebih Berdaya Saing”**.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi Kota Kediri 2014-2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

5.3.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Kota Kediri dalam 5 tahun ke depan, keterkaitan tujuan dan misi terurai pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2.
Keterkaitan Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik
Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan ramah lingkungan	1. Mewujudkan penataan ruang kota yang indah dan ramah lingkungan 2. Mewujudkan kota yang nyaman
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan	1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan 2. Mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun dan berbudaya
Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi

5.3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator yang digunakan dalam upaya pencapaian misi dapat dilihat pada tabel 5.3. berikut ini :

Tabel 5.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Kota Kediri Tahun 2014-2019

VISI : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN :						Kondisi Akhir RPJMD
						2013 (base line)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Opini BPK	BPPKAD, Inpekstorat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Inspektorat	-	-	-	Lv. 2	Lv. 2	Lv. 3	Lv. 3	Lv. 3
				Nilai SAKIP	Bagian Organisasi, Barenlitbang	D	D	C	CC	B	B	B	B
				Peringkat LPPD	Bagian Pemerintahan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				Indeks Profesionalits ASN	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	-	-	-	-	60	61	62	62
				Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	15%	15%	15%	18%	20%	20%	21%	21%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Nilai IKM	DPMPTSP, Dispendukcapil, RSUD, Puskesmas, Dinkes, Dindik, BPBD, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan	-	-	B(2,53)	B (2,76)	B (2,93)	B (3,11)	A(3,30)	A(3,30)
				Meningkatnya penerapan e-Governance	Prosentase penerapan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK secara terpadu	Diskominfo	-	-	22	24	27	31	45

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN :						Kondisi Akhir RPJMD
						2013 (base line)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan	Mewujudkan penataan ruang kota yang indah dan ramah lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Air	DLHKP	-	-	50	45	53	54	55	55
				Indeks Kualitas Udara	DLHKP	-	-	88,31	99	98	98	98	98
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	DLHKP	-	-	-	39,80	41,58	59,5	60	59,5
				Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	DLHKP, Dinas PUPR	7,20%	8,61%	7,29%	8,52%	7,22%	7,50%	8%	8%
	Mewujudkan kota yang nyaman	Indeks Kota Layak Huni	Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	Prosentase luas lahan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	Dinas PUPR, Barenlitbang	45%	82,4%	51%	60,17%	65%	70%	75%	75%
			Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Prosentase permukiman dalam kondisi baik/layak huni	Disperkim, DLHKP, Dinas PUPR	92%	93%	94%	95%	96%	97%	98%	98%
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Dindik, Sekolah	0,69	0,70	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77
				Angka Melek Huruf	Dindik, Sekolah	99,54	100	100	100	100	100	100	100
				Indeks Minat Baca	Dindik, Sekolah dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	40	42	44	44
			Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	73,51	73,52	73,62	73,65	73,66	73,67	73,68	73,68
	Mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun dan berbudaya	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Pengangguran terbuka	Dinkop UMTK, Disperdagin	8.00%	7,65%	8,46%	8,22%	4,68%	4,64%	4,60%	4,60%
		Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase penanganan potensi kasus SARA	Satpol PP, Kesbangpol, Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	DP3AP2KB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN :						Kondisi Akhir RPJMD
						2013 (base line)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa wisata dan industri kreatif	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produk-produk unggulan daerah	Persentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	Dinkop UMTK, Disperdagin	6,56	3,57	4,95	6,04	6,50	7,00	7,50	7,50
				Persentase pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	Dinkop UMTK, Disperdagin	2,57	6,13	5,39	5,36	5,50	6,00	6,50	6,50
				Persentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.2	1,76	2,53	3,60	4,51	5,43	5,87	5,87
			Meningkatnya jumlah investasi	Nilai investasi	DPMPPTSP	488.773.732.468	2.537.780.732.468	3.227.073.232.468	3.787.568.819.695	3.987.568.819.695	4.197.568.819.695	4.417.568.819.695	4.417.568.819.695
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Panjang jalan dengan kualitas mantap	Dinas PUPR, Disperkim, Dishub	236.919	243.919	250.919	257.919	264.919	271.919	278.919	278.919
				Jumlah jembatan dengan kondisi baik	Dinas PUPR, Disperkim	41	43	45	47	49	51	53	53
				Panjang jalan yang memiliki drainase (%)	Dinas PUPR, Disperkim	51%	52,63%	53,23%	53,84%	54,44%	55,65%	56,25%	56,25%
			Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	Disbudparpora	1,500,000	1,500,000	1,600,000	1,700,000	1,750,000	1,800,000	1,850,000	1,850,000

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun 2014-2019, maka Pemerintah Kota Kediri akan melaksanakannya melalui 4 (empat) misi yang telah ditetapkan dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 4 berdasarkan pendekatan urusan/bidang.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Kediri

Visi : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik	1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	BPPKAD
		2. Penerapan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah	2. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	BPPKAD
		3. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten	1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	INSPEKTORAT
			2. Optimalisasi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat	INSPEKTORAT
			3. Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	INSPEKTORAT
		4. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian secara terpadu	1. Meningkatkan kinerja koordinasi dan integrasi perencanaan seluruh OPD	BARENLITBANG
			2. Efektifitas kinerja pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	BARENLITBANG
			3. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	BARENLITBANG
			4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pengendalian secara terpadu	BARENLITBANG
		5. Peningkatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif dan efisien dalam mendukung pelayanan publik	1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan kepegawaian	BKPPD
			2. Penempatan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur berdasarkan kompetensi	BKPPD
		6. Peningkatan akuntabilitas ASN	Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan kinerja ASN	BKPPD
	2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Optimalisasi pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian pendapatan daerah sesuai regulasi	1. Meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah	
			2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
5	3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	3. Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi	
			4. Meningkatkan efektifitas pengelolaan sistem informasi penerimaan daerah	
			1. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan	DPMPTSP
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan	Dispendukcapil
			3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	RSUD Gambiran
			4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Kecamatan
			5. Meningkatkan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan	Sekretariat Daerah
			6. Meningkatkan kinerja legislatif	Sekretariat DPRD
			7. Meningkatkan pelayanan tanggap darurat bencana	BPBD
			1. Meningkatkan ketersediaan jaringan infrastruktur Teknologi, Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
	4. Meningkatnya penerapan e-Governance	Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik	2. Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi data dan informasi (data center) berbasis TIK	Diskominfo

Visi : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya
Misi 2: Mewujudkan Kota Kediri yang, nyaman dan ramah lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1. Mewujudkan penataan ruang kota yang indah dan ramah lingkungan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran air	DLHKP
			2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran udara	
			3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran tanah	
		2. Rehabilitasi dan pengelolaan kawasan lindung dan RTH	1. Merehabilitasi dan mengelola kawasan lindung	DLHKP
			2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH melalui pembangunan taman pada skala kota maupun kelurahan, serta RTH lainnya.	
		3. Peningkatan infrastruktur prasarana sumber daya air	1. Meningkatkan akses terhadap air bersih melalui perluasan jaringan PDAM	Dinas PUPR
			2. Meningkatkan infrastruktur prasarana sumber daya air berbasis masyarakat	Dinas PUPR

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
		4. Peningkatan jaringan irigasi	Meningkatkan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Dinas PUPR
	2. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	1. Peningkatan kualitas proses dan output dalam penyusunan rencana dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah	Meningkatkan sinergi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga tercipta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan antar wilayah yang mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan kualitas ruang secara berkelanjutan	DPUPR
		2. Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen rencana penataan ruang serta penyempurnaan instrumen pengawasan & pengendalian pemanfaatan ruang	DPUPR
2. Mewujudkan kota yang nyaman	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Peningkatan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	1. Penataan kawasan kumuh perkotaan dengan penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau	DPUPR DPKP
			2. Meningkatkan kinerja pelayanan umum kebersihan dan pengelolaan sampah	DLHKP
			3. Meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan dengan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan, komposting dan daur ulang (<i>reuse, reduce dan recycle</i>); meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan persampahan; optimalisasi pemanfaatan lahan TPA serta merintis dan menjalin kerjasama dengan daerah lain dalam pengelolaan TPA terpadu Regional	DLHKP

Visi : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya

Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	1. Peningkatan akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan	DINDIK
			2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dasar yang berkeadilan dengan : (a) memfasilitasi pembiayaan pendidikan dasar melalui BOSNAS dan BOSDA; (b) pemberian beasiswa bagi siswa Kota Kediri yang tidak mampu baik yang bersekolah di negeri dan swasta, didalam maupun di luar Kota Kediri; (c) standar pelayanan pendidikan dasar mengacu pada standar pendidikan nasional;	DINDIK

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
			(d) mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat; (e) Perluasan sekolah inklusif pendidikan dasar (akses bagi anak berkebutuhan khusus); 3. Pemberian beasiswa perguruan tinggi bagi siswa berprestasi dari kalangan tidak mampu (sebanyak 1.500 mahasiswa)	
		2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1. Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini secara terpadu	DINDIK
			2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan non formal dan informal dengan : (a) meningkatkan angka melek huruf melalui pendidikan keaksaraan fungsional;	DINDIK
			(b) sinergitas program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan dalam memperluas kesempatan kerja; (c) Meningkatkan fasilitasi pendidikan di Pondok Pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta	DINDIK
		3. Peningkatan manajemen pendidikan berbasis sekolah	Meningkatkan tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholders untuk mengakses informasi kinerja satuan pendidikan melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi; serta mengembangkan kerjasama dalam pengembangan Perguruan Tinggi Negeri di Kota Kediri	DINDIK
		4. Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standart	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan berkarakter	DINDIK
		5. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah	Meningkatkan daya tarik perpustakaan, minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan berbasis teknologi informasi menuju pengembangan manajemen perpustakaan secara modern	Din. Arsip Perpustakaan
	2. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1. Peningkatan akses, cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	1. Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin serta meningkatkan pemantauan terhadap kelompok rentan terutama ibu dan bayi	DINKES
			2. Merevitalisasi puskesmas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar	DINKES
			3. Mengembangkan pelayanan puskesmas rawat inap dan RSUD	DINKES
			4. Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan	DINKES
			5. Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian	DINKES

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
			6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat lingkungan kelurahan melalui (Poskeskel)	DINKES
		2. Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan melalui kampanye pola hidup bersih dan sehat	1. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan	DINKES
			2. Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya keluarga siaga dan terciptanya PHBS	DINKES
	3. Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Peningkatan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar sektor dengan lokasi dan sasaran penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang ada antar OPD sehingga dapat mengurangi beban rumah tangga miskin	DINSOS; DINKES; DINDIK
		2. Pelayanan sosial bagi PMKS sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS	DINSOS
		3. Peningkatan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS	Mendayagunakan dan memberdayakan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial	DINSOS
		4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	1. Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan daerah	DINSOS; Din. Kop UMTK
			2. Memfasilitasi informasi lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran	Din. Kop UMTK
		5. Peningkatan Perlindungan tenaga kerja	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan lembaga/serikat perburuhan	Din. Kop UMTK
	2. Mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun dan berbudaya	1. Peningkatan pendidikan politik dan perilaku demokratis	1. Pengembangan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Kant. Kesbangpol
			2. Meningkatkan pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban	Satpol PP
			3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara	Kant. Kesbangpol
		2. Peningkatan kewaspadaan daerah untuk menangkal upaya disintegrasi bangsa	Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, serta mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba serta terorisme	Satpol PP

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
	2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	3. Peningkatan fasilitasi dan harmonisasi sosial kemasyarakatan	Meningkatkan fasilitasi, monitoring dan evaluasi efektivitas bantuan layanan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan	Bag Kesra
		Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan	1. Meningkatkan Pengarusutamaan gender dengan : a. memperkuat dan advokasi kelembagaan; b. peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak; c. memfasilitasi pembinaan serta peningkatan kapasitas organisasi perempuan.	DP3AP2KB
			2. Meningkatkan pemberdayaan , kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak, advokasi perempuan dan anak korban kekerasan, advokasi perlindungan hak-hak anak serta mendorong terwujudnya kota layak anak	DP3AP2KB

Visi : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya

Misi 4: Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi	1. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif	1. Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk pengembangan produk unggulan daerah	Disperdagin
			2. Peningkatan kualitas produk lokal melalui inovasi yang dilakukan	Disperdagin
			3. Perluasan pangsa pasar bagi produk unggulan daerah	Disperdagin
		2. Peningkatan promosi dan pengembangan informasi potensi produk unggulan Kota Kediri	1. Mengembangkan kerja sama pengelolaan perdagangan skala besar, menengah dan kecil	Disperdagin; Din. Kop UMTK
			2. Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif	Disperdagin
			3. Mengembangkan industri kreatif serta meningkatkan akses dan informasi pasar	Disperdagin
		3. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatkan kinerja pelayanan umum pendampingan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan koperasi dan usaha mikro	Din. Kop UMTK
			2. Peningkatan kualitas dan manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro	Din. Kop UMTK
		4. Pengembangan kelembagaan perekonomian tingkat kelurahan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi sehat	Din. Kop UMTK

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
		5. Peningkatan akses permodalan dan peran serta Usaha Mikro dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	Perluasan jaringan akses permodalan melalui peran stimulasi pemerintah dan lembaga keuangan dengan mengutamakan pendampingan untuk kelancaran pembiayaan usaha bagi usaha ekonomi marginal serta meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam aktivitas ekonomi masyarakat	Din. Kop UMTK
	2. Meningkatnya jumlah investasi	1. Pengembangan sarana prasarana investasi serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif	1. Mengembangkan potensi investasi sesuai dengan karakteristik daerah	DPMPTSP
			2. Meningkatkan promosi jenis-jenis usaha potensial untuk meningkatkan daya tarik investasi	DPMPTSP
		2. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan dan memperluas cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, Nasional dan Internasional	DPMPTSP
	3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	1. Peningkatan Infrastruktur jaringan jalan dan jembatan	1. Meningkatkan pelayanan kebinamargaan dan keciptakaryaan	DPUPR
			2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan jalan dan jembatan untuk mempercepat aksesibilitas antar wilayah	DPUPR
			3. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai	DISHUB
		2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan drainase perkotaan	1. Peningkatan sistem jaringan drainase perkotaan	DPUPR
			2. Revitalisasi saluran drainase perkotaan	DPUPR
			3. Normalisasi saluran drainase perkotaan	DPUPR
	4. Meningkatnya daya tarik wisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas obyek dan event pariwisata serta pengembangan budaya daerah	1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata	Disbudparpora
			2. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Disbudparpora
			3. Pengembangan event kepariwisataan	Disbudparpora
			4. Pengembangan Budaya Daerah	Disbudparpora

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab tujuh ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, dapat ditentukan/dipilih atau dirumuskan berbagai program yang paling efektif untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

7.1. Kebijakan Umum.

Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Kediri Tahun 2014-2019 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing strategi yang tepat, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan, sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan, antara lain diarahkan untuk memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Pada satu sisi Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat. Di sisi lain diarahkan pula pada fungsi Pemerintah dalam alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi penyediaan barang publik seperti infrastruktur, penanaman modal, pelayanan kesehatan (seperti Jamkesda), pelayanan pendidikan, penyediaan kesempatan kerja dan penanganan kemiskinan.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja ke pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Arah ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme Aparat Sipil Negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah Kota Kediri dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan, antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan regulasi (administrasi), pengembangan skill dan manajemen sumber daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan

kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan Belanja Daerah, belanja daerah dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kinerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Selaras dan terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka dalam upaya mengantisipasi permasalahan-permasalahan di Kota Kediri dengan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Kediri, maka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul seperti permasalahan persampahan, pengembangan potensi daerah, transportasi, urbanisasi, masalah-masalah sosial (PMKS dan lain-lain), diperlukan adanya program program pembangunan yang mengarah kepada kerjasama antar daerah.

Disisi lain karena keterbatasan pembiayaan pembangunan di Kota Kediri, maka dalam pembiayaan penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema : (1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan; (2) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, serta (3) kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

Kebijakan umum kerjasama pembiayaan pembangunan :

- a. Kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
- b. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan.
- c. Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun 2014-2019, maka dirumuskan 9 (sembilan) Program Prioritas Utama Walikota, yang mendasari program prioritas pembangunan daerah. Sembilan program prioritas utama pembangunan tersebut adalah :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat;
- c. Penataan kota yang ramah lingkungan dan berbasis ekologi;
- d. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan kreatif, merata dan berkeadilan;
- f. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan;
- g. Pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan;
- h. Peningkatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur fisik prasarana, sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni dan budaya.

Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Berikut ini diuraikan secara lengkap program pembangunan yang mendukung pencapaian setiap sasaran pembangunan :

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya

Misi 1

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien dengan Memperluas Parisipasi Publik Dalam Pembangunan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	✓ Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel ✓ Penerapan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	BPPKAD
						Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengawasan	Inspektorat
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesekretariatan Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	✓ Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten	✓ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ✓ Optimalisasi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat ✓ Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai SAKIP	B	B	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pengawasan	Inspektorat
			Tingkat Maturitas SPIP	Lv. 2	Lv. 3	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pengawasan	Inspektorat
			Nilai LPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pengawasan	Inspektorat
	✓ Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian secara terpadu	✓ Meningkatkan kinerja koordinasi dan integrasi perencanaan seluruh OPD ✓ Efektifitas kinerja pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah ✓ Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah ✓ Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pengendalian secara terpadu				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Barenlitbang
						Program Pengembangan Data/informasi	Perencanaan	Barenlitbang
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan	Barenlitbang
						Program Perencanaan Sosial Budaya	Perencanaan	Barenlitbang
						Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Perencanaan	Barenlitbang
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kesekretariatan Daerah	Bagian Organisasi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
	Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	✓ Peningkatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif dan efisien dalam mendukung pelayanan publik ✓ Peningkatan akuntabilitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	60	62	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian/ Pendidikan Pelatihan	BKPPD
						Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kepegawaian/ Pendidikan Pelatihan	BKPPD
						Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kesekretariatan Daerah	Bagian Organisasi
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Optimalisasi pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian pendapatan daerah sesuai regulasi	✓ Meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah ✓ Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) ✓ Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi ✓ Meningkatkan efektifitas pengelolaan sistem informasi penerimaan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	20%	21%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah	Keuangan	BPPKAD
3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	✓ Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan ✓ Meningkatkan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan ✓ Meningkatkan kinerja legislatif	Nilai IKM	B (2,93)	A (3,30)	Program Penataam Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil
						Program Standarisasi pelayanan kesehatan		-
							Kesehatan	Dinkes
						Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinkes
						Program Peningkatan pelayanan Prima	Pemerintahan Umum	Kecamatan Kota
							Pemerintahan Umum	Kecamatan Pesantren
							Pemerintahan Umum	Kecamatan Mojoroto
						Program Pembinaan Administrasi Kecamatan/ Kelurahan	Kesekretariatan Daerah	Bagian Pemerintahan
						Program Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kesekretariatan Daerah	Bagian Umum
						Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kesekretariatan Daerah	Bagian Umum
							Kesekretariatan Daerah	Bagian Humas Protokol
						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kesekretariatan Daerah	Bagian Perekonomian
							Kesekretariatan Daerah	Bagian Pembangunan
							Kesekretariatan Daerah	Bagian Hukum
						Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kesekretariatan DPRD	Sekretariat DPRD

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
		✓ Meningkatkan pelayanan tanggap darurat bencana				Program Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	BPBD
4. Meningkatnya penerapan e-Governance	Meningkatnya penerapan e-Governance	✓ Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik ✓ Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi data dan informasi (data center) berbasis TIK	Prosentase penerapan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK secara terpadu	27%	45%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi Dan Informatika	Diskominfo
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Data Elektronik	Komunikasi Dan Informatika	Diskominfo

Misi 2
Mewujudkan Kota Kediri yang Indah, Nyaman dan Ramah Lingkungan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	✓ Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	✓ Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran air ✓ Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran udara ✓ Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran tanah	Indeks Kualitas Air	53	55	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DLHKP
	✓ Rehabilitasi dan pengelolaan kawasan lindung dan RTH	✓ Merehabilitasi dan mengelola kawasan lindung ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH melalui pembangunan taman pada skala kota maupun kelurahan, serta RTH lainnya.	Indeks Kualitas Udara	98	98	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	DLHKP
	✓ Peningkatan infrastruktur prasarana sumber daya air	✓ Meningkatkan akses terhadap air bersih melalui perluasan jaringan PDAM ✓ Meningkatkan infrastruktur prasarana sumber daya air berbasis masyarakat	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,58	59,5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
	✓ Peningkatan jaringan irigasi	✓ Meningkatkan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	7,22%	8%	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DLHKP
						Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Persampahan	Lingkungan Hidup	DLHKP
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	DLHKP

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
6. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	✓ Peningkatan kualitas proses dan output dalam penyusunan rencana dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah	✓ Meningkatkan sinergi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga tercipta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan antar wilayah yang mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan kualitas ruang secara berkelanjutan	Prosentase luas lahan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	65%	75%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
	✓ Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang	✓ Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen rencana penataan ruang serta penyempurnaan instrumen pengawasan & pengendalian pemanfaatan ruang				Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar	Perencanaan	Barenlitbang
7. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Peningkatan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	✓ Penataan kawasan kumuh perkotaan dengan penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau	Prosentase permukiman dalam kondisi baik/layak huni	97,5%	99%	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	DPKP
		✓ Meningkatkan kinerja pelayanan umum kebersihan dan pengelolaan sampah	Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan	77%	80%	Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
		✓ Meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan dengan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan, komposting dan daur ulang (reuse, reduce dan recicle); meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan persampahan; optimalisasi pemanfaatan lahan TPA serta merintis dan menjalin kerjasama dengan daerah lain dalam pengelolaan TPA terpadu Regional				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	DLHKP

Misi 3
Mewujudkan Masyarakat yang Agamis, Bermoral, Sejahtera, Berbudaya dan Sebagai Pusat Pendidikan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
8. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	✓ Peningkatan akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau	✓ eningkatkan pelayanan pendidikan ✓ Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan yang berkeadilan dengan : a. memfasilitasi pembiayaan pendidikan dasar melalui BOSNAS dan BOSDA; b. pemberian beasiswa bagi siswa Kota Kediri yang tidak mampu baik yang bersekolah di negeri dan swasta, didalam maupun di luar Kota Kediri; c. standar pelayanan pendidikan dasar mengacu pada standar pendidikan nasional; d. mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat; e. Perluasan sekolah inklusif pendidikan dasar (akses bagi anak berkebutuhan khusus); ✓ Beasiswa perguruan tinggi bagi siswa berprestasi dari kalangan tidak mampu (sebanyak 1.500 mahasiswa)	Indeks Pendidikan	0,75	0,77	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DINDIK
			Angka Melek Huruf	100	100			
			Indeks Minat Baca	40	44			
	✓ Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	✓ Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini secara terpadu ✓ Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan non formal dan informal dengan : a) meningkatkan angka melek huruf melalui pendidikan keaksaraan fungsional; b) sinergitas program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan dalam memperluas kesempatan kerja; c) Meningkatkan fasilitasi pendidikan di Pondok Pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta				Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan Pendidikan	DINDIK DINDIK

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
	✓ Peningkatan manajemen pendidikan berbasis sekolah	✓ Meningkatkan tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholders untuk mengakses informasi kinerja satuan pendidikan melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi; serta mengembangkan kerjasama dalam pengembangan Perguruan Tinggi Negeri di Kota Kediri ✓ Meningkatkan daya tarik perpustakaan, minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan berbasis teknologi informasi menuju pengembangan manajemen perpustakaan secara modern				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	DINDIK
	✓ Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standart	✓ Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan berkarakter				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	DINDIK
	✓ Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah	✓ Meningkatkan daya tarik perpustakaan, minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan berbasis teknologi informasi menuju pengembangan manajemen perpustakaan secara modern				Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	✓ Peningkatan akses, cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	✓ Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin serta meningkatkan pemantauan terhadap kelompok rentan terutama ibu dan bayi ✓ Merevitalisasi puskesmas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar ✓ Mengembangkan pelayanan puskesmas rawat inap dan RSUD	Angka Harapan Hidup	73,66	73,68	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program Pembinaan lingkungan Sosial	Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan	DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
		✓ Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan ✓ Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian ✓ Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat lingkungan kelurahan melalui (Poskeskel) ✓ Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan		-	-	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Program Pembinaan lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan	Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan	DINKES DINKES DINKES RSUD Gambiran Puskesmas RSUD Gambiran RSUD Gambiran RSUD Gambiran RSUD Gambiran Puskesmas Dinas PUPR
	✓ Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan melalui kampanye pola hidup bersih dan sehat	✓ Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya keluarga siaga dan terciptanya PHBS				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	DINKES
	✓ Peningkatan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar sektor dengan lokasi dan sasaran penanggulangan kemiskinan ✓ Pelayanan sosial bagi PMKS sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat	✓ Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang ada antar OPD sehingga dapat mengurangi beban rumah tangga miskin ✓ Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS	Tingkat kemiskinan	8,49%	8,10%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera	Sosial	Dinas Sosial

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
	✓ Peningkatan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS ✓ Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja ✓ Peningkatan Perlindungan tenaga kerja	✓ Mendayagunakan dan memberdayakan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial ✓ Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan daerah ✓ Memfasilitasi informasi lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran ✓ Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan lembaga/serikat perburuhan	Tingkat pengangguran terbuka	4,68%	4,60%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
						Program Pembinaan Anak Terlantar	Sosial	Dinas Sosial
						Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Sosial	Dinas Sosial
						Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
						Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sosial	Dinas Sosial
						Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Sosial	Dinas Sosial
						Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Sosial	Dinas Sosial
							Tenaga Kerja	Dinkop UM & Naker
						Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketenagakerjaan	Sosial	Dinas Sosial
							Tenaga Kerja	Dinas Koperasi UM & Naker
11. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	✓ Peningkatan pendidikan politik dan perilaku demokratis ✓ Peningkatan kewaspadaan daerah untuk menangkal upaya disintegrasi bangsa ✓ Peningkatan fasilitasi dan harmonisasi sosial kemasyarakatan	✓ Pengembangan wawasan kebangsaan dan nasionalisme ✓ Meningkatkan pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban ✓ Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara ✓ Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, serta mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba serta terorisme ✓ Meningkatkan fasilitasi, monitoring dan evaluasi efektivitas bantuan layanan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan	Prosentase penanganan potensi kasus SARA	100%	100%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL.
						Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL.
						Program Pendidikan Politik Masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL.
						Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL.
							Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
						Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL.
							Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
						Program Fasilitas Pelayanan Administrasi dan Harmonisasi Sosial Kemasyarakatan	Kesekretariatan Daerah	BAGIAN KESRA
12. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan	✓ Meningkatkan Pengarusutamaan gender dengan : a) memperkuat dan advokasi kelembagaan; b) peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak; c) memfasilitasi pembinaan serta peningkatan kapasitas organisasi perempuan. ✓ Meningkatkan pemberdayaan , kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak, advokasi perempuan dan anak korban kekerasan, advokasi perlindungan hak-hak anak serta mendorong terwujudnya kota layak anak	Prosentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
						Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
						Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
						Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
						Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB

Misi 4
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Menuju Terwujudnya Kota Kediri Sebagai Pusat Perdagangan, Jasa, Wisata dan Industri Kreatif

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
13. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah	✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif	✓ Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk pengembangan produk unggulan daerah ✓ Peningkatan kualitas produk lokal melalui inovasi yang dilakukan ✓ Perluasan pangsa pasar bagi produk unggulan daerah	Prosentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	6,50	7,50	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DISPERDAGIN
						Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	DISPERDAGIN
						Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perindustrian	DISPERDAGIN
						Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISPERDAGIN
						Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Perindustrian	DISPERDAGIN
			Prosentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	4,51	5,87	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	DKPP
						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	DKPP
						Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	DKPP
						Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	DKPP
						Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pertanian	DKPP
						Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapang	Pertanian	DKPP
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	DKPP
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	DKPP
						Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pertanian	DKPP
						Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DKPP

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
	✓ Peningkatan promosi dan pengembangan informasi potensi produk unggulan Kota Kediri ✓ Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro ✓ Pengembangan kelembagaan perekonomian tingkat kelurahan ✓ Peningkatan akses permodalan dan peran serta Usaha Mikro dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	✓ Mengembangkan kerja sama pengelolaan perdagangan skala besar, menengah dan kecil ✓ Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif ✓ Mengembangkan industri kreatif serta meningkatkan akses dan informasi pasar ✓ Meningkatkan kinerja pelayanan umum pendampingan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan koperasi dan usaha mikro ✓ Peningkatan kualitas dan manajemen pengelolaan koperasi dan usaha mikro ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi sehat ✓ Perluasan jaringan akses permodalan melalui peran stimulasi pemerintah dan lembaga keuangan dengan mengutamakan pendampingan untuk kelancaran pembiayaan usaha bagi usaha ekonomi marginal serta meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam aktivitas ekonomi masyarakat	Prosentase pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	5,50	6,50	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	DISPERDAGIN
						Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian	DISPERDAGIN
						Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop UM & Naker
						Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Kesekretariatan Daerah	Bagian Perekonomian
						Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	DINKOP UMTK
						Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	DIN.KOP UMTK
						Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	DINKOP UMTK
						Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop UM & Naker
						Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop UM & Naker
14. Meningkatnya jumlah investasi	✓ Pengembangan sarana prasarana investasi serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif	✓ Mengembangkan potensi investasi sesuai dengan karakteristik daerah ✓ Meningkatkan promosi jenis-jenis usaha potensial untuk meningkatkan daya tarik investasi	Nilai Investasi	3.987.568.819.695	4.417.568.819.695	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	DPMPTSP

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2017	2019			
	✓ Meningkatkan promosi investasi secara terpadu	✓ Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan dan memperluas cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, Nasional dan Internasional						
15. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	✓ Mengembangkan potensi Peningkatan Infrastruktur jaringan jalan dan jembatan	✓ Meningkatkan pelayanan kebinamargaan dan keciptakaryaan	Panjang jalan dengan kualitas mantap	264.919	278.919	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
		✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan jalan dan jembatan untuk mempercepat aksesibilitas antar wilayah	Jumlah jembatan dengan kondisi baik	49	53	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
		✓ Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai	Panjang jalan yang memiliki drainase (%)	54,44%	56,25%	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
	✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan drainase perkotaan	✓ Peningkatan sistem jaringan drainase perkotaan				Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
		✓ Revitalisasi saluran drainase perkotaan				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
		✓ Normalisasi saluran drainase perkotaan				Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
						Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR
16. Meningkatnya daya tarik wisata	Pengembangan kuantitas dan kualitas obyek dan event pariwisata	✓ Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata	Jumlah kunjungan wisata	1,750,000	1,850,000	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	DISBUDPARPORA
		✓ Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	DISBUDPARPORA
		✓ Pengembangan event kepariwisataan				Program Pengembangan Kemitraan	Kebudayaan	DISBUDPARPORA
		✓ Pengembangan Budaya Daerah				Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	DISBUDPARPORA
						Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DISBUDPARPORA
						Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DISBUDPARPORA
						Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DISBUDPARPORA

BAB VIII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan disampaikan kerangka pendanaan pembangunan dan seluruh program dalam RPJMD 2014-2019 baik program yang bersifat prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar dan non dasar kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pada bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah (PD) terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (PD). Disamping itu juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Kerangka pendanaan pembangunan merupakan kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah, sebagaimana yang disajikan pada tabel 8.1 berikut ini :

Tabel 8.1.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2015-2019 Kota Kediri

No	Uraian	PROYEKSI				
		2015	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	BELANJA	1.120.702.813.857,83	1.484.725.405.962,16	1.343.004.503.718,00	1.277.806.071.918,33	1.378.943.503.983,42
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	528.261.178.165,07	561.753.904.614,90	518.893.504.275,00	592.578.254.882,33	624.264.604.902,00
1	Belanja Pegawai	490.502.785.923,65	503.214.970.483,54	446.127.515.000,00	479.197.173.980,33	510.883.524.000,00
2	Belanja Hibah	21.711.780.000,00	29.589.010.0000,00	33.687.629.250,00	46.928.487.150,00	46.928.487.150,00
3	Belanja Bantuan Sosial	15.202.566.312,42	27.517.848.910,36	32.051.299.350,00	62.725.533.077,00	62.725.533.077,00
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00
6	Belanja Tak Terduga	116.985.254,00	705.014.555,00	6.300.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
B	BELANJA LANGSUNG	592.441.635.692,76	922.971.501.347,26	824.110.999.443,00	685.227.817.036,00	738.022.399.081,42
1	Belanja Pegawai	102.547.907.299,00	126.098.632.251,00	128.830.221.200,00	132.786.018.198,00	
2	Belanja barang dan jasa	315.430.879.038,76	415.027.359.366,76	399.561.308.621,00	429.103.081.883,00	
3	Belanja Modal	174.462.849.355,00	381.845.509.729,50	295.719.469.622,00	123.338.716.955,00	
	PEMBIAYAAN	428.429.158.907,04	535.711.940.751,80	210.664.334.463,38	156.540.210.293,16	96.919.968.502,99
1	Penerimaan Pembiayaan	428.429.158.907,04	535.711.940.751,80	210.664.334.463,38	166.540.210.293,16	106.919.968.502,99
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya	428.429.158.907,04	535.711.940.751,80	210.664.334.463,38	166.540.210.293,16	106.919.968.502,99
2	Pengeluaran Pembiayaan *	7.000.000.000,00		20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Penyertaan Modal					
	- BPR	5.000.000.000,00		20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	- PD Pasar	2.000.000.000,00				
	Pembayaran Pokok Hutang					

Setelah program prioritas diketahui, dibuatlah kerangka alokasi pagu anggaran untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Kediri terdiri dari program-program baik untuk mencapai visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD).

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Kediri, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah. Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Perubahan RPJMD ini disajikan data program dan kegiatan Tahun 2015 dan 2016 merupakan data realisasi serta Tahun 2017 target dan data tahun 2018 sampai dengan 2019 merupakan data proyeksi, sebagaimana yang disajikan pada tabel 8.2. berikut ini :

Tabel 8.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Kediri

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	DINAS PENDIDIKAN				53.229.739.335,00		68.479.560.402,00		62.364.027.915,00		70.077.863.000,00		68.460.220.260,00		322.611.410.912,00	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN WAJIB															DINAS PENDIDIKAN
1.01	PENDIDIKAN															DINAS PENDIDIKAN
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	3.677.586.853,00	92,00%	4.487.587.195,00	94,00%	5.445.183.440,00	96,00%	5.342.160.000,00	98,00%	5.449.003.200,00	98,00%	24.401.520.688,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	4.038.637.349,00	92,00%	3.324.125.929,00	94,00%	614.556.750,00	96,00%	356.000.000,00	98,00%	363.120.000,00	98,00%	8.696.440.028,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	- APK PAUD (%)	91,15%	94,00%	3.963.170.500,00	96,00%	10.139.176.700,00	94,00%	5.261.640.600,00	99,99%	4.984.500.000,00	100,00%	5.084.190.000,00	100,00%	29.432.677.800,00	DINAS PENDIDIKAN
		- APK TK (%)	105,44%	105,00%		105,44%		105,44%		105,44%		105,44%		105,44%		
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	98,82%	100,00%	17.855.986.295,00	100,00%	17.011.195.234,00	100,00%	23.293.121.000,00	100,00%	37.317.057.000,00	100,00%	38.063.398.140,00	100,00%	133.540.757.669,00	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMP/MTs/Paket B (%)	102,90%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/Paket C	170,60%	100,00%	13.877.288.488,00	100,00%	8.618.509.621,00	100,00%	5.000.000.000,00	100,00%	2.960.000.000,00	100,00%		100,00%	30.455.798.109,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf diatas 15 th	99,54%	100,00%	4.461.731.000,00	100,00%	7.655.829.000,00	100,00%	8.434.832.000,00	100,00%	9.000.906.000,00	100,00%	9.180.924.120,00	100,00%	38.734.222.120,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	96,57%	97,30%	1.879.679.850,00	97,80%	2.141.440.800,00	98,80%	2.224.940.000,00	99,39%	3.748.545.000,00	99,39%	3.823.515.900,00	99,39%	13.818.121.550,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan kepada masyarakat	96,57%	80,00%	3.475.659.000,00	87,00%	15.101.695.923,00	93,00%	12.089.754.125,00	95,00%	6.368.695.000,00	99,00%	6.496.068.900,00	99,00%	43.531.872.948,00	DINAS PENDIDIKAN
	SMP NEGERI 1 KEDIRI				1.139.889.434,00		1.544.272.927,00		1.232.759.000,00		2.062.000.000,00		2.103.240.000,00		8.082.161.361,00	
1	URUSAN WAJIB															
1.01	PENDIDIKAN															
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	294.690.981,00	92,00%	411.641.627,00	94,00%	294.683.000,00	96,00%	311.055.000,00	98,00%	317.276.100,00	98,00%	1.629.346.708,00	SMPN 1 KEDIRI
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	329.585.000,00	92,00%	133.027.500,00	94,00%	185.480.000,00	96,00%	5.900.000,00	98,00%	6.018.000,00	98,00%	660.010.500,00	SMPN 1 KEDIRI
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	98,82%	100,00%	515.613.453,00	100,00%	999.603.800,00	100,00%	752.596.000,00	100,00%	1.745.045.000,00	100,00%	1.779.945.900,00	98,00%	5.792.804.153,00	SMPN 1 KEDIRI
		APM SMP/MTs/Paket B (%)	102,90%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		SMPN 1 KEDIRI
	SMP NEGERI 2 KEDIRI				761.397.184,00		1.820.036.499,00		1.329.464.500,00		2.209.868.800,00		2.254.066.176,00		8.374.833.159,00	
1	URUSAN WAJIB															
1.01	PENDIDIKAN															
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	225.136.684,00	92,00%	243.831.599,00	94,00%	145.877.500,00	96,00%	156.877.500,00	98,00%	160.015.050,00	98,00%	931.738.333,00	SMPN 2 KEDIRI
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	73.750.000,00	92,00%		94,00%	117.940.000,00	96,00%	97.940.000,00	98,00%	99.898.800,00	98,00%	389.528.800,00	SMPN 2 KEDIRI
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	98,82%	100,00%	462.510.500,00	100,00%	1.576.204.900,00	100,00%	1.065.647.000,00	100,00%	1.955.051.300,00	100,00%	1.994.152.326,00	98,00%	7.053.566.026,00	SMPN 2 KEDIRI
		APM SMP/MTs/Paket B (%)	102,90%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		SMPN 2 KEDIRI
	SMP NEGERI 3 KEDIRI				720.169.694,00		1.445.237.952,00		1.298.000.000,00		2.042.480.296,00		2.083.329.901,92		7.589.217.843,92	SMPN 3 KEDIRI
1	URUSAN WAJIB															SMPN 3 KEDIRI
1.01	PENDIDIKAN															SMPN 3 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	287.760.294,00	92,00%	382.099.902,00	94,00%	252.026.000,00	96,00%	320.498.000,00	98,00%	326.907.960,00	98,00%	1.569.292.156,00	SMPN 3 KEDIRI
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%					94,00%	147.209.000,00	96,00%	35.702.000,00	98,00%	36.416.040,00	98,00%	219.327.040,00	SMPN 3 KEDIRI
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	98,82%	100,00%	432.409.400,00	100,00%	1.063.138.050,00	100,00%	898.765.000,00	100,00%	1.686.280.296,00	100,00%	1.720.005.901,92	100,00%	5.800.598.647,92	SMPN 3 KEDIRI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		APM SMP/MTs/Paket B (%)	102,90%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		SMPN 3 KEDIRI
1	SMP NEGERI 4 KEDIRI				942.948.549,00		1.567.742.642,00		1.975.000.000,00		2.064.000.000,00		2.105.280.000,00		8.654.971.191,00	
1.01	PENDIDIKAN															
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	310.941.899,00	92,00%	323.883.542,00	94,00%	435.994.200,00	96,00%	333.124.400,00	98,00%	339.786.888,00	98,00%	1.743.730.929,00	SMPN 4 KEDIRI
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	58.745.000,00											SMPN 4 KEDIRI
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	98,82%	100,00%	573.261.650,00	100,00%	1.243.859.100,00	100,00%	1.539.005.800,00	100,00%	1.730.875.600,00	100,00%	1.765.493.112,00	100,00%	6.852.495.262,00	SMPN 4 KEDIRI
		APM SMP/MTs/Paket B (%)	102,90%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		SMPN 4 KEDIRI
1	SMP NEGERI 5 KEDIRI				693.983.600,00		950.362.172,00		1.191.721.000,00		1.983.000.000,00		1.983.000.000,00		6.802.066.772,00	
1.01	PENDIDIKAN															SMPN 5 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	164.944.100,00	92,00%	195.330.372,00	94,00%	281.311.000,00	96,00%	211.120.000,00	98,00%	215.342.400,00	98,00%	1.068.047.872,00	SMPN 5 KEDIRI
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	174.400.000,00	92,00%	62.500.000,00	94,00%	35.100.000,00	96,00%	18.400.000,00	98,00%	18.768.000,00	98,00%	309.168.000,00	SMPN 5 KEDIRI
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	98,82%	100,00%	354.639.500,00	100,00%	692.531.800,00	100,00%	875.310.000,00	100,00%	1.753.480.000,00	100,00%	1.788.549.600,00	100,00%	5.464.510.900,00	SMPN 5 KEDIRI
		APM SMP/MTs/Paket B (%)	102,90%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		SMPN 5 KEDIRI
1	SMP NEGERI 6 KEDIRI				940.998.876,00		1.315.551.751,00		1.310.000.000,00		2.212.000.000,00		2.256.240.000,00		8.034.790.627,00	
1.01	PENDIDIKAN															
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	210.186.976,00	92,00%	233.890.641,00	94,00%	262.307.500,00	96,00%	267.300.000,00	98,00%	272.646.000,00	98,00%	1.246.331.117,00	SMPN 6 KEDIRI
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	322.886.000,00	92,00%	129.350.000,00	94,00%	91.003.500,00	96,00%	61.150.000,00	98,00%	62.373.000,00	98,00%	666.762.500,00	SMPN 6 KEDIRI
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	98,82%	100,00%	407.925.900,00	100,00%	952.311.110,00	100,00%	956.689.000,00	100,00%	1.883.550.000,00	100,00%	1.921.221.000,00	100,00%	6.121.697.010,00	SMPN 6 KEDIRI
		APM SMP/MTs/Paket B (%)	102,90%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		SMPN 6 KEDIRI
1	SMP NEGERI 7 KEDIRI				858.526.555,00		1.585.948.612,00		1.268.522.000,00		1.908.000.000,00		1.946.160.000,00		7.567.157.167,00	
1.01	PENDIDIKAN															
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	206.902.555,00	92,00%	364.616.512,00	94,00%	352.022.000,00	96,00%	355.150.000,00	98,00%	362.253.000,00	98,00%	1.640.944.067,00	SMPN 7 KEDIRI
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%						11.000.000,00	96,00%	8.000.000,00	98,00%	8.160.000,00	98,00%	27.160.000,00	SMPN 7 KEDIRI
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	98,82%	100,00%	651.624.000,00	100,00%	1.221.332.100,00	100,00%	905.500.000,00	100,00%	1.544.850.000,00	100,00%	1.575.747.000,00	100,00%	5.899.053.100,00	SMPN 7 KEDIRI
		APM SMP/MTs/Paket B (%)	102,90%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	SMP NEGERI 8 KEDIRI				880.043.417,00		1.400.174.704,00		1.420.000.000,00		2.106.000.000,00		2.148.120.000,00		7.954.338.121,00	
1.01	PENDIDIKAN												-			
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	242.378.617,00	92,00%	259.027.254,00	94,00%	295.873.200,00	96,00%	283.183.500,00	98,00%	288.847.170,00	98,00%	1.369.309.741,00	SMPN 8 KEDIRI
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,0%	163.730.150,00					96,00%	21.220.000,00	98,00%	21.644.400,00	98,00%	206.594.550,00	SMPN 8 KEDIRI
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	98,82%	100,00%	473.934.650,00	100,00%	1.141.147.450,00	100,00%	1.124.126.800,00	100,00%	1.801.596.500,00	100,00%	1.837.628.430,00	100,00%	6.378.433.830,00	SMPN 8 KEDIRI
		APM SMP/MTs/Paket B (%)	102,90%	100,0%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		SMPN 8 KEDIRI
	SMAN 1 KEDIRI				2.110.300.857,00	97,83%	2.561.431.263,00									SMAN 1 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	96,12%	565.067.957,00	96,79%	632.643.363,00									SMAN 1 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	97,56%	1.545.232.900,00	98,17%	1.928.787.900,00									SMAN 1 KEDIRI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tercapainya mutu pendidikan dan tenaga pendidik (%)														SMAN 1 KEDIRI
1.01.21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tercapainya tingkat pelayanan pendidikan														SMAN 1 KEDIRI
	SMAN 2 KEDIRI				1.485.316.410,00	80,71%	2.196.194.684,00									SMAN 2 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	84,50%	503.613.010,00	88,09%	558.268.944,00									SMAN 2 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	73,25%	981.703.400,00	78,48%	1.637.925.740,00									SMAN 2 KEDIRI
	SMAN 3 KEDIRI				1.642.086.115,00	98,74%	2.396.494.153,00									SMAN 3 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	96,49%	298.596.115,00	99,33%	361.201.363,00									SMAN 3 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	81,36%	1.343.490.000,00	98,64%	2.035.292.790,00									SMAN 3 KEDIRI
	SMAN 4 KEDIRI				1.595.791.300,00	96,29%	2.428.198.579,00									SMAN 4 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	98,19%	183.081.930,00	97,31%	270.436.979,00									SMAN 4 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	98,51%	1.412.709.370,00	96,17%	2.157.761.600,00									SMAN 4 KEDIRI
	SMAN 5 KEDIRI				1.691.808.984,00	92,28%	1.895.996.540,00									SMAN 5 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	92,81%	347.667.234,00	89,98%	411.141.000,00									SMAN 5 KEDIRI
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%													SMAN 5 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	93,85%	1.344.141.750,00	92,94%	1.484.855.540,00									SMAN 5 KEDIRI
	SMAN 6 KEDIRI				935.763.080,00	90,58%	1.776.835.159,00									SMAN 6 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	95,13%	225.407.980,00	98,27%	349.931.759,00									SMAN 6 KEDIRI
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%													SMAN 6 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	98,56%	710.355.100,00	88,87%	1.426.903.400,00									SMAN 6 KEDIRI
	SMAN 7 KEDIRI				1.751.573.036,00	98,21%	2.591.063.427,00									SMAN 7 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	93,82%	320.624.736,00	97,80%	421.972.427,00									SMAN 7 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	92,81%	1.430.948.300,00	98,29%	2.169.091.000,00									SMAN 7 KEDIRI
	SMAN 8 KEDIRI				1.299.464.243,00	98,20%	2.397.594.345,00									SMAN 8 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	92,79%	319.885.657,00	94,29%	325.047.067,00									SMAN 8 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	89,68%	979.578.586,00	98,84%	2.072.547.278,00									SMAN 8 KEDIRI
	SMKN 1 KEDIRI				1.516.105.544,00	94,46%	2.369.149.043,00									SMKN 1 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	93,79%	301.447.544,00	91,10%	326.508.601,00									SMKN 1 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	98,73%	1.214.658.000,00	95,02%	2.042.640.442,00									SMKN 1 KEDIRI
	SMKN 2 KEDIRI				1.422.869.827,00	94,90%	1.535.347.475,00									SMKN 2 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	92,94%	275.208.577,00	99,87%	259.707.975,00									SMKN 2 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	89,30%	1.147.661.250,00	93,95%	1.275.639.500,00									SMKN 2 KEDIRI
	SMKN 3 KEDIRI				1.382.520.302,00	89,98%	1.459.285.316,00									SMKN 3 KEDIRI
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	83,77%	299.380.052,00	83,42%	317.385.316,00									SMKN 3 KEDIRI
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	170,60%	94,26%	1.083.140.250,00	91,99%	1.141.900.000,00									SMKN 3 KEDIRI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	DINAS KESEHATAN				27.440.239.917,00		41.284.458.123,28		48.496.782.437,00		33.506.015.617,00		33.506.015.617,00		184.233.511.711,28	DINAS KESEHATAN
	URUSAN WAJIB															DINAS KESEHATAN
1.02	KESEHATAN															DINAS KESEHATAN
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	1.728.580.415,00	92,00%	1.896.957.751,00	94,00%	6.326.240.237,00	96,00%	7.130.305.000,00	98,00%	7.130.305.000,00	98,00%	24.212.388.403,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	1.462.392.265,00	92,00%	627.989.498,00	94,00%	3.771.019.600,00	96,00%	958.380.000,00	98,00%	958.380.000,00	98,00%	7.778.161.363,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (%)	85%	90,00%	135.000.000,00											DINAS KESEHATAN
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	80%	90,00%	258.929.300,00	92,00%	256.831.000,00	85,00%	300.000.000,00	96,00%	140.000.000,00	85,00%	140.000.000,00	85,00%	1.095.760.300,00	DINAS KESEHATAN
1.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	298.154.000,00	92,00%	333.944.500,00	94,00%	250.000.000,00	96,00%	394.850.000,00	98,00%	394.850.000,00	98,00%	1.671.798.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes	90%	90,00%	3.026.125.679,00	92,00%	2.846.936.410,00	95,00%	3.371.818.000,00	95,00%	123.500.000,00	100,00%	123.500.000,00	100,00%	9.491.880.089,00	DINAS KESEHATAN
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Puskesmas yang memiliki rawat inap	22,22%	22,22%	10.499.673.637,00	22,22%	12.824.650.699,00	22,22%	14.545.748.600,00	22,22%	4.638.400.617,00	22,22%	4.638.400.617,00	22,22%	47.146.874.170,00	DINAS KESEHATAN
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pembinaan sarana peredaran obat	77%	80,00%	211.011.520,00	85,00%	25.565.000,00	85,00%	100.000.000,00	90,00%	92.900.000,00	90,00%	92.900.000,00	90,00%	522.376.520,00	DINAS KESEHATAN
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita	0%	55,00%	1.870.644.400,00	50,00%	2.679.015.976,00	50,00%	3.750.000.000,00	50,00%	5.664.350.000,00	50,00%	5.664.350.000,00	50,00%	19.628.360.376,00	DINAS KESEHATAN
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita kurang gizi	3,3%	< 15%	197.580.000,00	< 15%	285.112.540,00	< 15%	700.000.000,00	< 15%	1.046.000.000,00	< 15%	1.046.000.000,00	< 15%	3.274.692.540,00	DINAS KESEHATAN
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	71,28%	85,00%	215.020.000,00	86,00%	136.127.900,00	86,00%	3.011.200.000,00	86,00%	1.484.303.250,00	96,00%	1.484.303.250,00	96,00%	6.330.954.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa/kelurahan UCI	85%	85,00%	3.131.101.401,00	87,00%	2.724.758.896,00	88,00%	3.825.000.000,00	89,00%	4.057.975.000,00	90,00%	4.057.975.000,00	90,00%	17.796.810.297,00	DINAS KESEHATAN
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yg di ISO	3	3	1.129.688.400,00	3	404.490.000,00	3	743.378.000,00	3	456.080.000,00			3	2.733.636.400,00	DINAS KESEHATAN
		Jumlah puskesmas yg di akreditasi									9	456.080.000,00	9	456.080.000,00		DINAS KESEHATAN
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas mas Pembantu dan Jaringannya	80%	82,00%	2.802.023.900,00	83,00%	9.006.450.500,00	84,00%	6.952.378.000,00	85,00%	1.490.196.750,00	90,00%	1.490.196.750,00	90,00%	21.741.245.900,00	DINAS KESEHATAN
1.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan nakes medis yang mempunyai SIK/SIP	90%	90,00%	167.688.000,00			92,00%	250.000.000,00	95,00%	206.350.000,00	98,00%	206.350.000,00	98,00%	830.388.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan kunjungan bayi	90%	90,00%	184.813.200,00	90,00%	150.000.000,00	90,00%	200.000.000,00	90,00%	161.075.000,00	90,00%	161.075.000,00	90,00%	856.963.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	80,00%	121.813.800,00	80,00%	135.262.200,00	80,00%	300.000.000,00	80,00%	461.350.000,00	80,00%	461.350.000,00	80,00%	1.479.776.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.35	Program Pembinaan lingkungan Sosial	Meningkatnya derajat hidup kesehatan masyarakat	80%			100,00%	6.950.365.253,28			100,00%	5.000.000.000,00	100,00%	5.000.000.000,00	100,00%	16.950.365.253,28	DINAS KESEHATAN
1.22.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	80%					87,00%	100.000.000,00					87,00%	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	RSUD GAMBIRAN				118.383.411.294,76		80.509.744.398,46		121.030.000.000,00		109.508.623.663,00		135.000.000.000,00		564.431.779.356,22	
1	URUSAN WAJIB															
1.02	KESEHATAN															
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		90,00%	6.826.582.292,19											RSUD GAMBIRAN
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur		90,00%	2.630.778.618,00											RSUD GAMBIRAN
1.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (%)		90,00%	82.767.500,00											RSUD GAMBIRAN
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)		90,00%	755.543.600,00											RSUD GAMBIRAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan		90,00%	81.740.000,00											RSUD GAMBIRAN
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes		90,00%	12.285.005.443,15											RSUD GAMBIRAN
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	85%	90,00%	35.314.718.612,80	90%	3.664.878.856,77	90,00%	97.500.000.000,00	90,00%	104.508.623.663,00	95,00%	115.000.000.000,00	95,00%	355.988.221.132,57	RSUD GAMBIRAN
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita		80,00%	910.325.600,00	100,00%	2.738.282.870,00									RSUD GAMBIRAN
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yg di ISO		90,00%	1.205.211.800,00	100,00%	306.162.374,00									RSUD GAMBIRAN
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru	Meningkatnya prasarana rumah sakit yang berfungsi dengan baik	0%	90,00%	32.363.375.201,48	90,00%	4.166.898.245,00	90,00%	21.626.500.000,00			60,00%	5.000.000.000,00	70,00%	63.156.773.446,48	RSUD GAMBIRAN
1.02. 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	% sarana dan prasarana yang berfungsi baik dan terkalibrasi		95,00%	3.742.339.580,00											RSUD GAMBIRAN
1.02. 34	Program Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Terpenuhihnya penunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit		100,00%	63.125.000,00			100,00%	1.903.500.000,00					100,00%	1.966.625.000,00	RSUD GAMBIRAN
1.02.35	Program Pembinaan lingkungan Sosial	Meningkatnya sarana prasarana kesehatan rumah sakit	80%	100,00%	22.121.898.047,14	100,00%	69.633.522.052,69			20,00%	5.000.000.000,00	85,00%	15.000.000.000,00	85,00%	111.755.420.099,83	RSUD GAMBIRAN
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN (BLUD)						106.790.828.942,52									RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN (BLUD)
1.02. 00	Non Program					100,00%	995.000,00							100,00%	995.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN (BLUD)
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	85%			100,00%	106.789.833.942,52							100,00%	106.789.833.942,52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN (BLUD)
											9.168.269.820,00					
	PUSKESMAS BALOWERTI										1.074.788.100,00		1.074.788.100,00		1.074.788.100,00	PUSKESMAS BALOWERTI
1	URUSAN WAJIB															PUSKESMAS BALOWERTI
1.02	KESEHATAN															PUSKESMAS BALOWERTI
1.02.39	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat										80,00%	1.074.788.100,00	80,00%	1.074.788.100,00	PUSKESMAS BALOWERTI
1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	85%							75,00%	1.074.788.100,00			75,00%	1.074.788.100,00	
	PUSKESMAS CAMPUREJO										1.136.169.200,00		1.136.169.200,00		1.136.169.200,00	PUSKESMAS CAMPUREJO
1	URUSAN WAJIB															PUSKESMAS CAMPUREJO
1.02	KESEHATAN															PUSKESMAS CAMPUREJO
1.02.39	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat										80,00%	1.136.169.200,00	80,00%	1.136.169.200,00	PUSKESMAS CAMPUREJO
1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	85%							75,00%	1.136.169.200,00			75,00%	1.136.169.200,00	
	PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN										944.507.460,00		944.507.460,00		944.507.460,00	PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN
1	URUSAN WAJIB															PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN

[illegible]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02	KESEHATAN															PUSKESMAS SUKORAME
1.02.39	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat										80,00%	1.240.737.560,00	80,00%	1.240.737.560,00	PUSKESMAS SUKORAME
1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	85%							75,00%	1.240.737.560,00			75,00%	1.240.737.560,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				72.542.635.645,00		221.120.874.647,00		213.371.815.811,00		88.830.000.000,00		88.830.000.000,00		684.161.301.834,00	DPUPR
1	URUSAN WAJIB															DPUPR
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															DPUPR
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	1.995.399.495,00	92,00%	2.864.751.383,00	94,00%	3.315.200.000,00	96,00%	3.365.200.000,00	98,00%	3.365.200.000,00	98,00%	14.905.750.878,00	DPUPR
1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	14.143.111.496,00	92,00%	57.372.487.513,00	94,00%	22.218.480.000,00	96,00%	12.878.000.000,00	98,00%	12.878.000.000,00	98,00%	119.490.079.009,00	DPUPR
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	84%	88,00%	214.424.802,00	89,00%	379.189.464,00	92,00%	560.000.000,00	94,00%	500.000.000,00	98,00%	500.000.000,00	98,00%	2.153.614.266,00	DPUPR
1.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	111.883.200,00	92,00%	294.835.000,00	94,00%	258.000.000,00	96,00%	250.000.000,00	98,00%	250.000.000,00	98,00%	1.164.718.200,00	DPUPR
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	meningkatnya jumlah Panjang jalan (km)	236.919	250.919	29.534.268.050,00	257.919	22.351.832.150,00	264.919	31.233.490.000,00	271.919	15.400.000.000,00	278.919	19.288.800.000,00	278.919	117.808.390.200,00	DPUPR
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Meningkatnya panjang saluran drainase/gorong-gorong yang	52,63%	53,84%	15.901.265.920,00	54,44%	33.057.700.430,00	55,05%	5.880.000.000,00	55,65%	7.200.000.000,00	56,25%	7.200.000.000,00	56,25%	69.238.966.350,00	DPUPR
1.03.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Prosentase plengsengan yang dibangun	52,63%	53,84%	2.767.110.300,00	54,44%	4.389.138.900,00	55,05%	3.329.384.811,00	55,65%	2.114.000.000,00	56,25%	2.114.000.000,00	56,25%	14.713.634.011,00	DPUPR
1.03.18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya umur manfaat jalan dan jembatan (%)	45%	43,00%	1.365.421.750,00	42,00%	47.719.688.400,00	40,00%	24.405.219.000,00	38,00%	500.000.000,00	36,00%	2.815.000.000,00	36,00%	76.805.329.150,00	DPUPR
1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	% peningkatan jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik	30%	40,00%	4.976.344.050,00	50,00%	5.775.455.750,00	60,00%	8.779.393.000,00	65,00%	2.714.000.000,00	70,00%	2.714.000.000,00	70,00%	24.959.192.800,00	DPUPR
1.03.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya sarana pengelolaan air baku		28,36%	38.092.700,00										38.092.700,00	DPUPR
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	% meningkatnya sarana sanitasi	32%	40,00%	72.305.800,00	50,00%	221.008.400,00	60,00%	5.074.114.000,00	70,00%	30.000.000,00	75,00%	155.000.000,00	75,00%	5.552.428.200,00	DPUPR
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	%Panjang saluran drainase yang dibersihkan terhadap panjang saluran	80%					77,00%	696.760.000,00	76,00%	1.050.000.000,00	75,00%	1.050.000.000,00	75,00%	2.796.760.000,00	DPUPR
1.03.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Prosentase pengembangan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh	0%			10%	50.000.000,00	35%	45.000.000.000,00	55%	30.000.000.000,00	70%	30.000.000.000,00	70%	105.050.000.000,00	DPUPR
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase terpenuhinya infrastruktur lingkungan kelurahan	30%	35,00%	350.398.020,00	40,00%	1.824.480.250,00	45,00%	950.000.000,00	50,00%	150.000.000,00	60,00%	150.000.000,00	60,00%	3.424.878.270,00	DPUPR
1.03.31	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-Gorong	Persentase meningkatnya saluran drainase atau gorong-gorong yang direhab	45%	43,00%	771.467.000,00	42,00%	1.152.857.800,00	40,00%	1.200.000.000,00	38,00%	1.000.000.000,00	36,00%	1.000.000.000,00	36,00%	5.124.324.800,00	DPUPR
1.03.37	Program Pembinaan lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan	Meningkatnya sarana prasarana kesehatan rumah sakit		96,35%		41.431.148.000,00		50.000.000.000,00							91.431.148.000,00	DPUPR
1.03.39	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	45%			55%	2.003.420.000,00	60,00%	10.471.775.000,00	65,00%	1.150.000.000,00	70,00%	1.150.000.000,00	70,00%	14.775.195.000,00	DPUPR
1.03.41	Program Pembinaan lingkungan Sosial Lingkup Pekerjaan Umum	meningkatnya jumlah Panjang jalan (km)								271,919	10.528.800.000,00	278,919	4.200.000.000,00	278,919	14.728.800.000,00	DPUPR
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															DPUPR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kecepatan waktu tanggap bencana kebakaran		72,08%	301.143.062,00	54,51%	232.881.207,00									DPUPR
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				-		-		15.272.895.000,00		14.510.000.000,00		14.638.447.600,00		44.421.342.600,00	
1	URUSAN WAJIB															
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												12.826.447.600,00			
1.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran						94,00%	662.000.000,00	94,00%	1.704.242.400,00	94,00%	1.789.600.000,00	94,00%	4.155.842.400,00	DISPERKIM
1.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur						94,00%	4.088.000.000,00	94,00%	428.410.000,00	94,00%	466.500.000,00	94,00%	4.982.910.000,00	DISPERKIM
1.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)						92,00%	50.000.000,00					92,00%	50.000.000,00	DISPERKIM
1.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)						94,00%	47.000.000,00	94,00%	50.000.000,00	94,00%	55.000.000,00	94,00%	152.000.000,00	DISPERKIM
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Prosentase ketersediaan area perumahan								60,00%	100.000.000,00	60,00%	100.000.000,00	60,00%	200.000.000,00	DISPERKIM
1.04.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Peningkatan pemeliharaan areal pemakaman						95,00%	365.700.000,00	95,00%	202.700.000,00	95,00%	202.700.000,00	95,00%	771.100.000,00	DISPERKIM
1.04.21	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Meningkatnya jumlah titik lampu yang terpelihara dan adanya database LPJU						85,00%	7.667.195.000,00	85,00%	9.762.647.600,00	90,00%	9.762.647.600,00	90,00%	27.192.490.200,00	DISPERKIM
1.04.XX	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup perumahan dan pemukiman	Terbinanya Lingkungan sosial lingkup perumahan dan pemukiman										50,00%	450.000.000,00	50,00%	450.000.000,00	DISPERKIM
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												1.812.000.000,00		1.812.000.000,00	DISPERKIM
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	meningkatnya jumlah Panjang jalan (km)						100,00%	1.000.000.000,00					100,00%	1.000.000.000,00	DISPERKIM
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Meningkatnya panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun						55,05%	673.000.000,00	60,00%	1.162.000.000,00	60,00%	1.162.000.000,00	60,00%	2.997.000.000,00	DISPERKIM
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase terpenuhinya infrastruktur lingkungan kelurahan						40,00%	700.000.000,00	45,00%	950.000.000,00	45,00%	500.000.000,00	45,00%	2.150.000.000,00	DISPERKIM
1.03.39	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW						60,00%	20.000.000,00	50,00%	150.000.000,00	50,00%	150.000.000,00	50,00%	320.000.000,00	DISPERKIM
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.636.390.122,00		3.806.040.883,00		3.784.479.550,00		3.634.479.550,00		3.730.000.000,00		19.566.737.405,00	KESBANGPOL
1	URUSAN WAJIB															KESBANGPOL
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												3.730.000.000,00		19.566.737.405,00	KESBANGPOL
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	335.975.422,00	92,00%	360.328.935,00	94,00%	267.488.550,00	95,00%	425.888.550,00	96,00%	505.000.000,00	96,00%	1.894.681.457,00	KESBANGPOL
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	872.564.000,00	92,00%	720.774.048,00	94,00%	1.200.306.000,00	95,00%	455.000.000,00	96,00%	195.000.000,00	96,00%	3.443.644.048,00	KESBANGPOL
1.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	4.512.000,00	92,00%	2.820.000,00	94,00%	5.512.500,00	95,00%	22.000.000,00	96,00%	30.000.000,00	96,00%	64.844.500,00	KESBANGPOL
1.05.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya rencana aksi (tim terpadu) penanganan gangguan keamanan dalam negeri	80%	90,00%	321.020.000,00	90,00%	185.950.000,00	90,00%	372.050.000,00	90,00%	171.077.500,00	95,00%	190.000.000,00	95,00%	1.240.097.500,00	KESBANGPOL

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terbentuk dan terkoordinirnya FKDM di tingkat Kota sampai Kelurahan	80%	90,00%	518.120.000,00	90,00%	580.567.000,00	90,00%	420.500.000,00	92,00%	991.891.000,00	95,00%	1.020.000.000,00	95,00%	3.531.078.000,00	KESBANGPOL
1.05.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya semangat berwawasan kebangsaan di lingkungan masyarakat	90%	90,00%	1.189.588.000,00	90,00%	789.193.000,00	90,00%	413.422.500,00	92,00%	388.422.500,00	95,00%	430.000.000,00	95,00%	3.210.626.000,00	KESBANGPOL
1.05.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan korps musik (upacara) di Balai Kota Kediri	70%	80,00%	267.640.000,00	85,00%	154.000.000,00	90,00%	105.200.000,00	92,00%	255.200.000,00	95,00%	285.000.000,00	95,00%	1.067.040.000,00	KESBANGPOL
1.05.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perpolitikan	80%	85,00%	1.102.319.000,00	87,00%	1.012.407.900,00	90,00%	1.000.000.000,00	92,00%	925.000.000,00	95,00%	1.075.000.000,00	95,00%	5.114.725.900,00	KESBANGPOL
1.19.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya kemampuan aparat dalam penanggulangan bencana alam	80%		24.651.700,00											KESBANGPOL
	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				3.641.305.038,00		5.423.589.072,00		5.615.107.000,00		6.454.471.000,00		6.454.471.000,00		27.588.943.110,00	SATPOL PP
1	URUSAN WAJIB															
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	202.202.674,00	92,00%	276.812.072,00	94,00%	233.074.000,00	96,00%	288.610.000,00	96,00%	288.610.000,00	98,00%	1.289.308.746,00	SATPOL PP
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparat	85%	90,00%	585.197.364,00	92,00%	418.230.000,00	94,00%	162.847.000,00	96,00%	275.340.000,00	96,00%	275.340.000,00	98,00%	1.716.954.364,00	SATPOL PP
1.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan dan wawasan aparat Satpol PP	85%	90,00%	119.466.000,00	92,00%	98.718.000,00	94,00%	1.033.045.000,00	96,00%	49.600.000,00	96,00%	49.600.000,00	98,00%	1.350.429.000,00	SATPOL PP
1.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%							96,00%	11.373.000,00	96,00%	11.373.000,00	98,00%	22.746.000,00	SATPOL PP
1.05.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terkendainya keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	90,00%	2.206.270.000,00	95,00%	2.670.316.000,00	90,00%	1.859.230.000,00	90,00%	2.136.850.000,00	90,00%	2.136.850.000,00	90,00%	11.009.516.000,00	SATPOL PP
1.05.16	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya situasi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	80%	90,00%	528.169.000,00	90,00%	1.959.513.000,00	90,00%	1.941.036.000,00	90,00%	3.355.713.000,00	90,00%	3.355.713.000,00	90,00%	11.140.144.000,00	SATPOL PP
1	URUSAN WAJIB															SATPOL PP
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															SATPOL PP
1.04.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kecepatan waktu tanggap bencana kebakaran						20 menit	385.875.000,00	20 menit	336.985.000,00	20 menit	336.985.000,00	20 menit	1.059.845.000,00	SATPOL PP
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				2.552.876.515,00		2.549.288.762,00		2.299.221.000,00		1.729.000.000,00		1.729.000.000,00		10.859.386.277,00	BPBD
1	URUSAN WAJIB															BPBD
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															BPBD
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	253.920.580,00	92,00%	342.570.021,00	96,82%	419.662.000,00	97,14%	411.745.000,00	97,80%	411.745.000,00	97,80%	1.839.642.601,00	BPBD
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparat	85%	90,00%	491.431.835,00	92,00%	304.353.741,00	92,36%	180.195.000,00	93,01%	99.865.000,00	93,80%	99.865.000,00	93,80%	1.175.710.576,00	BPBD
1.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% Meningkatnya disiplin aparat	85%			92,00%	37.500.000,00	86,51%	70.900.000,00	90,70%	18.800.000,00	94,21%	18.800.000,00	94,21%	146.000.000,00	BPBD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	3.546.000,00	92,00%	12.897.000,00	77,52%	22.890.000,00	85,68%	24.740.000,00	93,76%	24.740.000,00	93,76%	88.813.000,00	BPBD
1.19.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya kemampuan aparat dalam penanggulangan bencana alam	80%	90,00%	1.803.978.100,00											BPBD
1.05.23	Program Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya tindakan antisipasi dan penanggulangan bencana				75,00%	1.851.968.000,00	79,98%	1.605.574.000,00	81,67%	1.173.850.000,00	83,47%	1.173.850.000,00	83,47%	5.805.242.000,00	BPBD
	DINAS SOSIAL				4.592.088.920,00		6.880.771.774,00		9.078.750.000,00		7.349.205.000,00		7.699.205.000,00		35.600.020.694,00	DINAS SOSIAL
1	URUSAN WAJIB															DINAS SOSIAL
1.06	SOSIAL				1.391.638.900,00		2.203.156.210,00									DINAS SOSIAL
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%					94,00%	952.000.000,00	96,00%	957.000.000,00	98,00%	957.000.000,00	98,00%	2.866.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%					94,00%	524.500.000,00	96,00%	200.200.000,00	98,00%	200.200.000,00	98,00%	924.900.000,00	DINAS SOSIAL
1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)						94,00%	30.000.000,00					94,00%	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%					94,00%	25.000.000,00	96,00%	25.000.000,00	98,00%	25.000.000,00	98,00%	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera	Penurunan penduduk miskin	8%	7,80%	419.302.500,00	7,07%	663.687.000,00	7,40%	5.860.750.000,00	7,20%	4.346.635.000,00	7,00%	4.346.635.000,00	7,00%	15.637.009.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	% Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	41%	50,00%	445.159.900,00	60,00%	733.830.210,00	75,00%	840.000.000,00	85,00%	1.160.900.000,00	90,00%	1.160.900.000,00	90,00%	4.340.790.110,00	DINAS SOSIAL
1.06.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	%Anak terlantar yang dibina	80%	80,00%	70.746.000,00	80,00%	158.020.000,00	80,00%	220.000.000,00	80,00%	200.180.000,00	90,00%	200.180.000,00	90,00%	849.126.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	% penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	18%	20,00%	211.074.500,00	21,00%	238.374.000,00	24,00%	267.000.000,00	25,00%	195.325.000,00	30,00%	195.325.000,00	30,00%	1.107.098.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	%Terbinanya panti asuhan /panti jompo									90,00%	100.000.000,00	90,00%	100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.20	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba,dan penyakit sosial lainnya)	% PMKS berskala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar									90,00%	250.000.000,00	90,00%	250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	% wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan	17%	25,00%	245.356.000,00	30,00%	409.245.000,00	40,00%	359.500.000,00	50,00%	263.965.000,00	55,00%	263.965.000,00	55,00%	1.542.031.000,00	DINAS SOSIAL
	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA				3.200.450.020,00		4.677.615.564,00									
1.14	KETENAGAKERJAAN															
1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	66,11%	509.667.495,00	83,15%	737.463.140,00									
1.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	68,62%	216.281.425,00	80,83%	358.219.884,00									
1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)		78,38%	9.405.000,00	53,02%	18.558.000,00									
1.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	96,70%	24.174.400,00	98,14%	29.442.500,00									
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	% tenaga kerja yang mendapat pelatihan	75%	86,42%	203.091.000,00											

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	TPT %	8%	95,51%	248.325.000,00	66,30%	1.302.809.200,00									
1.14.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	79%	93,70%	374.781.000,00	87,06%	1.545.394.840,00									
1.14.18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	% pelatihan tenaga kerja di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan	77%	51,57%	1.521.352.700,00	17,14%	521.687.000,00									
2.08	KETRANSMIGRASIAN															
2.08.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	meningkatnya % transmigrasi yang ditempatkan	0%	84,88%	93.372.000,00	66,96%	164.041.000,00									
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8.177.022.522,00		8.191.294.658,00		7.240.150.000,00		6.075.250.000,00		6.075.250.000,00		35.758.967.180,00	DP3AP2KB
1	URUSAN WAJIB															DP3AP2KB
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												4.176.794.830,00			DP3AP2KB
1.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	965.916.388,00	92,00%	706.106.986,00	94,00%	676.644.830,00	96,00%	686.544.830,00	98,00%	686.544.830,00	98,00%	3.721.757.864,00	DP3AP2KB
1.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	2.313.201.178,00	92,00%	702.616.751,00	94,00%	1.244.200.000,00	96,00%	490.000.000,00	98,00%	490.000.000,00	98,00%	5.240.017.929,00	DP3AP2KB
1.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	70%	80,00%	49.200.000,00	92,00%	43.000.000,00	94,00%	70.000.000,00	96,00%	50.000.000,00	98,00%	50.000.000,00	98,00%	262.200.000,00	DP3AP2KB
1.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	37.245.500,00	92,00%	61.221.600,00	94,00%	90.000.000,00	96,00%	100.000.000,00	98,00%	100.000.000,00	98,00%	388.467.100,00	DP3AP2KB
1.08.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Prosentase tersusunnya regulasi perlindungan perempuan dan anak di kota Kediri	2 Perwal	1 perda, 5 perwal	1.946.479.400,00	1 perda, 7 perwal	2.356.786.200,00	1 perda, 9 perwal	1.771.819.000,00	1 perda, 10 perwal	2.850.250.000,00	1 perda, 11 perwal	1.600.250.000,00	1 perda, 11 perwal	10.525.584.600,00	DP3AP2KB
1.08.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%terbinanya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak										100,00%	954.228.000,00	100,00%	954.228.000,00	DP3AP2KB
1.11.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0.018	0.015	889.826.500,00	0.014	1.044.338.900,00	0.013	492.572.000,00					0.013	2.426.737.400,00	DP3AP2KB
1.08.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	%meningkatnya peranserta dan kesetaraan jender dalam pembangunan										100,00%	200.673.000,00	100,00%	200.673.000,00	DP3AP2KB
1.08.19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%terbinanya kelembagaan pengarusutamaan gender dan										100,00%	95.099.000,00	100,00%	95.099.000,00	DP3AP2KB
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												1.898.455.170,00			DP3AP2KB
1.14.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	73%	73,10%	934.976.000,00	73,15%	1.729.950.500,00	73,20%	1.698.821.500,00	73,25%	1.322.600.000,00	73,30%	1.302.600.000,00	73,30%	6.988.948.000,00	DP3AP2KB
1.14.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah PIK (Pelayanan Informasi dan Konseling) yang terbentuk	0.63	0.57	258.716.100,00	0.54	449.769.961,00	0.51	353.861.770,00	0.48	125.905.000,00	0.45	125.905.000,00	0.45	1.314.157.831,00	DP3AP2KB
1.14.17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.108	2.106	577.388.888,00	2.105	854.503.760,00	2.105	656.930.600,00	2.105	329.100.000,00	2.104	329.100.000,00	2.104	2.747.023.248,00	DP3AP2KB
1.12.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0.96	0.95	20.000.000,00	0.94	30.000.000,00									DP3AP2KB
1.14.20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan pendidik sebaya PIK yang sudah dilatih	92%	94,00%	154.072.568,00	98,00%	165.000.000,00	98,00%	152.655.300,00	98,00%	99.550.000,00	99,00%	99.550.000,00	99,00%	670.827.868,00	DP3AP2KB
1.14.22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Prosentase BKP yang telah mendapatkan informasi	70%	80,00%	30.000.000,00	83,00%	48.000.000,00	85,00%	32.645.000,00	88,00%	21.300.170,00	90,00%	21.300.170,00	90,00%	153.245.340,00	DP3AP2KB

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.14.xx	Program Fasilitas Pembinaan Pengendalian Penduduk	Tingkat pengendalian penduduk										90,00%	20.000.000,00	90,00%	20.000.000,00	DP3AP2KB
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				1.925.188.115,00		1.956.369.712,00		5.138.236.000,00		4.516.177.350,00		5.322.111.450,00		18.858.082.627,00	DKPP
1	URUSAN WAJIB															DKPP
1.09	PANGAN															DKPP
1.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	278.587.615,00	92,00%	310.406.100,00	94,00%	771.844.000,00	96,00%	838.694.000,00	98,00%	838.694.000,00	98,00%	3.038.225.715,00	DKPP
1.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	276.035.000,00	92,00%	113.413.700,00	94,00%	545.008.000,00	96,00%	223.550.000,00	98,00%	449.100.000,00	98,00%	1.607.106.700,00	DKPP
1.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	8.368.000,00	92,00%	16.000.000,00	94,00%	15.000.000,00	96,00%	12.532.000,00	98,00%	13.000.000,00	98,00%	64.900.000,00	DKPP
1.09.15	Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan energi dan protein per kapita	80%	90,00%	635.956.300,00	91,00%	597.701.500,00	91,50%	727.500.000,00	92,00%	733.276.500,00	92,50%	733.276.500,00	92,50%	3.427.710.800,00	DKPP
1.09.16	Program Penganekaragaman Pangan dan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan	88%	90,00%	402.000.000,00	91,00%	635.150.042,00	91,50%	420.000.000,00	92,00%	405.850.000,00	92,50%	405.850.000,00	92,50%	2.268.850.042,00	DKPP
1.09.17	Program Kewaspadaan Pangan dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70%	80,00%	324.241.200,00	81,00%	283.698.370,00	81,50%	188.000.000,00	82,00%	24.538.000,00	82,50%	24.538.000,00	82,50%	845.015.570,00	DKPP
1.09.18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketahanan Pangan	% pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja lingkup ketahanan pangan										80,00%	372.500.000,00	80,00%	372.500.000,00	DKPP
2	URUSAN PILIHAN															DKPP
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN															DKPP
2.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan (kw)	1390.60					1548,72	599.190.000,00	1579,69	359.713.500,00	1605,29	383.800.000,00	1605,29	1.342.703.500,00	DKPP
2.01.xx	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Perikanan	% pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja lingkup perikanan										80,00%	101.800.000,00	80,00%	101.800.000,00	DKPP
2	URUSAN PILIHAN															DKPP
2.03	PERTANIAN															DKPP
2.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	% Kelompok Tani yang dibina	75%					80,00%	203.159.000,00	82,00%	126.604.650,00	83,00%	126.604.650,00	83,00%	456.368.300,00	DKPP
2.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	%meningkatnya ketahanan pangan pertanian/perkebunan								91,80%	50.000.000,00	92,00%	50.000.000,00	92,00%	100.000.000,00	DKPP
2.03.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	% kelompok Tani yang dibantu pemasarannya	11%					50,00%	122.500.000,00	60,00%	73.004.000,00	70,00%	73.004.000,00	70,00%	268.508.000,00	DKPP
2.03.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	% kelompok tani yang dilatih dan menerapkan tehnologi	34%					48,00%	568.361.000,00	50,00%	118.023.500,00	56,00%	118.023.500,00	56,00%	804.408.000,00	DKPP
2.03.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman pangan padi (ton)	13483					13.337	227.650.000,00	12.918	965.120.800,00	12.685	992.996.400,00	12.685	2.185.767.200,00	DKPP
2.02.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya tanaman areal hutan yang direboisasi (ha)	113,4					5000	55.000.000,00					5000	55.000.000,00	DKPP
2.03.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang	% penyuluh yang mengikuti pelatihan	100%					85,00%	141.259.000,00	87,00%	126.303.000,00	88,00%	126.303.000,00	88,00%	393.865.000,00	DKPP
2.03.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	% menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak	10%					50,00%	116.000.000,00	55,00%	150.000.000,00	60,00%	165.000.000,00	60,00%	431.000.000,00	DKPP
2.03.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan (kg)	2.713.924					2.906.595	281.467.000,00	2.973.934	161.346.000,00	3.042.895	200.000.000,00	3.042.895	642.813.000,00	DKPP
2.03.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya pemasaran produksi hasil peternakan (kg)	1.479.194					1.568.672	156.298.000,00	1.600.672	147.621.400,00	1.632.046	147.621.400,00	1.632.046	451.540.800,00	DKPP
2.03.xx	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pertanian	% pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja lingkup pertanian										80,0%	307.493.000,00	80,0%	307.493.000,00	DKPP
	DINAS PERTANIAN				4.976.625.083,00		5.307.679.551,00									

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.01	PERTANIAN															
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	91,27%	432.551.960,00	90,55%	528.607.573,00									
2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	92,73%	322.100.933,00	92,59%	357.982.330,00									
2.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	100,00%	7.000.000,00	99,78%	7.334.000,00									
2.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	% Kelompok Tani yang dibina		88,96%	128.976.000,00	97,12%	251.138.400,00									
2.01.16	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	% kelompok tani yang dilatih dan menerapkan tehnologi		67,01%	695.386.500,00											
2.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	% kelompok Tani yang dibantu pemasarannya	11%	85,57%	69.315.000,00	55,00%	88.000.000,00									
2.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	% kelompok tani yang dilatih dan menerapkan tehnologi	34%			96,84%	668.443.100,00									
2.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman pangan padi (ton)	13483	100,00%	195.000.000,00	96,32%	336.650.000,00									
2.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang	% penyuluh yang mengikuti pelatihan	100%	10,68%	113.601.700,00	96,64%	242.074.100,00									
2.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	% menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak	10%	55,26%	340.454.100,00	95,65%	411.891.450,00									
2.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan (kg)	2.713.924	84,43%	128.591.300,00	80,20%	265.475.900,00									
2.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya pemasaran produksi hasil peternakan (kg)	1.479.194	31,34%	102.719.900,00	82,89%	650.258.198,00									
2.02	KEHUTANAN															
2.02.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya tanaman areal hutan yang direboisasi (ha)	113,4	100,00%	150.000.000,00	99,60%	156.875.000,00									
2.02.20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan															
2.05	KELAUTAN DAN PERIKANAN															
2.05.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan (kw)	1390.60	83,85%	2.290.927.690,00	78,45%	1.342.949.500,00									
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN				2.527.034.461,00		2.140.843.338,00		26.551.490.000,00		31.789.481.500,00		41.508.599.875,00		104.517.449.174,00	DLHKP
1	URUSAN WAJIB															DLHKP
1.11	LINGKUNGAN HIDUP															DLHKP
1.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	248.745.096,00	92,00%	327.914.282,00	94,00%	1.219.820.000,00	96,00%	1.401.945.000,00	80,00%	1.728.681.250,00	80,00%	4.927.105.628,00	DLHKP
1.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	164.183.729,00	92,00%	164.170.883,00	94,00%	356.055.000,00	96,00%	463.055.000,00	80,00%	578.818.750,00	80,00%	1.726.283.362,00	DLHKP
1.11.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur	85%					94,00%	20.000.000,00	96,00%	20.000.000,00	80,00%	25.000.000,00	80,00%	65.000.000,00	DLHKP
1.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur						80,00%	20.000.000,00					80,00%	20.000.000,00	DLHKP
1.08.06	Program Peningkatan Pengembangan	Tingkat ketepatan penyelesaian		90,00%	5.375.000,00	92,00%	9.219.300,00	94,00%	30.250.000,00					94,00%	44.844.300,00	DLHKP
1.11.15	Program Pengembangan Kinerja	Meningkatnya kesadaran	80,00%	96,40%	926.570.200,00	96,49%	24.324.000,00	96,58%	12.991.140.000,00	96,67%	18.114.835.000,00	78,00%	22.643.543.750,00	78,00%	54.700.412.950,00	DLHKP
1.11.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran udara, air dan tanah	12,36%	11,00%	569.644.411,00	10,00%	585.867.985,00	9,00%	528.000.000,00	8,00%	740.265.000,00	75,00%	925.331.250,00	75,00%	3.349.108.646,00	DLHKP
1.11.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	% upaya pengendalian dampak perubahan iklim dan gas rumah kaca	20,00%	50,00%	77.376.965,00	60,00%	762.475.800,00	70,00%	480.000.000,00	80,00%	742.812.000,00	50,00%	928.515.000,00	50,00%	2.991.179.765,00	DLHKP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.08.26	Program Pengembangan Penerimaan Daerah	% peningkatan PAD dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pertamanan	100%	99,96%	127.944.000,00	98,26%	73.697.000,00									
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.982.616.007,00		3.540.937.735,00		4.528.184.000,00		2.447.413.000,00		2.447.413.000,00		15.946.563.742,00	DISPENDUKCAPIL
1	URUSAN WAJIB															DISPENDUKCAPIL
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															DISPENDUKCAPIL
1.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	88,34%	359.628.941,00	89,18%	499.982.206,00	94,00%	509.960.000,00	96,00%	690.673.000,00	98,00%	690.673.000,00	98,00%	2.750.917.147,00	DISPENDUKCAPIL
1.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	95,55%	1.056.165.510,00	94,05%	407.425.262,00	94,00%	375.736.000,00	96,00%	410.890.000,00	98,00%	410.890.000,00	98,00%	2.661.106.772,00	DISPENDUKCAPIL
1.10.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan	85%			92,86%	52.650.000,00	94,00%	27.000.000,00					94,00%	79.650.000,00	DISPENDUKCAPIL
1.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	100,00%	5.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	94,00%	20.000.000,00	96,00%	20.000.000,00	98,00%	20.000.000,00	98,50%	80.000.000,00	DISPENDUKCAPIL
1.12.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan		95,79%	1.561.821.556,00	90,67%	2.565.880.267,00	90,00%	3.595.488.000,00	92,00%	1.325.850.000,00	98,00%	1.325.850.000,00	98,00%	10.374.889.823,00	DISPENDUKCAPIL
	DINAS PERHUBUNGAN				8.148.127.833,00		11.003.041.202,00		13.421.423.100,00		11.325.639.000,00		11.325.639.000,00		55.223.870.135,00	DISHUB
1	URUSAN WAJIB															DISHUB
1.15	PERHUBUNGAN											11.325.639.000,00				DISHUB
1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	1.070.428.789,00	92,00%	1.376.673.298,00	94,00%	2.361.788.000,00	96,00%	2.433.105.430,00	98,00%	2.303.105.430,00	98,00%	9.545.100.947,00	DISHUB

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	263.636.514,00	92,00%	390.967.324,00	94,00%	385.580.000,00	96,00%	256.001.000,00	98,00%	256.001.000,00	98,00%	1.552.185.838,00	DISHUB
1.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	92.603.000,00	92,00%	92.140.000,00					98,00%	30.000.000,00	98,00%	214.743.000,00	DISHUB
1.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	26.960.000,00	92,00%	46.962.000,00	94,00%	89.395.000,00	96,00%	39.196.000,00	98,00%	39.196.000,00	98,00%	241.709.000,00	DISHUB
1.15.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas perhubungan		60,00%	130.439.500,00	62,00%	227.953.400,00	64,00%	517.814.000,00	65,00%	479.706.000,00	66,00%	479.706.000,00	66,00%	1.835.618.900,00	DISHUB
1.15.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ		80,00%	703.215.000,00	81,50%	637.731.550,00	83,00%	672.755.850,00	84,50%	778.996.000,00	86,00%	778.996.000,00	86,00%	3.571.694.400,00	DISHUB
1.15.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan	80%	80,00%	739.257.600,00	80,00%	1.112.169.900,00	80,00%	3.495.796.250,00	85,00%	3.465.083.000,00	86%	3.465.083.000,00	86,00%	12.277.389.750,00	DISHUB
1.15.19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya keamanan dalam berlalu lintas		60,00%	1.374.594.750,00	70,00%	3.021.632.800,00	80,00%	2.564.750.000,00	84,00%	763.364.170,00	86%	763.364.170,00	86,00%	8.487.705.890,00	DISHUB
1.15.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan pengoperasio- nalan kendaraan bermotor	30%	30,00%	375.466.000,00							40%	100.000.000,00	40,00%	475.466.000,00	DISHUB
1.15.22	Program Pengembangan Penerimaan Daerah	Meningkatnya penerimaan pelayanan jasa perhubungan	78%	78,00%	2.905.171.000,00	78,00%	3.227.529.940,00	78,50%	3.333.544.000,00	79,00%	3.110.187.400,00	79,50%	3.110.187.400,00	79,50%	15.686.619.740,00	DISHUB
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	%Berkembangnya komunikasi informasi dan media massa		40,00%	441.405.680,00	41,00%	781.485.740,00									DISHUB
1.25.16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	%Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi		40,00%	24.950.000,00	40,00%	87.795.250,00									DISHUB
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								6.339.280.650,00		6.865.795.000,00		6.965.795.000,00		20.170.870.650,00	DISKOMINFO
1	URUSAN WAJIB															DISKOMINFO
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															DISKOMINFO
1.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran						95,00%	70.252.800,00	95,00%	323.000.000,00	95,00%	323.000.000,00	95,00%	716.252.800,00	DISKOMINFO
1.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur						95,00%	122.252.950,00	95,00%	212.000.000,00	95,00%	212.000.000,00	95,00%	546.252.950,00	DISKOMINFO
1.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)								95,00%	10.000.000,00	95,00%	10.000.000,00	95,00%	20.000.000,00	DISKOMINFO
1.16.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	%Berkembangnya komunikasi informasi dan media massa						42,00%	831.316.150,00	43,00%	1.609.811.900,00	44,00%	1.609.811.900,00	44,00%	4.050.939.950,00	DISKOMINFO
1.16.16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	%Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi						41,00%	135.860.750,00	42,00%	112.137.000,00	43,00%	112.137.000,00	43,00%	360.134.750,00	DISKOMINFO
1.16.17	Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Fasilitas SDM Komunikasi dan Informatika								90,00%	275.025.050,00	93,00%	275.025.050,00	93,00%	550.050.100,00	DISKOMINFO
1.16.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Terpenuhinya Informasi tentang arah dan tujuan pembangunan melalui program-program pembangunan								90,00%	360.026.050,00	93,00%	360.026.050,00	93,00%	720.052.100,00	DISKOMINFO
1.20.40	Program Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah(%)						90,00%	487.148.000,00					90,00%	487.148.000,00	DISKOMINFO
1.16.41	Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Data Elektronik	Meningkatnya efektifitas pelayanan pemanfaatan jaringan data elektronik						90,00%	4.692.450.000,00	90,00%	3.963.795.000,00	95,00%	3.963.795.000,00	95,00%	12.620.040.000,00	DISKOMINFO

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	URUSAN WAJIB															DISKOMINFO
1.20	STATISTIK															DISKOMINFO
1.20.xx	Program Pengelolaan Data dan Statistik	% Tersedianya data dan statistik sektoral di lingkup Pemerintahan Kota Kediri										70,00%	100.000.000,00	70,00%	100.000.000,00	
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA				8.958.431.501,00		9.914.094.841,00		10.987.553.700,00		7.895.500.000,00		8.095.500.000,00		45.851.080.042,00	DINKOPUMTK
1	URUSAN WAJIB															DINKOPUMTK
1.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															DINKOPUMTK
1.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	501.000.282,00	92,00%	568.649.982,00	94,00%	670.500.000,00	96,00%	888.686.945,00	98,00%	892.786.945,00	98,00%	3.521.624.154,00	DINKOPUMTK
1.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	1.203.742.332,00	92,00%	136.977.358,00	94,00%	568.000.000,00	96,00%	232.139.355,00	98,00%	256.639.355,00	98,00%	2.397.498.400,00	DINKOPUMTK
1.17.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% Meningkatnya disiplin aparatur	85%	90,00%	35.000.000,00			94,00%	35.000.000,00	98,00%	20.000.000,00	98,00%	21.400.000,00	98,00%	111.400.000,00	DINKOPUMTK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	14.580.000,00	92,00%	12.202.000,00	94,00%	16.500.000,00	96,00%	15.620.000,00	98,00%	15.620.000,00	98,00%	74.522.000,00	DINKOPUMTK
1.15.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	Jumlah UKM Aktif	29.369	31.378 UMKM	1.470.388.500,00	32.377 UMKM	3.888.334.000,00	5.700 UMKM	750.000.000,00	4.553 UM	100.000.000,00			5.700 UMKM	6.208.722.500,00	DINKOPUMTK
1.15.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM Berkualitas		178 UMKM	2.325.555.600,00	178 UMKM	2.633.839.987,00	185 UMKM	2.225.000.000,00	175 UM	1.141.053.700,00			185 UMKM	8.325.449.287,00	DINKOPUMTK
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	% UMKM yang mengakses penyertaan modal		70,00%	997.900.587,00	75,02%	1.171.311.514,00	78,57%	465.000.000,00	84,00%	1.297.500.000,00			78,57%	3.931.712.101,00	DINKOPUMTK
1.17.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	% koperasi aktif		61,00%	1.602.234.000,00	65,54%	1.502.780.000,00	75,00%	1.697.500.000,00	75,00%	1.382.500.000,00			75,00%	6.185.014.000,00	DINKOPUMTK
		% koperasi berkualitas						61,47%						61,47%		
		jumlah koperasi sehat		129		169										
		% koperasi sehat						61,47%		65,00%						
		% kualitas kelembagaan dan usaha koperasi										75,00%	1.357.500.000,00		1.357.500.000,00	
1.15.19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	% pelatihan tenaga kerja di lingkungan IHT yang mendapat		85,00%	808.030.200,00											DINKOPUMTK
1.17.20	Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya										6,00%	686.053.700,00	6,00%	686.053.700,00	DINKOPUMTK
1.17.21	Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Konduksif Bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dibina											100.000.000,00		100.000.000,00	DINKOPUMTK
		Jumlah Wirausaha Baru										400 WUB		400 WUB		
1.17.22	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro	Jumlah Kop dan UM yang mengakses permodalan											481.500.000,00		481.500.000,00	DINKOPUMTK
		% penerima manfaat perkuatan permodalan										77,00%				
1	URUSAN WAJIB															DINKOPUMTK
1.07	TENAGA KERJA															DINKOPUMTK
1.07.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	% tenaga kerja yang mendapat pelatihan	75%					82,00%	124.000.000,00						124.000.000,00	DINKOPUMTK
1.07.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	79%					83,00%	1.682.230.250,00	85,00%	640.230.250,00		640.230.250,00		2.962.690.750,00	DINKOPUMTK
		Meningkatkan persentase penyelesaian perselisihan						38,00%		40,00%						
		% Perusahaan yang Menerapkan Aturan Ketenagakerjaan										80,00%				
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	TPT %	8%					7,00%	118.000.000,00					7,00%	118.000.000,00	DINKOPUMTK
1.22.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Menguatnya kelembagaan ekonomi masyarakat	78%					85,00%	191.053.700,00					85,00%	191.053.700,00	DINKOPUMTK
2.08.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	meningkatnya % transmigrasi yang ditempatkan						65,00%	225.000.000,00					65,00%	225.000.000,00	DINKOPUMTK
1.07.18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketenagakerjaan	% pelatihan tenaga kerja di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan						80,00%	2.219.769.750,00	80,00%	2.177.769.750,00	50,00%	3.643.769.750,00	50,00%	8.041.309.250,00	DINKOPUMTK
		% angkatan kerja yang ditempatkan										50,00%				
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			89,20%	4.903.326.301,00	94,47%	6.300.726.354,00		3.810.000.000,00		2.965.209.000,00		3.222.720.000,00		21.080.481.655,00	DPMPPTSP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	URUSAN WAJIB															
1.18	PENANAMAN MODAL												3.222.720.000,00		21.080.481.655,00	DPMPTSP
1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	77,86%	883.345.749,00	91,00%	1.160.655.061,00	94,00%	1.046.260.000,00	94,00%	1.165.273.060,00	94,00%	1.223.537.000,00	94,00%	5.527.170.870,00	DPMPTSP
1.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	88,49%	375.269.752,00	92,45%	528.483.970,00	94,00%	319.950.000,00	94,00%	170.946.000,00	94,00%	256.146.000,00	94,00%	1.663.795.722,00	DPMPTSP
1.18.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% Meningkatnya disiplin aparatur	85%	88,04%	65.897.900,00	99,28%	74.312.000,00	99,28%	38.100.000,00	99,28%	500.000,00	99,28%	36.750.000,00	99,28%	214.209.900,00	DPMPTSP
1.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	88,80%	113.591.500,00	97,66%	42.521.000,00	97,66%	41.191.300,00	97,66%	10.755.440,00	97,66%	10.755.000,00	97,66%	218.814.240,00	DPMPTSP
1.18.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentase peningkatan nilai investasi	-54%	90,18%	1.564.425.400,00	97,66%	2.726.086.453,00	97,66%	1.147.845.000,00	97,66%	660.944.500,00	97,66%	700.504.000,00	97,66%	6.668.305.353,00	DPMPTSP
1.18.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	6 investor	8 investor	1.900.796.000,00	8 investor	1.768.667.870,00	10 investor	1.216.653.700,00	10 investor	867.640.000,00	12 investor	709.723.000,00	12 investor	6.413.730.570,00	DPMPTSP
1.18.17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Persentase implementasi kajian potensi sumber daya investasi								90,00%	89.150.000,00	90,00%	98.065.000,00	90,00%	187.215.000,00	DPMPTSP
1.18.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	%pemanfaatan teknologi informasi bidang perijinan										95,00%	187.240.000,00	95,00%	187.240.000,00	DPMPTSP
	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				9.206.672.887,00		12.037.087.648,00		9.300.000.000,00		8.603.350.000,00		9.463.685.000,00		48.610.795.535,00	DISBUDPARPORA
1	URUSAN WAJIB															DISBUDPARPORA
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA															DISBUDPARPORA
1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	1.355.772.693,00	92,00%	1.567.651.352,00	94,00%	1.562.650.000,00	98,00%	1.743.850.000,00	98,58%	1.918.235.000,00	98,58%	8.148.159.045,00	DISBUDPARPORA
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	348.394.794,00	92,00%	347.642.196,00	94,00%	171.350.000,00	96,00%	96.000.000,00	98,73%	105.600.000,00	98,73%	1.068.986.990,00	DISBUDPARPORA
1.19.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	%Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	60%	85,00%	947.049.900,00	88,00%	998.858.500,00	90,00%	566.000.000,00	95,00%	1.173.650.000,00	99,00%	1.291.015.000,00	99,00%	4.976.573.400,00	DISBUDPARPORA
1.19.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	%Meningkatnya prestasi olahraga	60%	97,00%	984.397.500,00	97,80%	922.165.000,00	98,00%	1.040.000.000,00	99,00%	900.000.000,00	100,00%	990.000.000,00	100,00%	4.836.562.500,00	DISBUDPARPORA
1.18.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	%Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga	60%	86,00%	8.182.000,00	87,00%	143.870.000,00	88,00%	50.000.000,00			88,00%		202.052.000,00	DISBUDPARPORA	
1.22	KEBUDAYAAN															DISBUDPARPORA
1.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Berkembangnya seni dan budaya daerah (%)	85%	85,00%	286.940.000,00			90,00%	410.000.000,00					90,00%	696.940.000,00	DISBUDPARPORA
1.22.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	85%	85,00%	2.669.403.500,00	88,00%	2.422.140.100,00	90,00%	1.395.000.000,00	94,00%	860.000.000,00	96,00%	946.000.000,00	96,00%	8.292.543.600,00	DISBUDPARPORA
1.22.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpeliharanya kekayaan budaya dan berkembangnya pariwisata budaya (%)	80%	85,00%	775.000.000,00	86,00%	3.332.590.000,00		1.322.063.000,00	88,00%	1.575.000.000,00	90,00%	1.732.500.000,00	90,00%	8.737.153.000,00	DISBUDPARPORA
1.22.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	70%	75,00%	399.910.000,00	80,00%	548.860.000,00	82,00%	727.937.000,00	86,00%	700.000.000,00	90,00%	770.000.000,00	90,00%	3.146.707.000,00	DISBUDPARPORA
2	URUSAN PILIHAN															DISBUDPARPORA
2.02	PARIWISATA															DISBUDPARPORA
2.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan	91.571	102.000	743.803.500,00	107.000	1.178.490.000,00	112.000	455.000.000,00	117.000	1.150.000.000,00	122.000	1.265.000.000,00	122.000	4.792.293.500,00	DISBUDPARPORA
2.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya potensi obyek wisata (%)	75%	80,00%	597.819.000,00	83,00%	395.320.500,00	86,00%	1.550.000.000,00	88,00%	219.600.000,00	90,00%	241.560.000,00	90,00%	3.004.299.500,00	DISBUDPARPORA
2.02.17	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata (%)	70%	75,00%	90.000.000,00	78,00%	179.500.000,00	80,00%	50.000.000,00	82,00%	185.250.000,00	83,00%	203.775.000,00	83,00%	708.525.000,00	DISBUDPARPORA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				1.506.019.350,00		1.693.574.030,00		2.060.000.000,00		2.216.500.000,00		2.416.500.000,00		9.892.593.380,00	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
	URUSAN WAJIB															DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.23	PERPUSTAKAAN															DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	335.673.276,00	92,00%	427.280.111,00									DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	586.738.274,00	92,00%	345.288.919,00									DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.26.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	8.314.000,00	92,00%	10.000.000,00									DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.23.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	65%	70,00%	430.693.300,00	75,00%	768.155.000,00	80,00%	885.000.000,00	85,00%	825.000.000,00	90,00%	825.000.000,00	90,00%	3.733.848.300,00	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.24	KEARSIPAN															DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%					94,00%	453.000.000,00	96,00%	590.845.000,00	98,00%	590.845.000,00	98,00%	1.634.690.000,00	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.24.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%					94,00%	237.000.000,00	96,00%	370.655.000,00	98,00%	370.655.000,00	98,00%	978.310.000,00	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.24.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%					94,00%	10.000.000,00	96,00%	15.000.000,00	98,00%	15.000.000,00	98,00%	40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.24.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	% SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan	65%					75,00%	110.000.000,00	78,00%	125.000.000,00	80,00%	125.000.000,00	80,00%	360.000.000,00	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.24 . 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentasi SKPD yang menerapkan penyelamatan dan pelestarian arsip sesuai ketentuan	65%	70,00%	57.450.000,00	73,00%	27.850.000,00	75,00%	190.000.000,00	78,00%	215.000.000,00	80,00%	215.000.000,00	80,00%	705.300.000,00	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.24.17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana kearsipan	70%	75,00%	6.000.000,00	77,00%	15.000.000,00	80,00%	15.000.000,00	85,00%	35.000.000,00	90,00%	35.000.000,00	90,00%	106.000.000,00	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.24.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase SKPD yang menerapkan penyimpanan dan pengelolaan Arsip secara Baku	65%	70,00%	81.150.500,00	73,00%	100.000.000,00	75,00%	160.000.000,00	78,00%	40.000.000,00	80,00%	40.000.000,00	80,00%	421.150.500,00	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
1.24.XX	Program Pengembangan Kearsipan	%Peningkatan Penataan Kearsipan										80,00%	200.000.000,00	80,00%	200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				4.185.021.828,00		8.194.604.961,00		6.402.282.000,00		4.234.700.000,00		4.953.744.340,00		27.970.353.129,00	DISPERDAGIN
2	URUSAN PILIHAN															DISPERDAGIN
2.06	PERDAGANGAN												3.658.744.340,00			DISPERDAGIN
2.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%					94,00%	595.820.000,00	96,00%	679.949.400,00	98,00%	747.944.340,00	98,00%	2.023.713.740,00	DISPERDAGIN
2.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%					94,00%	212.351.000,00	96,00%	301.000.000,00	98,00%	342.300.000,00	98,00%	855.651.000,00	DISPERDAGIN
2.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%					94,00%	12.100.000,00	0,00%	13.000.000,00	98,00%	23.500.000,00	98,00%	48.600.000,00	DISPERDAGIN
2.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase Penurunan Pelanggaran Perdagangan	90%	86,00%	169.500.000,00	66,67%	206.350.000,00	50,00%	695.500.000,00	45,00%	814.700.000,00	40,00%	925.000.000,00	40,00%	2.701.050.001,00	DISPERDAGIN
2.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Perdagangan (juta US \$)								246	45.000.000,00	275	100.000.000,00	275	145.000.000,00	DISPERDAGIN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya promosi dan jaringan pemasaran produk IKM (%)	70%	75,00%	2.197.711.750,00	81,25%	4.133.635.879,00	87,50%	2.840.511.000,00	93,75%	1.647.050.600,00	100,00%	1.375.000.000,00	100,00%	12.193.949.229,00	DISPERDAGIN
2.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	% penataan PKL	30%	89,67%	83.800.000,00	77,70%	139.855.000,00	97,83%	227.000.000,00	105,98%	45.000.000,00	114,13%	100.000.000,00	114,13%	595.655.000,00	DISPERDAGIN
2.06.20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Perdagangan	% IKM dan Pelaku Usaha yang terbina										25,00%	45.000.000,00	25,00%	45.000.000,00	DISPERDAGIN
2.07	PERINDUSTRIAN												1.295.000.000,00		6.462.157.065,00	DISPERDAGIN
2.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	427.825.773,00	92,00%	603.918.672,00									DISPERDAGIN
2.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	258.613.580,00	92,00%	552.928.500,00									DISPERDAGIN
2.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	9.977.500,00	92,00%	8.461.500,00									DISPERDAGIN
2.07.15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Prosentase IKM yang memenuhi standart	35%	27,00%	250.140.000,00	29,00%	1.168.632.500,00	31,00%	330.000.000,00	33,00%	85.000.000,00	35,00%	500.000.000,00	35,00%	2.333.772.500,00	DISPERDAGIN
2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase peningkatan status IKM	20%	0,95%	197.765.000,00	0,99%	203.687.500,00	1,04%	460.000.000,00	1,08%	175.000.000,00	1,17%	175.000.000,00	1,17%	1.211.452.500,00	DISPERDAGIN
2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Prosentase IKM yang menggunakan TTG	41%	41,00%	45.000.000,00	42,00%	202.430.000,00	43,00%	430.000.000,00	44,00%	75.000.000,00	45,00%	200.000.000,00	45,00%	952.430.000,00	DISPERDAGIN
2.07.18	Program Penataan Struktur Industri	Prosentase peningkatan industri kreatif	60%	25,33%	57.528.975,00	31,91%	476.818.090,00	32,26%	274.000.000,00	32,32%	225.000.000,00	33,18%	250.000.000,00	33,18%	1.283.347.065,00	DISPERDAGIN
2.07.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Sentra industri potensial	27	30	27.045.000,00	32	30.110.000,00	33	35.000.000,00	34	129.000.000,00	35	170.000.000,00	35	391.155.000,00	DISPERDAGIN
1.22.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80%					87,00%	290.000.000,00					87,00%	290.000.000,00	DISPERDAGIN
2.07.xx	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Perindustrian	%terbinanya lingkungan sosial lingkup perindustrian									80,00%	525.000.000,00		525.000.000,00		DISPERDAGIN
2.03	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL															DISPERDAGIN
2.03.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Meningkatnya alih profesi penambang (%)	21%	28,00%	172.996.500,00	36,00%	10.000.000,00									DISPERDAGIN
2.03.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Meningkatnya kesadaran masyarakat pengguna ketenagalistrikan (%)	7%	14,00%	19.373.100,00	28,00%	4.550.000,00									DISPERDAGIN
2.03.18	Program Pembinaan,Pengembangan Dan Pengawasan Bidang Energi	Meningkatnya kelancaran distribusi energi (%)	10%	16,00%	70.020.500,00	32,00%	39.542.820,00									DISPERDAGIN
2.03.20	Program Pembinaan dan Pengendalian Bidang Air Bawah Tanah	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perijinan air bawah tanah (%)	30%	40,00%	197.724.150,00	50,00%	413.644.500,00									DISPERDAGIN
	BAGIAN PEMERINTAHAN				1.265.073.416,00		1.431.386.889,00		4.049.800.000,00		4.028.480.000,00		4.028.480.000,00		14.803.220.305,00	BAG. PEMERINTAHAN
3	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN KESEKRETARIATAN DAERAH															BAG. PEMERINTAHAN
3.03	KESEKRETARIATAN DAERAH															BAG. PEMERINTAHAN
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	8.310.000,00	92,00%	15.200.000,00									BAG. PEMERINTAHAN
3.03. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%					94,00%	102.000.000,00	96,00%	6.500.000,00	96,00%	6.500.000,00	96,00%	115.000.000,00	BAG. PEMERINTAHAN
3.03.08	Program Pembinaan Administrasi Kecamatan/ Kelurahan	% terlaksananya pembinaan aparatur pemerintahan kelurahan	80%	85,00%	54.378.000,00	90,00%	96.849.000,00	95,00%	170.000.000,00	98,00%	140.000.000,00	99,00%	140.000.000,00	99,00%	601.227.000,00	BAG. PEMERINTAHAN
1.20 . 09	Program Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Tersusunnya data base administrasi pemerintahan kelurahan (%)	0	25,00%	28.867.250,00	40,00%	80.839.000,00									BAG. PEMERINTAHAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.20.19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase terlaksananya peningkatan kesejahteraan perangkat kelurahan Non PNS	90%	90,00%	542.013.000,00											BAG. PEMERINTAHAN
3.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	% terpenuhinya cakupan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH	88%	89,00%	159.827.067,00	90,00%	221.675.989,00	92,00%	185.000.000,00	94,00%	450.000.000,00	96,00%	450.000.000,00	96,00%	1.466.503.056,00	BAG. PEMERINTAHAN
3.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	%meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah		70,00%	132.512.000,00	70,00%	141.495.000,00	72,00%	150.000.000,00	74,00%	333.000.000,00	75,00%	333.000.000,00	75,00%	1.090.007.000,00	BAG. PEMERINTAHAN
3.03.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	% terlaksananya monitoring tugu batas wilayah kota kediri dengan kabupaten kediri yang akurat		85,00%	204.840.099,00	90,00%	178.634.700,00	95,00%	260.000.000,00	100,00%	325.000.000,00	100,00%	325.000.000,00	100,00%	1.293.474.799,00	BAG. PEMERINTAHAN
3.03.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% terwujudnya peningkatan kinerja aparaturnya Pemerintah Kecamatan		85,00%	965.000,00	90,00%	1.040.000,00	95,00%	52.000.000,00	98,00%	5.000.000,00	99,00%	55.000.000,00	99,00%	114.005.000,00	BAG. PEMERINTAHAN
3.03.43	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	% Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Kelurahan Non PNS				94,00%	493.669.200,00	96,00%	550.000.000,00	98,00%	460.000.000,00	98,00%	460.000.000,00	98,00%	1.963.669.200,00	BAG. PEMERINTAHAN
1.09.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya sertifikasi tanah Pemkot (%)	80%	80,00%	133.361.000,00	82,00%	201.984.000,00	84,00%	70.000.000,00					84,00%	405.345.000,00	BAG. PEMERINTAHAN
1	URUSAN WAJIB															BAG. PEMERINTAHAN
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															BAG. PEMERINTAHAN
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan	85%					92,00%	1.768.800.000,00	96,00%	1.449.480.000,00	96,00%	1.449.480.000,00	96,00%	4.667.760.000,00	BAG. PEMERINTAHAN
1.13.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80%					87,00%	308.000.000,00	90,00%	144.500.000,00	92,00%	300.000.000,00	92,00%	752.500.000,00	BAG. PEMERINTAHAN
1.13.66	Program Fasilitas Produmas	Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS)						84,00%	434.000.000,00	89,00%	715.000.000,00	91,00%	750.000.000,00	91,00%	1.899.000.000,00	BAG. PEMERINTAHAN
	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				3.596.615.282,00		3.196.616.615,00									
1.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90%	208.473.152,00		291.148.109,00									
1.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparaturnya	85%	90%	297.207.550,00		208.586.406,00									
1.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan	85%	87%	1.104.710.350,00		1.526.753.400,00									
1.22.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Menguatnya kelembagaan ekonomi masyarakat	78%	80%	87.265.930,00		175.225.000,00									
1.22.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun	80%	85%	451.466.000,00		485.657.200,00									
1.22.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	80%	85%	68.927.500,00		72.850.000,00									
1.22.66	Program Fasilitas Produmas	Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS)		85%	1.378.564.800,00		436.396.500,00									
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				5.018.691.935,00		8.491.795.643,00		6.788.905.300,00		6.750.000.000,00		6.918.750.000,00		7.120.243.218,76	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
3.03	KESEKRETARIATAN DAERAH															BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	22.046.000,00	92,00%	55.650.000,00									BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
3.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparaturnya	85%	90,00%	208.925.000,00	92,00%	769.760.500,00	94,00%	726.176.000,00	96,00%	125.182.950,00	98,00%	128.312.523,75	98,00%	131.520.336,84	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur (%)	85%	90,00%	34.300.000,00	92,00%	20.170.000,00	94,00%	42.550.000,00	96,00%	27.150.000,00	98,00%	27.828.750,00	98,00%	28.524.468,75	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
1.20. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	90%	95,00%	75.000.000,00	96,00%	143.384.000,00	94,00%	67.950.000,00					94,00%	28.524.468,75	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
3.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan dan protokol kesekretariatan, KDH dan Wakil KDH	85%	87,00%	101.604.500,00	88,00%	254.696.500,00	90,00%	256.262.000,00	92,00%	460.984.250,00	95,00%	472.508.856,25	95,00%	484.321.577,66	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
3.03.39	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Tersebarluasnya informasi peraturan/UU di bidang cukai	90%	90,00%	555.000.000,00	92,00%	1.532.850.000,00	93,00%	799.691.750,00	92,00%	802.135.000,00	96,00%	822.188.375,00	96,00%	842.743.084,38	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
3.03.40	Program Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah(%)	85%	81,00%	4.021.816.435,00	83,00%	5.715.284.643,00	84,00%	4.896.275.550,00	86,00%	5.334.547.800,00	89,00%	5.467.911.495,00	89,00%	5.604.609.282,38	BAG. HUMAS DAN PROTOKOL
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				5.123.769.500,00		7.560.491.500,00		6.300.000.000,00		5.965.000.000,00		6.005.000.000,00		30.954.261.000,00	BAG. KESRA
3.03	KESEKRETARIATAN DAERAH															BAG. KESRA
3.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%							80,00%	20.500.000,00	84,00%	60.500.000,00	84,00%	81.000.000,00	BAG. KESRA
3.03.33	Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi dan Harmonisasi Sosial Kemasyarakatan	% Penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi Pemerintah Kota Kediri	80%	82,00%	5.123.769.500,00	84,00%	7.560.491.500,00	86,00%	6.300.000.000,00	88,00%	5.944.500.000,00	90,00%	5.944.500.000,00	90,00%	30.873.261.000,00	BAG. KESRA
	BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN				1.106.319.653,00		1.200.224.760,00		1.677.185.500,00		1.543.340.000,00		1.745.964.000,00		7.273.033.913,00	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
3.03	KESEKRETARIATAN DAERAH															BAG. ADM. PEMBANGUNAN
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	86,62%	13.600.000,00	95,90%	59.940.000,00					96,00%	48.290.000,00	96,00%	121.830.000,00	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
3.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Penyerapan Anggaran Belanja Langsung yang Berkualitas	85%	73,03%	142.434.600,00	83,54%	105.953.600,00	94,00%	173.193.000,00	80,00%	154.391.000,00	90,00%	169.830.100,00	90,00%	745.802.300,00	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
3.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Penyusunan RKA dan DPA yang sesuai dengan HSPBJ	90%	89,21%	329.603.700,00	79,56%	348.708.550,00	91,00%	425.530.000,00	95,00%	323.104.000,00	97,00%	355.414.400,00	97,00%	1.782.360.650,00	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
3.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan sistem evaluasi di bidang pembangunan daerah	74%	90,05%	463.459.951,00	90,54%	515.551.610,00	90,00%	885.432.500,00	90,00%	863.879.000,00	92,00%	950.266.900,00	92,00%	3.678.589.961,00	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
3.03.36	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Rasio Jumlah Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Jalan dengan Hasil Kerja yang baik	80%	90,20%	157.221.402,00	93,28%	170.071.000,00	92,00%	193.030.000,00	85,00%	201.966.000,00	95,00%	222.162.600,00	95,00%	944.451.002,00	BAG. ADM. PEMBANGUNAN
	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN				6.142.788.950,00		5.389.997.350,00		1.305.000.000,00		1.365.000.000,00		1.365.000.000,00		15.567.786.300,00	BAG. ADM. PEREKONOMIAN
3.03	KESEKRETARIATAN DAERAH															BAG. ADM. PEREKONOMIAN
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	87,63%	133.200.000,00							100,00%	60.000.000,00	100,00%	193.200.000,00	BAG. ADM. PEREKONOMIAN
3.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	% SKPD yang patuh thdp ketentuan dan peraturan di bidang Bea Cukai	80%	85,00%	138.010.000,00	87,00%	145.765.000,00	90,00%	180.000.000,00	92,00%	165.000.000,00	95,00%	180.000.000,00	95,00%	808.775.000,00	BAG. ADM. PEREKONOMIAN
3.03.32	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah pemberdayaan masyarakat sebagai informan peredaran cukai	80%	82,00%	226.710.000,00	85,00%	497.388.550,00	90,00%	750.000.000,00	95,00%	650.000.000,00	99,00%	750.000.000,00	99,00%	2.874.098.550,00	BAG. ADM. PEREKONOMIAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.03.35	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	% meningkatnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan perekonomian daerah	60%	70,00%	5.644.868.950,00	75,00%	4.746.843.800,00	80,00%	375.000.000,00	85,00%	550.000.000,00	95,00%	375.000.000,00	95,00%	11.691.712.750,00	BAG. ADM. PEREKONOMIAN
3.03.XX	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	Peningkatan Kinerja BUMD										75,00%	250.000.000,00	75,00%	250.000.000,00	BAG. ADM. PEREKONOMIAN
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								748.037.500,00		840.000.000,00		840.000.000,00		2.428.037.500,00	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.03	KESEKRETARIATAN DAERAH															BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur										95,00%	40.100.000,00	95,00%	40.100.000,00	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)						90,00%	75.084.000,00	92,00%	199.900.000,00	93,00%	199.900.000,00	93,00%	474.884.000,00	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	meningkatnya fasilitasi pelaksanaan kinerja ULP						90,00%	672.953.500,00	92,00%	640.100.000,00	93,00%	600.000.000,00	93,00%	1.913.053.500,00	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
	BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK				2.101.365.468,00		6.519.639.397,00									
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,44%	195.719.000,00											
1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan sistem evaluasi di bidang pembangunan daerah		89,95%	503.928.523,00											
1.20.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)		90,08%	265.573.900,00											
1.20.41	Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Data Elektronik	Meningkatnya efektifitas pelayanan pemanfaatan jaringan data elektronik	80%	18,95%	1.136.144.045,00	79,60%	6.519.639.397,00									
	BAGIAN HUKUM				1.602.628.012,00		2.047.828.397,00		2.635.383.940,00		2.282.278.000,00		2.432.278.000,00		11.000.396.349,00	BAG. HUKUM
3.03	KESEKRETARIATAN DAERAH															BAG. HUKUM
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	85,00%	39.700.000,00	87,00%	19.800.000,00	88,00%	32.000.000,00			90,00%	150.000.000,00	90,00%	241.500.000,00	BAG. HUKUM
3.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% Aparatur yang mengikuti sosialisasi dan BinteK implementasi Perundang-undangan	70%	75,00%	230.885.500,00	80,00%	295.211.820,00	85,00%	386.483.200,00	90,00%	406.763.200,00	95,00%	406.763.200,00	95,00%	1.726.106.920,00	BAG. HUKUM
3.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kasus hukum yang ditindaklanjuti	4 kasus	50,00%	388.927.270,00	60,00%	557.110.740,00	65,00%	772.100.500,00	70,00%	720.500.000,00	72,00%	720.500.000,00	72,00%	3.159.138.510,00	BAG. HUKUM
3.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase produk hukum daerah yang ditetapkan	44%	80,00%	943.115.242,00	85,00%	1.175.705.837,00	90,00%	1.444.800.240,00	95,00%	1.155.014.800,00	97,00%	1.155.014.800,00	97,00%	5.873.650.919,00	BAG. HUKUM
	BAGIAN ORGANISASI				1.454.141.500,00		1.709.834.550,00		1.545.000.000,00		840.000.000,00		1.251.621.760,00		6.800.597.810,00	BAG. ORGANISASI
3.03	KESEKRETARIATAN DAERAH															BAG. ORGANISASI
3.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	27.300.000,00	92,00%	29.500.000,00					98,00%	20.000.000,00	98,00%	76.800.000,00	BAG. ORGANISASI
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya kelengkapan fasilitas pegawai	85%	90,00%	198.173.000,00			94,00%	220.000.000,00					94,00%	418.173.000,00	BAG. ORGANISASI
1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	% terpenuhinya cakupan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH						94,00%	100.000.000,00					94,00%	100.000.000,00	BAG. ORGANISASI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	180.695.000,00	92,00%	298.032.270,00	94,00%	375.000.000,00	96,00%	300.000.000,00	98,00%	300.000.000,00	98,00%	1.453.727.270,00	BAG. ORGANISASI
3.03.07	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	% SKPD telah dilakukan ANJAB dan ketatalaksanaannya	60%	70,00%	1.047.973.500,00	92,00%	1.382.302.280,00	94,00%	850.000.000,00	96,00%	540.000.000,00	98,00%	931.621.760,00	98,00%	4.751.897.540,00	BAG. ORGANISASI
	BAGIAN UMUM				13.975.614.689,00		15.977.338.865,00		18.849.096.800,00		18.154.110.000,00		18.154.110.000,00		85.110.270.354,00	BAG. UMUM
3.03	KESEKRETARIATAN DAERAH															BAG. UMUM
3.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	84,13%	7.942.230.742,00	90,14%	9.979.756.108,00	94,00%	7.111.779.300,00	96,00%	7.139.170.000,00	98,00%	7.139.170.000,00	98,00%	39.312.106.150,00	BAG. UMUM
3.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	87,59%	3.829.870.173,00	69,97%	2.672.848.492,00	94,00%	3.547.467.500,00	96,00%	1.970.000.000,00	98,00%	1.970.000.000,00	98,00%	13.990.186.165,00	BAG. UMUM
3.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase ketersediaan kebutuhan Disiplin Aparatur	85%	96,05%	163.085.000,00	87,37%	146.345.000,00	94,00%	187.325.000,00	96,00%	172.125.000,00	98,00%	172.125.000,00	98,00%	841.005.000,00	BAG. UMUM
3.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)								98,00%	36.265.000,00	99,00%	36.265.000,00	99,00%	72.530.000,00	BAG. UMUM
3.03.10	Program Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						97,00%	3.278.375.000,00	98,00%	3.908.150.000,00	99,00%	3.908.150.000,00	99,00%	11.094.675.000,00	BAG. UMUM
3.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Prosentase ketersediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	90%	67,42%	2.040.428.774,00	78,96%	3.178.389.265,00	90,00%	4.724.150.000,00	92,00%	4.928.400.000,00	95,00%	4.928.400.000,00	95,00%	19.799.768.039,00	BAG. UMUM
	SEKRETARIAT DPRD				17.918.696.614,00		28.275.297.614,00		33.500.000.000,00		36.500.000.000,00		47.000.000.000,00		156.619.701.282,27	SEKRETARIAT DPRD
3.04	KESEKRETARIATAN DPRD															SEKRETARIAT DPRD
3.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	2.537.399.944,00	92,00%	2.866.646.104,00	94,00%	3.017.614.500,00	96,00%	3.908.084.500,00	98,00%	3.987.259.500,00	98,00%	11.151.293.501,00	SEKRETARIAT DPRD
3.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	593.258.734,00	92,00%	974.477.405,00	94,00%	950.302.750,00	96,00%	761.802.750,00	98,00%	1.664.027.750,00	98,00%	3.683.884.641,27	SEKRETARIAT DPRD
3.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas	85%	90,00%	191.775.000,00	92,00%	246.873.000,00	94,00%	301.344.000,00	96,00%	296.994.000,00	98,00%	315.594.000,00	98,00%	1.352.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD
3.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%Aparatur yang telah mengikuti bimbingan teknis	0%			80,00%	229.844.170,00	85,00%	182.950.000,00	85,00%	179.950.000,00	90,00%	179.950.000,00	90,00%	772.694.170,00	SEKRETARIAT DPRD
3.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya perda yang ditetapkan (%)	70%	100,00%	14.447.665.785,00	100,00%	23.957.456.935,00	84,00%	29.047.788.750,00	90,00%	31.353.168.750,00	90,00%	40.853.168.750,00	90,00%	139.659.248.970,00	SEKRETARIAT DPRD
1.20.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)		88,53%	148.597.151,00											SEKRETARIAT DPRD
	INSPEKTORAT				2.418.526.994,00		3.083.216.337,00		3.624.978.100,00		3.136.100.000,00		3.136.100.000,00		12.980.394.437,00	INSPEKTORAT
3.05	PENGAWASAN															INSPEKTORAT
3.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	336.220.781,00	92,00%	428.165.753,00	94,00%	368.059.000,00	98,00%	441.309.000,00	98,00%	441.309.000,00	98,00%	1.678.842.753,00	INSPEKTORAT
3.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	277.767.833,00	92,00%	527.702.351,00	94,00%	457.000.000,00	90,00%	193.539.000,00	90,00%	193.539.000,00	90,00%	1.371.780.351,00	INSPEKTORAT
3.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a. Prosentase tersusunnya laporan AKIP yang tepat waktu	85%	90,00%	5.188.600,00	92,00%	5.053.800,00	94,00%	9.248.200,00	100,00%	14.844.000,00	100,00%	14.844.000,00	100,00%	43.990.000,00	INSPEKTORAT
3.05. 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	% OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal B	90%	90,00%	1.297.071.180,00	92,00%	1.583.710.066,00	87,50%	1.937.450.000,00	96,00%	1.963.273.600,00	96,00%	1.963.273.600,00	96,00%	7.447.707.266,00	INSPEKTORAT
		Tingkat Maturitas SPIIP														
		% Penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan														
3.05.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	% peningkatan nilai AK (Angka Kredit) melalui pengembangan profesi		77,00%	295.953.400,00	86,00%	261.826.900,00	95,00%	585.970.900,00	95,00%	240.339.400,00	95,00%	240.339.400,00	95,00%	1.328.476.600,00	INSPEKTORAT

[illegible]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				6.953.352.389,00		8.121.249.146,00		15.185.304.515,00		14.335.304.515,00		15.652.880.466,50		60.248.091.031,50	BPPKAD
3.07	KEUANGAN															BPPKAD
3.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	90,00%	1.010.055.300,00	92,00%	1.303.147.640,00	100,00%	2.546.804.400,00	100,00%	2.650.938.515,00	100,00%	2.916.032.366,50	100,00%	10.426.978.221,50	BPPKAD
3.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	90,00%	690.205.385,00	92,00%	1.047.906.405,00	100,00%	1.672.067.790,00	100,00%	1.235.455.000,00	100,00%	1.359.000.500,00	100,00%	6.004.635.080,00	BPPKAD
3.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	90,00%	109.545.500,00	92,00%	150.486.500,00	100,00%	205.000.000,00	100,00%	205.000.000,00	100,00%	109.545.500,00	100,00%	779.577.500,00	BPPKAD
3.07.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	5.143.546.204,00	WDP	5.619.708.601,00	WTP	10.495.612.325,00	WTP	10.102.511.000,00	WTP	11.112.762.100,00	WTP	42.474.140.230,00	BPPKAD
3.07.42	Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah	Pengembangan dan pemeliharaan website						100,00%	133.000.000,00	100,00%	141.400.000,00	100,00%	155.540.000,00	100,00%	429.940.000,00	BPPKAD
	DINAS PENDAPATAN			79,01%	5.658.892.101,00	79,11%	7.473.700.975,00									
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	69,13%	819.408.533,00	76,09%	830.875.911,00									
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	80,10%	1.118.374.728,00	81,74%	1.991.409.017,00									
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	80%	57,83%	43.878.000,00	79,33%	15.865.000,00									
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)		78,29%	84.667.500,00	75,70%	67.596.000,00									
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan penerimaan PAD	100%	82,32%	3.549.123.340,00	78,16%	4.360.629.190,00									
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	%meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi		50,66%	43.440.000,00	90,10%	207.325.857,00									
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				6.877.981.587,00		9.543.227.527,00		6.683.500.000,00		5.164.554.500,00		5.621.185.890,00		33.890.449.504,00	BKPPD
3.08	KEPEGAWAIAN															BKPPD
3.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85%	93,01%	388.843.985,00	94,77%	585.560.044,00	96,00%	712.297.500,00	97,00%	813.029.400,00	98,00%	894.332.340,00	98,00%	3.394.063.269,95	BKPPD
3.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	75,37%	1.417.845.300,00	94,99%	858.976.159,00	95,20%	535.153.200,00	95,50%	256.510.000,00	95,70%	382.161.000,00	96,00%	1.816.382.661,76	BKPPD
3.08.04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Meningkatnya pelayanan pemindahan tugas dan fasilitas PNS purna tugas tepat waktu	90%	91,68%	418.913.300,00	86,95%	1.065.071.994,00	92,00%	883.713.000,00	94,00%	1.183.300.000,00	94,50%	1.258.400.000,00	95,00%	4.809.398.295,81	BKPPD
3.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85%	96,26%	40.891.500,00	95,97%	43.187.500,00	96,50%	49.646.000,00	97,00%	59.646.000,00	97,50%	65.610.600,00	98,00%	9.418.864.367,43	BKPPD
3.08.28	Program Pendidikan Kedinasan	Meningatnya kompetensi teknis dan profesionalitas aparatur	84%	71,87%	1.963.486.586,00	90,21%	2.471.772.354,00	91,07%	1.447.397.500,00	92,00%	894.667.800,00	93,00%	984.134.580,00	94,00%	7.472.893.622,70	BKPPD
3.08.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	90%	67,22%	884.665.466,00	80,97%	1.684.439.577,00	85,33%	787.322.500,00	91,17%	477.239.500,00	92,33%	524.963.450,00	94,00%	4.358.630.497,03	BKPPD
3.08.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan aparatur	88%	78,62%	1.763.335.450,00	63,00%	2.834.219.899,00	79,00%	2.267.970.300,00	80,00%	1.480.161.800,00	82,00%	297.486.420,00	82,00%	7.094.838.255,11	BKPPD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.08 .xx	Program Pengelolaan Sumber Daya ASN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ASN										95,00%	632.659.500,00	95,00%	632.659.500,00	BKPPD
3.08 .xx	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian										88,00%	581.438.000,00	90,00%	581.438.000,00	BKPPD
	KECAMATAN PESANTREN				1.685.699.875,00		2.416.179.468,00		2.642.467.000,00		2.249.617.000,00		2.294.617.000,00		11.288.580.343,00	KEC. PESANTREN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEC. PESANTREN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	94,00%	290.688.848,00	96,00%	368.785.868,00	100,00%	422.428.000,00	100,00%	487.428.000,00	100,00%	487.428.000,00	100,00%	2.056.758.716,00	KEC. PESANTREN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	119.460.377,00	100,00%	277.848.000,00	100,00%	449.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	175.000.000,00	100,00%	1.121.308.377,00	KEC. PESANTREN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	20.736.950,00	100,00%	8.599.000,00	100,00%	18.893.000,00	100,00%	22.000.000,00	100,00%	22.000.000,00	100,00%	92.228.950,00	KEC. PESANTREN
3.11.31	Program Peningkatan Pelayanan Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	70,00%	80,25%	196.115.500,00	78,42%	368.116.000,00	75,40%	258.256.000,00	100,00%	190.256.000,00	100,00%	190.256.000,00	100,00%	1.202.999.500,00	KEC. PESANTREN
3.11.34	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% meningkatnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		100,00%	1.058.698.200,00	100,00%	1.392.830.600,00	100,00%	1.493.890.000,00	100,00%	1.449.933.000,00	100,00%	1.419.933.000,00	100,00%	6.815.284.800,00	KEC. PESANTREN
	KELURAHAN BANGSAL				2.437.641.979,00		2.632.456.012,00		2.873.307.250,00		2.963.307.500,00		3.013.307.500,00		13.970.020.241,00	KEL. BANGSAL
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												432.347.500,00		2.011.810.820,00	KEL. BANGSAL
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	134.334.108,00	100,00%	150.668.212,00	100,00%	153.660.000,00	100,00%	163.742.500,00	100,00%	224.242.500,00	100,00%	826.647.320,00	KEL. BANGSAL
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	127.229.500,00	100,00%	121.927.000,00	100,00%	276.952.000,00	100,00%	168.700.000,00	100,00%	108.200.000,00	100,00%	803.008.500,00	KEL. BANGSAL
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%			100,00%	2.694.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.625.000,00	100,00%	2.625.000,00	100,00%	10.944.000,00	KEL. BANGSAL
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%			100,00%	95.106.000,00	100,00%	81.545.000,00	100,00%	97.280.000,00	100,00%	97.280.000,00	100,00%	371.211.000,00	KEL. BANGSAL
1	URUSAN WAJIB															KEL. BANGSAL
1.13	PEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												2.580.960.000,00		11.958.209.421,00	KEL. BANGSAL
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	350.064.300,00	100,00%	334.491.800,00	100,00%	344.500.250,00	100,00%	567.310.000,00	100,00%	567.310.000,00	100,00%	2.163.676.350,00	KEL. BANGSAL
1.13.20	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangsal	% Nilai fasilitasi yang terealisasi		100,00%	1.826.014.071,00	100,00%	1.927.569.000,00	100,00%	2.013.650.000,00	100,00%	1.963.650.000,00	100,00%	2.013.650.000,00	100,00%	9.794.533.071,00	KEL. BANGSAL
	KELURAHAN PAKUNDEN				2.495.778.968,00		2.894.485.615,00		3.119.693.000,00		3.152.193.000,00		3.152.193.000,00		14.814.343.583,00	KEL. PAKUNDEN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												468.693.000,00		2.041.446.983,00	KEL. PAKUNDEN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100%	124.597.913,00	100%	174.050.820,00	100,00%	228.227.500,00	100,00%	228.227.500,00	100,00%	228.227.500,00	100,00%	983.331.233,00	KEL. PAKUNDEN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	70.450.000,00	100,00%	149.997.250,00	100,00%	153.535.000,00	100,00%	119.035.000,00	100,00%	119.035.000,00	100,00%	612.052.250,00	KEL. PAKUNDEN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	7.000.000,00	100,00%	9.050.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	46.050.000,00	KEL. PAKUNDEN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	43.534.000,00	100,00%	41.388.000,00	100,00%	92.230.500,00	100,00%	111.430.500,00	100,00%	111.430.500,00	100,00%	400.013.500,00	KEL. PAKUNDEN
1	URUSAN WAJIB															KEL. PAKUNDEN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												2.683.500.000,00		12.772.896.600,00	KEL PAKUNDEN
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	244.521.000,00	100,00%	306.157.600,00	100,00%	331.500.000,00	100,00%	379.300.000,00	100,00%	379.300.000,00	100,00%	1.640.778.600,00	KEL PAKUNDEN
1.13.21	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakunden	% Nilai fasilitas yang terealisasi		100,00%	2.005.676.055,00	100,00%	2.213.841.945,00	100,00%	2.304.200.000,00	100,00%	2.304.200.000,00	100,00%	2.304.200.000,00	100,00%	11.132.118.000,00	KEL PAKUNDEN
	KELURAHAN TOSAREN				2.703.088.625,00		3.422.916.700,00		3.521.287.000,00		3.553.787.000,00		3.553.787.000,00		16.754.866.325,00	KEL TOSAREN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												448.087.000,00		2.403.188.875,00	KEL TOSAREN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	101.805.875,00	100,00%	213.145.500,00	100,00%	164.650.000,00	100,00%	196.450.000,00	100,00%	196.450.000,00	100,00%	872.501.375,00	KEL TOSAREN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	170.525.000,00	100,00%	115.710.000,00	100,00%	103.480.000,00	100,00%	49.937.000,00	100,00%	49.937.000,00	100,00%	489.589.000,00	KEL TOSAREN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%						6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	KEL TOSAREN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	108.134.500,00	100,00%	328.907.000,00	100,00%	194.657.000,00	100,00%	195.700.000,00	100,00%	195.700.000,00	100,00%	1.023.098.500,00	KEL TOSAREN
1	URUSAN WAJIB															KEL TOSAREN
1.13	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA											100,00%	3.105.700.000,00	100,00%	14.351.677.450,00	KEL TOSAREN
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	297.916.000,00	100,00%	345.400.000,00	100,00%	526.100.000,00	100,00%	573.700.000,00	100,00%	573.700.000,00	100,00%	2.316.816.000,00	KEL TOSAREN
1.13.22	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tosaren	% Nilai fasilitas yang terealisasi		100,00%	2.024.707.250,00	100,00%	2.419.754.200,00	100,00%	2.526.400.000,00	100,00%	2.532.000.000,00	100,00%	2.532.000.000,00	100,00%	12.034.861.450,00	KEL TOSAREN
	KELURAHAN JAMSAREN				2.678.034.743,00		3.297.956.054,00		3.299.755.000,00		3.332.255.000,00		3.332.255.000,00		15.940.255.797,00	KEL JAMSAREN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												792.980.000,00		3.736.985.027,00	KEL JAMSAREN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	131.512.723,00	100,00%	236.554.054,00	100,00%	395.335.000,00	100,00%	400.335.000,00	100,00%	400.335.000,00	100,00%	1.564.071.777,00	KEL JAMSAREN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	222.987.250,00	100,00%	500.684.500,00	100,00%	108.500.000,00	100,00%	108.500.000,00	100,00%	108.500.000,00	100,00%	1.049.171.750,00	KEL JAMSAREN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	7.798.000,00	100,00%	23.970.500,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	91.768.500,00	KEL JAMSAREN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	115.960.000,00	100,00%	131.078.000,00	100,00%	256.645.000,00	100,00%	264.145.000,00	100,00%	264.145.000,00	100,00%	1.031.973.000,00	KEL JAMSAREN
1	URUSAN WAJIB															KEL JAMSAREN
1.13	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA												2.539.275.000,00		12.203.270.770,00	KEL JAMSAREN
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	299.309.500,00	100,00%	332.802.000,00	100,00%	331.180.000,00	100,00%	351.180.000,00	100,00%	351.180.000,00	100,00%	1.665.651.500,00	KEL JAMSAREN
1.13.23	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jamsaren	% Nilai fasilitas yang terealisasi		100,00%	1.900.467.270,00	100,00%	2.072.867.000,00	100,00%	2.188.095.000,00	100,00%	2.188.095.000,00	100,00%	2.188.095.000,00	100,00%	10.537.619.270,00	KEL JAMSAREN
	KELURAHAN SINGONEGARAN				3.073.677.453,00		3.663.367.262,00		3.549.105.000,00		3.581.500.000,00		3.581.500.000,00		17.449.149.715,00	KEL SINGONEGARAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												441.500.000,00		2.266.480.395,00	KEL SINGONEGARAN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	115.351.533,00	100,00%	144.421.362,00	100,00%	153.000.000,00	100,00%	168.000.000,00	100,00%	168.000.000,00	100,00%	748.772.895,00	KEL SINGONEGARAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	105.300.000,00	100,00%	338.507.000,00	100,00%	184.250.000,00	100,00%	116.500.000,00	100,00%	116.500.000,00	100,00%	861.057.000,00	KEL SINGONEGARAN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	37.000.000,00	KEL SINGONEGARAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	87.995.500,00	100,00%	118.000.000,00	100,00%	119.655.000,00	100,00%	147.000.000,00	100,00%	147.000.000,00	100,00%	619.650.500,00	KEL. SINGONEGARAN
1	URUSAN WAJIB															KEL. SINGONEGARAN
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												3.140.000.000,00		15.182.669.320,00	KEL. SINGONEGARAN
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	396.519.800,00	100,00%	458.674.000,00	100,00%	459.800.000,00	100,00%	490.000.000,00	100,00%	490.000.000,00	100,00%	2.294.993.800,00	KEL. SINGONEGARAN
1.13.24	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Singonegaran	% Nilai fasilitasi yang terealisasi		100,00%	2.363.510.620,00	100,00%	2.598.764.900,00	100,00%	2.625.400.000,00	100,00%	2.650.000.000,00	100,00%	2.650.000.000,00	100,00%	12.887.675.520,00	KEL. SINGONEGARAN
	KELURAHAN BLABAK				2.431.318.381,00		2.781.595.129,00		2.717.353.500,00		2.679.853.500,00		2.679.853.500,00		13.289.974.010,00	KEL. BLABAK
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												595.798.500,00		2.932.315.260,00	KEL. BLABAK
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	109.381.631,00	100,00%	119.798.729,00	100,00%	127.671.000,00	100,00%	127.671.000,00	100,00%	127.671.000,00	100,00%	612.193.360,00	KEL. BLABAK
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	94.590.000,00	100,00%	190.371.400,00	100,00%	159.245.000,00	100,00%	149.245.000,00	100,00%	149.245.000,00	100,00%	742.696.400,00	KEL. BLABAK
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	KEL. BLABAK
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	260.728.000,00	100,00%	304.550.000,00	100,00%	344.382.500,00	100,00%	308.882.500,00	100,00%	308.882.500,00	100,00%	1.527.425.500,00	KEL. BLABAK
1	URUSAN WAJIB															KEL. BLABAK
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												2.084.055.000,00		10.357.658.750,00	KEL. BLABAK
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	401.692.500,00	100,00%	453.840.500,00	100,00%	370.355.000,00	100,00%	378.355.000,00	100,00%	378.355.000,00	100,00%	1.982.598.000,00	KEL. BLABAK
1.13.25	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Blabak	% Nilai fasilitasi yang terealisasi		100,00%	1.554.926.250,00	100,00%	1.703.034.500,00	100,00%	1.705.700.000,00	100,00%	1.705.700.000,00	100,00%	1.705.700.000,00	100,00%	8.375.060.750,00	KEL. BLABAK
	KELURAHAN BETET				1.802.696.568,00		2.040.721.979,00		2.080.316.500,00		2.112.816.500,00		2.112.816.500,00		10.149.368.047,00	KEL. BETET
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												403.910.000,00		1.942.653.512,00	KEL. BETET
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	124.609.408,00	100,00%	161.100.604,00	100,00%	156.388.500,00	100,00%	174.630.000,00	100,00%	215.630.000,00	100,00%	832.358.512,00	KEL. BETET
3.11.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	132.310.000,00	100,00%	143.330.000,00	100,00%	118.500.000,00	100,00%	120.450.000,00	100,00%	79.450.000,00	100,00%	594.040.000,00	KEL. BETET
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%		100,00%	8.000.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	33.500.000,00	KEL. BETET
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	82.560.000,00	100,00%	90.135.000,00	100,00%	108.400.000,00	100,00%	100.830.000,00	100,00%	100.830.000,00	100,00%	482.755.000,00	KEL. BETET
1	URUSAN WAJIB															KEL. BETET
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												1.708.906.500,00		8.206.714.535,00	KEL. BETET
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	328.820.000,00	100,00%	368.330.000,00	100,00%	397.943.000,00	100,00%	405.683.500,00	100,00%	405.683.500,00	100,00%	1.906.460.000,00	KEL. BETET
1.13.26	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Betet	% Nilai fasilitasi yang terealisasi		100,00%	1.134.397.160,00	100,00%	1.269.826.375,00	100,00%	1.289.585.000,00	100,00%	1.303.223.000,00	100,00%	1.303.223.000,00	100,00%	6.300.254.535,00	KEL. BETET
	KELURAHAN TINALAN				2.406.376.889,00		2.571.029.655,00		2.611.299.450,00		2.682.745.950,00		2.682.745.950,00		12.954.197.894,00	KEL. TINALAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												437.522.950,00		2.034.635.699,00	KEL. TINALAN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Nilai fasilitasi yang terealisasi	85,00%	100,00%	93.477.224,00	100,00%	118.489.155,00	100,00%	148.685.950,00	100,00%	160.685.950,00	100,00%	160.685.950,00	100,00%	682.024.229,00	KEL. TINALAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	215.831.170,00	100,00%	85.235.000,00	100,00%	91.562.000,00	100,00%	114.080.000,00	100,00%	114.080.000,00	100,00%	620.788.170,00	KEL TINALAN	
3.11. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	5.000.000,00	100,00%	9.942.300,00	100,00%	10.919.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	34.861.300,00	KEL TINALAN	
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	102.913.500,00	100,00%	139.777.500,00	100,00%	137.757.000,00	100,00%	158.257.000,00	100,00%	158.257.000,00	100,00%	696.962.000,00	KEL TINALAN	
1	URUSAN WAJIB															KEL TINALAN	
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											2.245.223.000,00		10.919.562.195,00		KEL TINALAN	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	279.757.500,00	100,00%	340.799.500,00	100,00%	354.620.500,00	100,00%	376.620.500,00	100,00%	376.620.500,00	100,00%	1.728.418.500,00		KEL TINALAN
1.13. 27	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tinalan	% Nilai fasilitasi yang terealisasi		100,00%	1.709.397.495,00	100,00%	1.876.786.200,00	100,00%	1.867.755.000,00	100,00%	1.868.602.500,00	100,00%	1.868.602.500,00	100,00%	9.191.143.695,00		KEL TINALAN
	KELURAHAN BAWANG				2.071.346.098,00		2.457.061.672,00		2.447.024.500,00		2.479.524.500,00		2.474.367.000,00		11.945.366.770,00		KEL BAWANG
3.11	PEMERINTAHAN UMUM											383.342.000,00		1.908.709.840,00		KEL BAWANG	
3.11. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	122.606.098,00	100,00%	155.708.742,00	100,00%	145.052.000,00	100,00%	166.774.000,00	100,00%	166.774.000,00	100,00%	756.914.840,00		KEL BAWANG
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	89.492.000,00	100,00%	165.430.000,00	100,00%	78.690.000,00	100,00%	91.000.000,00	100,00%	76.000.000,00	100,00%	475.797.000,00		KEL BAWANG
3.11. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.610.000,00	100,00%	6.838.000,00	100,00%	6.838.000,00	100,00%	2.610.000,00	100,00%	12.940.000,00		KEL BAWANG
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	111.226.000,00	100,00%	137.958.000,00	100,00%	102.714.500,00	100,00%	123.887.500,00	100,00%	137.958.000,00	100,00%	663.058.000,00		KEL BAWANG
1	URUSAN WAJIB															KEL BAWANG	
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											2.091.025.000,00		10.036.656.930,00		KEL BAWANG	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	267.629.000,00	100,00%	285.367.000,00	100,00%	352.325.000,00	100,00%	328.375.000,00	100,00%	328.375.000,00	100,00%	1.562.071.000,00		KEL BAWANG
1.13.28	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bawang	% Nilai fasilitasi yang terealisasi		100,00%	1.477.893.000,00	100,00%	1.709.987.930,00	100,00%	1.761.405.000,00	100,00%	1.762.650.000,00	100,00%	1.762.650.000,00	100,00%	8.474.585.930,00		KEL BAWANG
	KELURAHAN NGLETIH				1.068.314.033,00		1.344.502.292,00		1.336.465.000,00		1.368.965.000,00		1.359.630.000,00		6.456.216.325,00		KEL NGLETIH
3.11	PEMERINTAHAN UMUM											364.892.000,00		1.771.946.680,00		KEL NGLETIH	
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	82.395.288,00	100,00%	92.593.292,00	100,00%	101.300.000,00	100,00%	113.381.500,00	100,00%	104.046.500,00	100,00%	472.056.580,00		KEL NGLETIH
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	102.457.700,00	100,00%	180.666.500,00	100,00%	107.750.000,00	100,00%	74.307.500,00	100,00%	74.307.500,00	100,00%	539.489.200,00		KEL NGLETIH
3.11. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	2.081.150,00	100,00%	7.500.000,00	100,00%	7.463.000,00	100,00%	7.463.000,00	100,00%	7.463.000,00	100,00%	31.970.150,00		KEL NGLETIH
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	86.078.750,00	100,00%	147.815.000,00	100,00%	136.387.000,00	100,00%	179.075.000,00	100,00%	179.075.000,00	100,00%	728.430.750,00		KEL NGLETIH
1	URUSAN WAJIB															KEL NGLETIH	
1.13	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA											994.738.000,00		4.684.269.645,00		KEL NGLETIH	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	169.414.100,00	100,00%	164.991.500,00	100,00%	208.015.000,00	100,00%	221.833.000,00	100,00%	221.833.000,00	100,00%	986.086.600,00		KEL NGLETIH
1.13.29	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngletih	% Nilai fasilitasi yang terealisasi		100,00%	625.887.045,00	100,00%	750.936.000,00	100,00%	775.550.000,00	100,00%	772.905.000,00	100,00%	772.905.000,00	100,00%	3.698.183.045,00		KEL NGLETIH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KELURAHAN TEMPUREJO				1.429.397.100,00		1.760.739.032,00		2.052.920.000,00		2.052.420.000,00		2.024.860.000,00		9.260.876.132,00	KEL. TEMPUREJO
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												528.417.000,00		2.371.303.577,00	KEL. TEMPUREJO
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	105.316.700,00	100,00%	168.931.407,00	100,00%	197.005.000,00	100,00%	208.032.000,00	100,00%	208.032.000,00	100,00%	887.317.107,00	KEL. TEMPUREJO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	151.950.000,00	100,00%	139.445.400,00	100,00%	195.850.000,00	100,00%	125.400.000,00	100,00%	101.000.000,00	100,00%	660.145.400,00	KEL. TEMPUREJO
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	4.979.000,00	100,00%	3.770.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	38.749.000,00	KEL. TEMPUREJO
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	59.432.070,00	100,00%	132.665.000,00	100,00%	177.025.000,00	100,00%	212.545.000,00	100,00%	209.385.000,00	100,00%	785.092.070,00	KEL. TEMPUREJO
1	URUSAN WAJIB															KEL. TEMPUREJO
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												1.496.443.000,00		6.889.572.555,00	KEL. TEMPUREJO
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	177.395.000,00	100,00%	240.655.000,00	100,00%	308.040.000,00	100,00%	330.693.000,00	100,00%	330.693.000,00	100,00%	1.387.476.000,00	KEL. TEMPUREJO
1.13.30	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tempurejo	% Nilai fasilitas yang terealisasi		100,00%	930.324.330,00	100,00%	1.075.272.225,00	100,00%	1.165.000.000,00	100,00%	1.165.750.000,00	100,00%	1.165.750.000,00	100,00%	5.502.096.555,00	KEL. TEMPUREJO
	KELURAHAN KETAMI				1.933.890.409,00		2.456.426.425,00		2.630.726.500,00		2.709.826.500,00		2.709.826.500,00		12.440.696.334,00	KEL. KETAMI
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												655.610.500,00		2.958.889.843,00	KEL. KETAMI
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	84.776.178,00	100,00%	143.603.865,00	100,00%	198.267.000,00	100,00%	250.733.000,00	100,00%	250.733.000,00	100,00%	928.113.043,00	KEL. KETAMI
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	120.224.000,00	100,00%	223.484.800,00	100,00%	126.389.000,00	100,00%	86.510.000,00	100,00%	86.510.000,00	100,00%	643.117.800,00	KEL. KETAMI
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	6.143.000,00	100,00%	2.822.500,00	100,00%	8.158.000,00	100,00%	1.321.000,00	100,00%	1.321.000,00	100,00%	19.765.500,00	KEL. KETAMI
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	161.723.000,00	100,00%	295.961.000,00	100,00%	276.116.500,00	100,00%	317.046.500,00	100,00%	317.046.500,00	100,00%	1.367.893.500,00	KEL. KETAMI
1	URUSAN WAJIB															KEL. KETAMI
1.13	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA												2.054.216.000,00		9.481.806.491,00	KEL. KETAMI
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	184.835.000,00	100,00%	231.047.000,00	100,00%	424.545.000,00	100,00%	454.714.000,00	100,00%	454.714.000,00	100,00%	1.749.855.000,00	KEL. KETAMI
1.13.31	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketami	% Nilai fasilitas yang terealisasi		100,00%	1.376.189.231,00	100,00%	1.559.507.260,00	100,00%	1.597.251.000,00	100,00%	1.599.502.000,00	100,00%	1.599.502.000,00	100,00%	7.731.951.491,00	KEL. KETAMI
	KELURAHAN PESANTREN				2.379.709.277,00		2.588.482.428,00		2.824.939.500,00		2.940.461.750,00		2.940.461.750,00		13.674.054.705,00	KEL. PESANTREN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												557.697.000,00		2.291.540.998,00	KEL. PESANTREN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	192.098.722,00	100,00%	201.823.556,00	100,00%	219.905.000,00	100,00%	238.505.000,00	100,00%	238.505.000,00	100,00%	1.090.837.278,00	KEL. PESANTREN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	145.866.000,00	100,00%	67.892.000,00	100,00%	76.112.000,00	100,00%	135.892.000,00	100,00%	135.892.000,00	100,00%	561.654.000,00	KEL. PESANTREN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	8.000.000,00	100,00%	7.832.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	36.832.000,00	KEL. PESANTREN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	36.772.720,00	100,00%	57.595.000,00	100,00%	155.250.000,00	100,00%	176.300.000,00	100,00%	176.300.000,00	100,00%	602.217.720,00	KEL. PESANTREN
1	URUSAN WAJIB															KEL. PESANTREN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											2.382.764.750,00		11.382.513.707,00	KEL. PESANTREN	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	295.768.000,00	100,00%	350.308.450,00	100,00%	296.922.500,00	100,00%	363.014.750,00	100,00%	363.014.750,00	100,00%	1.669.028.450,00	KEL. PESANTREN
1.13.32	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pesantren	% Nilai fasilitasi yang terealisasi		100,00%	1.701.203.835,00	100,00%	1.903.031.422,00	100,00%	2.069.750.000,00	100,00%	2.019.750.000,00	100,00%	2.019.750.000,00	100,00%	9.713.485.257,00	KEL. PESANTREN
	KELURAHAN BANARAN				1.685.833.581,00		2.076.584.874,00		2.014.309.500,00		2.046.809.500,00		2.046.809.500,00		9.870.346.955,00	KEL. BANARAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM											281.642.000,00		1.371.223.405,00	KEL. BANARAN	
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	138.223.231,00	100,00%	180.929.174,00	100,00%	158.177.000,00	100,00%	173.177.000,00	100,00%	173.177.000,00	100,00%	823.683.405,00	KEL. BANARAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	110.000.000,00	100,00%	100.940.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%	70.500.000,00	100,00%	70.500.000,00	100,00%	421.940.000,00	KEL. BANARAN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.290.000,00	100,00%	3.300.000,00	100,00%	17.000.000,00	100,00%	17.000.000,00	100,00%	43.590.000,00	KEL. BANARAN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	11.150.000,00	100,00%	15.465.000,00	100,00%	13.465.000,00	100,00%	20.965.000,00	100,00%	20.965.000,00	100,00%	82.010.000,00	KEL. BANARAN
1	URUSAN WAJIB														KEL. BANARAN	
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											1.765.167.500,00		8.499.123.550,00	KEL. BANARAN	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	304.485.000,00	100,00%	373.152.800,00	100,00%	380.607.500,00	100,00%	378.817.500,00	100,00%	378.817.500,00	100,00%	1.815.880.300,00	KEL. BANARAN
1.13.33	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banaran	% Nilai fasilitasi yang terealisasi		100,00%	1.118.975.350,00	100,00%	1.402.807.900,00	100,00%	1.388.760.000,00	100,00%	1.386.350.000,00	100,00%	1.386.350.000,00	100,00%	6.683.243.250,00	KEL. BANARAN
	KELURAHAN BURENGAN				2.242.736.726,00		2.668.129.433,00		2.831.695.500,00		3.030.695.500,00		3.030.695.500,00		13.803.952.659,00	KEL. BURENGAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM											615.805.500,00		2.410.569.629,00	KEL. BURENGAN	
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	100,00%	102.642.886,00	100,00%	102.973.693,00	100,00%	133.046.500,00	100,00%	151.146.500,00	100,00%	151.146.500,00	100,00%	640.956.079,00	KEL. BURENGAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	100,00%	70.384.050,00	100,00%	144.715.500,00	100,00%	78.420.000,00	100,00%	212.090.000,00	100,00%	212.090.000,00	100,00%	717.699.550,00	KEL. BURENGAN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	100,00%	2.250.000,00	100,00%	2.257.000,00	100,00%	4.229.000,00	100,00%	4.229.000,00	100,00%	4.229.000,00	100,00%	17.194.000,00	KEL. BURENGAN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	100,00%	123.374.000,00	100,00%	188.556.000,00	100,00%	226.110.000,00	100,00%	248.340.000,00	100,00%	248.340.000,00	100,00%	1.034.720.000,00	KEL. BURENGAN
1	URUSAN WAJIB														KEL. BURENGAN	
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											2.414.890.000,00		11.393.383.030,00	KEL. BURENGAN	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		100,00%	273.396.400,00	100,00%	292.949.000,00	100,00%	349.900.000,00	100,00%	374.900.000,00	100,00%	374.900.000,00	100,00%	1.666.045.400,00	KEL. BURENGAN
1.13.34	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Burengan	% Nilai fasilitasi yang terealisasi		100,00%	1.670.689.390,00	100,00%	1.936.678.240,00	100,00%	2.039.990.000,00	100,00%	2.039.990.000,00	100,00%	2.039.990.000,00	100,00%	9.727.337.630,00	KEL. BURENGAN
	KECAMATAN KOTA				1.099.786.243,00		1.998.325.819,00		2.500.521.200,00		2.292.784.200,00		2.292.784.200,00		10.184.201.662,00	KEC. KOTA
3.11	PEMERINTAHAN UMUM											2.292.784.200,00			KEC. KOTA	
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	257.793.023,00	92,00%	318.272.611,00	94,00%	426.194.200,00	96,00%	588.189.700,00	98,00%	588.189.700,00	98,00%	2.178.639.234,00	KEC. KOTA
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	144.086.920,00	92,00%	58.675.458,00	94,00%	410.925.000,00	96,00%	99.380.000,00	98,00%	99.380.000,00	98,00%	812.447.378,00	KEC. KOTA
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	19.232.500,00	92,00%	9.310.000,00	94,00%	18.780.000,00	96,00%	11.242.500,00	98,00%	11.242.500,00	98,00%	69.807.500,00	KEC. KOTA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informast			80,00%	43.755.000,00											KEC. KOTA
3.11.31	Program Peningkatan Pelayanan Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	70,00%	75,00%	54.291.000,00	80,00%	225.122.000,00	82,00%	121.000.000,00	85,00%	23.704.000,00	90,00%	23.704.000,00	90,00%	447.821.000,00	KEC. KOTA
3.11.34	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% meningkatnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	80,00%	85,00%	580.627.800,00	85,00%	1.386.945.750,00	86,00%	1.523.622.000,00	86,00%	1.570.268.000,00	88,00%	1.570.268.000,00	88,00%	6.631.731.550,00	KEC. KOTA
	KELURAHAN SEMAMPIR				2.400.754.927,00		2.631.612.067,00		3.112.418.000,00		2.779.018.000,00		2.779.018.000,00		13.702.820.994,00	KEL SEMAMPIR
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL SEMAMPIR
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	128.701.392,00	92,00%	193.572.667,00	94,00%	249.289.000,00	96,00%	317.901.500,00	98%	317.901.500,00	98%	1.207.366.059,00	KEL SEMAMPIR
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	350.842.935,00	92,00%	276.787.900,00	94,00%	474.491.000,00	96,00%	65.735.000,00	98%	65.735.000,00	98%	1.233.591.835,00	KEL SEMAMPIR
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	14.048.500,00	92,00%	10.460.000,00	94,00%	10.822.500,00	96,00%	4.419.000,00	98%	4.419.000,00	98%	44.169.000,00	KEL SEMAMPIR
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	85,00%	90,00%	155.617.500,00	0,00%	249.258.100,00	88,00%	261.400.000,00	96,00%	325.773.500,00	98%	325.773.500,00	98%	1.317.822.600,00	KEL SEMAMPIR
1	URUSAN WAJIB															KEL SEMAMPIR
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL SEMAMPIR
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	237.653.000,00	80,00%	239.154.950,00	85,00%	357.081.500,00	86,00%	411.779.000,00	87%	411.779.000,00	87%	1.657.447.450,00	KEL SEMAMPIR
1.13.35	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semampir	%Nilai fasilitas yang terealisasi	0,00%	80,00%	1.513.891.600,00	83,00%	1.662.378.450,00	85,00%	1.759.334.000,00	88,00%	1.653.410.000,00	90%	1.653.410.000,00	90%	8.242.424.050,00	KEL SEMAMPIR
	KELURAHAN BALOWERTI				1.711.418.703,00		2.240.346.139,00		2.627.742.500,00		2.660.242.500,00		2.660.242.500,00		11.899.992.342,00	KEL BALOWERTI
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL BALOWERTI
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	92.478.623,00	92,00%	138.137.464,00	94,00%	214.250.000,00	96,00%	292.051.100,00	98%	292.051.100,00	98%	1.028.968.287,00	KEL BALOWERTI
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	83.074.300,00	92,00%	185.874.500,00	94,00%	105.350.000,00	96,00%	174.565.400,00	98%	174.565.400,00	98%	723.429.600,00	KEL BALOWERTI
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%			92,00%	6.813.000,00	94,00%	10.000.000,00					94,00%	16.813.000,00	KEL BALOWERTI
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	3.175.000,00	90,00%	132.475.900,00	92,00%	242.200.000,00	93,00%	179.570.000,00	94%	179.570.000,00	94%	736.990.900,00	KEL BALOWERTI
1	URUSAN WAJIB															KEL BALOWERTI
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL BALOWERTI
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	232.624.450,00	80,00%	258.472.500,00	85,00%	361.442.500,00	86,00%	340.311.000,00	87%	340.311.000,00	87%	1.533.161.450,00	KEL BALOWERTI
1.13.36	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balowerti	%Nilai fasilitas yang terealisasi	0,00%	80,00%	1.300.066.330,00	83,00%	1.518.572.775,00	85,00%	1.694.500.000,00	88,00%	1.673.745.000,00	90%	1.673.745.000,00	90%	7.860.629.105,00	KEL BALOWERTI
	KELURAHAN DANDANGAN				2.747.479.000,00		3.100.092.125,00		3.189.252.000,00		3.221.752.000,00		3.221.752.000,00		15.480.327.125,00	KEL DANDANGAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL DANDANGAN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	106.624.370,00	92,00%	124.720.593,00	94,00%	186.250.000,00	96,00%	211.450.000,00	98,00%	211.450.000,00	98,00%	840.494.963,00	KEL DANDANGAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	132.241.700,00	92,00%	88.475.000,00	94,00%	81.650.000,00	96,00%	56.800.000,00	98,00%	56.800.000,00	98,00%	415.966.700,00	KEL DANDANGAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%		92,00%	3.000.000,00	94,00%	3.000.000,00	96,00%	3.000.000,00	98,00%	3.000.000,00	98,00%	12.000.000,00	KEL DANDANGAN	
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	89.531.000,00	90,00%	170.042.500,00	92,00%	135.752.000,00	93,00%	147.902.000,00	95,00%	147.902.000,00	95,00%	691.129.500,00	KEL DANDANGAN
1	URUSAN WAJIB														KEL DANDANGAN	
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														KEL DANDANGAN	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	390.131.000,00	80,00%	394.773.000,00	85,00%	419.375.000,00	86,00%	439.375.000,00	83,00%	439.375.000,00	83,00%	2.083.029.000,00	KEL DANDANGAN
1.13.37	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dandangan	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	0,00%	80,00%	2.028.950.930,00	83,00%	2.319.081.032,00	85,00%	2.363.225.000,00	88,00%	2.363.225.000,00	90,00%	2.363.225.000,00	90,00%	11.437.706.962,00	KEL DANDANGAN
	KELURAHAN NGADIREJO				3.690.377.942,00		4.017.144.194,00		4.338.505.225,00		4.296.005.225,00		4.296.005.225,00		20.638.037.811,00	KEL NGADIREJO
3.11	PEMERINTAHAN UMUM														KEL NGADIREJO	
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	175.769.342,00	92,00%	213.903.119,00	94,00%	225.233.975,00	96,00%	229.233.975,00	98,00%	229.233.975,00	98,00%	1.073.374.386,00	KEL NGADIREJO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	359.059.900,00	92,00%	193.843.500,00	94,00%	187.511.250,00	96,00%	112.511.250,00	98,00%	112.511.250,00	98,00%	965.437.150,00	KEL NGADIREJO
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%				94,00%	10.000.000,00	96,00%	10.000.000,00	98,00%	10.000.000,00	98,00%	30.000.000,00	KEL NGADIREJO
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	85,00%	90,00%	122.037.000,00	92,00%	239.670.000,00	94,00%	207.950.000,00	96,00%	230.450.000,00	98,00%	230.450.000,00	98,00%	1.030.557.000,00	KEL NGADIREJO
1	URUSAN WAJIB														KEL NGADIREJO	
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														KEL NGADIREJO	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	77,00%	80,00%	445.825.000,00	85,00%	524.502.500,00	85,00%	600.712.500,00	86,00%	606.712.500,00	87,00%	606.712.500,00	87,00%	2.784.465.000,00	KEL NGADIREJO
1.13.38	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngadirejo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	80,00%	83,00%	2.587.686.700,00	85,00%	2.845.225.075,00	88,00%	3.107.097.500,00	88,00%	3.107.097.500,00	90,00%	3.107.097.500,00	90,00%	14.754.204.275,00	KEL NGADIREJO
	KELURAHAN BANJARAN				3.414.561.079,00		3.639.516.805,00		3.646.326.000,00		4.030.224.000,00		4.030.224.000,00		18.760.851.884,00	KEL BANJARAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM														KEL BANJARAN	
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	130.734.629,00	92,00%	173.103.965,00	94,00%	130.894.000,00	96,00%	213.424.000,00	98,00%	213.424.000,00	98,00%	861.580.594,00	KEL BANJARAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	360.282.000,00	92,00%	172.936.000,00	94,00%	171.732.000,00	96,00%	95.000.000,00	98,00%	95.000.000,00	98,00%	894.950.000,00	KEL BANJARAN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	24.666.500,00	92,00%	30.000.000,00	94,00%	28.611.000,00	96,00%	45.805.000,00	98,00%	45.805.000,00	98,00%	174.887.500,00	KEL BANJARAN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	14.382.000,00	90,00%	222.090.000,00	92,00%	237.929.000,00	93,00%	380.800.000,00	94,00%	380.800.000,00	94,00%	1.236.001.000,00	KEL BANJARAN
1	URUSAN WAJIB														KEL BANJARAN	
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														KEL BANJARAN	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		85,00%	458.745.000,00	90,00%	388.048.000,00	92,00%	432.010.000,00	94,00%	552.500.000,00	96,00%	552.500.000,00	96,00%	2.383.803.000,00	KEL BANJARAN
1.13.39	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjaran	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		80,00%	2.425.750.950,00	83,00%	2.653.338.840,00	85,00%	2.645.150.000,00	88,00%	2.742.695.000,00	90,00%	2.742.695.000,00	90,00%	13.209.629.790,00	KEL BANJARAN
	KELURAHAN KALIOMBO				2.814.114.399,00		3.377.053.108,00		3.339.436.000,00		3.371.936.000,00		3.371.936.000,00		16.274.475.507,00	KEL KALIOMBO

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL KALIOMBO
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	117.357.139,00	92,00%	128.218.958,00	94,00%	120.085.000,00	96,00%	125.085.000,00	96,00%	125.085.000,00	98,00%	615.831.097,00	KEL KALIOMBO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	146.395.000,00	92,00%	259.628.000,00	94,00%	70.000.000,00	96,00%	70.000.000,00	98,00%	70.000.000,00	98,00%	616.023.000,00	KEL KALIOMBO
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	6.260.000,00	92,00%	6.450.000,00	94,00%	8.800.000,00	96,00%	8.800.000,00	98,00%	8.800.000,00	98,00%	39.110.000,00	KEL KALIOMBO
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	86.075.000,00	90,00%	154.450.000,00	92,00%	206.125.000,00	93,00%	233.625.000,00	94,00%	233.625.000,00	95,00%	913.900.000,00	KEL KALIOMBO
1	URUSAN WAJIB															KEL KALIOMBO
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL KALIOMBO
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	302.630.000,00	80,00%	323.012.000,00	85,00%	366.718.000,00	86,00%	366.718.000,00	87,00%	366.718.000,00	88,00%	1.725.796.000,00	KEL KALIOMBO
1.13. 40	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaliombo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	0,00%	80,00%	2.155.397.260,00	83,00%	2.505.294.150,00	85,00%	2.567.708.000,00	88,00%	2.567.708.000,00	90,00%	2.567.708.000,00	90,00%	12.363.815.410,00	KEL KALIOMBO
	KELURAHAN NGRONGGO				3.993.278.242,00		4.610.263.915,00		4.798.320.000,00		4.830.820.000,00		4.830.820.000,00		23.063.502.157,00	KEL NGRONGGO
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL NGRONGGO
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	96.854.818,00	92,00%	127.616.715,00	94,00%	262.670.000,00	96,00%	272.670.000,00	98,00%	272.670.000,00	98,00%	1.032.481.533,00	KEL NGRONGGO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	95.886.624,00	92,00%	142.290.000,00	94,00%	87.000.000,00	96,00%	74.000.000,00	98,00%	74.000.000,00	98,00%	473.176.624,00	KEL NGRONGGO
1.20. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%					94,00%	10.000.000,00			94,00%		10.000.000,00	KEL NGRONGGO	
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	6.850.000,00	90,00%	38.560.000,00	92,00%	59.850.000,00	93,00%	67.350.000,00	94,00%	67.350.000,00	95,00%	239.960.000,00	KEL NGRONGGO
1	URUSAN WAJIB															KEL NGRONGGO
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL NGRONGGO
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	444.989.750,00	80,00%	494.405.000,00	85,00%	517.000.000,00	86,00%	555.000.000,00	87,00%	555.000.000,00	88,00%	2.566.394.750,00	KEL NGRONGGO
1.13.41	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngronggo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	0,00%	80,00%	3.348.697.050,00	83,00%	3.807.392.200,00	85,00%	3.861.800.000,00	88,00%	3.861.800.000,00	90,00%	3.861.800.000,00	90,00%	18.741.489.250,00	KEL NGRONGGO
	KELURAHAN MANISRENGGO				2.154.207.685,00		3.216.622.511,00		3.046.305.000,00		3.111.805.000,00		3.111.805.000,00		14.640.745.196,00	KEL MANISRENGGO
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL MANISRENGGO
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	113.265.035,00	92,00%	149.910.211,00	94,00%	174.165.000,00	96,00%	188.673.000,00	98,00%	188.673.000,00	98,00%	814.686.246,00	KEL MANISRENGGO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	53.168.500,00	92,00%	741.447.750,00	94,00%	312.600.000,00	96,00%	267.800.000,00	98,00%	267.800.000,00	98,00%	1.642.816.250,00	KEL MANISRENGGO
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	9.104.900,00	92,00%	10.000.000,00	94,00%	10.000.000,00	96,00%	10.000.000,00	98,00%	10.000.000,00	98,00%	49.104.900,00	KEL MANISRENGGO
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	45.920.000,00	90,00%	192.825.750,00	92,00%	177.650.000,00	93,00%	254.624.000,00	94,00%	254.624.000,00	95,00%	925.643.750,00	KEL MANISRENGGO
1	URUSAN WAJIB															KEL MANISRENGGO
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL MANISRENGGO

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	350.190.200,00	80,00%	449.625.500,00	85,00%	590.890.000,00	86,00%	615.008.000,00	87,00%	615.008.000,00	88,00%	2.620.721.700,00	KEL. MANISRENGGO
1.13.42	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrenggo	%Nilai fasilitas yang terealisasi	0,00%	80,00%	1.582.559.050,00	83,00%	1.672.813.300,00	85,00%	1.781.000.000,00	88,00%	1.775.700.000,00	90,00%	1.775.700.000,00	90,00%	8.587.772.350,00	KEL. MANISRENGGO
	KELURAHAN REJOMULYO				1.600.522.177,00		1.839.398.343,00		2.134.102.800,00		1.966.602.800,00		1.966.602.800,00		9.507.228.920,00	KEL. REJOMULYO
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. REJOMULYO
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	146.918.177,00	92,00%	175.002.843,00	94,00%	213.502.500,00	96,00%	224.802.500,00	98,00%	224.802.500,00	0,00%	985.028.520,00	KEL. REJOMULYO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	50.619.000,00	92,00%	87.424.500,00	94,00%	251.600.000,00	96,00%	79.800.000,00	98,00%	79.800.000,00	0,00%	549.243.500,00	KEL. REJOMULYO
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	83,00%	87,00%	5.052.500,00	89,00%	2.151.000,00	94,00%	3.000.000,00	97,00%	3.200.000,00	99,00%	3.200.000,00	0,00%	16.603.500,00	KEL. REJOMULYO
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	23.300.000,00	90,00%	20.120.000,00	92,00%	49.500.000,00	93,00%	62.000.000,00	94,00%	62.000.000,00	0,00%	216.920.000,00	KEL. REJOMULYO
1	URUSAN WAJIB															KEL. REJOMULYO
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. REJOMULYO
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	230.709.000,00	80,00%	263.465.000,00	85,00%	290.700.300,00	86,00%	271.000.300,00	87,00%	271.000.300,00	0,00%	1.326.874.900,00	KEL. REJOMULYO
1.13.43	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	%Nilai fasilitas yang terealisasi	0,00%	80,00%	1.143.923.500,00	83,00%	1.291.235.000,00	85,00%	1.325.800.000,00	88,00%	1.325.800.000,00	90,00%	1.325.800.000,00	0,00%	6.412.558.500,00	KEL. REJOMULYO
	KELURAHAN KEMASAN				697.534.183,00		794.917.270,00		858.500.000,00		921.000.000,00		921.000.000,00		4.192.951.453,00	KEL. KEMASAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. KEMASAN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	87.584.139,00	92,00%	105.747.649,00	94,00%	96.434.000,00	96,00%	101.434.000,00	96,00%	101.434.000,00	96,00%	492.633.788,00	KEL. KEMASAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	40.646.344,00	92,00%	71.355.000,00	94,00%	56.309.000,00	96,00%	56.309.000,00	96,00%	56.309.000,00	96,00%	280.928.344,00	KEL. KEMASAN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	7.500.000,00	92,00%	7.500.000,00	94,00%	9.300.000,00	96,00%	9.300.000,00	96,00%	9.300.000,00	96,00%	42.900.000,00	KEL. KEMASAN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	34.322.500,00	90,00%	67.652.000,00	92,00%	76.145.500,00	93,00%	108.645.500,00	93,00%	108.645.500,00	93,00%	395.411.000,00	KEL. KEMASAN
1	URUSAN WAJIB															KEL. KEMASAN
1.13	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA															KEL. KEMASAN
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	143.093.500,00	80,00%	165.422.000,00	85,00%	171.511.500,00	86,00%	196.511.500,00	86,00%	196.511.500,00	86,00%	873.050.000,00	KEL. KEMASAN
1.13.44	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemas	%Nilai fasilitas yang terealisasi	0,00%	80,00%	384.387.700,00	83,00%	377.240.621,00	85,00%	448.800.000,00	88,00%	448.800.000,00	88,00%	448.800.000,00	88,00%	2.108.028.321,00	KEL. KEMASAN
	KELURAHAN POCANAN				692.249.464,00		849.591.762,00		851.660.350,00		884.160.350,00		884.160.350,00		4.161.822.276,00	KEL. POCANAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. POCANAN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	92.253.464,00	92,00%	99.061.262,00	94,00%	105.805.350,00	96,00%	110.805.350,00	98,00%	110.805.350,00	98,00%	518.730.776,00	KEL. POCANAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	75.046.000,00	92,00%	71.350.000,00	94,00%	61.450.000,00	96,00%	39.850.000,00	98,00%	39.850.000,00	98,00%	287.546.000,00	KEL. POCANAN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	1.800.000,00	92,00%	3.140.000,00	94,00%	10.000.000,00	96,00%	10.000.000,00	98,00%	10.000.000,00	98,00%	34.940.000,00	KEL. POCANAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	53.850.000,00	90,00%	59.800.000,00	92,00%	55.250.000,00	93,00%	72.000.000,00	94,00%	72.000.000,00	94,00%	312.900.000,00	KEL. POCANAN
1	URUSAN WAJIB															KEL. POCANAN
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. POCANAN
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	102.309.000,00	80,00%	124.377.000,00	86,00%	119.200.000,00	86,00%	146.700.000,00	87,00%	146.700.000,00	87,00%	639.286.000,00	KEL. POCANAN
1.13.45	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pocanan	%Nilai fasilitas yang terealisasi	0,00%	80,00%	366.991.000,00	83,00%	491.863.500,00	85,00%	499.955.000,00	88,00%	504.805.000,00	90,00%	504.805.000,00	90,00%	2.368.419.500,00	KEL. POCANAN
	KELURAHAN RINGINANOM				771.089.308,00		968.425.303,00		968.022.500,00		1.100.522.500,00		1.100.522.500,00		4.908.582.111,00	KEL. RINGINANOM
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. RINGINANOM
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	64.097.750,00	92,00%	99.129.378,00	94,00%	116.362.500,00	96,00%	146.728.500,00	98,00%	146.728.500,00	98,00%	573.046.628,00	KEL. RINGINANOM
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	83.859.800,00	92,00%	176.685.000,00	94,00%	69.695.000,00	96,00%	111.435.000,00	98,00%	111.435.000,00	98,00%	553.109.800,00	KEL. RINGINANOM
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	7.597.500,00	92,00%	3.647.500,00	94,00%	10.210.000,00	96,00%	5.000.000,00	98,00%	5.000.000,00	98,00%	31.455.000,00	KEL. RINGINANOM
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	72.390.000,00	90,00%	88.220.000,00	92,00%	52.600.000,00	93,00%	173.293.000,00	94,00%	173.293.000,00	94,00%	559.796.000,00	KEL. RINGINANOM
1	URUSAN WAJIB															KEL. RINGINANOM
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. RINGINANOM
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	189.005.000,00	80,00%	223.700.000,00	86,00%	326.155.000,00	86,00%	268.620.000,00	87,00%	268.620.000,00	87,00%	1.276.100.000,00	KEL. RINGINANOM
1.13.46	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ringinanom	%Nilai fasilitas yang terealisasi	0,00%	80,00%	354.139.258,00	83,00%	377.043.425,00	85,00%	393.000.000,00	88,00%	395.446.000,00	90,00%	395.446.000,00	90,00%	1.915.074.683,00	KEL. RINGINANOM
	KELURAHAN KAMPUNGDALEM				1.486.632.259,00		1.511.754.714,00		2.053.926.000,00		2.086.426.000,00		2.086.426.000,00		9.225.164.973,00	KEL. KAMPUNGDALEM
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. KAMPUNGDALEM
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	119.645.704,00	92,00%	220.989.814,00	94,00%	241.151.000,00	96,00%	239.951.000,00	98,00%	239.951.000,00	98,00%	1.061.688.518,00	KEL. KAMPUNGDALEM
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	214.238.500,00	92,00%	51.746.000,00	94,00%	111.013.000,00	96,00%	52.800.000,00	98,00%	52.800.000,00	98,00%	482.597.500,00	KEL. KAMPUNGDALEM
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	22.349.500,00	92,00%	19.142.000,00	94,00%	21.282.000,00	96,00%	19.730.000,00	98,00%	19.730.000,00	98,00%	102.233.500,00	KEL. KAMPUNGDALEM
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	83.875.000,00	90,00%	290.779.000,00	92,00%	300.000.000,00	93,00%	338.000.000,00	95,00%	338.000.000,00	95,00%	1.350.654.000,00	KEL. KAMPUNGDALEM
1	URUSAN WAJIB															KEL. KAMPUNGDALEM
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. KAMPUNGDALEM
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	205.134.000,00	80,00%	306.033.000,00	86,00%	376.310.000,00	86,00%	431.775.000,00	88,00%	431.775.000,00	88,00%	1.751.027.000,00	KEL. KAMPUNGDALEM
1.13.47	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Dalem	%Nilai fasilitas yang terealisasi	0,00%	80,00%	841.389.555,00	83,00%	623.064.900,00	85,00%	1.004.170.000,00	88,00%	1.004.170.000,00	90,00%	1.004.170.000,00	90,00%	4.476.964.455,00	KEL. KAMPUNGDALEM
	KELURAHAN SETONO PANDE				1.826.239.817,00		2.285.282.300,00		2.505.178.500,00		2.487.678.500,00		2.487.678.500,00		11.592.057.617,00	KEL. SETONO PANDE

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL SETONO PANDE
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	80.615.907,00	92,00%	160.461.853,00	94,00%	135.653.500,00	96,00%	185.653.500,00	98,00%	185.653.500,00	98,00%	748.038.260,00	KEL SETONO PANDE
3.11. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	60.872.900,00	92,00%	34.002.025,00	94,00%	294.925.000,00	96,00%	119.275.000,00	98,00%	119.275.000,00	98,00%	628.349.925,00	KEL SETONO PANDE
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	4.670.000,00	92,00%	5.501.000,00	94,00%	6.100.000,00	98,00%	6.100.000,00	98,00%	6.100.000,00	98,00%	28.471.000,00	KEL SETONO PANDE
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	82.668.500,00	90,00%	210.872.500,00	92,00%	193.300.000,00	93,00%	243.300.000,00	94,00%	243.300.000,00	94,00%	973.441.000,00	KEL SETONO PANDE
1	URUSAN WAJIB															KEL SETONO PANDE
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL SETONO PANDE
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	215.937.000,00	80,00%	311.905.000,00	85,00%	333.400.000,00	86,00%	391.550.000,00	87,00%	391.550.000,00	87,00%	1.644.342.000,00	KEL SETONO PANDE
1.13.48	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setono Pande	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	0,00%	80,00%	1.381.475.510,00	83,00%	1.562.539.922,00	85,00%	1.541.800.000,00	88,00%	1.541.800.000,00	90,00%	1.541.800.000,00	90,00%	7.569.415.432,00	KEL SETONO PANDE
	KELURAHAN JAGALAN				662.471.048,00		908.858.281,00		856.139.000,00		1.038.639.000,00		1.038.639.000,00		4.504.746.329,00	KEL JAGALAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL JAGALAN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	102.219.548,00	92,00%	116.254.731,00	94,00%	127.542.000,00	96,00%	133.432.000,00	98,00%	133.432.000,00	98,00%	612.880.279,00	KEL JAGALAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	53.000.000,00	92,00%	170.269.000,00	94,00%	69.793.000,00	96,00%	205.865.000,00	98,00%	205.865.000,00	98,00%	704.792.000,00	KEL JAGALAN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%			92,00%	5.606.000,00	94,00%	13.015.000,00	96,00%	14.269.000,00	98,00%	14.269.000,00	98,00%	47.159.000,00	KEL JAGALAN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	32.780.000,00	90,00%	53.910.000,00	92,00%	54.300.000,00	93,00%	71.136.000,00	95,00%	71.136.000,00	95,00%	283.262.000,00	KEL JAGALAN
1	URUSAN WAJIB															KEL JAGALAN
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL JAGALAN
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	156.135.000,00	80,00%	213.056.000,00	85,00%	247.589.000,00	86,00%	270.037.000,00	88,00%	270.037.000,00	88,00%	1.156.854.000,00	KEL JAGALAN
1.13. 49	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagalan	%Nilai fasilitasi yang terealisasi	0,00%	80,00%	318.336.500,00	83,00%	349.762.550,00	85,00%	343.900.000,00	88,00%	343.900.000,00	90,00%	343.900.000,00	90,00%	1.699.799.050,00	KEL JAGALAN
	KELURAHAN PAKELAN				1.135.581.710,00		1.393.301.107,00		1.567.502.500,00		1.700.938.600,00		1.700.938.600,00		7.498.262.517,00	KEL PAKELAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL PAKELAN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	105.629.010,00	92,00%	146.788.407,00	94,00%	198.912.500,00	96,00%	230.952.500,00	98,00%	230.952.500,00	98,00%	913.234.917,00	KEL PAKELAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	102.845.000,00	92,00%	119.533.000,00	94,00%	185.600.000,00	96,00%	226.818.100,00	98,00%	226.818.100,00	98,00%	861.614.200,00	KEL PAKELAN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	2.662.000,00	92,00%	4.000.000,00	94,00%	11.000.000,00	96,00%	6.633.000,00	98,00%	6.633.000,00	98,00%	30.928.000,00	KEL PAKELAN
3.11. 38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	68.000.000,00	90,00%	204.150.000,00	92,00%	145.000.000,00	93,00%	199.275.000,00	94,00%	199.275.000,00	94,00%	815.700.000,00	KEL PAKELAN
1	URUSAN WAJIB															KEL PAKELAN
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL PAKELAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	134.190.000,00	80,00%	176.680.000,00	85,00%	203.840.000,00	86,00%	214.110.000,00	87,00%	214.110.000,00	87,00%	942.930.000,00	KEL. PAKELAN
1.13.50	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakelan	%Nilai fasilitas yang terealisasi	0,00%	80,00%	722.255.700,00	83,00%	742.149.700,00	85,00%	823.150.000,00	88,00%	823.150.000,00	90,00%	823.150.000,00	90,00%	3.933.855.400,00	KEL. PAKELAN
	KELURAHAN SETONO GEDONG				497.286.449,00		633.137.661,00		706.702.500,00		739.202.500,00		739.202.500,00		3.315.531.610,00	KEL. SETONO GEDONG
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. SETONO GEDONG
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	65.496.024,00	92,00%	87.414.022,00	94,00%	88.330.000,00	96,00%	88.330.000,00	98,00%	88.330.000,00	98,00%	417.900.046,00	KEL. SETONO GEDONG
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	72.078.300,00	92,00%	98.436.500,00	94,00%	63.470.000,00	96,00%	63.470.000,00	98,00%	63.470.000,00	98,00%	360.924.800,00	KEL. SETONO GEDONG
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%					94,00%	2.500.000,00	96,00%	2.500.000,00	98,00%	2.500.000,00	98,00%	7.500.000,00	KEL. SETONO GEDONG
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	4.000.000,00	90,00%	21.000.000,00	92,00%	39.592.500,00	93,00%	52.092.500,00	94,00%	52.092.500,00	94,00%	168.777.500,00	KEL. SETONO GEDONG
1	URUSAN WAJIB															KEL. SETONO GEDONG
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. SETONO GEDONG
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	0,00%	77,00%	111.735.000,00	80,00%	152.760.000,00	85,00%	221.360.000,00	86,00%	241.360.000,00	88,00%	241.360.000,00	88,00%	968.575.000,00	KEL. SETONO GEDONG
1.13.51	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setono Gedong	%Nilai fasilitas yang terealisasi	0,00%	80,00%	243.977.125,00	83,00%	273.527.139,00	85,00%	291.450.000,00	88,00%	291.450.000,00	90,00%	291.450.000,00	90,00%	1.391.854.264,00	KEL. SETONO GEDONG
	KECAMATAN MOJOROTO				1.497.913.399,00		2.152.750.697,00		2.418.500.000,00		2.104.425.000,00		2.104.425.000,00		10.278.014.096,00	KEC. MOJOROTO
3.11	PEMERINTAHAN UMUM												2.104.425.000,00		10.278.014.096,00	KEC. MOJOROTO
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	215.434.324,00	92,00%	294.266.740,00	94,00%	361.870.000,00	96,00%	383.315.000,00	98,00%	350.315.000,00	98,00%	1.605.201.064,00	KEC. MOJOROTO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	136.705.075,00	92,00%	186.894.957,00	94,00%	414.985.000,00	96,00%	52.350.000,00	98,00%	85.350.000,00	98,00%	876.285.032,00	KEC. MOJOROTO
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	20.855.000,00	92,00%	11.365.000,00	94,00%	13.432.500,00	96,00%	12.000.000,00	98,00%	12.000.000,00	98,00%	69.652.500,00	KEC. MOJOROTO
3.11.31	Program Peningkatan Pelayanan Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	70,00%	75,00%	85.000.000,00	80,00%	196.080.000,00	82,00%	68.425.000,00	85,00%	30.735.000,00	90,00%	30.735.000,00	90,00%	410.975.000,00	KEC. MOJOROTO
3.11.34	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% meningkatnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		90,00%	1.039.919.000,00	92,00%	1.464.144.000,00	94,00%	1.559.787.500,00	96,00%	1.626.025.000,00	98,00%	1.626.025.000,00	98,00%	7.315.900.500,00	KEC. MOJOROTO
	KELURAHAN BANDAR LOR				2.677.468.037,00		3.058.917.530,00		3.153.530.000,00		3.186.030.000,00		3.186.030.000,00		15.261.975.567,00	KEL. BANDAR LOR
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. BANDAR LOR
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	114.673.647,00	92,00%	125.843.480,00	94,00%	151.530.000,00	96,00%	169.100.000,00	98,00%	169.100.000,00	98,00%	730.247.127,00	KEL. BANDAR LOR
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	228.076.000,00	92,00%	350.124.900,00	94,00%	184.320.000,00	96,00%	169.570.000,00	98,00%	169.570.000,00	98,00%	1.101.660.900,00	KEL. BANDAR LOR
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%			92,00%	3.900.000,00	94,00%	5.400.000,00	96,00%	5.670.000,00	98,00%	5.670.000,00	98,00%	20.640.000,00	KEL. BANDAR LOR
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	4.000.000,00	90,00%	31.265.000,00	92,00%	23.630.000,00	93,00%	38.625.000,00	94,00%	38.625.000,00	95,00%	136.145.000,00	KEL. BANDAR LOR
1	URUSAN WAJIB															KEL. BANDAR LOR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. BANDAR LOR
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	355.282.500,00	80,00%	373.139.500,00	85,00%	492.300.000,00	86,00%	496.915.000,00	87,00%	496.915.000,00	88,00%	2.214.552.000,00	KEL. BANDAR LOR
1.13.52	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar Lor	%Nilai fasilitas yang terealisasi		80,00%	1.975.435.890,00	83,00%	2.174.644.650,00	85,00%	2.296.350.000,00	88,00%	2.306.150.000,00	90,00%	2.306.150.000,00	90,00%	11.058.730.540,00	KEL. BANDAR LOR
	KELURAHAN BANDAR KIDUL				1.880.108.578,00		2.209.762.952,00		2.238.194.000,00		2.344.094.000,00		2.344.094.000,00		11.016.253.530,00	KEL. BANDAR KIDUL
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. BANDAR KIDUL
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	106.391.578,00	92,00%	121.353.952,00	94,00%	149.964.000,00	96,00%	158.694.000,00	98,00%	158.694.000,00	98,00%	695.097.530,00	KEL. BANDAR KIDUL
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	136.658.500,00	92,00%	143.090.000,00	94,00%	106.600.000,00	96,00%	96.600.000,00	98,00%	96.600.000,00	98,00%	579.548.500,00	KEL. BANDAR KIDUL
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%					94,00%	6.341.000,00	96,00%	6.341.000,00	98,00%	6.341.000,00	98,00%	19.023.000,00	KEL. BANDAR KIDUL
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	5.500.000,00	90,00%	63.875.000,00	92,00%	64.159.000,00	93,00%	90.829.000,00	95,00%	90.829.000,00	95,00%	315.192.000,00	KEL. BANDAR KIDUL
1	URUSAN WAJIB															KEL. BANDAR KIDUL
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. BANDAR KIDUL
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	204.760.000,00	80,00%	243.890.000,00	85,00%	273.430.000,00	86,00%	353.930.000,00	87,00%	353.930.000,00	88,00%	1.429.940.000,00	KEL. BANDAR KIDUL
1.13.53	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar Kidul	%Nilai fasilitas yang terealisasi		80,00%	1.426.798.500,00	83,00%	1.637.554.000,00	85,00%	1.637.700.000,00	88,00%	1.637.700.000,00	90,00%	1.637.700.000,00	90,00%	7.977.452.500,00	KEL. BANDAR KIDUL
	KELURAHAN BANJARMLATI				2.100.345.356,00		2.300.579.651,00		2.573.053.000,00		2.604.975.000,00		2.604.975.000,00		12.183.928.007,00	KEL. BANJARMLATI
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. BANJARMLATI
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	102.607.072,00	92,00%	126.965.986,00	94,00%	182.953.053,00	96,00%	253.422.000,00	98,00%	253.422.000,00	98,00%	919.370.111,00	KEL. BANJARMLATI
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	134.952.750,00	92,00%	110.280.000,00	94,00%	293.500.000,00	96,00%	191.828.000,00	98,00%	191.828.000,00	98,00%	922.388.750,00	KEL. BANJARMLATI
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	5.268.750,00	92,00%	7.321.250,00	94,00%	7.550.000,00	96,00%	11.225.000,00	98,00%	11.225.000,00	98,00%	42.590.000,00	KEL. BANJARMLATI
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	80.927.500,00	90,00%	104.359.500,00	92,00%	65.250.000,00	93,00%	99.725.000,00	94,00%	99.725.000,00	94,00%	449.987.000,00	KEL. BANJARMLATI
1	URUSAN WAJIB															KEL. BANJARMLATI
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. BANJARMLATI
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	226.007.000,00	80,00%	289.009.495,00	85,00%	361.299.947,00	86,00%	373.275.000,00	87,00%	373.275.000,00	87,00%	1.622.866.442,00	KEL. BANJARMLATI
1.13.54	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarmlati	%Nilai fasilitas yang terealisasi		80,00%	1.550.582.284,00	83,00%	1.662.643.420,00	85,00%	1.662.500.000,00	88,00%	1.675.500.000,00	90,00%	1.675.500.000,00	90,00%	8.226.725.704,00	KEL. BANJARMLATI
	KELURAHAN POJOK				3.121.504.608,00		3.640.470.609,00		3.478.407.500,00		3.565.707.500,00		3.565.707.500,00		17.371.797.717,00	KEL. POJOK
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. POJOK
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	96.288.760,00	92,00%	144.242.209,00	94,00%	159.000.000,00	96,00%	200.885.000,00	98,00%	200.885.000,00	98,00%	801.300.969,00	KEL. POJOK
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	272.653.890,00	92,00%	337.034.000,00	94,00%	127.500.000,00	96,00%	12.500.000,00	98,00%	12.500.000,00	98,00%	762.187.890,00	KEL. POJOK
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	6.109.000,00	92,00%	6.500.000,00	94,00%	8.000.000,00	96,00%	6.930.000,00	98,00%	6.930.000,00	98,00%	34.469.000,00	KEL. POJOK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	70.666.000,00	90,00%	292.709.100,00	92,00%	246.907.500,00	93,00%	291.802.500,00	94,00%	291.802.500,00	94,00%	1.193.887.600,00	KEL POJOK
1	URUSAN WAJIB															KEL POJOK
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL POJOK
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	290.050.700,00	80,00%	304.975.000,00	85,00%	317.000.000,00	86,00%	381.530.000,00	87,00%	381.530.000,00	87,00%	1.675.085.700,00	KEL POJOK
1.13.55	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pojok	%Nilai fasilitas yang terealisasi		80,00%	2.385.736.258,00	83,00%	2.555.010.300,00	85,00%	2.620.000.000,00	88,00%	2.672.060.000,00	90,00%	2.672.060.000,00	90,00%	12.904.866.558,00	KEL POJOK
	KELURAHAN SUKORAME				2.337.363.171,00		2.565.194.592,00		2.721.522.500,00		2.930.694.000,00		2.930.694.000,00		13.485.468.263,00	KEL SUKORAME
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL SUKORAME
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	87.216.169,00	92,00%	87.973.123,00	94,00%	107.822.500,00	96,00%	121.830.000,00	98,00%	201.830.000,00	98,00%	606.671.792,00	KEL SUKORAME
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	89.000.000,00	92,00%	108.000.000,00	94,00%	160.000.000,00	96,00%	306.500.000,00	98,00%	226.500.000,00	98,00%	890.000.000,00	KEL SUKORAME
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan laporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	1.815.000,00	92,00%	2.000.000,00	94,00%	6.000.000,00	96,00%	13.200.000,00	98,00%	13.200.000,00	98,00%	36.215.000,00	KEL SUKORAME
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	82.060.500,00	90,00%	136.580.000,00	92,00%	156.750.000,00	93,00%	182.550.000,00	94,00%	182.550.000,00	94,00%	740.490.500,00	KEL SUKORAME
1	URUSAN WAJIB															KEL SUKORAME
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL SUKORAME
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	217.462.000,00	80,00%	233.325.500,00	85,00%	262.400.000,00	86,00%	272.000.000,00	87,00%	272.000.000,00	87,00%	1.257.187.500,00	KEL SUKORAME
1.13.56	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukorame	%Nilai fasilitas yang terealisasi		80,00%	1.859.809.502,00	83,00%	1.997.315.969,00	85,00%	2.028.550.000,00	88,00%	2.034.614.000,00	90,00%	2.034.614.000,00	90,00%	9.954.903.471,00	KEL SUKORAME
	KELURAHAN BUJEL				2.221.812.827,00		2.523.249.165,00		2.617.244.500,00		2.873.495.200,00		2.873.495.200,00		13.109.296.892,00	KEL BUJEL
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL BUJEL
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	99.596.580,00	92,00%	110.889.265,00	94,00%	126.471.600,00	96,00%	153.175.000,00	98,00%	156.175.000,00	98,00%	646.307.445,00	KEL BUJEL
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	92.960.000,00	92,00%	134.869.000,00	94,00%	119.076.900,00	96,00%	176.170.000,00	98,00%	171.670.000,00	98,00%	694.745.900,00	KEL BUJEL
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan laporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	4.536.000,00	92,00%	4.416.000,00	94,00%	9.072.000,00	96,00%	9.572.000,00	98,00%	9.572.000,00	98,00%	37.168.000,00	KEL BUJEL
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	92.785.000,00	90,00%	124.399.000,00	92,00%	225.293.200,00	93,00%	311.008.200,00	94,00%	312.508.200,00	94,00%	1.065.993.600,00	KEL BUJEL
1	URUSAN WAJIB															KEL BUJEL
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL BUJEL
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	196.014.700,00	80,00%	222.907.600,00	85,00%	223.260.800,00	86,00%	291.500.000,00	87,00%	291.500.000,00	87,00%	1.225.183.100,00	KEL BUJEL
1.13.57	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bujel	%Nilai fasilitas yang terealisasi		80,00%	1.735.920.547,00	83,00%	1.925.768.300,00	85,00%	1.914.070.000,00	88,00%	1.932.070.000,00	90,00%	1.932.070.000,00	90,00%	9.439.898.847,00	KEL BUJEL
	KELURAHAN GAYAM				1.929.965.819,00		2.222.376.328,00		2.347.698.500,00		2.380.198.500,00		2.380.198.500,00		11.260.437.647,00	KEL GAYAM
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL GAYAM
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	77.511.106,00	92,00%	115.206.223,00	94,00%	127.284.000,00	96,00%	145.184.000,00	98,00%	145.184.000,00	98,00%	610.369.329,00	KEL GAYAM

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	74.128.750,00	92,00%	95.336.250,00	94,00%	150.601.000,00	96,00%	150.601.000,00	98,00%	150.601.000,00	98,00%	621.268.000,00	KEL. GAYAM
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	772.500,00	92,00%	832.500,00	94,00%	7.000.000,00	96,00%	7.000.000,00	98,00%	7.000.000,00	98,00%	22.605.000,00	KEL. GAYAM
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	51.482.000,00	90,00%	103.078.500,00	92,00%	105.262.500,00	93,00%	105.262.500,00	94,00%	105.262.500,00	94,00%	470.348.000,00	KEL. GAYAM
1	URUSAN WAJIB															KEL. GAYAM
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. GAYAM
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	176.813.700,00	80,00%	205.080.750,00	85,00%	259.201.000,00	86,00%	259.201.000,00	87,00%	259.201.000,00	87,00%	1.159.497.450,00	KEL. GAYAM
1.13.58	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		80,00%	1.549.257.763,00	83,00%	1.702.842.105,00	85,00%	1.698.350.000,00	88,00%	1.712.950.000,00	90,00%	1.712.950.000,00	90,00%	8.376.349.868,00	KEL. GAYAM
	KELURAHAN MRICAN				2.522.121.923,00		2.698.117.156,00		2.820.977.500,00		2.870.977.500,00		2.870.977.500,00		13.783.171.579,00	KEL. MRICAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. MRICAN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	94.295.373,00	92,00%	103.674.830,00	94,00%	154.785.000,00	96,00%	168.607.500,00	98,00%	168.607.500,00	98,00%	689.970.203,00	KEL. MRICAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	247.785.025,00	92,00%	104.078.700,00	94,00%	93.500.000,00	96,00%	75.000.000,00	98,00%	75.000.000,00	98,00%	595.363.725,00	KEL. MRICAN
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	4.490.000,00	92,00%	1.446.000,00	94,00%	11.000.000,00	96,00%	6.145.000,00	98,00%	6.145.000,00	98,00%	29.226.000,00	KEL. MRICAN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	112.353.000,00	90,00%	279.324.950,00	92,00%	312.492.500,00	93,00%	356.868.000,00	94,00%	356.868.000,00	94,00%	1.417.906.450,00	KEL. MRICAN
1	URUSAN WAJIB															KEL. MRICAN
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. MRICAN
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	245.730.000,00	80,00%	228.685.000,00	85,00%	285.600.000,00	86,00%	294.200.000,00	87,00%	294.200.000,00	87,00%	1.348.415.000,00	KEL. MRICAN
1.13.59	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mrican	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		80,00%	1.817.468.525,00	83,00%	1.980.907.676,00	85,00%	1.963.600.000,00	88,00%	1.970.157.000,00	90,00%	1.970.157.000,00	90,00%	9.702.290.201,00	KEL. MRICAN
	KELURAHAN DERMO				1.578.099.063,00		1.905.549.921,00		1.981.850.000,00		2.093.750.000,00		2.093.750.000,00		9.652.998.984,00	KEL. DERMO
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. DERMO
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	77.378.643,00	92,00%	93.913.221,00	94,00%	110.100.000,00	96,00%	145.325.000,00	98,00%	150.225.000,00	98,00%	576.941.864,00	KEL. DERMO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	50.550.000,00	92,00%	194.757.000,00	94,00%	109.150.000,00	96,00%	74.400.000,00	98,00%	73.500.000,00	98,00%	502.357.000,00	KEL. DERMO
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	2.500.000,00	92,00%	3.949.000,00	94,00%	7.000.000,00	96,00%	7.000.000,00	98,00%	7.000.000,00	98,00%	27.449.000,00	KEL. DERMO
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	67.125.000,00	90,00%	98.475.000,00	92,00%	181.750.000,00	93,00%	254.775.000,00	94,00%	254.775.000,00	94,00%	856.900.000,00	KEL. DERMO
1	URUSAN WAJIB															KEL. DERMO
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. DERMO
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	163.584.500,00	80,00%	189.030.000,00	85,00%	194.600.000,00	86,00%	231.500.000,00	87,00%	227.500.000,00	87,00%	1.006.214.500,00	KEL. DERMO
1.13.60	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		80,00%	1.216.960.920,00	83,00%	1.325.425.700,00	85,00%	1.379.250.000,00	88,00%	1.380.750.000,00	90,00%	1.380.750.000,00	90,00%	6.683.136.620,00	KEL. DERMO

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KELURAHAN NGAMPEL				1.914.620.400,00		1.965.940.899,00		2.245.286.500,00		2.416.586.500,00		2.416.586.500,00		10.959.020.799,00	KEL NGAMPEL
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL NGAMPEL
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	92.079.622,00	92,00%	110.905.702,00	94,00%	120.541.500,00	96,00%	128.941.500,00	98,00%	128.941.500,00	98,00%	581.409.824,00	KEL NGAMPEL
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	205.880.500,00	92,00%	76.980.000,00	94,00%	148.611.000,00	96,00%	210.111.000,00	98,00%	210.111.000,00	98,00%	851.693.500,00	KEL NGAMPEL
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	5.000.000,00	92,00%	5.000.000,00	94,00%	10.000.000,00	96,00%	10.000.000,00	98,00%	10.000.000,00	98,00%	40.000.000,00	KEL NGAMPEL
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	78.777.500,00	90,00%	91.835.000,00	92,00%	105.967.000,00	93,00%	165.967.000,00	94,00%	165.967.000,00	94,00%	608.513.500,00	KEL NGAMPEL
1	URUSAN WAJIB															KEL NGAMPEL
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL NGAMPEL
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	213.477.200,00	80,00%	254.761.060,00	85,00%	268.981.000,00	86,00%	306.981.000,00	87,00%	306.981.000,00	87,00%	1.351.181.260,00	KEL NGAMPEL
1.13.61	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampel	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		80,00%	1.319.405.578,00	83,00%	1.426.459.137,00	85,00%	1.591.186.000,00	88,00%	1.594.586.000,00	90,00%	1.594.586.000,00	90,00%	7.526.222.715,00	KEL NGAMPEL
	KELURAHAN MOJOROTO				2.943.475.734,00		3.366.546.948,00		3.459.085.000,00		3.527.850.000,00		3.527.850.000,00		16.824.807.682,00	KEL MOJOROTO
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL MOJOROTO
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	112.887.324,00	92,00%	118.164.608,00	94,00%	123.390.000,00	96,00%	149.850.000,00	98,00%	149.850.000,00	98,00%	654.141.932,00	KEL MOJOROTO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	40.314.700,00	92,00%	80.610.000,00	94,00%	37.900.000,00	96,00%	44.900.000,00	98,00%	44.900.000,00	98,00%	248.624.700,00	KEL MOJOROTO
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	3.056.000,00	92,00%	9.900.000,00	94,00%	9.900.000,00	96,00%	10.000.000,00	98,00%	10.000.000,00	98,00%	42.856.000,00	KEL MOJOROTO
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	97.420.000,00	90,00%	137.570.000,00	92,00%	137.005.000,00	93,00%	128.550.000,00	94,00%	128.550.000,00	94,00%	629.095.000,00	KEL MOJOROTO
1	URUSAN WAJIB															KEL MOJOROTO
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL MOJOROTO
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	319.940.000,00	80,00%	368.890.000,00	85,00%	367.540.000,00	86,00%	406.140.000,00	87,00%	406.140.000,00	87,00%	1.868.650.000,00	KEL MOJOROTO
1.13.62	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojoroto	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		80,00%	2.369.857.710,00	83,00%	2.651.412.340,00	85,00%	2.783.350.000,00	88,00%	2.788.410.000,00	90,00%	2.788.410.000,00	90,00%	13.381.440.050,00	KEL MOJOROTO
	KELURAHAN CAMPUREJO				1.898.929.060,00		2.334.786.233,00		2.494.645.500,00		2.627.145.500,00		2.627.145.500,00		11.982.651.793,00	KEL CAMPUREJO
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL CAMPUREJO
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	112.567.100,00	92,00%	159.208.763,00	94,00%	184.854.500,00	96,00%	239.554.500,00	98,00%	239.554.500,00	98,00%	935.739.363,00	KEL CAMPUREJO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	99.690.000,00	92,00%	189.273.000,00	94,00%	157.227.000,00	96,00%	215.117.000,00	98,00%	215.117.000,00	98,00%	876.424.000,00	KEL CAMPUREJO
3.11. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	3.500.000,00	92,00%	5.330.000,00	94,00%	12.800.500,00	96,00%	9.800.500,00	98,00%	9.800.500,00	98,00%	41.231.500,00	KEL CAMPUREJO
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			90,00%	15.237.500,00									90,00%	15.237.500,00	KEL CAMPUREJO

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Base Line/2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	8.660.000,00	90,00%	106.248.000,00	92,00%	159.780.000,00	93,00%	200.322.500,00	94,00%	200.322.500,00	94,00%	675.333.000,00	KEL. CAMPUREJO
1	URUSAN WAJIB															KEL. CAMPUREJO
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. CAMPUREJO
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	240.499.600,00	80,00%	290.846.040,00	85,00%	385.381.500,00	86,00%	361.951.000,00	87,00%	361.951.000,00	87,00%	1.640.629.140,00	KEL. CAMPUREJO
1.13.63	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campurejo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		80,00%	1.418.774.860,00	83,00%	1.583.880.430,00	85,00%	1.594.602.000,00	88,00%	1.600.400.000,00	90,00%	1.600.400.000,00	90,00%	7.798.057.290,00	KEL. CAMPUREJO
	KELURAHAN LIRBOYO				1.778.457.241,00		1.961.613.158,00		2.391.828.750,00		2.424.328.750,00		2.424.328.750,00		10.980.556.649,00	KEL. LIRBOYO
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. LIRBOYO
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	88.078.566,00	92,00%	106.098.683,00	94,00%	159.067.750,00	96,00%	169.148.800,00	98,00%	169.148.800,00	98,00%	691.542.599,00	KEL. LIRBOYO
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	99.180.000,00	92,00%	50.745.000,00	94,00%	86.356.000,00	96,00%	142.100.000,00	98,00%	142.100.000,00	98,00%	520.481.000,00	KEL. LIRBOYO
3.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	2.035.500,00	92,00%	3.172.100,00	94,00%	10.000.000,00	96,00%	10.000.000,00	98,00%	10.000.000,00	98,00%	35.207.600,00	KEL. LIRBOYO
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	75.413.000,00	90,00%	101.613.200,00	92,00%	227.935.000,00	93,00%	233.379.200,00	94,00%	233.379.200,00	94,00%	871.719.600,00	KEL. LIRBOYO
1	URUSAN WAJIB															KEL. LIRBOYO
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. LIRBOYO
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	196.834.900,00	80,00%	249.834.000,00	85,00%	342.520.000,00	86,00%	306.750.000,00	87,00%	306.750.000,00	87,00%	1.402.688.900,00	KEL. LIRBOYO
1.13.64	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lirboyo	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		80,00%	1.316.915.275,00	83,00%	1.450.150.175,00	85,00%	1.565.950.000,00	88,00%	1.562.950.750,00	90,00%	1.562.950.750,00	90,00%	7.458.916.950,00	KEL. LIRBOYO
	KELURAHAN TAMANAN				1.382.880.018,00		1.755.967.016,00		1.946.265.600,00		1.978.765.600,00		1.978.765.600,00		9.042.643.834,00	KEL. TAMANAN
3.11	PEMERINTAHAN UMUM															KEL. TAMANAN
3.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85,00%	90,00%	79.886.644,00	92,00%	128.888.141,00	94,00%	137.857.900,00	96,00%	185.469.500,00	98,00%	185.469.500,00	98,00%	717.571.685,00	KEL. TAMANAN
3.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85,00%	90,00%	96.310.000,00	92,00%	213.425.000,00	94,00%	399.658.800,00	96,00%	199.997.800,00	98,00%	154.997.800,00	98,00%	1.064.389.400,00	KEL. TAMANAN
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, dan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (%)	85,00%	90,00%	3.500.000,00	92,00%	1.606.000,00	94,00%	5.130.100,00						10.236.100,00	KEL. TAMANAN
3.11.38	Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	% terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan	0,00%	88,00%	62.535.000,00	90,00%	148.625.500,00	92,00%	133.274.000,00	93,00%	274.941.500,00	94,00%	304.941.500,00	94,00%	924.317.500,00	KEL. TAMANAN
1	URUSAN WAJIB															KEL. TAMANAN
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															KEL. TAMANAN
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat		77,00%	138.030.000,00	80,00%	159.256.400,00	85,00%	177.944.800,00	86,00%	223.956.800,00	87,00%	238.956.800,00	87,00%	938.144.800,00	KEL. TAMANAN
1.13.65	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanan	%Nilai fasilitasi yang terealisasi		80,00%	1.002.618.374,00	83,00%	1.104.165.975,00	85,00%	1.092.400.000,00	88,00%	1.094.400.000,00	90,00%	1.094.400.000,00	90,00%	5.387.984.349,00	KEL. TAMANAN
Total Belanja					592.441.635.692,76		922.971.501.347,26		824.110.999.443,00		685.227.817.036,00		738.022.399.081,42	-	3.450.569.266.531,95	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diukur menggunakan pencapaian target masing-masing indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.. Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD, adapun Indikator Kinerja Utama Kota Kediri yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 9.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kota Kediri

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Capaian Setiap Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	63	65	65-67	67-69	69-71
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (2,53)	B (2,76)	B (2,93)	B (3,11)	A (3,30)
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,87	55,46	55,6	55,7	55,8
4	Indeks Kota Layak Huni	-	-	63,62	63,94	64,75
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,67	76,33	77,01	77,50	77,75
6	Tingkat Kemiskinan	8,51%	8,40%	8,49%	8,25%	8,10%
7	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	-	-	2,75	2,85	2,95
8	Pertumbuhan Ekonomi	5,36	5,50	6,00	5,90	5,80-6,10

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kota Kediri secara rinci disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9.2.
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Kediri**

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
			2018	2019		
(1)	(2)	(3)	2015	2016	2017	(13)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	Pertumbuhan PDRB	6,01	4,38 - 9,27	4,11 - 9,81	4,11 - 9,81	BPS
		4,10	3,15 - 7,94	2,96 - 8,71	2,96 - 8,71	BPS
	Laju Inflasi IHK Kota Kediri	8,05	3	3-5	3-5	BPS
	PDRB per kapita ADHK (Juta Rupiah)	57,92	77,96	78,98	78,98	BPS
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,51	5,90	5,80-6,10	5,80-6,10	BPS
	Penduduk Miskin (%)	8,20%	8,25%	8,10%	8,10%	BPS
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,18	77,50	77,75	77,75	BPS
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,05	95,85	95,94	95,94	BPS
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,92	82,43	82,74	82,74	BPS
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	1.	Fokus Layanan Urusan Wajib				
	1.1	URUSAN PENDIDIKAN				
		Indeks Pendidikan	0,69	0,76	0,77	DINDIK
		Angka melek huruf	99,54	100,00	100,00	DINDIK
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :				
		a. APK PAUD (%)	91,15	99,99	100,00	DINDIK
		b. APK TK (%)	105,44	105,44	105,44	DINDIK
		Pendidikan Dasar				
		APK SD/MI/Paket A	112,45	115.25	116.98	DINDIK
		APK SMP/MTs/Paket B	131,61	135.31	137.34	DINDIK
		APM SD/MI/Paket A	102,95	107.69	109.30	DINDIK
		APM SMP/MTs/Paket B	103,33	105.56	107.14	DINDIK
		Pendidikan Menengah				
		APK SMA/SMK/MA/Paket C	260,55	-	-	DINDIK
		APM SMA/SMK/MA/Paket C	191,93	-	-	DINDIK
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	98,21	-	-	DINDIK
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/SMK /MA (%)	193,03	-	-	DINDIK

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2018	2019		
(1)	(2)		(3)	2015	2016	2017	(13)
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,56	-	-	-	DINDIK
		Rasio guru/murid pendidikan menengah	1:14	-	-	-	DINDIK
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	96,57	99,39	100,00	100	DINDIK
	1.2	URUSAN KESEHATAN					
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran	5,05 permil	8 permil	8 permil	8 permil	DINKES
		Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	74,9	98	98	98	DINKES
		Persentase balita gizi buruk	3,30%	< 15%	< 15%	< 15%	DINKES
		Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	100%	100%	100%	100%	DINKES
		Meningkatnya cakupan rumah sehat (%)	71,28%	86%	86%	86%	DINKES
		Rasio dokter per satuan penduduk	58,28%	1:2500	1:2500	1:2500	DINKES
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	DINKES
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94%	95%	95%	95%	DINKES
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	86,4%	70%	70%	70%	DINKES
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100%	100%	100%	100%	DINKES
		Cakupan penemuan dan penanganan HIV dan AIDS	100%	100%	100%	100%	DINKES
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	7%	15%	15%	15%	DINKES
		Rasio Jumlah Posyandu Terhadap Jumlah Balita	1:70	1:63	1:63	1:63	DINKES
		Jumlah puskesmas yang terakreditasi	11,11%	100%	100%	100%	DINKES
		Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes	81,9%	100%	100%	100%	DINKES
		Angka kunjungan pasien ke RSUD :					
		- BOR rawat Inap	76,67%	75%	75%	75%	RSUD
		- Rawat Jalan (orang)	143,204	174,065	182,769	182.769	RSUD
		- Rawat Darurat (orang)	21,143	25,699	26,984	26.984	RSUD
		Angka kematian di RSUD :					
		- NDR (%)	38,09%	≤ 25	≤ 25	≤ 25	RSUD
		- GDR (%)	76,85%	≤ 49	≤ 49	≤ 49	RSUD
		Jenis dan Standarisasi pelayanan RSUD					
		- Akreditasi	Perencanaan	Survey Verifikasi	Survey Penilaian	Lulus Paripurna	RSUD
	1.3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
		Panjang jalan dalam kondisi baik/mantap (Km)	236.919	271.919	278.919	278.919	DPUPR
		Jembatan yang berfungsi dengan baik (unit)	41	51	53	53	DPUPR
		Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar (%)	13,83%	14,59%	14,74%	14,74%	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2018	2019		
(1)	(2)		(3)	2015	2016	2017	(13)
		Persentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (%)	51%	55,65%	56,25%	56,25%	DPUPR
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	99,43%	99,86%	100%	100%	DPUPR
		Persentase peningkatan jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik	28,19%	65%	70%	70%	DPUPR
		Prosentase luas lahan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	45%	70%	75%	75%	DPUPR
		Persentase luasan RTH dari luas kota (Rasio RTH dibanding (luas wilayah kota – luas kawasan lindung) RTH Publik	7,20%	7,50%	8%	8%	DLHKP
		Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	38,84	41,40	42,00	42,00	DPUPR
		Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	95,31%	98%	100%	100%	DPUPR
		Rumah tangga bersanitasi (%)	93%	98%	100%	100%	DPUPR
	1.4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
		Persentase rusun terbangun (%)	55%	100%	100%	100%	DPKP
		Rumah Layak Huni (%)	95,3%	98%	99%	99%	DPKP
		Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang (titik)	4.640	12.590	13.240	13.240	DPKP
	1.5	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
		Prosentase penanganan potensi kasus SARA	100%	100%	100%	100%	Satpol PP; Kesbangpol; Bag. Kesra
		Persentase Ormas dan LSM yang terbina	31,25%	39,88%	41,88%	43,97%	Kesbangpol
		Menurunnya tingkat pelanggaran Perda	55,31%	46%	45%	45%	Satpol PP
		Rasio Jumlah personil Pol PP per 10.000 penduduk	2,8	5,75	6	6	Satpol PP
		Rasio Jumlah linmas per 1.000 penduduk	56,5%	4,75	5	5	Satpol PP
		Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keamanan)	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) bencana kebakaran	25 menit	20 menit	20 menit	20 menit	Satpol PP
		Prosentase responsifitas penanganan bencana	0%	90%	92%	92%	BPBD
		Prosentase pendampingan pasca bencana yang direalisasikan	0%	90%	92%	92%	BPBD
	1.6	URUSAN SOSIAL					
		% Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2,17%	2,00%	2,00%	2,00%	DINSOS
		% Penurunan jumlah penduduk miskin	- %	2,8%	1,8%	1,8%	DINSOS
		PMKS yang memperoleh Bantuan (%)	54,40	85%	88 %	90 %	DINSOS
	1.7	URUSAN TENAGA KERJA					
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	8.00%	4,64%	4,60%	4,60%	BPS
		Persentase penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun (%)	33%	100%	100%	100%	Dinkop UMTK
		% partisipasi angkatan kerja	-	68%	68%	68%	Dinkop UMTK

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2018	2019		
(1)	(2)		(3)	2015	2016	2017	(13)
	1.8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
		Prosentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	DP3AP2KB
		Prosentase Capaian Indikator Kota Layak Anak	0%	60%	70%	70%	DP3AP2KB
	1.9	URUSAN PANGAN					
		Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)	80	92	92,50	92,50	DKPP
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	88	92	92,50	92,50	DKPP
		Stabilitas Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	88	92	92,5	92,5	DKPP
		Skor PPH (%)	88	92	93	93	DKPP
	1.10	URUSAN PERTANAHAN					
	1.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
		Persentase capaian layanan persampahan perkotaan (cakupan penanganan sampah)					
		- Luas area yang dilayani dibagi luas wilayah Kota Kediri	70%	78%	80%	80%	DLHKP
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	55,7	55,8	55,8	DLHKP
	1.12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
		Rasio penduduk ber KTP-EL per satuan penduduk	85%	98%	98,5%	98,5%	Disdukcapil
		Rasio bayi berakte kelahiran	99,00%	98.50%	99%	99%	Disdukcapil
		Persentase Kepemilikan KK	83,26%	93%	95%	95%	Disdukcapil
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	99,25%	99,30%	99,35%	99,35%	Disdukcapil
		Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	98.50%	99%	99%	Disdukcapil
	1.13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
		Persentase fasilitasi program pemberdayaan masyarakat	90%	90%	90%	90%	Bag. Pemerintahan
	1.14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
		Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,96	0,92	0,91	0,91	DP3AP2KB
		Cakupan peserta KB aktif(%)	73,02	73,25	73,30	73,30	DP3AP2KB
		Persentase jumlah wanita kawin usia dibawah 20 tahun (%)	0,63	0,48	0,45	0,45	DP3AP2KB
	1.15	URUSAN PERHUBUNGAN					
		Rasio ijin trayek	48,54	58,54	58,54	58,54	DISHUB
		Jumlah uji kir angkutan umum	144	135	135	135	DISHUB
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	DISHUB
		Jumlah Rambu-rambu (buah)	1,322	1,485	1,525	1,525	DISHUB
	1.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI					
		Prosentase Jumlah OPD yang terkoneksi melalui <i>web site</i> pemkot	70,11%	85%	90%	90%	Diskominfo
		Prosentase penerapan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK	-	31%	45%	45%	Diskominfo

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2018	2019		
(1)	(2)		(3)	2015	2016	2017	(13)
		secara terpadu					
1.17	URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO						
		Jumlah UKM berkualitas	0	-	-	-	Dinkop UMTK
		Persentase koperasi berkualitas	35,60%	-	-	-	Dinkop UMTK
		Jumlah KUKM yang mengakses penguatan permodalan (%)	62,50%	-	-	-	Dinkop UMTK
		Jumlah pertumbuhan Usaha Mikro	-	6%	8%	8%	Dinkop UMTK
		% Usaha Mikro yang naik kelas	-	5%	6%	6%	Dinkop UMTK
		% koperasi sehat	-	69,15%	79,76%	79,76%	Dinkop UMTK
1.18	URUSAN PENANAMAN MODAL						
		Nilai investasi	488.773.732.468	4.197.568.819.695	4.417.568.819.695	4.417.568.819.695	DPMPTSP
		Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	76,00	86,25	86,50	86,50	DPMPTSP
1.19	URUSAN KEPEMUDA DAN OLAHRAGA						
		% Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	85%	99%	100%	100%	Dibudparpora
		Meningkatnya prestasi olahraga	90%	98%	100%	100%	Dibudparpora
1.20	URUSAN STATISTIK						
1.21	URUSAN PERSANDIAN						
1.22	URUSAN KEBUDAYAAN						
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali kegiatan)	51	71	72	72	Dibudparpora
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	10	292	292	292	Dibudparpora
1.23	URUSAN PERPUSTAKAAN						
		Indeks Minat Baca	-	42	44	44	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.24	URUSAN KEARSIPAN						
		Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan	65%	100%	100%	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
2.1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
		Produksi perikanan (kw)	1.390,60	1.579,69	1.605,29	1.605,29	DKPP
2.2	URUSAN PARIWISATA						
		Kunjungan wisata	1,500,000	1,800,000	1,850,000	1,850,000	Disbudparpora
		Meningkatnya potensi obyek wisata (%)	85%	98%	100%	100%	Disbudparpora
2.3	URUSAN PERTANIAN						

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2018	2019		
(1)	(2)		(3)	2015	2016	2017	(13)
		Produksi tanaman pangan padi (ton)	13.483	13.205	13.213	13.213	DKPP
		Produksi tanaman pangan jagung (ton)	6.408	4.673	4.678	5.073	DKPP
		Produksi tanaman perkebunan tebu (kw)	1.420.701	1.413.000	1.415.000	1.400.000	DKPP
		Jumlah produksi peternakan (kg)	2.713.924	2.973.934	3.042.895	3.042.895	DKPP
		Persentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	2.2	5.43	5.87	5.87	DKPP
	2.4	URUSAN KEHUTANAN					
	2.5	URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL					
	2.6	URUSAN PERDAGANGAN					
		Persentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	6,56	7,00	7,50	7,50	Disperdagin
	2.7	URUSAN PERINDUSTRIAN					
		Pertumbuhan Industri (%)	1,52	2,73	3,24	3,24	Disperdagin
		Persentase pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	2,57	6,00	6,50	6,50	Disperdagin
	2.8	URUSAN TRANSMIGRASI					
	3.	Fokus Layanan Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang					
	3.1	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH					
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	B (3,11)	A (3,30)	A (3,30)	Bag. Organisasi
		Nilai SAKIP	D	B	B	B	Bag. Organisasi
		Persentase penetapan produk hukum daerah	44	95	97	97	Bag. Hukum
		Peringkat LPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Bag. Pemerintahan
		BUMD yang menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik	-	2 BUMD	3 BUMD	3 BUMD	Bag. Perekonomian
		Peningkatan jumlah laba BUMD	-	12,5%	15%	15%	Bag. Perekonomian
	3.2	URUSAN SEKRETARIAT DEWAN					
		Persentase Penyelesaian Peraturan Daerah	70%	90%	90%	90%	Sekr. DPRD
	3.3	URUSAN PENGAWASAN					
		Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	-	Lv. 3	Lv. 3	Lv. 3	Inspektorat
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	70%	100%	100%	100%	Inspektorat
	3.4	URUSAN PERENCANAAN					
		Prosentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan	-	91,23%	91,81%	91,81%	Barenlitbang
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk perencanaan	-	75%	80%	80%	Barenlitbang
	3.5	URUSAN KEUANGAN					

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	OPD/Sumber
				2018	2019		
(1)	(2)		(3)	2015	2016	2017	(13)
		Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	171,55%	175,01%	175,01%	BPPKAD
		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	15%	20%	21%	21%	BPPKAD
	3.6	URUSAN KEPEGAWAIAN					
		Indeks Profesionalits ASN	-	61	62	62	BKPPD
	3.7	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
		Meningkatnya kompetensi ASN	-	76%	80%	80%	BKPPD
	3.8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan kecamatan dan kelurahan	73%	89%	89,5%	89,5%	Kec./Kel
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
		Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	45,38	44,2	44	44	BPS
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0782	0,0942	0,0970	0,0970	DPUPR dan Dishub
		Luas wilayah produktif (Ha)	57,30	56,77	56,70	56,70	DPUPR
		Luas wilayah industri	2,80	3,05	3,10	3,10	DPUPR
		Luas wilayah banjir (m2)	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	DPUPR
		jumlah restoran	97	131	132	132	Disperdagin
		jumlah penginapan/ hotel	30	34	35	35	Disbuparpora
	Fokus Iklim Berinvestasi						
		Angka kriminalitas per 100 penduduk	0,17	0,15	0,15	0,15	Kesbangpol
		Lama proses perijinan	3 - 15 hari	3 - 15 hari	3 - 15 hari	3 - 15 hari	DPMPTSP
	Fokus Sumber Daya Manusia						
		Rasio lulusan S1/S2/S3	8,00	8,50	8,60	8,60	Dispendukcapil
		Rasio ketergantungan	42,60	43,40	43,60	43,60	Dispendukcapil

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Walikota Kediri serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kota Kediri Tahun 2009 –2014. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Kediri periode 2014-2019. Substansi yang terkandung di dalamnya berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Kediri serta memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional,

10.1. Pedoman Transisi

- a. Dokumen RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang secara operasional dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri mulai tahun 2015 hingga tahun 2019;
- b. Pada masa transisi, sebelum dokumen Perubahan RPJMD Kota Kediri tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu pada indikasi program dan indikasi rencana pendanaan pada Rancangan Awal RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019.
- c. Setelah berakhirnya RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019, perlu disusun RPJMD Kota Kediri Tahun 2019-2024 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2020. Sementara RPJMD belum ditetapkan, perencanaan pembangunan tahun 2020 didasarkan pada RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Kediri serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Kediri berkewajiban mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 kepada masyarakat;
- b. RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 menjadi pedoman Penyusunan RKPD Kota Kediri Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Kediri, dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kota Kediri tahun 2014-2019;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Kediri, dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya;

- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Kediri agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri 2014-2019 pasca ditetapkannya RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 ini dengan Peraturan Daerah;
- f. RPJMD Kota Kediri tahun 2014-2019 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam menyusun dokumen Renstra PD. Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra PD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri tahun 2014-2019. Renstra PD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD). Oleh karena itu Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJM Daerah dengan dokumen Renstra SKPD.
- g. Barenlitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019, yang dimulai pelaksanaannya pada Tahun 2015-2019;
- h. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan untuk penilaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ditetapkan sebagaimana tertuang didalam lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 sebagaimana tertuang di dalam tabel 5.3 pada halaman Bab V-8.

Disamping itu, perlu adanya perhatian yang sungguh – sungguh dari semua pemangku amanah serta adanya komitmen untuk bersama – sama mewujudkan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai sehingga cita-cita dan harapan untuk **“Menata Kota Kediri yang Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”** dapat segera terwujud.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003